BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH



LAPORAN KINERJA 2024

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

LAPORAN KINERJA 2024

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran program beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Badan Bahasa tahun 2024. Badan Bahasa pada tahun 2024 menetapkan lima sasaran program (SP) dan enam indikator kinerja program (IKP). Secara umum, Badan Bahasa telah berhasil merealisasikan kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari transformasi yang terus dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Bahasa serta penajaman program prioritas yang berfokus pada penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan, pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia.

Pada akhir masa Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020—2024 Badan Bahasa telah melaksanakan seluruh target yang telah ditetapkan dalam renstra. Keberhasilan tiga program prioritas selama tahun 2020—2024 ditandai dengan beberapa capaian, yakni pada tahun 2020, Badan Bahasa melakukan tranformasi pada masa pandemi Covid-19 dengan mengubah pola kegiatan yang sedianya luring menjadi daring; pada tahun 2021, Badan Bahasa mengakomodasi pencetakan dan pengiriman buku literasi ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); tahun 2022, Badan Bahasa terpilih sebagai *co-organiser* Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional di Prancis (Paris) secara tatap muka (luring) dan daring serta melaksanakan program Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah; pada tahun 2023, Badan Bahasa secara konsisten dan keberlanjutan terus melaksanakan program Merdeka Belajar Episode 23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi dan yang paling membanggakan bangsa Indonesia adalah ditetapkannya bahasa Indonesia

sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO; dan pada tahun 2024, Badan Bahasa berupaya memperkenalkan sastra Indonesia melalui Peringatan 100 Tahun A.A. Navis.

Selain itu, capaian tahun 2020—2024 menjadi acuan dalam menetapkan strategi pada rencana strategis mendatang. Semoga upaya tersebut dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program dan anggaran serta perumusan kebijakan bidang pendidikan.

Terima kasih saya ucapkan kepada para pimpinan beserta seluruh pegawai Badan Bahasa yang telah bekerja dengan penuh semangat tanpa kenal lelah untuk mewujudkan Badan Bahasa Bermartabat-Bermanfaat. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam menyusun Laporan Kinerja Badan Bahasa Tahun 2024 ini.

Jakarta, 14 Februari 2025
Kepala Badan Bahasa,



Hafidz Muksin
NIP 197001221990011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR GRAFIK ix
DAFTAR FOTO x

IKHTISAR EKSEKUTIF 1

BAB I PENDAHULUAN 7
A. Gambaran Umum 7
B. Dasar Hukum 13
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi 13
D. Isu Strategis 16
E. Peran Strategis 18

BAB II PERENCANAAN KINERJA 21
A. Rencana Strategis 21
1. Visi 21
2. Misi 21
3. Tujuan Strategis 22
4. Matriks Kinerja 23
B. Program Prioritas 2020—2024 24
C. Rencana Kerja dan Anggaran 26
D. Perjanjian Kinerja 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 33
A. Akuntabilitas Kinerja 33
B. Agenda Prioritas
C. Realisasi Program 140
1. Realisasi Anggaran 147
2. Efisiensi Anggaran 150
C. Kinerja Lain-lain 151
1. Reformasi Birokrasi 153
2. Informasi Capaian Kinerja Lainnya yang Mendukung

BAB IV PENUTUP 171

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Renja Krisna
4. SK Tim Penyusun
5. SK Tim Reviu Lakin
6. Surat Pernyataan Telah Direviu Tim Reviu Badan
7. Pernyataan Telah Direviu Tim APIP Itjen
8. CHR Lakin Badan Bahasa
9. Jumlah Komunitas Literasi dan Generasi Muda Terbina
10. Rekapitulasi Capaian Badan Bahasa Tahun 2020--2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Status Tanah dan Bangunan Seluruh Satker di Lingkungan Badan Bahasa 11
Tabel 2 Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Terkait Pelestarian dan Pemajuan Budaya, Bahasa, dan Sastra Serta Pengarusutamaannya dalam Pendidikan 22
Tabel 3 Tujuan dan Indikator Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 22
Tabel 4 Matriks Renstra 2020—2021 Sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 23
Tabel 5 Matriks Renstra 2022—2024 Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 24
Tabel 6 Target dan Capaian Rincian Output (RO) Prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 26
Tabel 7 Peningkatan Anggaran Tahun 2024 29
Tabel 8 Rencana Kerja dan Anggaran Badan Bahasa Tahun 2024 30
Tabel 9 Matriks Renstra 2020—2021 Sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 30
Tabel 10 Matriks Renstra 2022—2024 Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 31
Tabel 11 Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 32
Tabel 12 Pagu Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 32
Tabel 13 Pengukuran Kinerja Tahun 2024 33
Tabel 14 Target dan Realisasi IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya 38
Tabel 15 Rentang Nilai Kecakapan Literasi 58
Tabel 16 Hasil inventarisasi kosakata Balai/Kantor Tahun 2024 68
Tabel 17 Rekapitulasi Hasil SKI 2024 70
Tabel 18 Jumlah Data Korpus 75
Tabel 19 Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya 75
Tabel 20 Target dan Realisasi IKP Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya 78
Tabel 21 Lembaga Penerima Penghargaan Wajah Lembaga Tahun 2024 81
Tabel 22 Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Persentase Lembaga Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya 82
Tabel 23 Target dan Realisasi IKP Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia 86
Tabel 25 Tabel Rincian Produk Penerjemahan Badan Bahasa Tahun 2021—2024 97
Tabel 26 Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia 101
Tabel 27 Hasil Penghitungan Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya Berdasarkan Indikatornya 104
Tabel 28 Target dan Realisasi IKP Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya Tahun 2023 106
Tabel 29 Sasaran Pembaca dan Sumber Cerita Komik dan Cerita Bergambar 113
Tabel 30 Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya 114
Tabel 31 Rentang Nilai, Predikat, dan Interprestasi Penilaian SAKIP 115
Tabel 32 Target dan Realisasi IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 115
Tabel 33 Nilai SAKIP Seluruh Satker di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 116
Tabel 34 Tabel Kendala, Strategi, dan Langkah Antisipasi IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 125
Tabel 35 Tabel Kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah 128
Tabel 36 Syarat ZI-WBK/WBBM 128
Tabel 37 Satker yang Memperoleh Predikat ZI-WBK/WBBM 129
Tabel 39 Temuan BPK 137
Tabel 40 Temuan Inspektorat Jenderal 138
Tabel 41 Kendala, Strategi, dan Langkah Antisipasi IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM 140

Tabel 42 Realisasi Program/Agenda Prioritas Badan Bahasa Tahun 2024 140
Tabel 43 Terjemahan 10 karya A.A. Navis 146
Tabel 44 Realisasi Per Sasaran Program 148
Tabel 45 Anggaran Satker di Lingkungan Badan Bahasa 148
Tabel 46 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Program 151
Tabel 47 Penilaian Laporan Audit Kearsipan 162
Tabel 48 Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Literasi Kebahasaan dan Kesastraan 165
Tabel 49 Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah 166
Tabel 50 Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Internasionalisasi Bahasa Indonesia 167
Tabel 51 Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Dukungan Manajemen 168
Tabel 52 Target dan Capaian Sasaran Program dan Indikator Program Tahun 2020—2021 sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 172
Tabel 53 Target dan Capaian Sasaran Program dan Indikator Program Tahun 2022—2024 sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 173

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase Capaian IKP Badan Bahasa Tahun 2024 1
Gambar 2 Tren Anggaran Badan Bahasa Tahun 2020--2024 3
Gambar 3 Struktur Organisasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 14
Gambar 4 Gambar Sebaran Unit Pelaksana Teknis Balai Bahasa dan Kantor Bahasa 14
Gambar 5 Tiga Program Prioritas Badan Bahasa 25
Gambar 6 Sebaran Peserta UKBI Tahun 2024 42
4
Gambar 7 Protipe UKBI bagi Disablitas Rungu 45
Gambar 8 Buku Peta Kemahiran Berbahasa Indonesia 46
Gambar 9 Poster Giat UKBI 47
Gambar 10 contoh buku hasil Sayembara Penulisan Bahan Bacaan Literasi Tahun 2024 53
Gambar 11 contoh Hasil Penyusunan Buku Komik 54
Gambar 12 contoh Buku Video dan Buku Braile 54
Gambar 13 contoh buku hasil residensi 55
Gambar 16 sinergi dan kolaborasi lintas unit utama di Kemendikbudristek dalam Program Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. 59
Gambar 17 Capaian Literasi dan Dampak Bantuan Buku Bacaan Bermutu. 61
Gambar 18 Tampilan Laman KBBI Daring 65
Gambar 19 Perbandingan Jumlah Tim Redaksi Tahun 2023 dengan 2024 66
Gambar 20 Bahan Publikasi Rekrutmen Editor KBBI Daring 67
Gambar 21 Platform Lexonomy oleh Lexicom 68
Gambar 22 Kegiatan Pemutakhiran Aplikasi KBBI Daring 69
Gambar 23 Sampul Kamus Bidang Ilmu 71
Gambar 24 Sampul Kamus Etimologi 72
Gambar 25 Laman Unduh Sipebi 73
Gambar 26 impor Data Korpus 74
Gambar 27 Metode Perhitungan Persentase Lembaga Terbina 78
Gambar 28 Penetapan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Resmi Sidang Umum UNESCO 84
Gambar 29 Metode Perhitungan Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia 85
Gambar 30 Data Capaian Negara Terfasilitas Program BIPA tahun 2020--2024 87
Gambar 32 Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Daring Tahun 2024 90
Gambar 33 Bahan Ajar BIPA Pengayaan Membaca Berjenjang Seri Legenda Tahun 2024 92
Gambar 34 Bahan Tes BIPA Tahun 2024 93
Gambar 35 Bahan Siaran BIPA Tahun 2024 93
Gambar 36 Alih Wahan Bahan Ajar BIPA Tahun 2024 94
Gambar 37 Aplikasi Chatbot BIPA “Satria BIPA” 94
Gambar 38 Forum Ilmiah BIPA Bekerja Sama dengan IDN Global Tahun 2024 95
Gambar 39 Buku-buku hasil terjemahan 97
Gambar 40 Tampilan laman penjaring 100
Gambar 41 Buku Saku Garuda Arab Lebanon—Bahasa Indonesia 101
Gambar 42 Buku Saku Garuda Bahasa Prancis—Bahasa Indonesia 101
Gambar 43 Buku Saku Garuda Bahasa Inggris—Bahasa Indonesia 101
Gambar 44 Metode Perhitungan IPBD 103
Gambar 45 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pelindungan Kebahasaan dan Kesastraan 107
Gambar 49 Lini Masa Aktivitas Layanan Evaluasi 119
Gambar 50 Lini Masa Aktivitas Layanan Perencanaan 119
Gambar 51 Layanan Informasi Publik 120
Gambar 53 Lini Masa Aktivitas Data dan Informasi 122
Gambar 54 Lini Masa Aktivitas Layanan Sumber Daya Manusia 123
Gambar 55 Lini Masa Aktivitas Layanan Barang Milik Negara 124
Gambar 56 Lini Masa Aktivitas Layanan Hukum Tata Laksana 131
Gambar 57 Tampilan Konten JENTERA di aplikasi Tripper dan Pasflix 133
Gambar 58 Lini Masa Aktivitas Layanan Kerja Sama 134
Gambar 59 Lini Masa Aktivitas Layanan Keuangan dan Perbendaharaan 135
Gambar 60 Pendampingan UPT 137
Gambar 61 Lini Masa Layanan Akutansi dan Pelaporan Keuangan 138

Gambar 62 Rangkaian Kegiatan BBS 2024 142
Gambar 63 Total Anggaran Badan Bahasa 2024 147
Gambar 64 Buku Seminovel 153
Gambar 65 Inovasi Laman UKBI 157
Gambar 66 Tampilan laman BIPA 159
Gambar 67 Tangkapan Layar Perjanjian Trilateral Badan Bahasa – OUP – Lexicom 166
Gambar 68 Tangkapan Layar Perjanjian Kerja Sama Pusat Penguatan dan _ Pemberdayaan Bahasa dengan Perguruan Tinggi 168
Gambar 69 Buku Statistik Kebahasaan dan Kesastraan Tahun 2024, Volume 6. 169

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Bahasa Tahun 2024 1
Grafik 2 Tren Jumlah Pegawai Badan Bahasa 2020—2024 8
Grafik 3 Sebaran Jumlah Pegawai Badan Bahasa tahun 2024 8
Grafik 4 Tren Pagu Badan Bahasa Tahun 2020--2024 26
Grafik 5 Tindak Lanjut Hasil Temuan Badan Bahasa Tahun 2020--2024 16
Grafik 6 Tren Jumlah Peserta UKBI Tahun 2021—2024 41
Grafik 7 Peserta UKBI Pelajar dan Mahasiswa 42
Grafik 8 Peserta UKBI Umum 43
Grafik 9 Predikat Peserta UKBI 44
Grafik 10 Peningkatan jumlah entri KBBI per tahun 66
Grafik 11 Data Statistik KBBI 66
Grafik 12 Progres Capaian Entri 66
Grafik 13 Capaian IKP Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas x
Penggunaan Bahasanya 78
Grafik 14 Progres Capaian Entri 66
Grafik 15 Jumlah Pemelajar BIPA Tahun 2024 89
Grafik 16 Proyeksi IPBD Tahun 2021--2024 105
Grafik 17 Capaian Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya 107
Grafik 18 Capaian IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 116
Grafik 19 Capaian IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM 130
Grafik 20 Efisiensi Anggaran 151
Grafik 21 Target dan Capaian Indikator Kinerja Program 151
Grafik 22 Efisiensi Anggaran 150
Grafik 23 Target dan Capaian Indikator Kinerja Program 150
Grafik 24 Satker Badan Bahasa yang Mendapatkan Predikat Zi-WBK/WBBM 152
Grafik 25 Tren Pagu Badan Bahasa 2020--2024 172

DAFTAR FOTO

Foto 1 Foto Kepala Satker di Lingkungan Badan Bahasa pada kegiatan Rapat Koordinsi Badan Bahasa pada tanggal 18--20 Februari 2024, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta 10
Foto 2 Gedung Kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13220 10
Foto 3 kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional di Kabupaten Sleman. 39
Foto 4 kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional di Kabupaten Bantul. 39
Foto 5 kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional di Kabupaten Bantul. 40
Foto 6 Praktik baik hasil pendampingan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional di Kabupaten Kulon Progo. 41
Foto 7 Diseminasi Nasional Kemahiran Berbahasa Indonesia 45
Foto 8 Pelaksanaan Giat UKBI 48
Foto 9 Webinar Musikalisasi Puisi 49
Foto 10 Festival Musikalisasi Puisi Tingkat Nasional 49
Foto 11 kegiatan Bengkel Sastra Penulisan Puisi di Kabupaten Jayapura, Papua. 50
Foto 12 kegiatan Bengkel Sastra Penulisan Puisi di Kabupaten Keerom, Papua. 51
Foto 13 Dokumentasi Kegiatan Bengkel Sastra Penulisan Puisi di Jambi. 51
Foto 14 pelaksanaan Uji Keterbacaan Bahan Bacaan Literasi Tahun 2024 57
Foto 15 Pelaksanaan Pengiriman Buku Pengayaan GLN Tahun 2024 58
Foto 16 kegiatan Parade Waja Bahasa Ruang Publik Sekolah di SMA Negeri 32 Jakarta 62
Foto 17 Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dengan menggandeng Forum FTBM dan Pemerintah Kab. Lampung Barat 63
Foto 18 Penyerahan Secara Simbolis Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024 64
Foto 19 Pelaksanaan SKI 70
Foto 20 Perbaikan data objek penggunaan bahasa di ruang publik 79
Foto 21 Perbaikan data objek penggunaan bahasa di ruang publik di SMAN 32 Jakarta 80
Foto 22 Perbaikan data objek penggunaan bahasa di ruang publik di Hotel Santika, Bengkulu 80
Foto 23 Pemberian Penghargaan Pembinaan 45 Lembaga Tingkat Nasional 82
Foto 24 Penugasan Pengajar BIPA Pusat Secara Langsung Tahun 2024 89
Foto 25 Penugasan Pengajar Lokal BIPA Tahun 2024 89
Foto 26 Karya Peserta FHI Tahun 2024 Berupa Video dalam Babak Penyisihan 91
Foto 27 Penampilan Finalis FHI Tahun 2024 di Bali 91
Foto 28 Forum Peningkatan Kepakaran Mitra Program BIPA Tahun 2024 95
Foto 29 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penjurubahasaan 98
Foto 30 Pelaksanaan Diseminasi di Bandarlampung 98
Foto 31 Pelaksanaan Diseminasi Nasional Bidang Penerjemahan 99
Foto 32 Kegiatan Revalidasi UNESCO Global Geopark Batur 100
Foto 33 pelaksanaan Koordinasi RBD dengan Pemerintah Daerah 108
Foto 34 Festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2024 108
Foto 35 Pembahasan Pemutakhiran VIBA Berbasi AI oleh STIS 110
Foto 36 Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2024 111
Foto 38 Narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan materi Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN dalam menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan 122
Foto 39 Pemilihan Pegawai Berprestasi Tahun 2024 123
Foto 40 Press Tour Kongres Pameran Kebahasaan dan Kesastraan 2024 125
Foto 41 Evaluasi Organisasi Badan Bahasa 130
Foto 42 Pendampingan PEKPP di Kantor Bahasa NTB 131
Foto 43 Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Bogor 132
Foto 44 Pendampingan Pengelolaan Keuangan di UPT 135
Foto 45 Penyusunan laporan keuangan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 dan 2024 136
Foto 46 Penyusunan bahan SPIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 136

Foto 47 Penyusunan laporan keuangan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa TA 2023 Unaudited 136
Foto 48 Seminar dan Pameran Perpustakaan Badan Bahasa 139
Foto 49 Aktivitas Bedah Buku di Lingkungan Badan Bahasa 140
Foto 51 Peresmian Pameran Bulan Bahasa dan Sastra oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Kebudayaan, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 143
Foto 52 Peluncuran Produk dan Capaian Badan Bahasa oleh Ketua Komisi X DPR RI dan Pejabat Kementerian 143
Foto 53 Penyerahan Penghargaan dan Penampilan Seni Budaya pada Acara Puncak Bulan Bahasa dan Sastra 143
Foto 50 Taklimat Media Bulan Bahasa dan Sastra 143
Foto 54 Acara Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 202 145
Foto 55 Pelaksanaan Peringatan 100 Tahun A.A. Navis 147
Foto 56 Kegiatan Pelatihan Pratugas Bagi Satgas TNI Kontingen Garuda 157
Foto 57 Kegiatan “Parade Puisi Untuk Gaza” 161

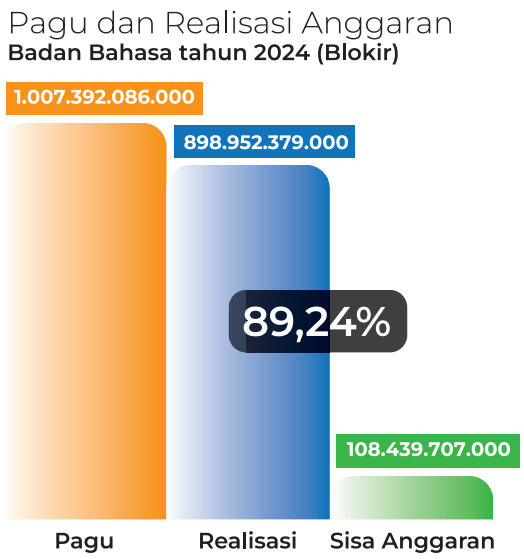
IKHTISAR EKSEKUTIF

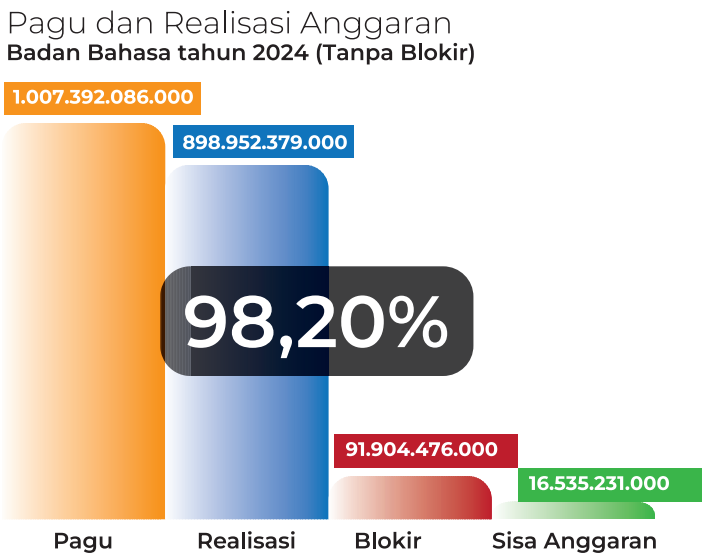
Laporan kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) tahun 2024 menyajikan tingkat pencapaian lima sasaran program (SP) dengan enam indikator kinerja program (IKP) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum, berikut ini capaian kinerja Badan Bahasa.

Gambar 1 Gambar Persentase Capaian IKP Badan Bahasa Tahun 2024



Grafik 1 Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Bahasa Tahun 2024

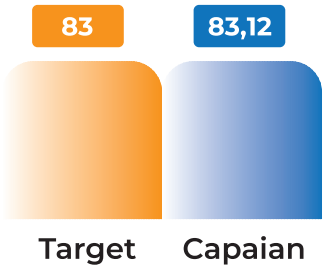




[SP 1] Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan

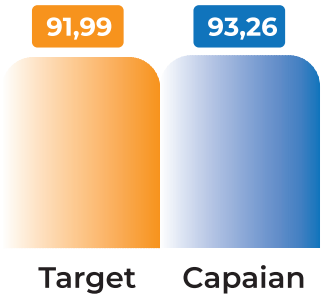
[IKP 1.1] Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya

Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya 2024



[IKP 1.2] Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya

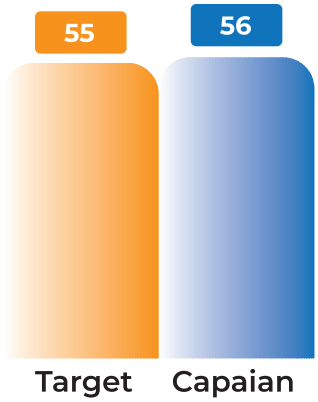
Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya Tahun 2024



[SP 2] Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional

[IKP 2.1] Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia

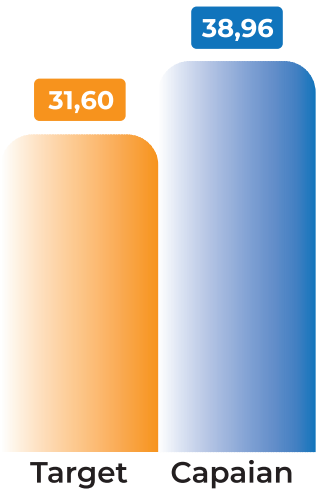
Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia Tahun 2024



[SP 3] Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah

[IKP 3.1] Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya

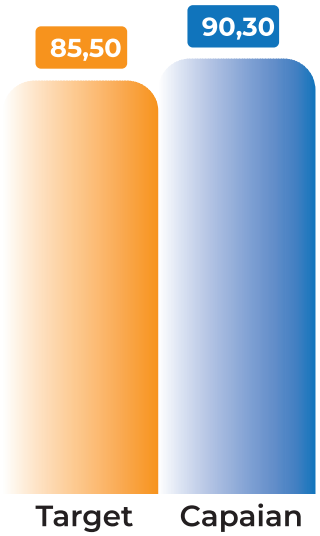
Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya 2024



[SP 4] Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

IKP 4.1] Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

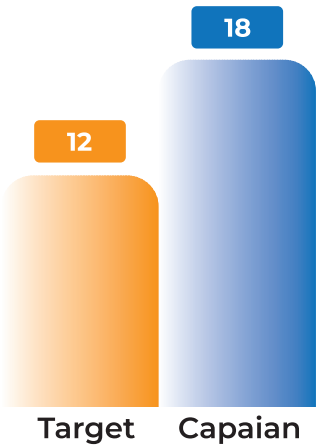
Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024



[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

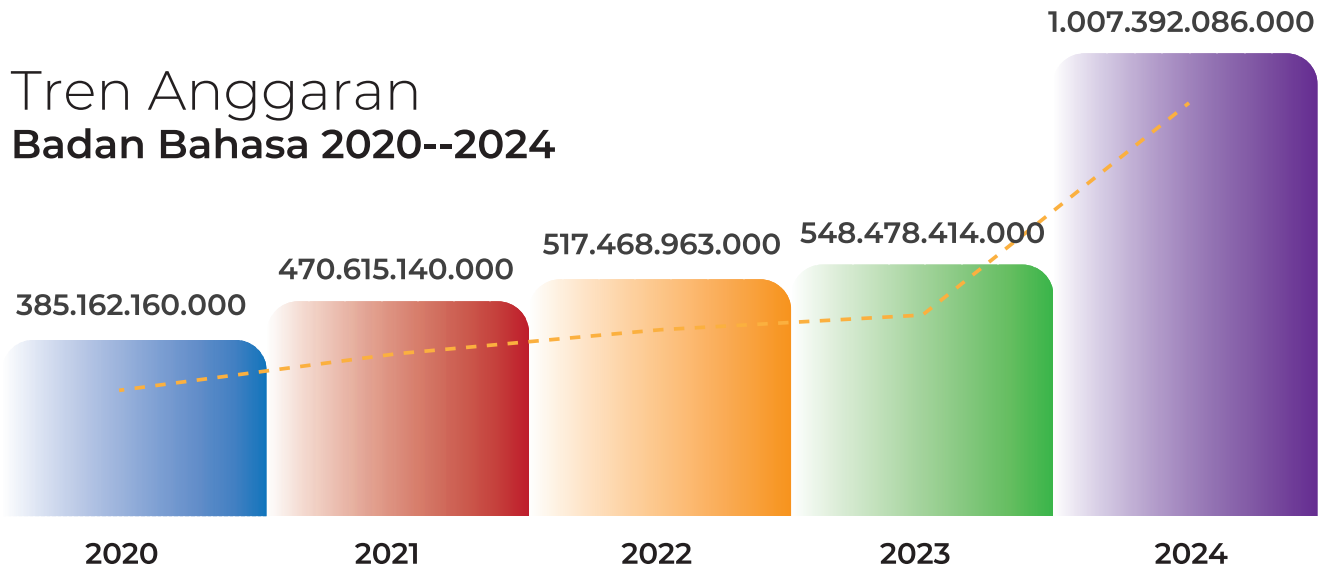
[IKP 5.1] Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM Tahun 2024



Berikut tren alokasi anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020 sampai dengan 2024.

Gambar 2 Tren Anggaran Badan Bahasa Tahun 2020--2024



Berdasarkan grafik di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan, hal tersebut seiring dengan peningkatan target/sasaran program prioritas Badan Bahasa.

Selama tahun 2024, terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

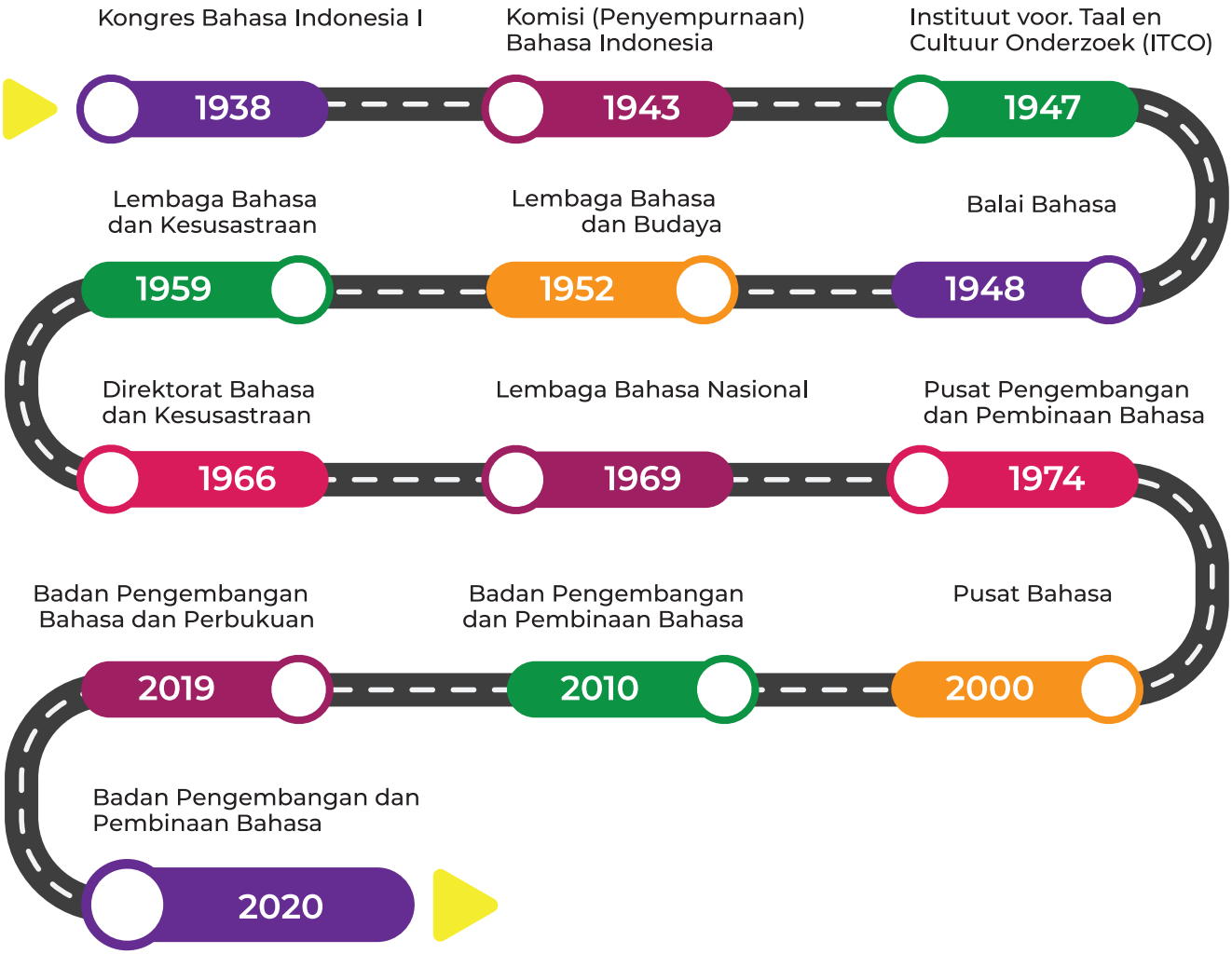
No	Kendala/Hambatan	Strategi
1	Adanya kendala jaringan saat pelaksanaan tes awal/tes akhir di beberapa balai/kantor yang melaksanakan kegiatan di daerah perbatasan.	Mengoordinasikan dengan panitia daerah setempat untuk menyediakan jaringan internet yang memadai.
2	Pengurusan nomor *international standard book number* (ISBN) seluruh bahan bacaan literasi mengalami keterlambatan karena penulis belum mengirimkan surat pernyataan keaslian karya.	Melakukan koordinasi dan bersurat secara resmi kepada seluruh peserta untuk segera mengumpulkan surat pernyataan keaslian. Pengajuan nomor ISBN akan dilaksanakan pada awal tahun 2025.
3	Inventarisasi Kosakata: Target 200 ribu entri Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terlalu besar dengan waktu yang sedikit dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas.	Merekrut editor eksternal, melaksanakan pembekalan mahasiswa sebagai calon pengusul entri KBBI, meningkatkan dan memonitor pelibatan tim redaksi KBBI dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia, dan melaksanakan 15 Konsinyasi Inventarisasi Kosakata.
4	Proses Integrasi Produk Kosakata dengan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), terutama terkait dengan perizinan untuk pembelian perangkat lunak memiliki prosedur yang sangat panjang.	Berkoordinasi dengan berbagai pihak agar proses pembelian perangkat lunak berjalan lancar.
5	Beberapa instansi masih belum memberikan respons baik/positif terhadap hasil rekomendasi untuk perbaikan data penggunaan bahasa di ruang publik karena memerlukan anggaran.	Koordinasi dengan Pemda untuk pengutamaan bahasa negara di 45 lembaga dalam perbaikan data di ruang publik dan dokumen agar dapat dianggarkan.
6	Permohonan fasilitasi pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dari negara yang baru atau belum terfasilitasi sebelumnya diterima setelah penyusunan rencana program untuk tahun anggaran berjalan telah selesai dilaksanakan	Memfasilitasi permohonan fasilitasi pembelajaran BIPA sesuai dengan ketersediaan anggaran
7	Pemrosesan pembelian lisensi buku mulai dari seleksi bahan terjemahan, pengadaan, sampai dengan pemerolehan fail produksi memerlukan waktu yang lama dan melibatkan banyak pihak antara lain penerbit, agen, tim kelompok kerja (pokja) pengadaan di Biro umum dan PBJ, serta tim pengadaan satker.	Terus berkomunikasi/berkorespondensi dengan pihak penerbit, Biro Umum dan PBJ untuk mempercepat proses pengadaan.
8	Setiap komponen dalam penghitungan Indikator Indeks Pemanfataan Bahasa Daerah (IPBD) diperoleh dari pihak eksternal dengan rentang waktu pemutakhiran yang tidak sama	Berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk menyinkronkan linimasa pemutakhiran data
9	Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 harus lebih tinggi dari capaian 2023 sesuai dengan hasil evaluasi kinerja.	Melakukan pendampingan kepada seluruh satker secara intensif dalam berbagai bentuk konsinyasi dan koordinasi, baik bersemuka maupun daring.
10	Tenaga IT belum mengakomodasi insiden serangan siber laman dan aplikasi di lingkungan Badan Bahasa.	Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam pengujian dan kerentanan menangani serangan siber.

No	Kendala/Hambatan	Strategi
11	Data capaian kebahasaan dan kesastraan yang masih beranekaragam jumlahnya dari berbagai sumber yang menyebabkan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perencanaan tidak relevan.	Melakukan validasi dan sinkronisasi data di tiap Satuan Kerja.
12	Perubahan kebijakan dari tim penilai KemenpanRB terkait dengan proses penilaian zona integritas wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani (ZI-WBK/WBBM).	Berkoordinasi dengan tim penilai dari KemenpanRB dan mitra dari Biro Ortala terkait dengan proses penilaian ZI-WBK/WBBM yang terbaru.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

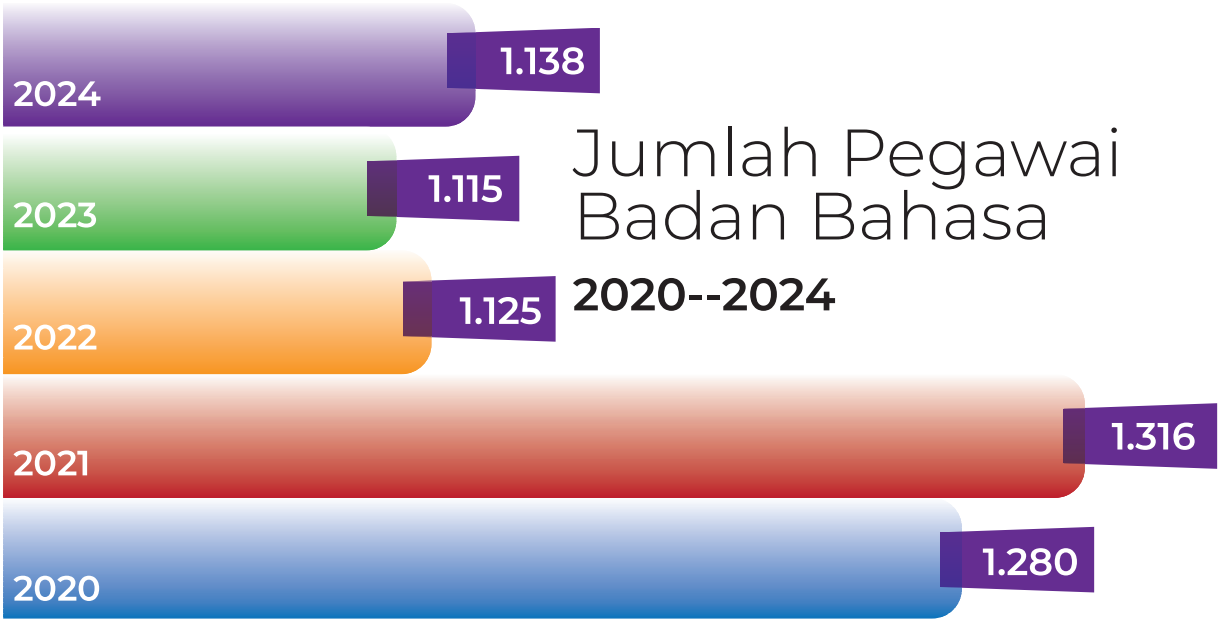
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) merupakan salah satu lembaga di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Badan Bahasa telah berdiri sejak Indonesia belum merdeka dan terus berkembang hingga saat ini. Secara lengkap, perjalanan sejarah Badan Bahasa dapat dilihat melalui laman resmi Badan Bahasa: https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/sejarah.



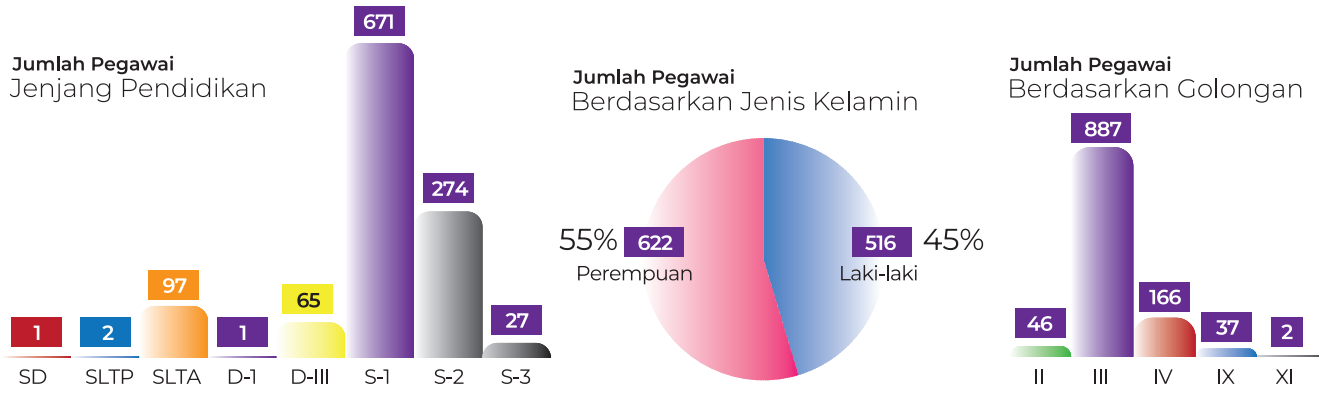
Badan Bahasa dipimpin oleh Hafidz Muksin, S.Sos., M.Si. sejak tanggal 7 Januari 2025 menggantikan Prof. Endang Aminudin Aziz, M.A., Ph.D., seiring dengan berubahnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

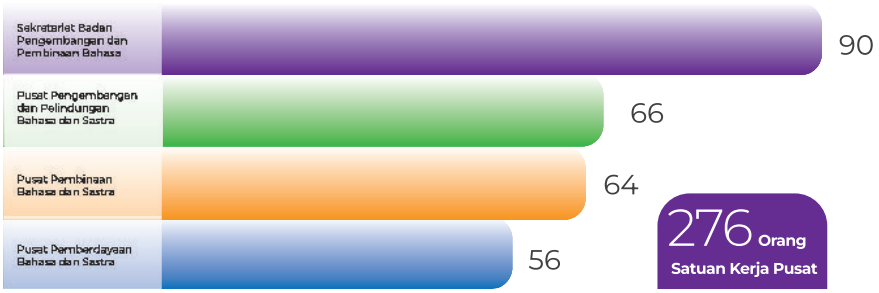
Badan Bahasa memiliki wilayah kerja di seluruh Indonesia. Badan Bahasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi didukung oleh empat satker pusat dan tiga puluh UPT di daerah dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) sebanyak 1.138 orang pada tahun 2024. Berikut ini tren jumlah pegawai Badan Bahasa sejak 2020 sampai dengan 2024.

Grafik 2 Tren Jumlah Pegawai Badan Bahasa 2020—2024



Grafik 3 Sebaran Jumlah Pegawai Badan Bahasa tahun 2024





276 Orang
Satuan Kerja Pusat



Total ASN Badan Bahasa
1.138 Orang

862 Orang
Satuan Kerja UPT

Sebaran Jumlah Pegawai
Balai/Kantor Bahasa

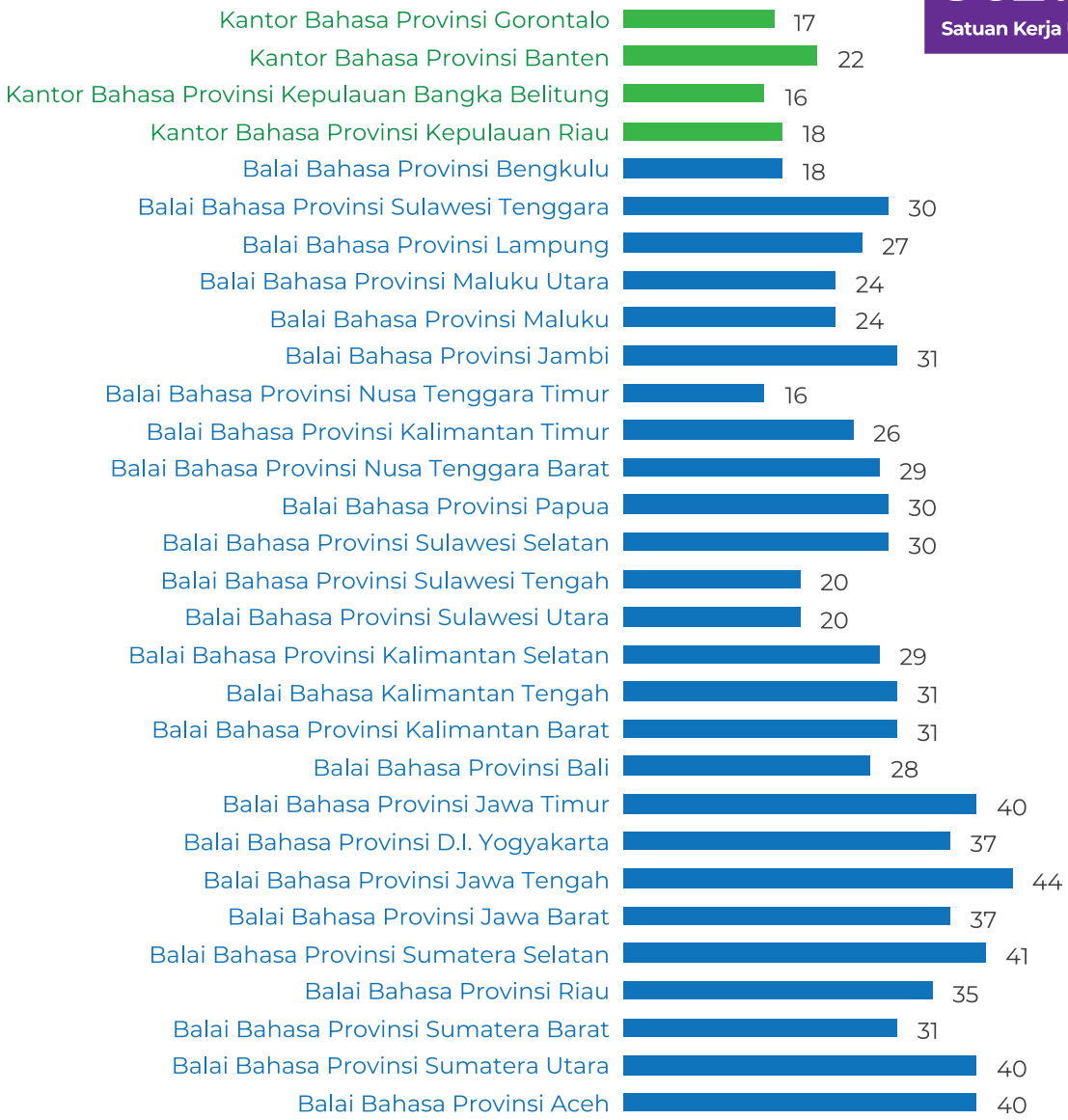




Foto 1 Foto Kepala Satker di Lingkungan Badan Bahasa pada kegiatan Rapat Koordinsi Badan Bahasa pada tanggal 18--20 Februari 2024, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta



Foto 2 Gedung Kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13220

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan layanan kepada masyarakat, semua satuan kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Salah satu prasarana yang sangat penting ialah ketersediaan gedung/kantor sebagai tempat kerja utama. Berdasarkan kepemilikan tanah dan gedung, terdapat lima kategori satuan kerja di lingkungan Badan Bahasa, yaitu

1. memiliki tanah dan sertifikat: 23 satker;
2. memiliki bangunan yang berdiri di tanah pemerintah provinsi: 5 satker;
3. memiliki tanah, tetapi berkantor di UPT Kemendikdasmen: 3 satker;
4. pinjam pakai: 2 satker
5. penggunaan sementara: 1 satker.

Tabel 1 Tabel Status Tanah dan Bangunan Seluruh Satker di Lingkungan Badan Bahasa

No	Nama Satuan Kerja	Tanah	Sertifikat	Pinjam Pakai	Penggunaan Sementara	Menempati Satker Kemendikbudristek
1	Sekretariat Badan Bahasa	V	V			
2	Pusat Pengembangan dan Pelindungan					V
3	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra					V
4	Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra				V	
5	BBP Jawa Barat	V	V			
6	BBP Jawa Tengah	V	V			
7	BBP D. I. Yogyakarta	V	V			
8	BBP Jawa Timur	V	V			
9	BBP Aceh	V	V			
10	BBP Sumatera Utara	V	V			
11	BBP Sumatera Barat	V	V			
12	BBP Riau	V	V			
13	BBP Jambi			V		
14	BBP Sumatera Selatan	V				
15	BBP Lampung	V	V			
16	BBP Kalimantan Barat	V	V			
17	BBP Kalimantan Tengah	V				
18	BBP Kalimantan Selatan	V	V			
19	KBP Kalimantan Timur	V				
20	BBP Sulawesi Utara	V				
21	BBP Sulawesi Tengah	V				
22	BBP Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	V	V			
23	BBP Sulawesi Tenggara	V	V			
24	BBP Maluku	V	V			
25	BBP Bali	V	V			
26	BBP Nusa Tenggara Barat	V	V			
27	BBP Nusa Tenggara Timur					V
28	BBP Papua			V		
29	BBP Bengkulu	V	V			V
30	KBP Maluku Utara	V	V			V
31	KBP Banten	V	V			
32	KBP Kepulauan Bangka Belitung	V	V			V
33	KBP Gorontalo	V	V			
34	KBP Kepulauan Riau	V	V			V

Pada tahun 2024, penataan UPT yang dilakukan memberikan dampak yang signifikan bagi seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa. Peningkatan tersebut terjadi pada sembilan Kantor Bahasa menjadi Balai Bahasa, yaitu Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat, Balai Bahasa Kalimantan Timur, Balai Bahasa Nusa Tenggara Timur, Balai Bahasa Jambi, Balai Bahasa Maluku, Balai Bahasa Maluku Utara, Balai Bahasa Lampung, Balai Bahasa Sulawesi Tenggara, serta Balai Bahasa Bengkulu. Secara lengkap dapat dilhat pada Permendkbudristek Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa. Pada tahun 2025, akan dilakukan penguatan dan peningkatan sehingga empat satker yang masih berstatus Kantor Bahasa—Kantor Bahasa Kepulauan Riau, Kantor Bahasa Bangka Belitung, Kantor Bahasa Gorontalo, dan Kantor Bahasa Banten—dapat berstatus Balai Bahasa..

Untuk melaksanakan program bidang kebahasaaan dan kesastraan, Badan Bahasa menetapkan strategi pelaksanaan program melalui platform Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP). Platform ini merupakan upaya fungsionalisasi para tenaga fungsional di lingkungan Badan Bahasa, baik satker pusat maupun satker UPT, agar dapat bekerja secara optimal sesuai dengan minat dan kepakarannya dalam suatu bidang keahlian dan layanan profesional kebahasaan dan kesastraan tertentu. Pola kerja KKLP bersifat fungsional, lintas struktur, dan holistik-integratif dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Fungsional

   Melalui prinsip ini, KKLP bekerja menurut kepakaran fungsional keilmuan para anggotanya yang dikelompokkan menurut hasil pemetaan jenis-jenis kepakaran guna mengukuhkan kepakaran individu dan kelompok serta mengoptimalkan layanan yang dapat diberikan oleh anggota KKLP kepada mitra kerjanya.

b. Lintas Struktur (Pusat-UPT)

   Dengan prinsip ini, KKLP dibentuk berdasarkan kepakaran anggotanya yang dapat tersebar di satuan-satuan kerja yang ada di lingkungan Badan Bahasa. Melalui KKLP, pegawai fungsional di satuan kerja pusat dan UPT akan dikumpulkan di dalam kelompok kepakaran tertentu guna memberikan layanan profesional yang optimal.

c. Holistik-Integratif

   Melalui prinsip ini, KKLP menyelenggarakan tugas dan fungsi pengembangan kepakaran dan layanan dalam ‘satu atap-satu rangkaian’ mulai dari kegiatan (1) analisis-sintesis substansi kebahasaan dan kesastraan, (2) pelatihan untuk peningkatan kapasitas anggota, (3) diseminasi, publikasi, sampai dengan penyediaan layanan profesional yang dapat diberikan kepada mitra kerjanya.

Pada tahun 2022, Badan Bahasa melaksanakan penyelarasan dan penyempurnaan sasaran, indikator, dan target kinerja berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.

Berdasarkan penyelarasan dan penyempurnaan kebijakan tersebut, laporan kinerja (Lakin) Badan Bahasa disusun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024.

B. Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025

2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan

4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang
Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020—2024

7 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156)

8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknolog Tahun 2020-2024

11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang
Standar Biaya Keluaran Umum

13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa

15 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
OTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

16 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang
Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

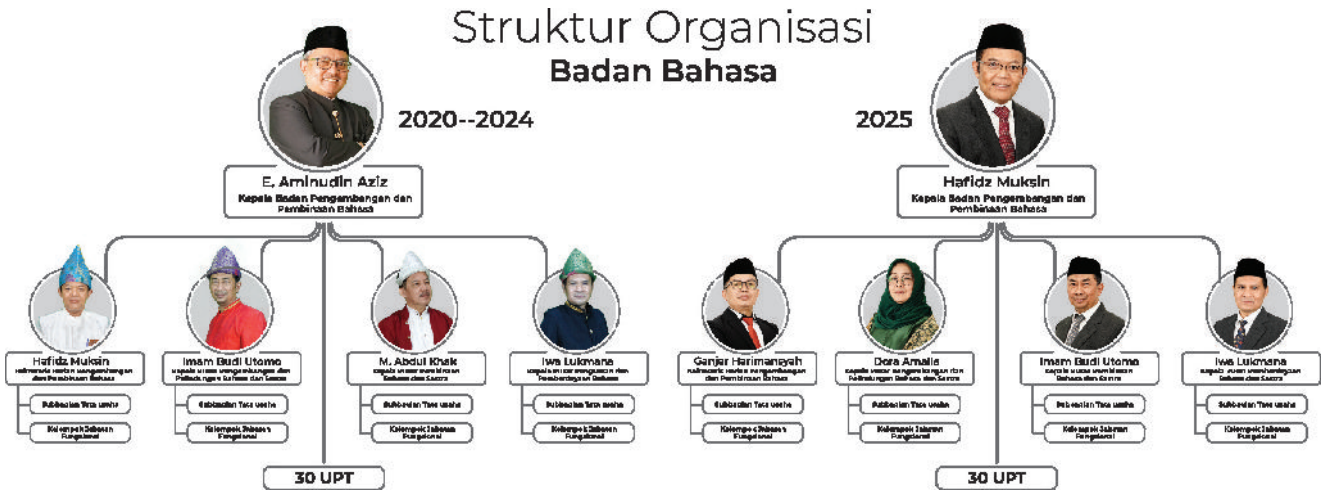
17 Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang
Rencana Srategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020-2024

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra dan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
b. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra
d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terdiri atas empat Eselon II, yaitu (1) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (2) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, (3) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dan (4) Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra. Selain memiliki empat unit Eselon II, Badan Bahasa juga didukung oleh 30 unit pelaksana teknis (UPT).



Gambar 3 Struktur Organisasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



Gambar 4 Gambar Sebaran Unit Pelaksana Teknis Balai Bahasa dan Kantor Bahasa

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta dalam rangka meningkatkan produk dan layanan kepada masyarakat, Badan Bahasa memiliki slogan atau moto: **Badan Bahasa Bermartabat-Bermanfaat**.

Bermartabat : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah lembaga yang memiliki wibawa dan marwah yang tinggi dan memiliki tugas yang sangat besar dan mulia, yakni mengawal salah satu identitas bangsa yaitu bahasa.

Bermanfaat: Keberadaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Badan Bahasa Bermartabat-Bermanfaat memiliki nilai filosofis yang mengarah kepada wujud kebanggaan terhadap lembaga karena marwahnya dan nilai kebermanfaatan lembaga ini untuk masyarakat. Dengan demikian, semua pegawai akan melakukan hal yang terbaik untuk lembaganya.



“Kesatria” sebagai Budaya Organisasi Badan Bahasa

Usaha mencapai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) yang bermartabat-bermanfaat dan untuk lebih terarahnya transformasi yang sedang dilakukan, Badan Bahasa merumuskan hal-hal yang harus diperbaiki, yaitu mencakup pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang diimplementasikan dalam sebuah budaya organisasi. Budaya organisasi ini merupakan karakteristik yang dijunjung tinggi oleh organisasi dan seluruh pegawai dan menjadi standar etik organisasi sekaligus sebagai pembeda dengan organisasi yang lain.

Budaya organisasi Badang Bahasa digambarkan dalam sosok **“kesatria”** untuk menciptakan landasan nilai-nilai etik dan moral yang tinggi. Kesatria Badan Bahasa dalam budaya kerjanya dapat diartikan sebagai individu yang tidak hanya memiliki keterampilan dan keahlian profesional di bidang kebahasaan dan kesastraan, tetapi juga menonjol dalam integritas, kreatif dan inovatif, berani dan bertanggungjawab, adil serta terus belajar. Nilai-nilai tersebut dapat diuraikan dalam makna-makna budaya kerja berikut.

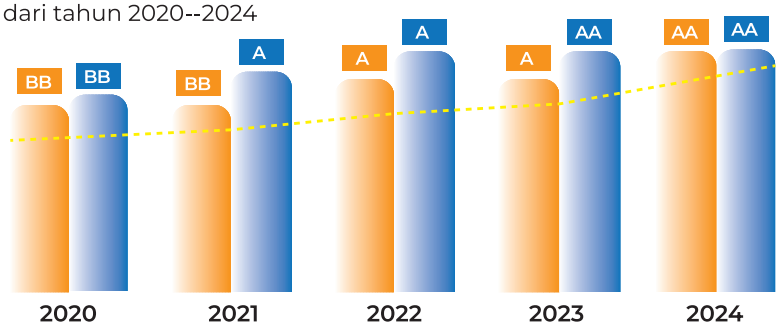
1. **Berintegritas** bermakna memiliki integritas tinggi, mematuhi prinsipprinsip etik, dan selalu berusaha untuk bertindak dengan kejujuran serta menunjukkan keberanian untuk berdiri teguh pada nilai-nilai moral, bahkan dalam situasi yang sulit.
2. **Kreatif dan Inovatif** bermakna memiliki kemampuan untuk menemukan gagasan-gagasan baru, menciptakan strategi terbaik dan tepat untuk mewujudkasidangn gagasannya, serta tidak akan pernah kehabisan akal untuk melakukan hal terbaik.
3. **Berani dan Bertanggung Jawab** bermakna memiliki keberanian yang didorong oleh keyakinan akan kebenaran dan senantiasa siap untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang diambilnya secara profesional.
4. **Adil** bermakna berusaha menciptakan suasana yang adil dan seimbang dalam melayani, menghargai perbedaan, mempromosikan keharmonisan dalam bekerja, dan menanggapi setiap situasi dengan bijaksana, serta menekankan pentingnya pengelolaan konflik dengan cara yang positif dan konstruktif.
5. **Terus Belajar** bermakna mendorong pemberdayaan diri dan orang lain, mendukung pertumbuhan kolektif tim, dan selalu terbuka terhadap pembelajaran baru serta berusaha untuk menjadi agen perubahan yang positif.

Dengan semangat budaya kerja **Kesatria** itu memberikan dampak positif bagi upaya untuk mewujudkan Badan Bahasa Bermanfaat dan Bermantabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebahasaan dan kesastran. Dampak Budaya Kerja dibuktikan melalui:

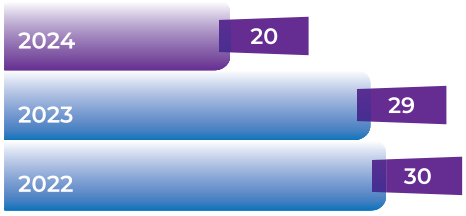
1) Akuntabilitas Kinerja semakin meningkat yang ditunjukkan melalui progres nilai SAKIP satker Badan Bahasa sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.
2) Tren Peningkatan Disiplin Pegawai sejak tahun 2022—2024.
3) Penurunan Temuan tahun 2020—2023.

Grafik 4 Akuntabilitas Badan Bahasa Tahun 2020--2024

Akuntabilas Kinerja Badan Bahasa Meningkat ditandai dengan peningkatan Nilai SAKIP dari tahun 2020--2024

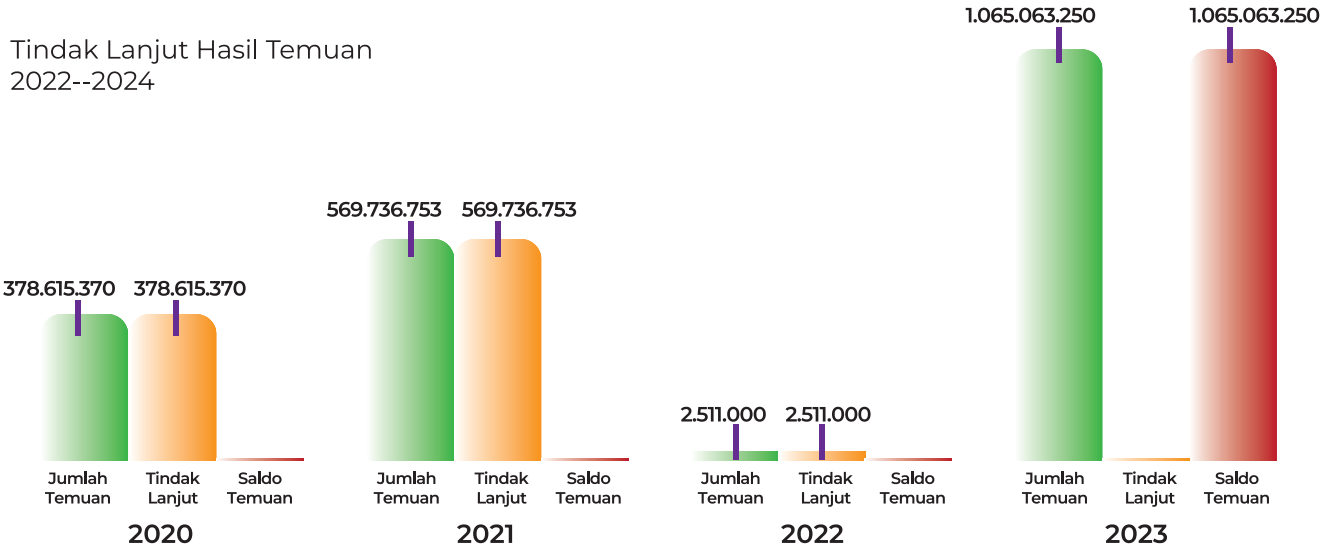


Jumlah yang Terkena Disiplin Pegawai 2022--2024



Grafik 5 Tindak Lanjut Hasil Temuan Badan Bahasa Tahun 2020--2024

Tindak Lanjut Hasil Temuan 2022--2024



D. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis permasalahan yang dihadapi oleh Badan Bahasa, isu strategis yang harus menjadi perhatian dalam peningkatan kinerja berdasa rkan program prioritas dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan

a) Berbagai kajian dan hasil survei tingkat nasional maupun internasional, menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Paling tidak ada tiga faktor utama penyebabnya. Pertama, kurangnya akses buku bacaan bermutu bagi masyarakat (baik berupa buku cetak maupun digital), terutama bagi peserta didik SLB, PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK. Kedua, kurang maksimalnya peran serta pendidik, komunitas literasi, masyarakat, dan orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi anak-anak Indonesia. Ketiga, sinergi, kolaborasi, dan kerja sama antar-pemangku kepentingan (kementerian/lembaga, komunitas literasi, lembaga swasta, pemerintah daerah, dan masyarakat) terkait dengan gerakan literasi nasional belum berjalan secara maksimal.

b) Penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat khususnya di lembaga sampai saat ini ternyata belum digunakan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya.

Hal itu disebabkan, antara lain, oleh kuatnya pengaruh bahasa asing di masyarakat dan belum maksimalnya kemampuan masyarakat dalam berbahasa Indonesia dengan baik. Penggunaan bahasa di ruang publik memperlihatkan pergeseran sikap yang cenderung lebih mengutamakan bahasa asing, seperti bahasa Inggris, daripada bahasa Indonesia. Kondisi itu memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia, masih belum diutamakan dan dimartabatkan.

c) Terbukanya batasan-batasan budaya dan lajunya perkembangan teknologi terus mendorong masuknya Istilah-istilah asing, baik Istilah bidang ilmu maupun Istilah populer, dan munculnya kosakata bentukan baru di dalam masyarakat. Hal itu perlu diimbangi oleh kecepatan pihak yang memiliki otoritas dalam pengelolaan bahasa untuk menyediakan padanan istilah kepada masyarakat dan mencatat kosakata baru dalam kamus acuan.

d) Berbagai kajian dan hasil survei tingkat nasional maupun internasional, menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Paling tidak ada tiga faktor utama penyebabnya. Pertama, kurangnya akses buku bacaan bermutu bagi masyarakat (baik berupa buku cetak maupun digital), terutama bagi peserta didik SLB, PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK. Kedua, kurang maksimalnya peran serta pendidik, komunitas literasi, masyarakat, dan orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi anak-anak Indonesia. Ketiga, sinergi, kolaborasi, dan kerja sama antar-pemangku kepentingan (kementerian/lembaga, komunitas literasi, lembaga swasta, pemerintah daerah, dan masyarakat) terkait dengan gerakan literasi nasional belum berjalan secara maksimal.

e) Pemanfaatan UKBI untuk berbagai kepentingan akademis dan profesional merupakan suatu hal yang memiliki urgensi tinggi. Pada tahun 2023 pemanfaatan UKBI untuk berbagai kepentingan makin nyata terlihat, di antaranya adalah pemanfaatan UKBI bagi kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai tes standar yang mendampingi mata pelajaran dan mata kuliah Bahasa Indonesia. UKBI juga dimanfaatkan dalam seleksi lomba kebahasaan, seleksi beasiswa, seleksi pegawai, seleksi jabatan fungsional di bidang kebahasaan, dan seleksi kalangan profesional. Selain itu, inovasi layanan juga merupakan isu yang muncul tentang UKBI. Pada tahun ini dikembangkan interkoneksi aplikasi UKBI dengan aplikasi Simponi dari Kementerian Keuangan yang akan memudahkan, baik bagi pelaksanaan layanan maupun bagi penutur bahasa Indonesia sebagai pengguna layanan. Selain itu, gagasan pengembangan UKBI bagi kaum difabel telah direspons dengan perencanaan desain pengembangan UKBI Difabel pada tahun 2024.

2) Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

a) Daya hidup (vitalitas) bahasa dan sastra daerah yang terancam punah dan kritis kian bertambah.

b) Menurunnya sikap positif generasi muda serta melemahnya peran keluarga, komunitas, dan pemangku kepentingan terhadap bahasa dan sastra daerah.

c) Masih rendahnya tingkat partisipasi dan kontribusi pemerintah daerah dalam hal pelindungan bahasa dan sastra daerah.

d) Revitalisasi bahasa daerah menjadi prioritas utama karena banyak bahasa daerah mengalami penurunan jumlah penutur.

3) Internasionalisasi Bahasa Indonesia

a) Amanat undang-undang untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional belum dapat dipenuhi dilihat dari pengakuan negara lain dan lembaga internasional.
b) Bahan diplomasi kebahasaan, termasuk produk penerjemahan, belum dioptimalkan dalam mendukung peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
c) Keberhasilan internasionalisasi bahasa Indonesia diukur dari peningkatan jumlah negara yang mengajarkan BIPA serta jumlah peserta didik internasional yang mempelajari bahasa Indonesia.

4) Tata Kelola

a) Peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
b) Penguatan pembangunan budaya zona integritas wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) serta peningkatan eselonisasi satuan kerja UPT di lingkungan Badan Bahasa.

E. Peran Strategis

Badan Bahasa memiliki peran strategis dalam **Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan** yang diwujudkan melalui beberapa peran sebagai berikut.

1) Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan

a) Untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu berperan aktif dalam hal: (1) menyediakan buku bacaan yang bermutu secara rutin (baik dalam bentuk cetak mupun digital) dan menyebarluaskannya kepada masyarakat; (2) mengoptimalkan peran serta pendidik, komunitas literasi, masyarakat, dan orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi anak-anak Indonesia; serta (3) mengoordinasikan dan memaksimalkan sinergi, kolaborasi, dan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam gerakan literasi nasional. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga perlu secara rutin menyediakan akses buku bacaan bermutu bagi anak-anak berkebutuhan khusus karena mereka sangat membutuhkan buku-buku tersebut. Selain itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga perlu secara rutin memberikan bantuan pemerintah kepada komunitas literasi supaya program, aktivitas, dan inovasi yang dilakukan oleh komunitas literasi guna meningkatkan literasi masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.
b) Program unggulan seperti Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi dan pengembangan platform digital literasi telah dilaksanakan untuk memperluas akses bacaan bagi masyarakat.
c) Badan Bahasa berperan penting dalam mengoordinasi lebih lanjut dengan pemangku kepentingan baik lembaga pemerintah, pendidikan maupun swasta untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kedudukan dan fungsinya.

d) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra bergerak cepat dalam penyediaan produk-produk kebahasaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan daya ungkap berupa kosakata dan makna baru melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta istilah baru melalui aplikasi Padanan Istilah (Pasti). Selain KBBI dan Pasti, produk-produk acuan kebahasaan lain juga disusun dan diintegrasikan dengan TIK untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mencari informasi kebahasaan. Produk-produk itu dimutakhirkan secara berkala untuk menghindari keterlambatan penyampaian informasi kepada masyarakat.

e) UKBI dengan gerakan Giat UKBI Adaptifnya telah meningkatkan sikap positif pelajar dan mahasiswa terhadap bahasa Indonesia. Peningkatan sikap positif ini secara tidak langsung akan menguatkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Penguatan sikap positif itu ditandai dengan kebanggaan untuk menggunakan bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia, dan berkarya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sertifikat UKBI juga merupakan sertifikat yang menjadi kebanggaan bagi pelajar dan mahasiswa serta kalangan profesional di bidang kebahasaan. Hasil UKBI penutur bahasa Indonesia tersebut akan termuat dalam buku Peta Kemahiran Berbahasa Indonesia. Di dalam buku tersebut akan dicantumkan berbagai profesi di setiap provinsi dan kabupaten di Indonesia. Selain itu, UKBI berperan atas penjenamaan bahasa Indonesia di tingkat nasional dan internasional melalui pengujian UKBI bagi anggota DPR dan penutur asing. Dengan demikian, para pemangku kepentingan dapat menggunakan UKBI sebagai alat untuk mengukur kemahiran dan memetakan kemahiran pelajar, mahasiswa, dan para profesional.

2) Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

a. Pendekatan baru dalam program revitalisasi bahasa daerah (RBD) melalui platform Merdeka Belajar ke-17 guna menghambat laju kepunahan bahasa mendapat respons yang baik dari berbagai pihak. Program RBD tersebut merupakan langkah strategis dalam rangka menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari melalui cara yang menyenangkan, baik ranah keluarga, sekolah, komunitas, maupun masyarakat.
b. Badan Bahasa memberikan fasilitasi dan penghargaan kepada komunitas sastra dan sastrawan melalui program Bantuan Pemerintah di Bidang Kebahasaan dan Kesastraan. Program tersebut merupakan penghargaan sekaligus bentuk kepedulian pemerintah terhadap keberadaan komunitas sastra dan sastrawan agar terus produktif dan berkarya dalam dunia kesastraan yang telah mencapai pengabdian lebih dari 40 tahun.
c. Badan Bahasa melakukan inovasi berbasis kecerdasan buatan dalam upaya pelindungan bahasa daerah, yang diinisiasi melalui pengembangan korpus berbahasa daerah, serta pengumpulan dan pengolahan data vitalitas bahasa daerah sehingga lebih efisien secara sumber daya.
d. Langkah strategis dalam pelindungan bahasa daerah meliputi dokumentasi bahasa, penerbitan kamus digital, dan pelibatan komunitas lokal dalam revitalisasi bahasa.

3) Internasionalisasi Bahasa Indonesia

a) Badan Bahasa melaksanakan amanat peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional melalui kolaborasi intensif dengan kementerian lain, lembaga internasional, dan lembaga serta tokoh penggiat bahasa Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri.
b) Badan Bahasa menyusun bahan diplomasi kebahasaan (produk penerjemahan dan bahan ajar BIPA) dan menyediakan layanan (penerjemahan, penjurubahasaan, dan pembelajaran BIPA) untuk mendukung upaya penginternasionalan bahasa Indonesia.
c) Kolaborasi dengan lembaga luar negeri, seperti universitas dan pusat studi bahasa, menjadi strategi utama dalam memperkenalkan bahasa Indonesia di dunia.

4) Tata Kelola

a) Peningkatan akuntabilitas kinerja tercermin dari perbaikan skor SAKIP Badan Bahasa yang terus meningkat setiap tahun.
b) Pemerolehan predikat ZI-WBK pada 5 satker di lingkungan Badan Bahasa.
c) Pemerolehan penghargaan satker dengan nilai kinerja anggaran (NKA) terbaik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Visi dan Misi Badan Bahasa ini merupakan rumusan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024. Selain itu, visi dan misi Badan Bahasa ini dirumuskan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Kemendikbudristek.

1. Visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024 adalah sebagai berikut.

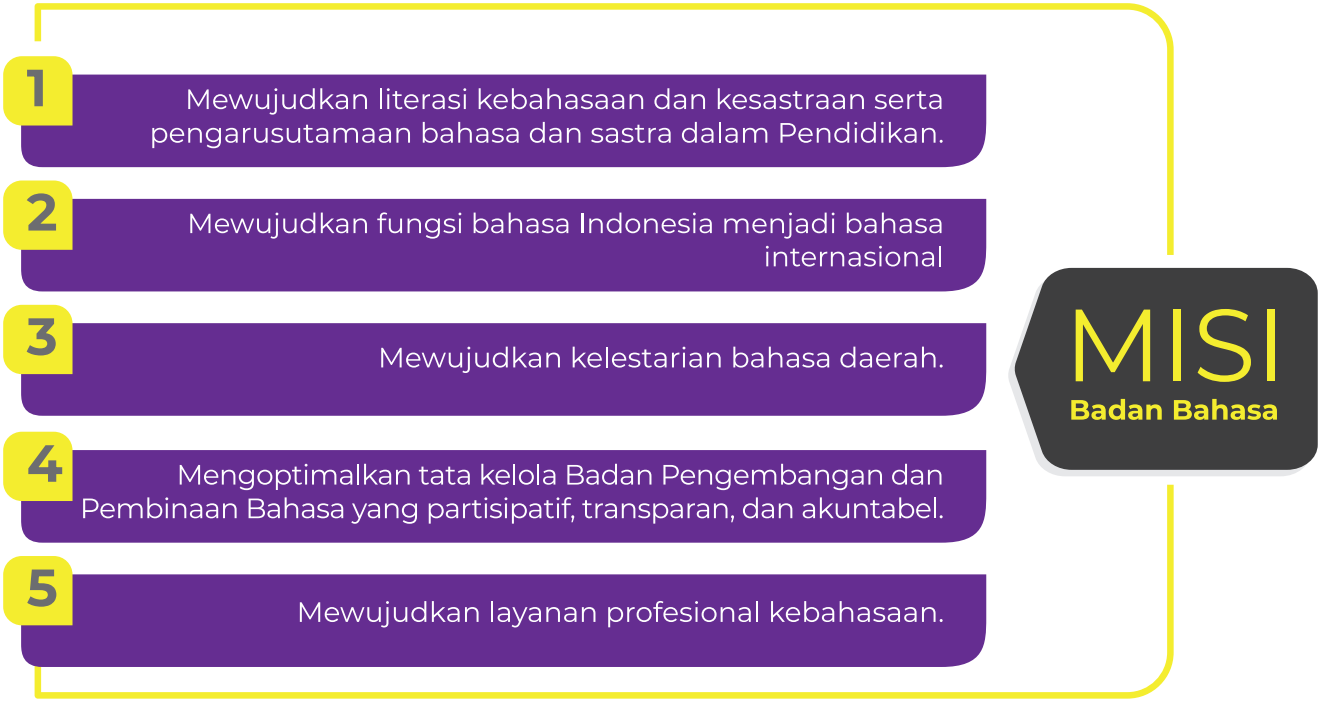
VISI
Badan Bahasa

Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan bahasa dan sastra.

Dari rumusan visi di atas, Indonesia maju terwujud ketika bangsa Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong-royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan melalui pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Visi ini dijabarkan dalam misi, tujuan strategis, serta program prioritas yang mendukung penguatan kebijakan kebahasaan nasional.

2. Misi

Untuk mencapai visi dan misi Kemendikbudristek dalam mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki misi sebagai berikut.



3. Tujuan Strategis

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berfokus pada tujuan Kemendikbudristek (sebelum berubah menjadi Kemendikdasmen), khususnya dalam **pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra, serta pengarusutamaan dalam pendidikan**.

Tabel 2 Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Terkait Pelestarian dan Pemajuan Budaya, Bahasa, dan Sastra Serta Pengarusutamaannya dalam Pendidikan

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Keberhasilan 2024
Pelestarian dan Pemajuan Budaya, Bahasa, dan Sastra Serta Pengarusutamaannya dalam Pendidikan	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	81
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,70
Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipasif, Transparan, dan Akuntabel	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	A
	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	87

Berdasarkan tujuan Kemendikbudristek tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tujuan dan indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 3 Tujuan dan Indikator Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Keberhasilan 2024
1	Peningkatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan serta Pengaru-sutamaan Bahasa dan Sastra dalam Pendidikan	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbaha-sanya	72
		Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya	91,99

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Keberhasilan 2024
2	Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	50
3	Peningkatan Kelestarian Bahasa Daerah	Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya	20,54
4	Penguatan Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Partisipasif, Transparan, dan Akuntabel	Pedikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A
		Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	4

4. Matriks Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024, Badan Pengembangan dan Pembinaan menetapkan sasaran, indikator dan target selama 5 tahun. Matriks kinerja ini disusun berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Tabel 4 Matriks Renstra 2020—2021 Sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020

Kode	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target	
			2020	2021
SP 1	**Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia**			
IKP 1.1	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji	Persen	42	44
IKP 1.2	Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Persen	26	35
SP 2	**Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah**			
IKP 2.1	Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	Indeks	58,2	61,4
SP 3	**Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah**			
IKP 3.1	Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah	Indeks	0,55	0,56
SP 4	**Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional**			
IKP 4.1	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	Negara	30	31
IKP 4.2	Jumlah Pemelajar BIPA	Orang	75.865	80.865
SP 5	**Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas**			
IKP 5.1	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB	Predikat	BB	BB
IKP 5.2	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZIWBK/WBBM	Satker	5	5
IKP 5.3	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	Nilai	91	92

Tabel 5 Matriks Renstra 2022—2024 Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022

Kode	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
SP	**Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan**				
IKP 3.1.1	Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	Persen	66	70	72
IKP 3.1.2	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Persen	59,93	75,96	91,99
SP	**Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional**				
IKP 3.1.3	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	Negara	48	49	50
SP	**Meningkatnya kelestarian bahasa daerah**				
IKP 3.1	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Indeks	18,73	19,67	20,54
SP	**Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi**				
IKP 5.3.11	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A	A	A
SP 5	**Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek**				
IKP 5.4.9	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	2	3	4

B. Program Prioritas 2020—2024

Badan Bahasa dalam mendukung program prioritas Kementerian melalui program Merdeka Belajar turut serta melaksanakan Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah dan Merdeka Belajar Episode 23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Program Prioritas Badan Bahasa dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terutama dalam mewujudkan *pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan*. Kebijakan diarahkan pada tiga fokus utama sebagai berikut

1. Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan

Literasi kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu upaya Badan Bahasa menciptakan ekosistem masyarakat Indonesia yang berbudaya literasi (terutama baca-tulis). Literasi secara operasional dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, baik teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup sumber daya manusia. Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan diarahkan pada dua ranah, yaitu dunia pendidikan dan masyarakat umum. Penguatan literasi dalam dunia pendidikan bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan nalar kritis siswa, sedangkan penguatan literasi masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang literat.

2. Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

Pelindungan bahasa dan sastra daerah merupakan upaya menjaga bahasa dan sastra daerah agar tidak punah. Hal itu dilandasi pada pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga—sejumlah besar pengetahuan—termasuk kearifan lokal, legenda, dan puisi—yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. Berkaitan dengan hal itu, berbagai aktivitas dilaksanakan dalam rangka melindungi bahasa daerah,

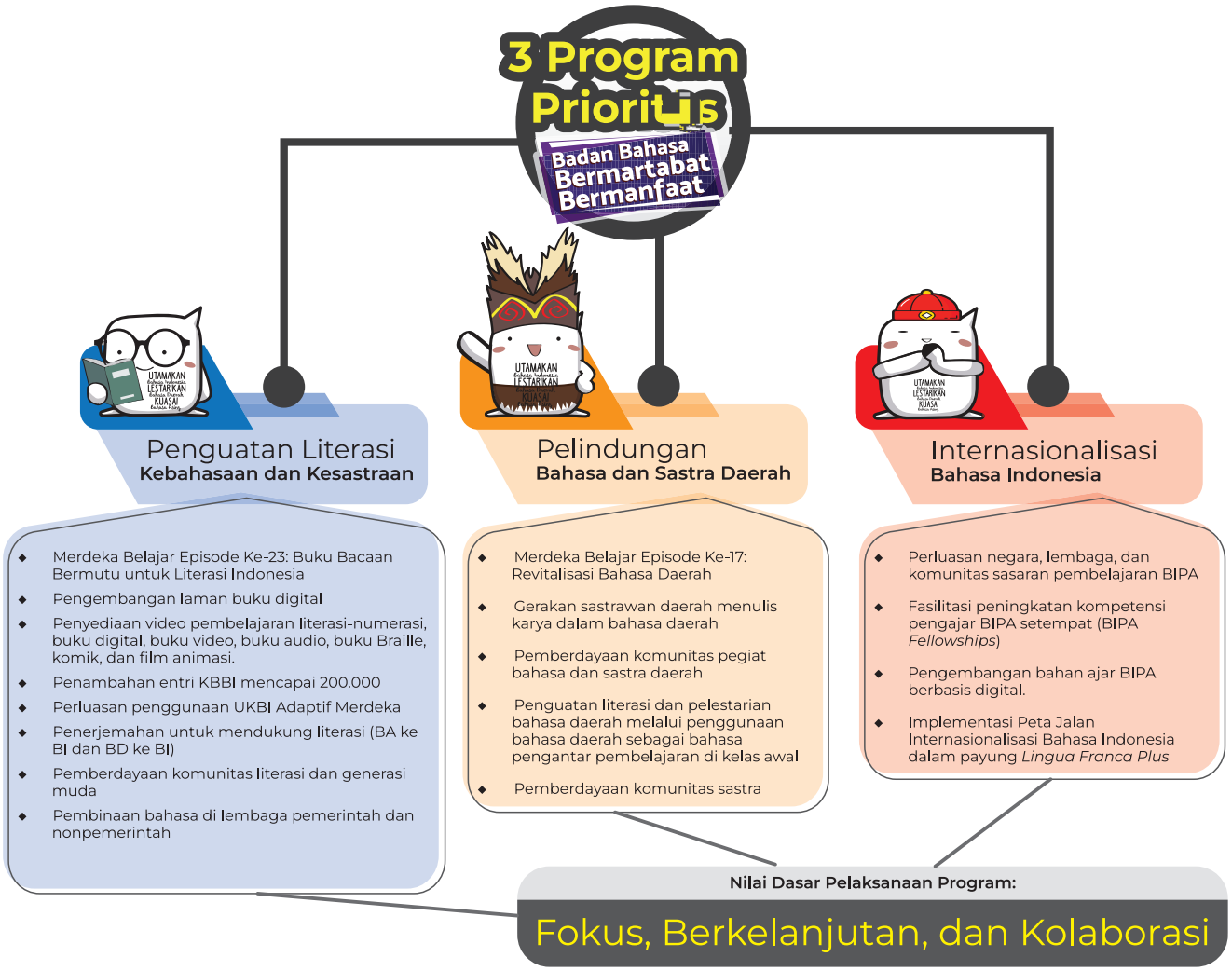
yaitu pemetaan bahasa, kajian daya hidup bahasa, konservasi, revitalisasi, dan registrasi.

3. Internasionalisasi Bahasa Indonesia

Internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, strategi *Lingua Franca Plus* ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan dan keamanan. Melalui pendekatan pendidikan, Badan Bahasa melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan. Program BIPA telah diimplementasikan di berbagai negara dan terus diperluas melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan internasional.

Ketiga program ini dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan strategis dalam jangka menengah dan panjang.

Gambar 5 Tiga Program Prioritas Badan Bahasa



Selaras dengan program prioritas Badan Bahasa, berikut ini Target dan Capaian Rincian Program Prioritas beserta Rincian *Output* (RO) Prioritas Nasional Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.

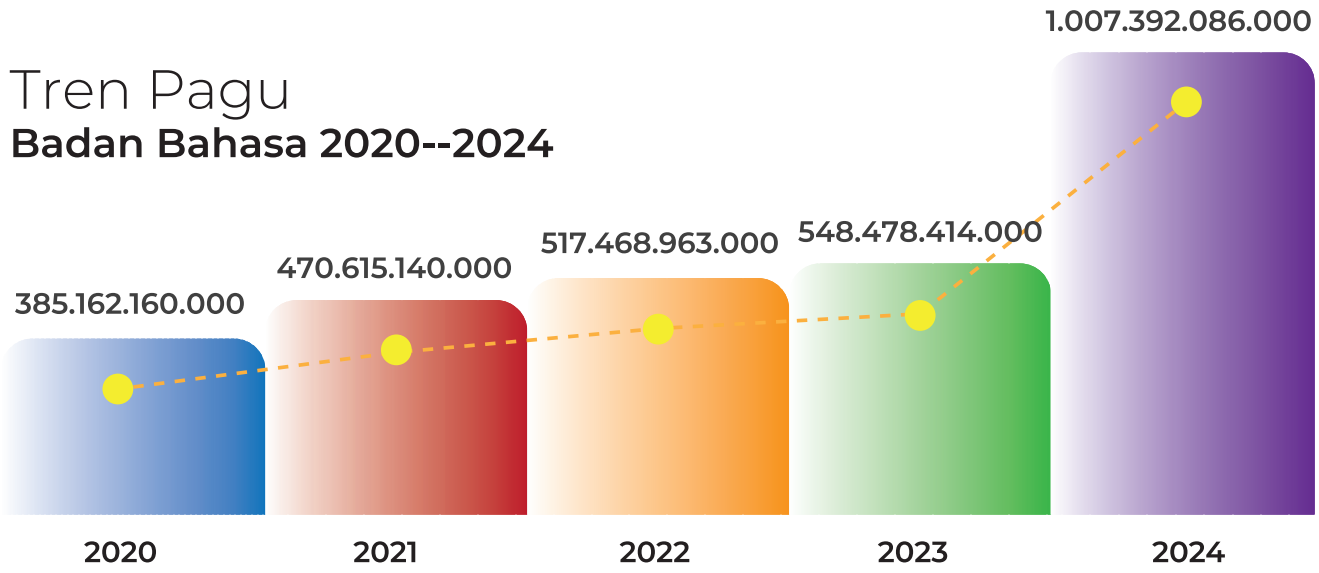
Tabel 6 Target dan Capaian Rincian Output (RO) Prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024

No	Program Prioritas Badan Bahasa	RO Prioritas	Target	Alokasi
1	Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	Produk Kodifikasi Bahasa	70	24.543.925.000
		Penutur Bahasa Terbina	9.154	24.433.020.000
		Penutur Bahasa Teruji	111.586	13.526.243.000
		Generasi Muda Terbina Program Literasi	19.133	22.880.973.000
2	Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah	Partisipan Pelindungan Bahasa dan Sastra	8.292	83.460.915.000
3	Internasionalisasi Bahasa Indonesia	Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	256	37.162.478.000

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai pengguna anggaran, Badan Bahasa menyusun rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut tren alokasi anggaran 2020—2024 Badan Bahasa.

Grafik 6 Tren Pagu Badan Bahasa Tahun 2020--2024



Setiap alokasi anggaran disusun sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam rangka meningkatkan dampak program. Alokasi anggaran Badan Bahasa pada tahun 2020 mengalami beberapa penyesuaian, terutama kebijakan nasional yang wajib dilaksanakan oleh seluruh satker di lingkungan Kemendikbudristek untuk penanganan pandemi Covid-19. Berikut ini beberapa penyesuaian anggaran yang dilakukan Badan Bahasa pada tahun 2020:

1. pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19;
2. pemotongan anggaran untuk pemenuhan pulsa bagi peserta didik; dan
3. pemotongan anggaran untuk bantuan subsidi upah (BSU) dan pengalihan belanja pegawai ke UPT di lingkungan Badan Bahasa.

Pada tahun 2021, anggaran Badan Bahasa meningkat dibandingkan dengan alokasi anggaran di tahun 2020. Peningkatan anggaran itu untuk mengakomodasi pencetakan dan pengiriman buku Literasi ke daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) ke 84 kabupaten/kota di 18 provinsi, di 14.107 PAUD, 14.632 SD, 4.792 SMP, 1.695 SMA, 944 SMK, 319 TBM, dan 40 Perpustakaan Daerah serta melakukan pemantauan pengiriman serta upaya memperoleh informasi kebermanfaatan program Gerakan Literasi Nasional (GLN). Sepanjang tahun 2021, terdapat beberapa penyesuaian alokasi anggaran Badan Bahasa lainnya sampai dengan akhir tahun, yaitu:

1. perubahan pimpinan satker;
2. penyesuaian anggaran karena penghematan anggaran berasal dari belanja pegawai tunjangan kinerja;
3. penyesuaian anggaran karena realokasi belanja modal untuk belanja modal UPT;
4. Penyesuaian anggaran karena *refocusing* dan realokasi belanja untuk penanganan Covid-19;
5. Penyesuaian anggaran karena realokasi belanja untuk pemenuhan belanja pegawai UPT; dan
6. Penyesuaian anggaran karena *refocusing* untuk TPG dan TKG non PNS dan beasiswa unggulan.

Pada tahun 2022, anggaran Badan Bahasa mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi anggaran di tahun 2021. Peningkatan itu dioptimalisasi untuk mengakomodasi pencetakan dan pengiriman buku Literasi ke daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Berikut ini alokasi anggaran Badan Bahasa pada 2022, yaitu:

1. mencetak dan mendistribusikan buku sebanyak 15.066.794 eksemplar (560 judul) buku bacaan ke 5.963 PAUD dan 14.595 SD di 81 kabupaten dengan nilai kompetensi literasi/numerasi merah;
2. Penyusunan Bahan Bacaan Literasi (75 buku) yang berupa buku cerita bergambar (*picture book*) untuk anak usia PAUD, dan SD kelas 1—3 (jenjang A, B-1, dan B-2);
3. Pendigitalan Bahan Bacaan, 10 buku video, 7 buku audio, 20 komik, dan 592 buku digital yang dapat diakses di laman budi.kemdikbud.go.id;
4. Penyusunan Video Animasi Pembelajaran Literasi Numerasi (10 video);
5. Peningkatan literasi generasi muda bagi 14.005 orang (650 di DKI Jakarta dan 13.355 di 33 provinsi lainnya);
6. Bimbingan Teknis Pemberdayaan Komunitas Literasi pada 797 komunitas (100 di DKI Jakarta dan 697 di 33 provinsi lainnya);
7. Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional (HBII), Indonesia terpilih sebagai *co-organiser* Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional di Prancis (Paris) secara tatap muka (luring) dan daring;
8. Penerjemahan Buku Cerita Anak yang Bermutu dan Menarik (1.251 buku terjemahan cerita anak berbasis *Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics* yang dapat diakses di laman Storyweaver, Let's Read Asia, dan Penjaring);

9. 25 produk layanan Badan Bahasa, di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang telah diakui dan dilindungi hak ciptanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada 2023, anggaran Badan Bahasa mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi anggaran di tahun 2022. Berikut ini alokasi anggaran Badan Bahasa pada tahun 2023, yaitu:

1. peningkatan literasi generasi muda sebanyak 14.829 orang;
2. melaksanakan Pemberdayaan Generasi Muda dengan melibatkan 14.829 orang dan menghasilkan 930 konten kebahasaan dan kesastraan;
3. melakukan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Komunitas Literasi bagi 923 komunitas di 34 Provinsi;
4. melakukan diseminasi bahan bacaan literasi di lima provinsi (Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku) dengan melibatkan 800 peserta yang terdiri atas 400 siswa dan 400 pendamping);
5. melaksanakan Pembinaan Komunitas Penggerak Literasi dengan melibatkan anggota DPR di tiga lokus (Bandung, Samarinda, Tegal) dan 300 komunitas penggerak literasi;
6. melakukan Sosialisasi Program Literasi Generasi Muda Terbina di 29 lokus melibatkan 2900 peserta;
7. menyusun Bahan penguatan literasi: 100 bahan (80 buku cerita hasil sayembara dan 20 komik);
8. melayani 252.110 peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
9. melaksanakan program Apresiasi Giat UKBI dengan total pendaftar berjumlah 170 sekolah;
10. melaksanakan Pelayanan Ahli Bahasa dan Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara 1.005 layanan dengan 229 pelayanan ahli bahasa;
11. Peluncuran KBBI VI;
12. melaksanakan Revitalisasi Bahasa Daerah (72 bahasa daerah/dialek) dengan melibatkan 4.113.059 siswa, 68.077 guru dan fasilitator, 3.524 Pegiat Bahasa-Sastra/Budayawan/Seniman, 13.128 komunitas dan pemangku lainnya di 25 provinsi;
13. Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional (HBII) 2023;
14. Alih wahana legenda Nusantara dalam bentuk film animasi sebanyak 33 judul;
15. Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Sastra bagi 45 Komunitas sastra penerima bantuan kategori fasilitasi, 5 komunitas sastra penerima bantuan kategori penghargaan, dan 29 perseorangan penerima bantuan kategori penghargaan;
16. Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO;
17. Apresiasi ke-BIPA-an dilaksanakan melalui Festival Handai Indonesia Peserta: 146 orang warga negara asing;

18. Terfasilitasinya pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri melalui kerja sama dengan berbagai lembaga, terutama perwakilan RI, perguruan tinggi, dan penyelenggara program BIPA mandiri, termasuk dua negara baru yang terfasilitasi program BIPA: Kroasia dan Peru;
19. melakukan terjemahan 3267 buku cerita anak (1320 dari bahasa asing dan 1947 dari bahasa daerah) berbasis *Science*, *Technology*, *Engineering*, *Arts*, dan *Mathematics*.

Pada Tahun 2024 terdapat peningkatan anggaran yang signifikan, yang semula pada tahun 2023 sebesar Rp548.478.414.000,00 menjadi sebesar Rp1.007.392.086.000,00 pada tahun 2024. Anggaran pada tahun 2024 dialokasikan untuk:

Tabel 7 Peningkatan Anggaran Tahun 2024

Kenaikan **Rp458.913.672.000,00**	Kenaikan Anggaran TA 2024
Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Rp85.828.852.000,00	1. Penambahan entri KBBI hingga 200.000 lema 2. Pengembangan Aplikasi Penyuntingan Ejaan Bahasa Indonesia (Sipebi) 3. Bantuan pemerintah untuk komunitas sastra 4. Penyusunan RUU Bahasa Daerah 5. Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 6. Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional 2024
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Rp 264.308.234.000,00	1. Catak dan kirim buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia 2. Penyediaan buku literasi, buku video, buku audio, buku braile, dan komik 3. Bantuan pemerintah untuk komunitas literasi 4. Pemberdayaan literasi generasi muda
Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra Rp104.381.307.000,00	1. Penerjemahan untuk mendukung literasi (bahasa asing ke bahasa Indonesia) 2. Peningkatan kebutuhan pengajar BIPA pusat dan lokal secara luring di 7 negara 3. Festival program BIPA bagi perwakilan asing di Indonesia 4. Festival Handai Indonesia
Sekretariat Badan Rp152.908.251.000,00	1. Alat pengolah data dan fasilitas perkantoran 30 UPT (Balai/Kantor Bahasa) 2. Pengaspalan jalan dan halaman (Kantor Badan Bahasa, Sentul)
30 Balai/Kantor Rp420.757.735.000,00	1. Penerjemahan untuk mendukung literasi (bahasa daerah ke bahasa Indonesia) 2. Penambahan sasaran Revitalisasi Bahasa Daerah di dua provinsi (DKI Jakarta dan Papua Pegunungan) 3. Pembangunan gedung kantor (KB Banten, KB Maluku Utara, KB Bangka Belitung, KB Bengkulu) 4. Renovasi gedung kantor (BB Yogyakrata, BB Kalimantan Tengah, BB Jawa Barat, BB Kalimantan Barat, BB Sulawesi Utara, KB Nusa Tenggara Barat, KN Kalimantan Timur) 5. Penyelesian konstruksi dalam pengerjaan (BB Sumatera Barat) 6. Pembangunan KB Banten, Babel, Maluku Utara, Bengkulu, dan Pembelian Tanah (KB Nusa Tenggara Timur)

Realisasi anggaran tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan pada program prioritas tertentu, seperti pelindungan bahasa daerah.

Berikut ini rencana kerja dan anggaran Badan Bahasa pada tahun 2024.

Tabel 8 Rencana Kerja dan Anggaran Badan Bahasa Tahun 2024

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program (IKP)		Target	Kegiatan	Alokasi 2024
SP 1	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	IKP 1.1	Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	83	(2022) Pembinaan Bahasa dan Sastra	315.774.228.000
		IKP 1.2	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	91,99		
SP 2	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	IKP 2.1	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	55	[6702] Penguatan Diplomasi Kebahasaan	104.381.307.000
SP 3	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	IKP 3.1	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	31,6	(2021} Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	157.936.927.000
SP 4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	IKP 4.1	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A	[2020] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	429.299.624.000
SP 5	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	IKP 5.1	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	12		

D. Perjanjian Kinerja

Dokumen ini merupakan komitmen Badan Bahasa dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMN 2020—2024 dan Renstra Badan Bahasa. Perjanjian kinerja menjadi acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan serta evaluasi capaian program di setiap unit kerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024, Badan Bahasa menetapkan tujuan, indikator, dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel 9 Matriks Renstra 2020—2021 Sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020

Kode	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target Renstra		Target PK		Persentase	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
SP 1	**Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia**							
IKP 1.1	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji	Persen	42	44	42	44	100%	100%
IKP 1.2	Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Persen	26	35	26	35	100%	100%

Kode	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target Renstra		Target PK		Persentase	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
SP 2	**Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah**							
IKP 2.1	Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	Indeks	58,2	61,4	58,2	61,4	100%	100%
SP 3	**Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah**							
IKP 3.1	Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah	Indeks	0,55	0,56	0,55	0,56	100%	100%
SP 4	**Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional**							
IKP 4.1	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	Negara	30	31	30	31	100%	100%
IKP 4.2	Jumlah Pemelajar BIPA	Orang	75.865	80.865	75.865	80.865	100%	100%
SP 5	**Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas**							
IKP 5.1	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	100%	100%
IKP 5.2	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZIWBK/WBBM	Satker	2	2	2	2	100%	100%

Tabel 10 Matriks Renstra 2022—2024 Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022

Kode	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target Renstra			Target PK			Persentase		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
SP 1	**Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan**										
IKP 1.1	Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	Persen	66	70	72	66	70	83	100%	100%	115,28%
IKP 1.2	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Persen	59,93	75,96	91,99	59,93	75,96	91,99	100%	100%	100%
SP 2	**Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional**										
IKP 2.1	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	Negara	48	49	50	48	49	55	100%	100%	110%
SP 3	**Meningkatnya kelestarian bahasa daerah**										
IKP 3.1	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Indeks	18,73	19,67	20,54	18,73	19,67	31,6	100%	100%	153,85%
SP 4	**Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi**										
IKP 4.1	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A	A	A	A	A	AA	100%	100%	105,6%
SP 5	**Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek**										
IKP 5.1	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	2	3	4	2	3	12	100%	100%	300%

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Badan Bahasa menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2024. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis. Berikut ini ringkasan Perjanjian Kinerja Badan Bahasa tahun 2024.

Tabel 11 Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target PK
1	Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya	persen	83
		Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya	persen	91.99
2	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	negara	55
3	Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah	Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya	indeks	31.6
4	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	predikat	AA
5	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	satker	12

Tabel 12 Pagu Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp448.358.850.000,00
2	2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Rp158.642.121.000,00
3	2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	Rp295.296.117.000,00
4	6702	Penguatan Diplomasi Kebahasaan	Rp105.094.998.000,00
		TOTAL	**Rp1.007.392.086.000,00**

Pagu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2024 dengan pagu sebesar **Rp1.007.392.086,00 (satu miliar tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah)**.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) memasuki tahun kelima periode 2020—2024. Target yang telah ditentukan pada tahun 2024 akan disampaikan capaiannya pada bab ini sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024. Pada bab ini juga akan diuraikan langkah, strategi, dan hambatan dalam upaya merealisasikan target. Badan Bahasa berupaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam PK sebagai bentuk pertanggungjawaban, baik terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, maupun penggunaan anggaran. Pertanggungjawaban itu akan disampaikan secara konsisten setiap tahun kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, laporan kinerja ini dapat dijadikan sebagai (1) bahan evaluasi kinerja lembaga; dan (2) bahan pengambilan kebijakan terkait dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Badan Bahasa. Berikut ini capaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Bahasa.

A. Akuntabilitas Kinerja

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan lima Sasaran Program (SP) dengan enam Indikator Kinerja Program (IKP). Seluruh IKP yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tercapai lebih dari 100%. Berikut ini deskripsi dan analisis target dan capaian kinerja Badan Bahasa pada tahun 2024.

Tabel 13 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya	persen	83	83,12	100,14%
		Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya	persen	91.99	93,26	101,38%
2	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	negara	55	56	101,82%
3	Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah	Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya	indeks	31.6	38,96	123,29%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
4	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	predikat	AA	AA	101,27%
5	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	satker	12	18	150,00%

Sasaran Program 1:
Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan

Dampak pelaksanaan Sasaran Program Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan:

1. Literasi kebahasaan dan kesastraan yang baik, terutama literasi baca tulis, dapat menumbuhkembangkan lima literasi dasar berikutnya (numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan);
2. Literasi kebahasaan dan kesastraan yang baik dapat membantu anak meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka melalui analisis dan interpretasi teks bacaan (buku bacaan penunjang literasi). Anak-anak diajak untuk memikirkan dan memahami makna dari teks sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Selain itu, kecakapan literasi ini juga telah membantu anak meningkatkan kemampuan berkreasi mereka melalui ekspresi diri dan pemikiran yang kreatif, serta memahami bagaimana mengejar minat dan berkreasi melalui eksplorasi dan eksperimentasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan berkarya mereka;
3. Ketersediaan pilihan buku yang sesuai dengan jenjang pembacanya, terutama usia dini dapat membantu meningkatkan minat baca pada anak;
4. Buku yang bermutu dan berkualitas mendorong peningkatan aktivitas membaca dan menulis, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat meningkat;
5. Literasi kebahasaan dan kesastraan melalui pengutamaan bahasa negara dan pembinaan lembaga dapat meningkatkan citra profesionalisme.

Dalam hal ini, dengan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, lembaga-lembaga akan terlihat lebih profesional dan memiliki citra yang positif di mata masyarakat.

Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi aspek pengetahuan, teknologi, dan budaya harus terus mengembangan budaya literasi. Pengembangan budaya literasi dilakukan, baik melalui pendidikan yang terintegrasi mulai dari pendidikan nonformal dalam ranah keluarga, pendidikan formal di sekolah, maupun secara sosial di masyarakat. Pengembangan ini sejalan dengan prasyarat kecakapan hidup abad ke-21 yang disepakati oleh *World Economic Forum* pada tahun 2015. Selain itu, literasi juga menjadi bagian penting dalam upaya penumbuhan budi pekerti. Seperti yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penanaman Budi Pekerti salah satunya melalui aktivitas membaca.

Untuk mendukung hal tersebut, minat baca pada anak perlu dipupuk sejak usia dini yang dimulai dari lingkungan keluarga. Ketersediaan pilihan buku yang sesuai dengan jenjang pembacanya, terutama usia dini akan membantu meningkatkan minat baca pada anak. Selain itu, buku yang bermutu dan berkualitas juga akan mendorong peningkatan aktivitas membaca dan menulis, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Dengan kemampuan membaca yang baik, lima literasi dasar berikutnya (numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan

kewargaan) dapat ditumbuhkembangkan. Oleh karena itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa setiap tahun mengambil ikhitiar penyediaan bahan bacaan literasi yang bermutu dan dapat dijangkau ketersediaannya oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, bahan bacaan ini diharapkan mampu mendorong praktik baik literasi baca-tulis di sekolah, di komunitas literasi, serta kegiatan lain yang berkaitan erat dengan penumbuhan budaya literasi.

Selanjutnya, masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat pendukungnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah terjadi berbagai perubahan, baik sebagai akibat tatanan kehidupan dunia yang baru, seperti pemberlakuan pasar bebas dalam rangka globalisasi maupun akibat perkembangan teknologi informasi yang amat pesat ataupun pemberlakuan otonomi daerah. Teknologi informasi mampu menerobos batas ruang dan waktu sehingga keterbukaan tidak dapat dihindari. Selain itu, konflik sosial yang berkaitan dengan kasus kebahasaan pun terjadi di negara dengan keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa ini. Kondisi-kondisi itu telah memengaruhi perilaku masyarakat Indonesia dalam bertindak dan berbahasa. Oleh karena itu, masalah bahasa dan sastra perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana supaya tujuan akhir pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kebahasaan di Indonesia dapat dicapai. Tujuan akhir pembinaan itu adalah meningkatkan literasi kebahasaan dan kesastraan di Indonesia.

Literasi yang baik didukung dengan kemampuan pengguna bahasa dalam menggunakan bahasa. Mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, baik ranah kedinasan, pendidikan, jurnalistik, ekonomi, maupun perdagangan belum membanggakan. Di dalam berbagai ranah tersebut, campur aduk penggunaan bahasa masih terjadi. Berbagai kaidah yang telah berhasil dibakukan dalam pengembangan bahasa juga belum sepenuhnya diindahkan oleh para pengguna bahasa. Di satu sisi, kaidah yang telah lama ada belum terinternalisasi. Di sisi lain, kaidah baru perlu diperkenalkan untuk dapat diinternalisasi oleh pengguna bahasa.

Sikap apresiatif masyarakat terhadap sastra Indonesia sekarang ini pun menurun. Selain itu, minat baca masyarakat terhadap karya sastra Indonesia cenderung rendah. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pengenalan apresiasi terhadap karya sastra di lembaga pendidikan. Selain itu, kurangnya bacaan bermutu yang membantu penutur bahasa meningkatkan kualitas berbahasanya pun terbatas.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa upaya pembinaan bahasa dan sastra Indonesia pada berbagai lapisan masyarakat masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Oleh karena itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa masih perlu bekerja keras untuk membangkitkan kembali kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Upaya itu ditempuh melalui peningkatan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah serta peningkatan sikap apresiatif masyarakat terhadap sastra Indonesia. Upaya itu juga dimaksudkan agar kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra Indonesia makin mantap di tengah terpaan gelombang globalisasi saat ini.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah instansi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertugas melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan

fungsi bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam hal pembinaan bahasa dan sastra Indonesia adalah meningkatkan kemahiran berbahasa penutur bahasa. Kemahiran berbahasa itu akan meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia sekaligus meningkatkan sikap apresiatif masyarakat terhadap sastra Indonesia. Kegiatan pemasyarakatan tersebut perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan kegiatan ini juga diarahkan pada upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

Peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan tidak hanya berfokus pada penutur bahasa secara orang perseorang, tetapi juga sebagai masyarakat atau komunitas. Selain itu, lembaga yang dalam komunikasi kerja dan kemasyarakatannya menggunakan bahasa Indonesia juga merupakan fokus peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan. Literasi yang meningkat pada penutur bahasa dan lembaga dapat dicapai melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penutur bahasa dan lembaga dalam menggunakan bahasa dan memanfaatkan sastra. Indikator ketercapaian peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan ini adalah persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya dan persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas berbahasanya.

Indikator Kinerja Program 1.1: Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya

Peningkatan kualitas berbahasa pada penutur bahasa dilakukan dengan menerapkan tiga prinsip, yaitu berfokus dan terukur, berkesinambungan, dan bermitra. Kegiatan berfokus bermakna bahwa sasaran kegiatan ditentukan berdasarkan pendataan dan analisis kebutuhan pembinaan bahasa penutur tertentu. Terukur bermakna bahwa kegiatan dapat diukur tingkat keberhasilannya sesuai dengan target. Adapun target tersebut secara umum sudah termuat di dalam dokumen rencana kerja, baik target kuantitas maupun kualitas. Kegiatan berkesinambungan bermakna bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan langkah-langkah yang terukur dan berkelanjutan. Kegiatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan ini dapat dilakukan dalam multitahun atau pada sepanjang tahun dengan tetap mendampingi atau memfasilitasi lembaga atau penutur bahasa. Kegiatan bermitra bermakna bahwa kegiatan dilakukan dengan dasar kerja sama atau kesepakatan dengan penutur sasaran sehingga terjalin ikatan yang saling memberi manfaat kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai pembina bahasa dan kepada lembaga/penutur yang dibina. Kemitraan ini dapat dilandasi dengan nota kesepakatan, perjanjian kerja sama, atau permintaan dari penutur yang akan dibina.

Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya ditentukan dengan mengakumulasi jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai kaidah kebahasaan, jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai kemahiran membaca, jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai kemahiran menulis yang masing-masing dibandingkan dengan jumlah peserta pembinaan dibagi

tiga dikali seratus persen. Namun, jika dalam setiap kegiatan pembinaan tidak semua peserta mengikuti tes awal sekaligus tes akhir, nilai diperoleh dari peserta yang mempunyai nilai awal dan akhir saja. Dengan demikian, penghitungannya adalah jumlah rerata kenaikan nilai kaidah kebahasaan ditambah rerata kenaikan nilai kemahiran membaca, dan rerata kenaikan nilai menulis, lalu dibagi 3.

$$PPT = \left(\frac{PK}{PP} + \frac{PMb}{PP} + \frac{PMt}{PP} \right) \times \frac{100}{3}$$

Keterangan:

PPT = Persentase penutur terbina yang meningkat kualitas berbahasanya
PK = Jumlah peserta yang nilai kaidahnya naik
PMb = Jumlah peserta yang nilai membacanya naik
PMt = Jumlah peserta yang nilai menulisnya naik
PP = Jumlah peserta pembinaan
Tipe = Nonkumulatif

Persentase Penutur Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya Tahun 2024

(84,17+ 79,75 + 85,45) : 3 = 83,12

Jika melihat dasar penentuan nilai ini, pada dasarnya pembinaan penutur bahasa yang dilakukan oleh Badan Bahasa sudah mampu meningkatkan kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa tersebut. Adapun nilai awal dan nilai akhir yang dibandingkan dalam penghitungan tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara penilaian. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Tes awal dan tes akhir

   Tes ini disiapkan oleh narasumber yang menyampaikan materi pembinaan bahasa/sastra. Materi tes menggambarkan materi yang disampaikan dalam pembinaan yang dilakukan oleh narasumber. Materi tes awal sama dengan materi tes akhir. Jumlah soal berdasarkan kecukupan untuk mengetahui kemampuan peserta secara umum.

b. Penilaian awal dan penilaian akhir

   Penilaian awal dan penilaian akhir diberikan dalam kegiatan yang bersifat praktik berkarya yang disertai dengan penjurian/penilaian karya, seperti festival musikalisasi puisi atau bengkel sastra. Dalam penilaian awal, juri/penilai memberi nilai kepada seluruh peserta pembinaan berdasarkan pengamatan juri/penilai, penugasan awal yang diberikan (misalnya dengan membuat uraian mengenai interpretasi/penafsiran terhadap sebuah puisi), atau penampilan peserta sebelum dilakukan pembinaan. Penilaian akhir didasarkan pada karya atau penampilan peserta sesudah pembinaan dilakukan sesuai dengan format penilaian yang ditentukan dalam juknis kegiatan dimaksud. Misalnya, dalam kegiatan festival musikalisasi puisi penilaian akhir berupa pemberian nilai oleh juri/penilai untuk penafsiran puisi, komposisi dan aransemen, keselarasan/harmonisasi, dan penampilan.

c. Uji diri

   Uji diri merupakan nilai yang diberikan oleh penutur yang dibina terhadap kondisi/pengetahuannya mengenai materi pembinaan yang diberikan pada sebelum mengikuti pembinaan dan setelah mengikuti pembinaan. Materi penilaian diri ini merupakan materi yang diberikan pada saat pembinaan.

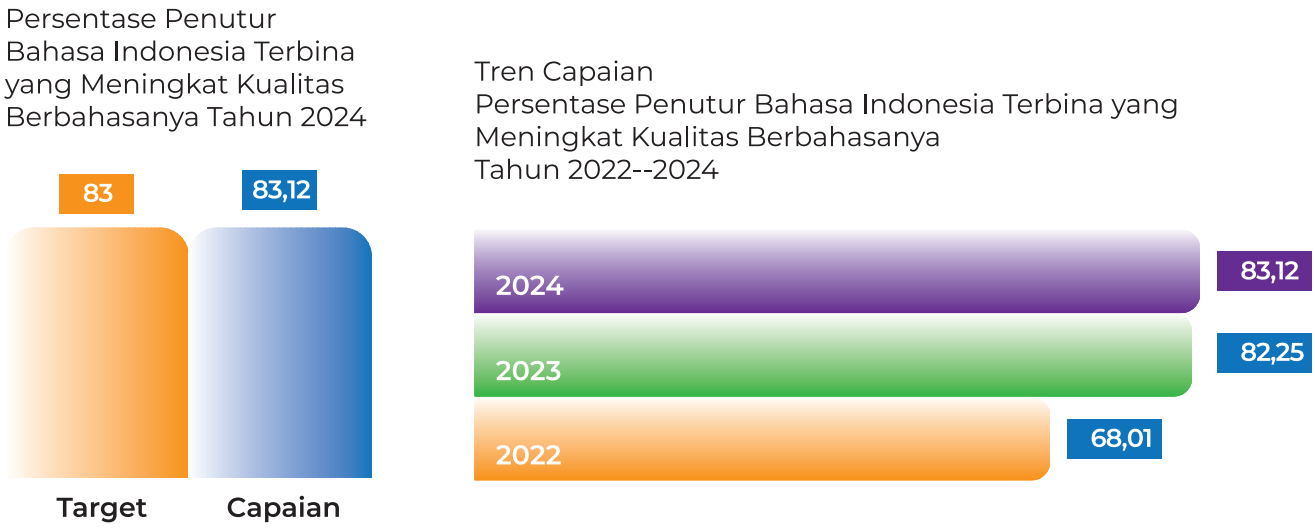
Pada tahun 2022, target yang ditetapkan adalah 66, capaiannya adalah 68,61, dan persentase capaiannya sebesar 103,04%. Pada tahun 2023, target yang ditetapkan adalah 70, capaiannya adalah 82,25, dan persentase capaiannya sebesar 117,50%. Selanjutnya, pada tahun 2024 target yang ditetapkan dalam renstra adalah 83, capaiannya adalah 83,12 dan persentase capaiannya sebesar 100,14%.

Berdasarkan data tersebut capaian IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya pada tahun 2024 sudah tercapai dengan baik. Peningkatan kualitas berbahasa penutur bahasa Indonesia terlihat dari kenaikan persentase setiap tahun. Detail penghitungan seluruh satker Badan Bahasa terkait dengan IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya ada dalam lampiran lakin ini.

Tabel 14 Target dan Realisasi IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Angka Dasar	Capaian		Tahun 2024			Target Renstra 2024
					2022	2023	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	1.1	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya	62	68,01	82,25	83	83,12	100,14%	72

Grafik 7 Capaian IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya



Berikut ini adalah kegiatan yang mendukung IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya.

a. Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia

Badan Bahasa bertugas menangani masalah pembinaan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia, seperti pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia, peningkatan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia, dan penyebarluasan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ke seluruh lapisan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas itu, Badan Bahasa menyediakan berbagai bahan kebahasaan sebagai rujukan dalam penggunaan bahasa

Indonesia yang baik dan benar. Bahan-bahan pembinaan bahasa tersebut harus disebarluaskan agar pengguna bahasa Indonesia mengetahui rujukan dan pedoman kebahasaan dengan baik untuk kemudian dapat menerapkannya.

Pembinaan dengan pemberian materi kebahasaan atau kesastraan dilakukan melalui peningkatan kemahiran berbahasa atau penyuluhan bahasa. Tujuan akhir pembinaan terhadap penutur bahasa tersebut adalah meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa serta meningkatkan kemampuan bernalar dan berpikir kreatif penutur bahasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan kegiatan pembinaan secara terus-menerus dan berkesinambungan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, tercipta masyarakat Indonesia yang makin kuat identitas dan kebanggaannya terhadap Indonesia yang dimulai dari kesadaran untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.



Foto 3 kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional di Kabupaten Sleman.

Kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia dilakukan oleh seluruh balai/kantor bahasa di Indonesia sebanyak 94 kegiatan dengan jumlah peserta 5.587 orang. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh balai/kantor bahasa.



Foto 4 kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional di Kabupaten Bantul.

Kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Penutur Terbina dilakukan di seluruh Indonesia melalui balai/kantor bahasa dan diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan, di antaranya dosen, guru, pemengaruh, mahasiswa, ASN, dan masyarakat umum. Dalam kegiatan tersebut para peserta diberi materi ejaan yang meliputi penjelasan umum tentang ejaan dan sejarahnya, pengenalan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Selain itu, peserta juga menerima materi bentuk dan pilihan kata, tata kalimat, tata istilah, paragraf, kemahiran membaca, mendengarkan, dan menulis. Pemberian materi tersebut dapat disesuaikan dengan tujuan kegiatan dan sasaran peserta kegiatan.

Kegiatan itu dapat meningkatkan kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa. Peningkatan kualitas berbahasa para penutur terbina dapat tercapai dengan baik karena adanya proses pembinaan dan pendampingan yang secara terus-menerus dan berkelanjutan terhadap penutur bahasa yang dibina. Pendampingan ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 sampai dengan 3 bulan. Dalam pendampingan tersebut, peserta dibimbing dan diberi pengayaan tentang materi kebahasaan terkait dengan tiga aspek, yaitu kaidah bahasa, membaca, dan menulis.

Berikut dokumentasi kegiatan pendampingan yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas berbahasa penutur terbina.



Foto 5 kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional di Kabupaten Bantul.

Pendampingan dan fasilitasi serta penguatan diberikan kepada peserta setelah menerima materi saat kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa. Dalam masa pendampingan ini, para penutur bahasa yang dibina diberi ruang diskusi untuk mendiskusikan masalah-masalah kebahasaan yang dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Para peserta juga diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas saat pendampingan. Para penutur bahasa terbina diberi kesempatan untuk membuat inovasi dan kreasi terkait dengan penyebarluasan materi yang diberikan dalam bentuk konten melalui media sosial. Konten tersebut dibuat dalam bentuk gambar dan atau video yang diunggah di media sosial (Instagram, Tiktok, dan Youtobe) peserta. Berikut contoh karya peserta yang sudah diunggah melalui media sosial mereka.

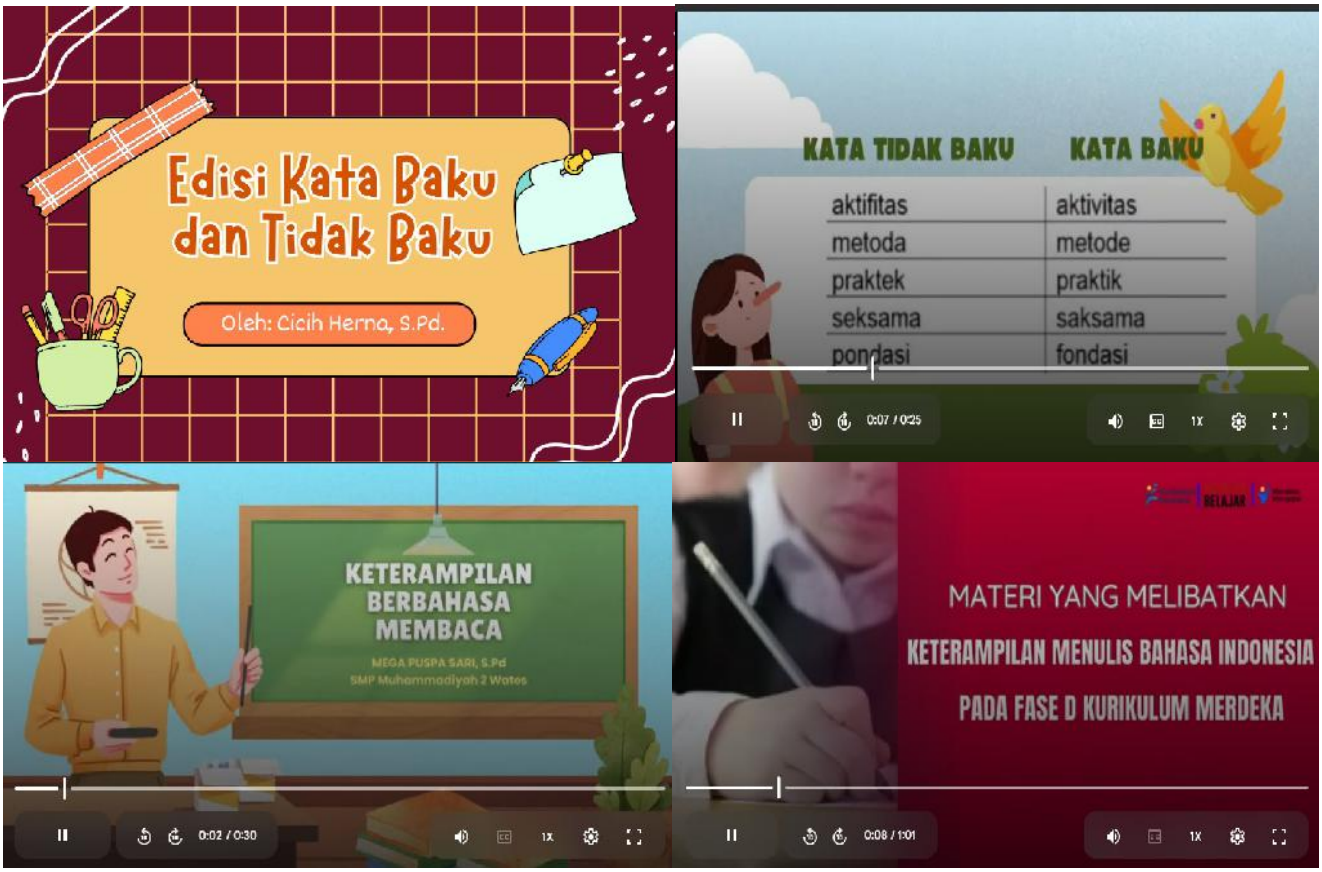
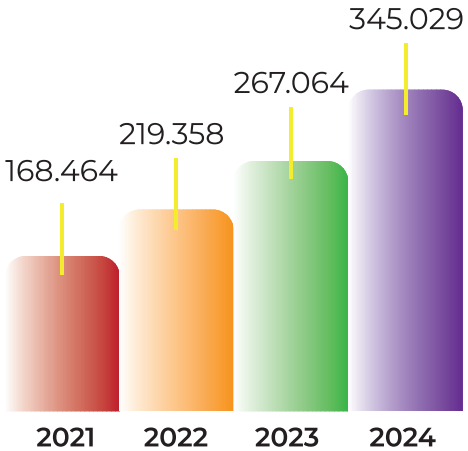


Foto 6 Praktik baik hasil pendampingan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional di Kabupaten Kulon Progo.

b. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)

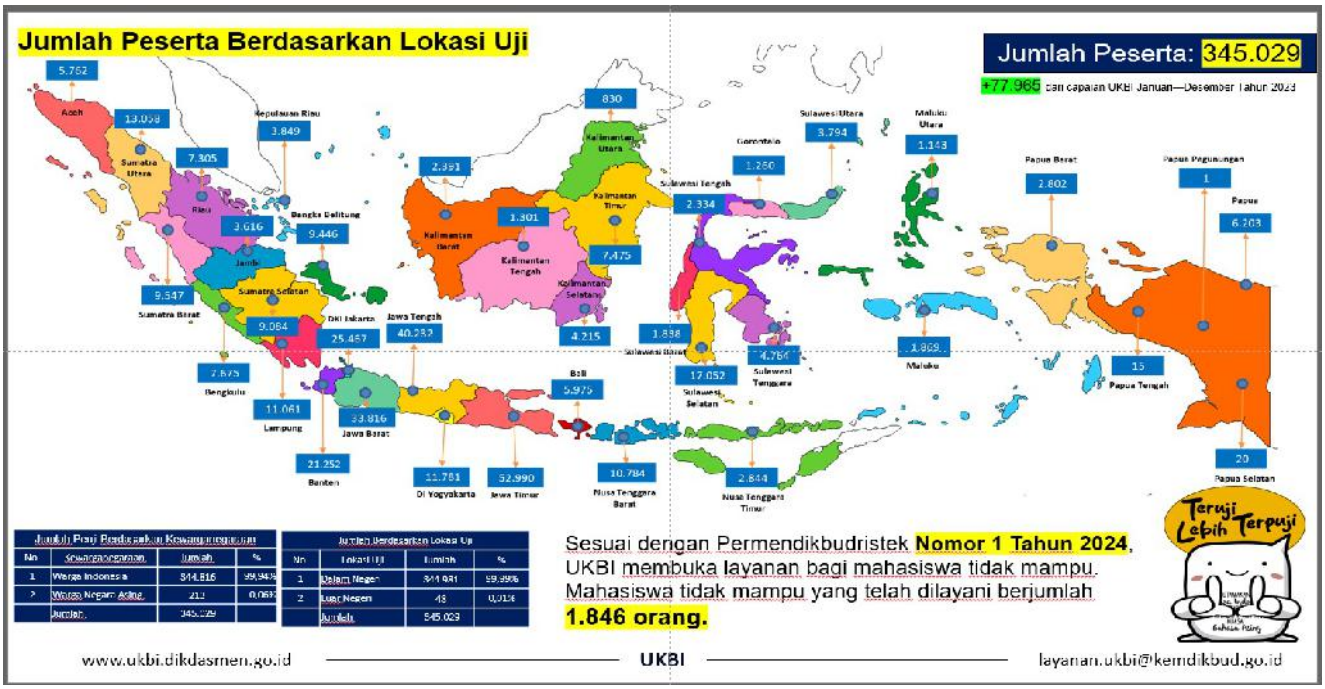
Pada tahun 2024, masyarakat yang menggunakan layanan UKBI berjumlah 345.029 orang. Jumlah tersebut merupakan data keseluruhan peserta uji, baik peserta uji yang melaksanakan uji dari setiap provinsi yang ada di Indonesia maupun peserta uji yang melaksanakan uji di luar negeri. Terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari capaian tahun 2023 sebesar 29% atau bertambah sejumlah 77.965 peserta uji. Sejak diluncurkan pada tahun 2021, UKBI Adaptif telah diujikan kepada 999.915 orang. Tingginya capaian tersebut diperoleh dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui satuan kerja yang ada di pusat maupun yang ada di daerah.

Grafik 8 Tren Jumlah Peserta UKBI Tahun 2021—2024



Jika dilihat dari sebaran jumlah peserta uji, lima provinsi dengan jumlah peserta uji terbanyak adalah Jawa Timur dengan jumlah 52.990 orang, Jawa Tengah dengan jumlah 40.232 orang, Jawa Barat dengan jumlah 33.816 orang, DKI Jakarta dengan jumlah 25.467 orang, dan Banten dengan jumlah 21.252 orang. Sebagian besar peserta UKBI Adaptif berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Selain itu, dari jumlah tersebut dapat diketahui sejumlah 213 di antaranya adalah warga negara asing yang berasal dari 52 negara.

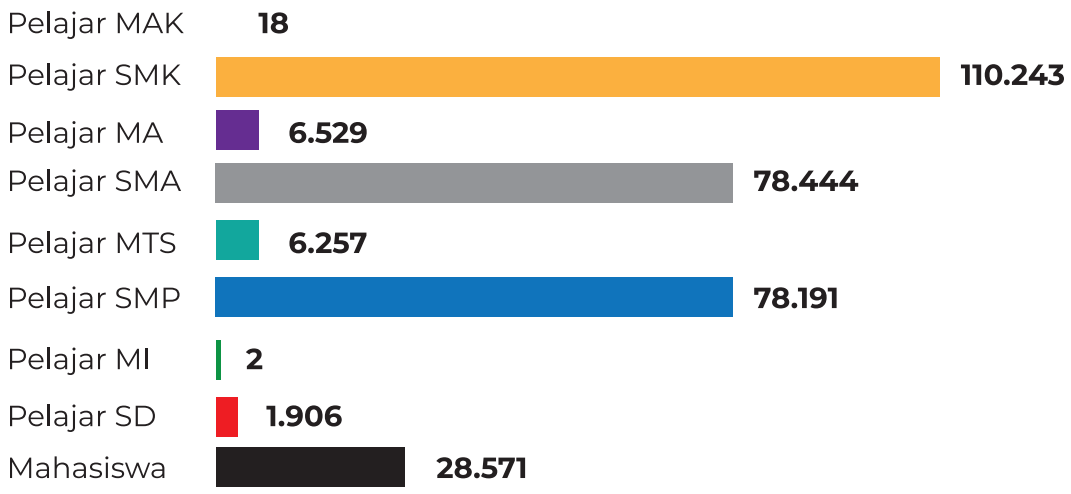
Gambar 6 Sebaran Peserta UKBI Tahun 2024



UKBI Adaptif merupakan salah satu layanan PNBP di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Total PNBP yang diperoleh dari layanan UKBI Adaptif sejak tahun 2021 berjumlah Rp16.450.420.000.

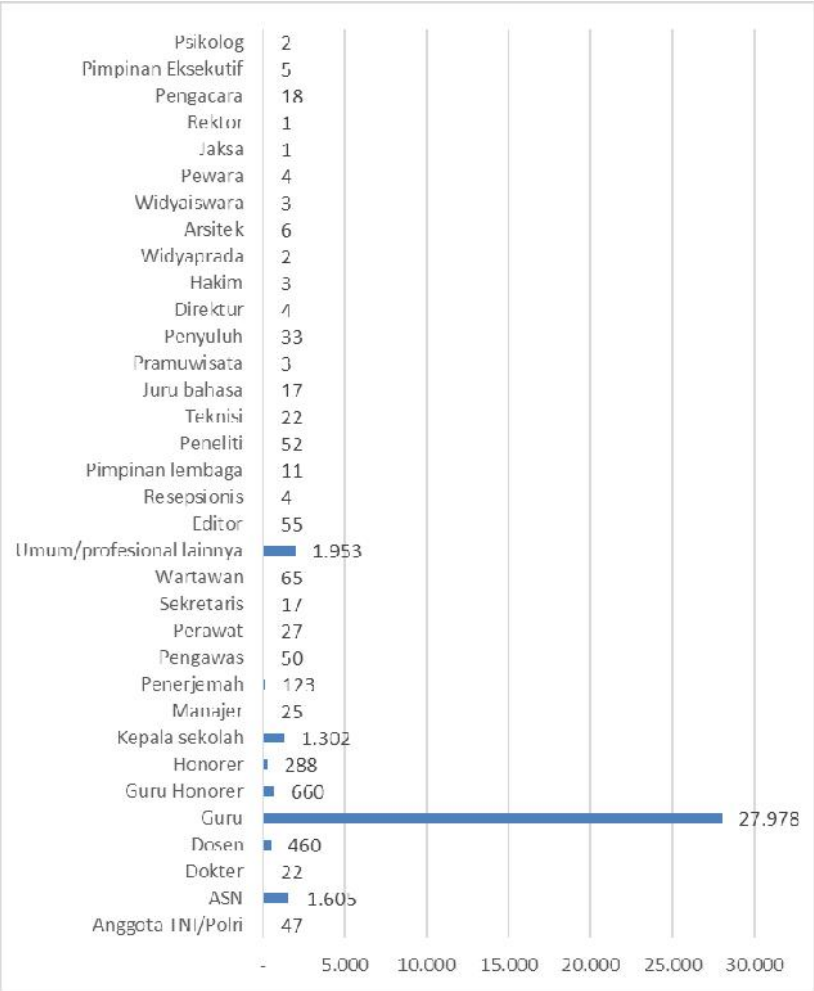
Penutur bahasa Indonesia yang mengikuti UKBI Adaptif terbagi menjadi dua kelompok besar, kalangan pelajar/mahasiswa dan kalangan profesional. Kalangan pelajar pada jenjang SD sederajat berjumlah 1.908 orang, pelajar SMP sederajat berjumlah 84.448 orang, pelajar SMA sederajat berjumlah 195.234 orang. Sementara itu, mahasiswa yang telah mengikuti UKBI Adaptif pada tahun 2024 berjumlah 28.571 orang.

Grafik 9 Peserta UKBI Pelajar dan Mahasiswa



Selanjutnya, dari kalangan profesional terdapat 33 profesi yang mengikuti UKBI Adaptif. Profesi dengan jumlah peuji terbanyak adalah guru, yaitu sejumlah 27.978 orang. Terbanyak berikutnya adalah profesi ASN dengan jumlah 1.953 orang, kepala sekolah dengan jumlah 1.302 orang, guru honorer sebanyak 660 orang, dosen sebanyak 460 orang, tenaga honorer sebanyak 288 orang, dan penerjemah sebanyak 123 orang. Profesi lain memiliki jumlah peuji di bawah 100 orang.

Grafik 10 Peserta UKBI Umum



Predikat peserta UKBI Adaptif Merdeka tersebar mulai dari predikat Istimewa hingga Terbatas. Ada pula yang tidak mendapat predikat, yaitu peserta yang meraih skor kurang dari 251. Peserta dengan predikat Istimewa berjumlah 934 atau sebesar 0,3% dari seluruh peuji. Peserta dengan predikat Sangat Unggul sejumlah 23.106 atau sejumlah 6,7% dari seluruh peuji. Peserta dengan predikat Unggul sejumlah 36.697 atau sejumlah 10,6%. Peserta dengan predikat Madya sejumlah 80.551 atau sejumlah 23,3%. Peserta dengan predikat Semenjana sejumlah 78.668 atau sejumlah 22,8%. Peserta dengan predikat Marginal sejumlah 75.006 atau sejumlah 21,7%. Peserta dengan predikat Terbatas sejumlah 43.261 atau sejumlah 12,5%. Peserta yang tidak berpredikat sejumlah 6.806 atau sejumlah 2%. Dari jabaran tersebut dapat dikatakan bahwa predikat dengan peserta terbanyak adalah predikat Madya. Terjadi peningkatan dari tahun 2023, jumlah peserta uji terbanyak memperoleh predikat Semenjana.

Grafik 11 Predikat Peserta UKBI



Capaian jumlah peserta UKBI yang meningkat tersebut didapat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan balai/kantor bahasa di seluruh Indonesia. Berbagai Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti UKBI adalah sebagai berikut.

1) Penguatan Regulasi tentang UKBI
   Sebagai bagian dari layanan negara yang diberikan kepada masyarakat di bidang kebahasaan, regulasi UKBI telah dikuatkan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Salah satu isi dalam peraturan tersebut adalah pemberian biaya Rp0,00 bagi mahasiswa tidak mampu. Hal tersebut merupakan salah satu semangat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa guna memastikan semua kalangan dapat menggunakan UKBI Adaptif untuk meningkatkan Kemahiran berbahasa Indonesia.

2) Penyusunan instrumen UKBI Adaptif
   Penyusunan instrumen UKBI Adaptif menghasilkan 700 butir soal. Penyusunan instrumen ini merupakan kegiatan utama untuk menambah soal pada bank soal yang akan digunakan pada uji UKBI Adaptif. Proses penyusunan soal diawali dengan kegiatan penyusunan instrumen (wacana dan soal), sidang pembakuan, perekaman Seksi I Mendengarkan, uji coba empiris, sidang validasi, dan pengunggahan soal ke bank soal.

3) Pengembangan Aplikasi UKBI Adaptif
   Aplikasi UKBI adaptif terus dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur yang diperlukan serta dengan menyempurnakan proses layanan agar lebih ramah pengguna. Pada tahun 2024, dilakukan penerapan interkoneksi laman UKBI Adaptif dengan layanan Simponi Kementerian Keuangan. Adanya interkoneksi tersebut membuat proses pembayaran menjadi lebih

efektif dan mengantisipasi berbagai kendala dalam proses pembayaran layanan UKBI Adaptif. Selain itu, interkoneksi pun dilakukann dengan layanan Beasiswa Unggulan. Pendaftar beasiswa unggulan lebih dimudahkan dalam proses pendaftaran beasiswa. Selain itu, pada tahun 2024 dilakukan uji tampilan laman UKBI untuk mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat pengguna layanan UKBI terhadap *user interface* (UI) dan *user experience* (UX). Hasil dari uji tampilan tersebut akan menjadi rekomendasi dalam pembaharuan laman UKBI Adaptif agar lebih ramah pengguna. Pada tahun 2024 tim UKBI Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra mulai merancang prototipe UKBI Adaptif bagi disabilitas rungu. Prototipe ini merupakan tahapan awal sebelum nantinya akan dikembangkan layanan UKBI bagi disabilitas rungu.

Gambar 7 Protipe UKBI bagi Disablitas Rungu



4) Diseminasi Nasional dan Peluncuran Buku Peta Kemahiran Berbahasa Indonesia



Foto 7 Diseminasi Nasional Kemahiran Berbahasa Indonesia

Kegiatan Diseminasi Nasional Kemahiran Berbahasa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan para pemangku kepentingan tentang kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam mengembangkan dan membina bahasa Indonesia. Selain itu, kegiatan ini bermaksud untuk memperkenalkan UKBI Adaptif Merdeka secara lebih luas kepada masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat membuat kebijakan terkait peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia. Kegiatan diseminasi nasional ini dihadiri oleh 1.360 orang secara daring dan 86 orang peserta secara luring.

Pemangku kepentingan yang hadir dalam acara tersebut, di antaranya, adalah kepala dinas pendidikan provinsi/kota/kabupaten, kepala sekolah, kepala balai/kantor Bahasa, dan guru.

Gambar 8 Buku Peta Kemahiran Berbahasa Indonesia



Selain pemaparan materi tentang kebijakan kemahiran berbahasa Indonesia dan pelaksanaan UKBI Adaptif, pada kegiatan diseminasi pun diluncurkan buku Peta Kemahiran Berbahasa Indonesia. Buku ini merupakan bentuk publikasi pengolahan data UKBI Adaptif pada tahun 2023. Buku Peta Kemahiran Berbahasa Indonesia berisikan informasi jumlah peserta uji secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, pada buku ini pun dibahas tentang capaian hasil UKBI, yaitu predikat hasil uji dan rata-rata hasil UKBI pada setiap kemahiran.

5) Apresiasi Giat UKBI Adaptif

Sebagai bentuk penguatan terhadap semangat yang dimiliki oleh sekolah, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra memiliki program Apresiasi Giat UKBI. Program ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada sekolah yang melaksanakan Giat UKBI Adaptif. Pemberian apresiasi dikemas dalam bentuk lomba yang diikuti oleh sekolah pendaftar. Pada tahun 2024 jumlah sekolah yang mendaftar pada program ini adalah 165 sekolah yang tersebar di 26 provinsi.



Gambar Sekolah Yang Mengikuti Giat UKBI

Sekolah yang mendaftar pada program Apresiasi Giat UKBI Adaptif wajib memenuhi kriteria pendaftaran sebagai berikut.

1. Peserta merupakan sekolah, baik SMP maupun SMA sederajat, yang telah mengikutsertakan siswanya sebagai peserta UKBI Adaptif.
2. Sekolah membuat video pelaksanaan Giat UKBI Adaptif dan memublikasikannya di kanal Youtube sekolah.
3. Sekolah membuat cuplikan video yang bertema ajakan untuk mengikuti UKBI Adaptif dan mengunggahnya di Instagram sekolah.
4. Sekolah mengirimkan lima foto terbaik dalam pelaksanaan UKBI Adaptif.
5. Sekolah membuat artikel dengan tema "UKBI Adaptif Memperkuat Profil Pelajar Pancasila".
6. Sekolah mendaftar melalui tautan https://bit.ly/ApresiasiUKBI2024.



Gambar 9 Poster Giat UKBI

Untuk menentukan peraih apresiasi, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra melakukan penjurian atas karya yang didaftarkan oleh sekolah. Penjurian dilakukan oleh enam orang juri yang terdiri atas ahli bahasa, pakar fotografi, dan pakar publikasi. Setelah melalui tahapan penjurian dan rapat penentuan pemenang, tim juri memutuskan 25 sekolah peraih Apresiasi Giat UKBI tahun 2024. Berikut adalah 25 sekolah peraih Apresiasi Giat UKBI.

No	Nama Sekolah	Provinsi
1	UPT SMAN 2 Parepare	Sulawesi Selatan
2	SMAN 1 Turen	Jawa Timur
3	SMAN 7 Denpasar	Bali
4	SMAN 4 Berau	Kalimantan Timur
5	SMPN 1 Purbalingga	Jawa Tengah
6	SMA Terpadu Krida Nusantara	Jawa Barat
7	MAN 7 Jakarta	DKI Jakarta
8	SMK Katolik St. Louis Surabaya	Jawa Timur
9	SMPN 206 Jakarta	DKI Jakarta
10	SMPN 1 Banda Aceh	Aceh

No	Nama Sekolah	Provinsi
11	SMPN 6 Cimahi	Jawa Barat
12	UPT SMKN 1 Pinrang	Sulawesi Selatan
13	SMPN 4 Kota Bengkulu	Bengkulu
14	SMPN 1 Padamara	Jawa Tengah
15	SMAN 1 Pinrang	Sulawesi Selatan
16	UPT SMAN 4 Makassar	Sulawesi Selatan
17	SMKN 1 Jombang	Jawa Timur
18	SMAN 2 Malang	Jawa Timur
19	SMPN 4 Polewali	Sulawesi Barat
20	SMKN 14 Bandung	Jawa Barat
21	SMAS PKP DKI Jakarta	DKI Jakarta
22	SMAN 1 Bobotsari	Jawa Tengah
23	SMAN 1 Namang	Kepulauan Bangka Belitung
24	SMKN 1 Bukittinggi	Sumatera Barat
25	SMPN Binaan Khusus Kota Dumai	Riau



Foto 8 Pelaksanaan Giat UKBI

Testimoni

Mitra dan Penerima Manfaat Program dan Layanan Badan Bahasa

"UKBI sangat penting, orang-orang yang belajar bahas Indonesia bisa mengetahui kapasitasnya berbahasa Indonesia dengan mengikuti UKBI ini, dengan mengetahui kemahiran bahasa Indonesia bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Indonesia, yuk ikut UKBI"



Ichsan

Pusat Bahasa Isyarat Bahasa Indonesia

c. Apresiasi Sastra: Festival Musikalisasi Puisi

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 1988 (saat itu bernama Pusat Bahasa) mulai mengadakan kegiatan musikalisasi puisi bagi pelajar di tingkat SMA/SMK/MA se-DKI Jakarta. Kegiatan itu dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra. Kegiatan itu kemudian dilaksanakan

di sekolah-sekolah secara mandiri di wilayah Jabodetabek. Selanjutnya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memandang perlu untuk mengadakan kegiatan musikalisasi puisi secara rutin setiap tahun sebagai salah satu upaya memberikan layanan pembinaan kesastraan kepada generasi muda, khususnya pelajar di tingkat SMA/SMK/MA. Kegiatan ini diselenggarakan pada tingkat daerah atau provinsi oleh balai/kantor bahasa di seluruh Indonesia. Kegiatan musikalisasi puisi di wilayah DKI Jakarta dan tingkat nasional diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, sebagai instansi pusat di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Dengan meneruskan praktik baik dalam hal keefektifan dan keluasan jangkauan peningkatan apresiasi sastra pada masa pandemi serta sebagai sebuah bentuk adaptasi hidup pada era kenormalan baru, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Bahasa telah menyelenggarakan Festival Musikalisasi Puisi di seluruh balai/kantor bahasa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi sastra generasi muda melalui musikalisasi puisi. Dalam rangkaian kegiatan Festival Musikalisasi Puisi dilaksanakan juga Webinar Musikalisasi Puisi. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari yang diikuti kurang lebih 938 peserta dari seluruh Indonesia. Dalam webinar ini peserta diberikan materi Apresiasi dan Alih Wahana Puisi, Menafsir sebelum Menggubah Puisi, Aransemen Musik dalam Musikalisasi Puisi, Visualisasi dalam Penampilan Musikalisasi Puisi. Setelah menerima materi-materi dalam webinar tersebut, peserta dapat praktik dan mengikuti Festival Musikalisasi Puisi di wilayah masing-masing melalui balai/kantor bahasa. Setelah dari balai/kantor bahasa peserta terbaik satu nantinya akan mengikuti Festival Musikalisasi Puisi di tingkat nasional. Berikut dokumentasi kegiatan webinar dan musikalisasi puisi yang sudah dilakukan oleh balai/kantor.

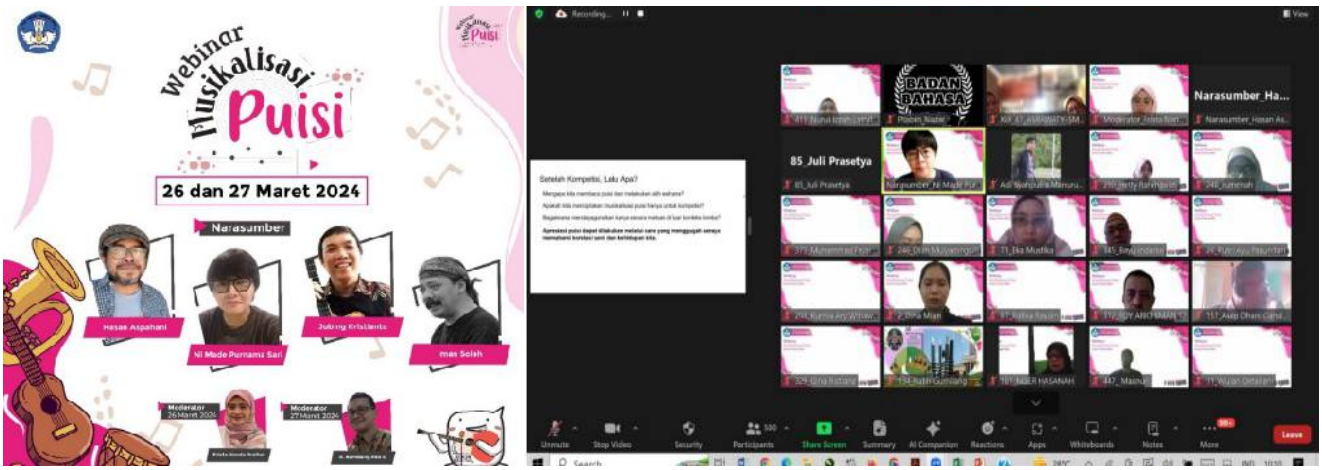


Foto 9 Webinar Musikalisasi Puisi



Foto 10 Festival Musikalisasi Puisi Tingkat Nasional

d. Bengkel Sastra: Penulisan Puisi dan Cerita Pendek

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya pembinaan dan peningkatan kualitas berbahasa bagi penutur terbina bahasa Indonesia adalah bengkel sastra khususnya penulisan puisi dan penulisan cerita pendek. Berkaitan dengan upaya pembinaan sastra, Badan Bahasa—melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra—bertanggung jawab melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat tentang sastra Indonesia dan daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membentuk sikap positif dan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia untuk memperkukuh jati diri dan karakter bangsa. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2014, Bab V tentang Pembinaan Bahasa dan Sastra, Pasal 23 ayat (1), dikatakan bahwa pembinaan sastra Indonesia dilakukan untuk meningkatkan sikap apresiatif dan kemampuan masyarakat untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra, serta menciptakan suasana kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan sastra.

Adapun salah satu bentuk pembinaan sastra tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan bengkel sastra dan apresiasi sastra. Kegiatan tersebut berfungsi sebagai sanggar pelatihan atau bimbingan teknis sastra guna meningkatkan minat berkarya sastra dan apresiasi sastra masyarakat. Kegiatan bengkel sastra dilakukan untuk melatih masyarakat memahami dan menghayati karya sastra sebab taraf pemahaman ini bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan seseorang sebagai pembaca dan jenis karya sastra yang dibaca. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah bengkel penulisan puisi. Kegiatan Bengkel Sastra Penulisan Puisi bertujuan untuk memasyarakatkan puisi serta menjadi sarana untuk mengungkapkan emosi, imajinasi, ide, dan pemikiran untuk menjadi sebuah karya sastra, yaitu puisi. Jadi, melalui kegiatan bengkel sastra diharapkan minat masyarakat dalam berkarya sastra dapat ditingkatkan dan selanjutnya tumbuh apresiasi masyarakat terhadap karya sastra. Dalam Kegiatan Bengkel Sastra Penulisan Puisi tersebut, peserta diberi materi Program Peningkatan Minat Berkarya Sastra bagi Masyarakat, Puisi (pengantar, unsur-unsur pembangun puisi, metode penulisan puisi, proses kreatif menulis puisi, berlatih menulis puisi dilanjutkan praktik menulis puisi).

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan Bengkel Sastra: Penulisan Puisi yang dilakukan oleh balai/kantor bahasa.



Foto 11 kegiatan Bengkel Sastra Penulisan Puisi di Kabupaten Jayapura, Papua.



Foto 12 kegiatan Bengkel Sastra Penulisan Puisi di Kabupaten Keerom, Papua.



Foto 13 Dokumentasi Kegiatan Bengkel Sastra Penulisan Puisi di Jambi.



Foto 6 kegiatan Pendampingan Bengkel Sastra Penulisan Naskah Drama di Jambi.

Testimoni

Mitra dan Penerima Manfaat Program dan Layanan Badan Bahasa

“Kegiatan ini sangat menarik, saya bisa mendapatkan ilmu tentang menulis cerpen. Saya suka menulis dan membaca cerpen, semoga bisa menjadi cerpenis”



Ode Nur Annisa Fadila

Peserta Kemah Penulisan Cerpen Bahasa Daerah Tolaki

e. Penyusunan Bahan Pendukung Literasi

Penyusunan bahan pendukung literasi pada tahun 2024 terealisasikan sebanyak 516 judul buku, sedangkan dari tahun 2020—2023 total bahan pendukung literasi yang tersusun berjumlah 345 judul buku. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan bahan pendukung literasi pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan.

Pada tahun 2024, penyusunan bahan pendukung literasi telah menghasilkan 300 judul buku cerita bergambar, 116 judul buku komik, 50 buku novelet, dan 50 buku seminovel hasil residensi penulis cerita anak ke wilayah 3T serta 300 bahan bacaan bagi penyandang disabilitas yang terdiri dari 100 buku audio, 100 buku video, dan 100 buku braile yang merupakan adaptasi dari buku yang telah dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Penyusunan bahan yang tersebut berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan pada petunjuk teknis dan referensi buku cerita rakyat atau alih wahana buku cerita rakyat. Proses penyusunan yang dilakukan melalui sayembara penulisan, kurasi, moderasi, pendampingan, uji keterbacaan, hingga penerbitan, penulisan naskah oleh staf balai/kantor, dan ilustrasi dikerjakan oleh mitra Badan Bahasa.

Adapun rincian penyusunan bahan pendukung literasi adalah sebagai berikut.

Sayembara Penulisan Bahan Bacaan Literasi Tahun 2024

1) Pelaksanaan sayembara

   Sayembara penulisan dilakukan dengan cara membuka kesempatan kepada seluruh penulis cerita anak di Indonesia untuk mendaftar dan mengirimkan papan cerita (*storyboard*) untuk menghasilkan buku bacaan bermutu yang dapat dinikmati oleh seluruh anak Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian Merdeka Belajar yang tertuang dalam episode ke-23, yaitu Buku Bermutu untuk Literasi Indonesia. Peserta yang telah mendaftar pada sayembara penulisan bahan bacaan literasi tahun 2024 berjumlah 1584 orang.

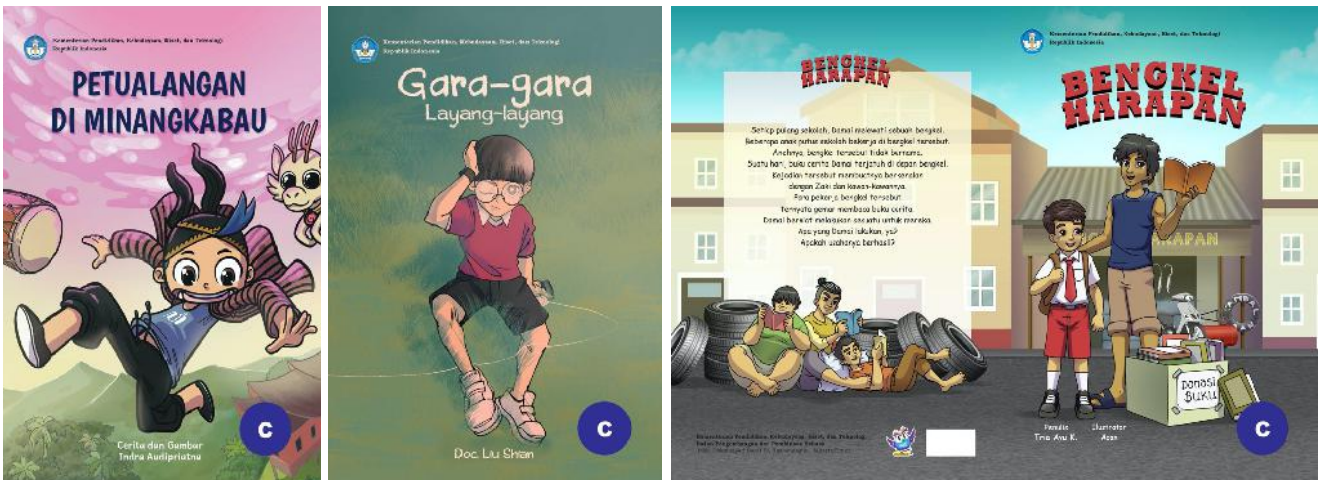
   Konsep buku yang dibuat adalah buku buku bergambar yang sesuai untuk pembaca di rentang usia PAUD dan SD yang berada pada jenjang baca B-1 untuk PAUD, B-2 untuk siswa SD kelas 1 dan 2, B-3 untuk siswa kelas 2 dan 3 SD, dan siswa SMP. Pemilihan jenis buku bergambar disesuaikan dengan kriteria buku bermutu untuk siswa PAUD dan SD yang telah ditetapkan oleh Pusat Perbukuan BSKAP Kemdikbudristek melalui Peraturan Kepala BSKAP Nomor 030/P/20222 tentang Pedoman Perjenjangan Buku. Penyusunan bahan bacaan literasi pada tahun 2024 telah menghasilkan 350 judul buku yang diklasifikasikan menjadi 100 buku untuk jenjang pembaca B-1, 100 buku untuk jenjang pembaca B-2, 100 buku untuk jenjang pembaca B-3, dan 50 buku untuk jenjang D.



Gambar 10 contoh buku hasil Sayembara Penulisan Bahan Bacaan Literasi Tahun 2024

2) Penyediaan Bahan Bacaan dengan Muatan untuk Peningkatan Implementasi Literasi Numerasi Anak PAUD dan SD melalui Komik

Penyusunan bahan bacaan komik ditujukan untuk menambah variasi bacaan untuk jenjang C yang merupakan pembaca usia 9—11 tahun yang berada pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6. Pemilihan komik didasarkan pada konsep jenis bacaan yang bisa dibaca oleh jenjang pembaca C dan hasil dari diskusi kelompok terpumpun (DKT) kriteria bahan bacaan bermutu yang mengundang anak-anak sebagai peserta. Penyusunan komik ini dilakukan dengan mekanisme sayembara dengan mengundang penulis komik dari seluruh wilayah di Indonesia untuk berpartisipasi mengirimkan rancangan *storyboard* komik berdasarkan tema yang telah ditentukan beserta syarat administrasi lainnya. Jumlah pendaftar sampai hari terakhir penutupan sebanyak 241 orang. Dari penyusunan bahan bacaan komik ini dihasilkan 116 judul buku komik.



Gambar 11 contoh Hasil Penyusunan Buku Komik

3) Penyediaan Bahan Bacaan Bermutu untuk Murid Berkebutuhan Khusus

Penyediaan bahan bacaan bermutu untuk murid berkebutuhan khusus diperlukan agar penyediaan bahan bacaan bermutu merata dan dapat dirasakan oleh semua kalangan. Hal ini juga mendukung upaya penerapan hak-hak penyandang disabilitas yang tertuang dalan UU Nomor 19 Tahun 2011 serta Peraturan MenPPA Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus. Sejalan dengan itu, ini merupakan upaya yang dilakukan Kemdikbudristek yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 32 mengenai anak berkebutuhan khusus.

Mekanisme penyediaan bahan bacaan bermutu untuk murid berkebutuhan khusus dihasilkan dengan cara bermitra dalam mengalihwahanakan yang merupakan adaptasi dari buku yang telah dihasilkan oleh Badan Bahasa selama ini. Judul buku yang diadaptasi merupakan judul buku tahun 2018–-2023 yang dipilih berdasarkan keterwakilan dari tiap tema dan jenjang pembaca. Dari penyediaan ini telah dihasilkan 100 buku audio yang diperuntukkan untuk jenjang B-1, B-2, B-3, dan C dengan setiap jenjang ada sebanyak 25 buku audio, 100 buku video diperuntukkan untuk jenjang B-1 dan B-2 dengan setiap jenjang sebanyak 50 buku video, dan 100 buku braile diperuntukkan untuk jenjang B-3 dan C dengan setiap jenjang sebanyak 50 buku braile.



Gambar 12 contoh Buku Video dan Buku Braile

4) Residensi Penulis Buku Anak ke Daerah 3T

Residensi penulis buku anak ke wilayah 3T bertujuan untuk menyediakan buku bacaan yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian anak jenjang pembaca mahir E akan pengetahuan dan keterampilan, khususnya memperkenalkan informasi mengenai potensi yang ada di wilayah 3T kepada seluruh anak Indonesia. Penyusunan ini diharapkan dapat mengenalkan potensi daerah terluar, terdepan, dan tertinggal dan mendukung konsep Merdeka Belajar yang diusung oleh Kemdikbudristek. Pada tahun 2024, Penulis buku anak yang telah dikirim ke wilayah 3T adalah sebanyak 25 penulis ke 25 lokus wilayah 3T dan telah menghasilkan 50 buku seminovel jenjang E mengenai potensi daerah, budaya, dan lokalitas yang ada di wilayah tersebut.

Mekanisme pemilihan penulis residensi ini dilaksanakan melalui penunjukkan langsung berdasarkan penjaringan portofolio penulis buku anak untuk buku seminovel. Selain itu, penulis juga harus mengirimkan proposal yang memuat rancangan kerja penulisan dan rancangan buku seminovel yang akan dibuat serta syarat administrasi lainnya. Tema yang diangkat penulis meliputi (a) kedudukan anak dalam masyarakat/komunitas adat di wilayah 3T, (b) kearifan lokal dalam bentuk tradisi dan kesenian di wilayah 3T, (c) cerita inspiratif mengenai anak-anak di wilayah 3T, atau (d) isu lingkungan dan sosial-budaya di wilayah 3T.

Proses pelaksanaan yang telah dilakukan penulis selama di wilayah 3T meliputi riset awal, riset lapangan selama 10 hari, penyusunan draf awal selama 10 hari, dan kewajiban melaporkan kegiatan harian melalui sistem Log Harian pada tautan *google form* yang telah disiapkan panitia. Selain itu, penulis juga telah menyelesaikan draf sampai serah terima hasil kerja kepada Badan Bahasa dalam waktu yang telah ditentukan.



Gambar 13 contoh buku hasil residensi

5) Pengembangan Laman Buku Digital

Laman Buku Digital merupakan salah satu sarana publikasi bahan bacaan literasi yang dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Guna menunjang aktivitas penggunaan laman budi, diperlukan pengembangan laman buku digital yang bersifat pemutakhiran sistem laman secara berkala. Hal ini diperlukan karena aktivitas laman Budi yang tinggi. Selain itu, padatnya muatan konten yang dimasukkan ke dalam laman Budi memerlukan pengembangan fitur-fitur baru yang dapat menampung seluruh produk literasi yang dihasilkan

seperti buku literasi dalam bentuk buku bergambar, komik, buku video, buku audio. Dalam laman buku digital juga terdapat fitur publikasi karya pembaca yang juga harus dimutakhirkan agar terus dapat menampung karya-karya pembaca. Proses pengembangan laman ini akan bersifat kerja sama dengan pihak ke-3 yaitu pengembang laman buku digital.

Gambar 14 Tampilan laman buku digital sebelum dimutakhirkan



Gambar 15 Tampilan laman buku digital sesudah dimutakhirkan



6) Uji Keterbacaan Bahan Bacaan Literasi

Uji Keterbacaan Bahan Bacaan Literasi Tahun 2024 merupakan salah satu rangkaian kegiatan penyusunan bahan bacaan literasi. Kegiatan ini dilaksanakan tidak hanya untuk menyosialisasikan 516 buku yang telah disusun, melainkan juga memastikan bahwa buku-buku tersebut dapat dipahami oleh pembaca sasaran. Hasil kegiatan ini adalah mendapatkan masukan dan saran dari seluruh peserta kegiatan. Masukan ini melingkupi aspek pemahaman anak terhadap isi cerita, aspek kepatutan dan kelayakan buku dari segi konten dan grafis, serta tema buku yang dipilih pada tahun 2024. Selanjutnya, masukan ini akan diolah oleh KKLP Literasi untuk diberikan kepada penulis sebagai bentuk pembinaan penulis terhadap karya yang telah dihasilkan dan menjadi bahan perbaikan sebelum buku dinilai kelayakannya oleh Pusat Perbukuan, BSKAP Kemdikbudristek.

Mekanisme kegiatan uji keterbacaan ini melalui pembacaan buku yang akan dilakukan oleh setiap peserta sebanyak 3–4 buku. Anak dan pendamping akan membaca buku secara bersama. Setelah selesai pendamping akan mengisi kueisioner yang telah disiapkan panitia melalui gawai setiap pendamping. Setelah selesai mengisi kueisioner, peserta akan membaca buku selanjutnya hingga buku terakhir. Kegiatan uji keterbacaan telah dilaksanakan di lima lokus yaitu DKI Jakarta, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Barat. Peserta kegiatan ditiap lokasi berjumlah 450 peserta terdiri atas 225 anak dan 225 pendamping (150 orang perhari). Sementara itu, uji keterbacaan buku braile di Jakarta diikuti oleh 168 peserta.



Foto 14 pelaksanaan Uji Keterbacaan Bahan Bacaan Literasi Tahun 2024

f. Pencetakan dan pengiriman buku pengayaan pendukung GLN

Pada Tahun 2024, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melaksanakan program pencetakan dan pengiriman buku pengayaan untuk mendukung Gerakan Literasi Nasional (GLN) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Jumlah Buku sebanyak 200 judul dengan total 21.471.000 eksemplar dengan sasaran 35.785 SD berkategori 0, 1, dan 2 berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2022 di 514 kabupaten/kota, termasuk di Provinsi Jawa Timur, Jambi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi siswa di daerah 3T. Selain buku cetak, Badan Bahasa juga menyediakan lebih dari 800 judul buku digital dalam bentuk teks, audio, dan video yang dapat diakses melalui laman budi.kemdikbud.go.id. Dengan upaya ini, diharapkan tingkat literasi anak-anak di sekolah-sekolah tersebut dapat meningkat, sejalan dengan tujuan Gerakan Literasi Nasional.

Sekolah yang menerima pengiriman buku ditentukan dari kemampuan literasi satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) pada rentang nilai 1—3 pada tahun 2021. Pada rentang nilai 1 (satu) artinya kategori capaian seluruh aspek/subaspek dalam indikator tersebut kurang, sedangkan rentang nilai 2 (dua) berkategori capaian sedang, dan nilai 3 (tiga) berkategori baik. Pengertian rentang nilai kecakapan literasi dijelaskan lebih rinci sebagai berikut.

Tabel 15 Rentang Nilai Kecakapan Literasi

Atribut Sekolah	Jauh Di Bawah Kompetensi Minimun (Level 1)	Di Bawah Kompetensi Minimun (Level 2)	Kompetensi Minimun (Level 2)	Di Atas Kompetensi Minimun (Level 4)
Pengertian	Sebagian besar murid belum mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.	Kurang dari 50% murid telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca.	Sebagian besar murid telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca, namun perlu upaya mendoronglebih banyak murid menjadi mahir.	Murid di sekolah menunjukkan tingkat literasi membaca yang cakap dan cukup banyak murid berada pada level mahir.
Atribut Murid	Perlu Intervensi Khusus	Dasar Cakap	Cakap	Mahir

(Sumber: Pusmendik/BSKAP. 2021)

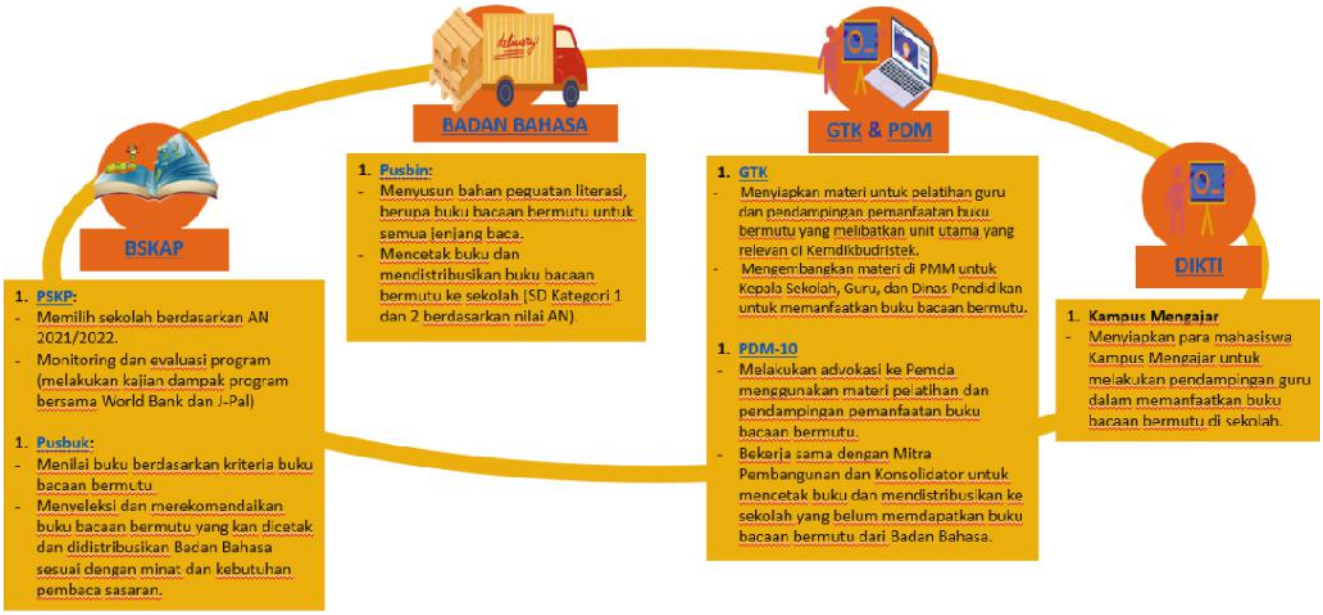


Foto 15 Pelaksanaan Pengiriman Buku Pengayaan GLN Tahun 2024

g. Dampak Penyusunan Bahan Penguatan Literasi

Hasil temuan dari studi Kesenjangan Pembelajaran yang dilakukan oleh program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) dan Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak, saat ini bernama Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan), Kemendikbudristek, pada tahun 2022 menunjukkan bahwa telah terjadi kehilangan pembelajaran (*learning loss*) dan kehilangan kemampuan literasi (*literacy loss*) yang signifikan dan siswa mengalami putus sekolah. Hal itu dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Efek kerugian ini mungkin akan terus dirasakan bahkan setelah pandemi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya mendesak untuk mengatasi situasi ini, demi memitigasi dampak langsung maupun jangka panjang dari situasi pandemi–baik dari sisi sumber daya manusia, ekonomi, maupun sosial. Selain itu, hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) pada Tahun 2022, secara umum menunjukkan bahwa **kemampuan literasi siswa Indonesia termasuk ke dalam kategori di bawah kompetensi minimum**. Artinya, kurang dari 50% siswa telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah merumuskan sejumlah strategi untuk meningkatkan kompetensi siswa, salah satunya melalui program **Merdeka belajar Episode Ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia** yang diluncurkan pada Februari 2023. Tujuan program ini adalah agar siswa Indonesia makin mudah memiliki akses terhadap buku nonteks yang dapat dimanfaatkan, baik dalam kegiatan membaca untuk kesenangan maupun dalam pembelajaran. Semua unit utama di Kemendikbudristek pun bersinergi, berkolaborasi, dan bekerja sama guna memulihkan pembelajaran dan kehilangan kemampuan literasi siswa Indonesia melalui program Buku Bacaan Bermutu ini.



Gambar 16 sinergi dan kolaborasi lintas unit utama di Kemendikbudristek dalam Program Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia.

Ketersediaan buku bacaan yang bermutu akan sangat bermanfaat bagi peserta didik sekolah dasar yang telah mengalami kehilangan kemampuan literasi cukup lama. Buku-buku tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan minat baca mereka dan menjadi buku pendukung pembelajaran di sekolah. Selain itu,

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim INOVASI diketahui bahwa untuk meningkatkan kompetensi literasi siswa diperlukan kualitas pembelajaran yang baik yang disertai dengan ketersediaan dan pemanfaatan buku bacaan yang tepat. Pelatihan disertai ketersediaan buku bacaan yang berkualitas dapat menaikkan nilai literasi siswa sebanyak 8% pada kemampuan membaca dan 9% pada kemampuan mendengar (Sumber: INOVASI *Literacy thematic study* (2020)).

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2022, Badan Bahasa telah mencetak dan mendistribusikan buku bacaan bermutu (buku bacaan literasi yang telah lolos penilaian Pusat Perbukuan dan layak digunakan di satuan pendidikan) sebanyak lebih dari 15 juta eksemplar ke sekolah-sekolah. Pencetakan dan pendistibusian buku tersebut menyasar sekolah jenjang PAUD dan SD di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T) yang nilai AN tahun 2021 masih rendah. Hal itu dilakukan sesuai amanat Nawacita yang menekankan pentingnya membangun Indonesia dari daerah pinggiran dengan menguatkan sisi sosial, ekonomi, dan SDM.

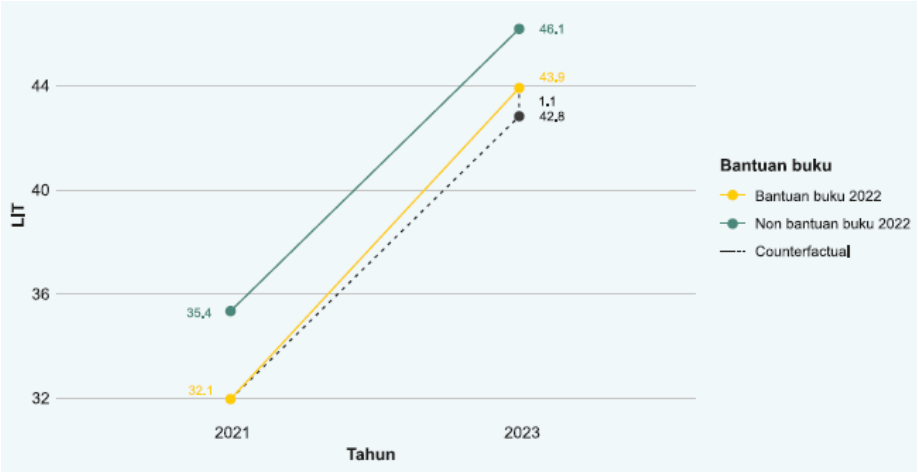
Selanjutnya, pada tahun 2024 Badan Bahasa kembali melakukan pencetakan dan pengiriman buku bacaan bermutu ke satuan pendidikan SD yang hasil AN-nya pada tahun 2022 termasuk ke dalam kemampuan literasinya yang masih rendah. Melalui kegiatan cetak dan kirim buku ini diharapkan minimal 20% satuan pendidikan yang diintervensi akan meningkat kemampuan literasi siswanya. Adapun SD yang menjadi sasaran pengiriman buku di tahun 2024 ialah SD dengan kriteria berikut.

1) SD yang hasil AN-nya pada tahun 2022 termasuk ke dalam kategori kemampuan literasi masih **jauh di bawah** kompetensi minimum (kategori 1) dan pada tahun 2022 belum mendapat buku bacaan bermutu dari Badan Bahasa.
2) SD yang hasil AN-nya pada tahun 2022 termasuk ke dalam kategori kemampuan literasi masih **di bawah** kompetensi minimum (kategori 2) dan pada tahun 2022 belum mendapat buku bacaan bermutu dari Badan Bahasa.
3) SD yang hasil AN-nya pada tahun 2022 tidak terdeteksi karena **angka partisipannya rendah**—jumlah siswa yang mengikuti AN kurang dari 30 orang atau kategori 0.

Jadi, bahan penguatan literasi yang disusun setiap tahun oleh Badan Bahasa yang berupa buku bacaan literasi, tidak hanya selesai pada penilaian buku ke Pusat Perbukuan. Namun, buku tersebut juga dicetak dan distribusikan ke sekolah-sekolah yang perlu intervensi khusus (nilai AN termasuk ke dalam kategori kemampuan literasi siswanya masih jauh di bawah kompetensi minimun (kategori 1), di bawah kompetensi minimum (kategori 2), serta SD yang angka partisipan yang mengikuti AN rendah (kategori 0)). Dengan demikian, buku-buku tersebut dapat bermanfaat dan berdampak positif secara langsung, baik bagi siswa maupun guru di sekolah-sekolah sasaran pendistribusian buku bacaan bermutu.

Hasil kajian dampak yang dilakukan oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Kemendikbudrsitek pada tahun 2024 menunjukkan bahwa **dalam satu tahun program Buku Bacaan Bermutu telah menunjukkan dampak terhadap kenaikan capaian literasi siswa SD.** Dengan demikian, **buku-buku bacaan**

bermutu yang telah disusun, dicetak, dan didistribusikan oleh Badan Bahasa terbukti telah membantu meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi siswa. Hasil kajian Kajian Evaluasi Dampak Program Hibah Buku Bacaan Bermutu yang dilakukan oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) tersebut dapat dilihat secara lengkap melalui tautan berikut https://pskp.kemdikbud.go.id/analisis-kebijakan/detail/546.



Gambar 17 Capaian Literasi dan Dampak Bantuan Buku Bacaan Bermutu.
(Sumber: Olah Data Tim Kajian terhadap Data AN 2021 dan AN 2023, serta Data Bantuan Buku)

Gambar tersebut menunjukkan visualisasi dampak bantuan buku secara nasional. Sekolah yang mendapatkan buku bacaan bermutu memiliki kenaikan skor capaian literasi AN 1,1 lebih tinggi dibandingkan sekolah yang tidak mendapatkan bantuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bantuan buku bacaan bermutu yang diberikan oleh Badan Bahasa kepada sekolah-sekolah sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa di Indonesia. Dengan demikian, kegiatan penyusunan bahan penguatan literasi, pencetakan, dan pendistsibusian buku bacaan literasi yang bermutu sangat perlu dilakukan secara rutin oleh Badan Bahasa pada tahun depan dan tahun-tahun berikutnya.

h. Generasi Muda Terbina Program Literasi

Pembinaan literasi terhadap generasi muda menjadi salah satu program yang dijalankan oleh Badan Bahasa sebagai bentuk peningkatan kemampuan literasi. Pembinaan ini menyasar generasi muda di tingkat SMP, SMA, dan Mahasiswa, serta melibatkan mitra strategis Badan Bahasa seperti Duta Bahasa di setiap provinsi dan Direktorat SMK dan Vokasi, Kemendikbudristek. Pembinaan literasi terhadap generasi muda ini dilaksanakan oleh pusat dan balai/kantor dengan target 18.600 orang pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, pusat dan balai/kantor bahasa melaksanakan program Krida Aktivis Muda. Program ini bertujuan untuk melakukan pembinaan sikap positif terhadap bahasa negara dan kepedulian terhadap bahasa daerah kepada aktivis organisasi sekolah sebagainya) tingkat SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan/atau aktivis muda penggerak literasi di lingkungan kampus. Krida ini terbagi atas Parade Wajah Bahasa Ruang Publik Sekolah, Parade

Pidato Pengutamaan Bahasa Negara, Bengkel Kreatif Berbahasa Daerah, Kelas Kreatif Pembuatan Konten Digital Berbahasa Daerah, dan Kelas Kreatif Film Pendek Berbahasa Daerah.



Foto 16 kegiatan Parade Waja Bahasa Ruang Publik Sekolah di SMA Negeri 32 Jakarta

Baik pusat maupun balai/kantor bahasa mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Bahkan ada Pusat dan balai/kantor bahasa yang mampu melebihi target yang telah ditetapkan. Seperti Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dari target sebanyak 600 orang, mampu mencapai target 760 orang dengan menggunakan strategi menjalin kemitraan dengan Direktorat SMK Kemdikbudristek dalam program SMK-PK dan universitas yang sudah bermitra dengan Pusbin seperti Universitas Nasional. Untuk tingkat UPT, Balai Bahasa Provinsi Riau mampu mencapai target 907 orang dari target awal sebanyak 600 orang dengan menggunakan strategi kemitraan dengan sekolah dan kampus-kampus, serta membuat surat permohonan izin bagi siswa dan mahasiswanya untuk dapat mengikuti program Krida Aktivis Muda. Capaian generasi muda terbina program literasi yang dilakukan oleh balai/kantor bahasa di setiap provinsi dapat dilihat dalam lampiran LAKIN ini.

i. Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi

Komunitas Penggerak Literasi merupakan mitra strategis Badan Bahasa dalam menjalankan misinya untuk meningkatkan budaya literasi di masyarakat. Komunitas penggerak literasi ini perlu didukung agar terus mampu menjadi perpanjangan tangan Badan Bahasa untuk meningkatkan kemampuan literasi khususnya bagi masyarakat. Salah satu hal yang dilakukan Badan Bahasa adalah memberdayakan komunitas penggerak literasi yang ada di Indonesia dengan memberikan fasilitasi dalam bentuk pelatihan dan pendampingan terkait dengan program-program keliterasian yang hasilnya bisa dirasakan dan berdampak bagi masyarakat. Pemberdayaan ini dilaksanakan oleh pusat dan balai/kantor bahasa dengan target 1.236 komunitas penggerak literasi di seluruh wilayah kerja pusat dan balai/kantor pada tahun 2024.



Foto 17 Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dengan menggandeng Forum FTBM dan Pemerintah Kab. Lampung Barat

Baik pusat maupun balai/kantor bahasa mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Bahkan ada balai/kantor bahasa yang mampu melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena balai/kantor bahasa menggandeng mitra strategis seperti Dinas Perpustakaan dan Arsip, Perpustakaan Desa, dan Forum TBM yang memiliki ranting kepengurusan sampai tingkat kabupaten/kota untuk membantu menjangkau komunitas penggerak literasi yang jauh dari wilayah kerja balai/kantor bahasa. Seperti yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung, dari target 49 komunitas di tahun 2024, mampu memberdayakan sebanyak 95 komunitas penggerak literasi dengan menggunakan strategi meminta komunitas yang pernah diberi pelatihan untuk melakukan pengimbasan pengetahuan dari pelatihan yang didapatkan dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung pada komunitas penggerak literasi yang ada di sekitarnya. Capaian kegiatan pemberdayaan komunitas penggerak literasi yang dilakukan oleh balai/kantor bahasa di setiap provinsi dapat dilihat dalam lampiran LAKIN ini.

j. Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi

Pada tahun 2024, Badan Bahasa telah menyalurkan Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Adapun jenis bantuan yang disalurkan adalah fasilitasi kegiatan dengan nominal bantuan masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada 339 komunitas penggerak literasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Bantuan diberikan dalam rangka meningkatkan peran komunitas penggerak literasi sebagai wadah yang menumbuhkan dan menggiatkan minat baca tulis masyarakat yang sekaligus membangun cinta literasi dalam rangka gerakan literasi nasional yang dapat membentuk karakter bangsa yang berbudi dan berkarakter melalui membaca. Selain itu, penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi juga diharapkan dapat menciptakan sinergi dan kolaborasi yang

baik antara Badan Bahasa dan komunitas penggerak literasi dalam menanamkan komitmen bersama sebagai garda terdepan dalam peningkatan literasi di tengah masyarakat.

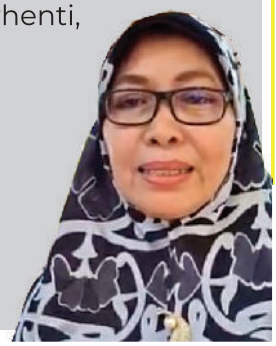


Foto 18 Penyerahan Secara Simbolis Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024

Testimoni

Mitra dan Penerima Manfaat Program dan Layanan Badan Bahasa

"Saat ini Saya menjadi narasumber pada kegiatan sastra yang diadakan Rumah Sastra Evi Idawati di Yogyakarta. Acara ini terealisasi atas bantuan dari Badan Bahasa untuk komunitas sastra. Saya berharap acara seperti ini tidak akan berhenti, bantuan ini sangat berarti. Di kalangan sastrawan, bantuan ini sangat penting untuk peningkatan kreatifitas komunitas sastra. Bantuan sastra ini akan lebih menghidupkan sastra di Indonesia, dan menginpirasi generasi sastra selanjutnya".



Abidah El Khalieqy

Penulis novel Perempuan Berkalung Sorban

k. Tersedianya Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Meluasnya penggunaan bahasa Indonesia, baik di dunia maya melalui media sosial maupun dalam komunikasi antarbangsa, menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam kedudukan bahasa Indonesia. Menipisnya batasan geografis dan budaya seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru bagi bahasa Indonesia untuk berkembang dan beradaptasi. Namun, hal ini juga membawa tantangan baru terkait dengan variasi penggunaan bahasa di berbagai platform. Pengoptimalan peran bahasa Indonesia di kancah global memerlukan dukungan yang berkelanjutan, salah satunya melalui penyediaan produk pengembangan bahasa yang tepat.

Tersedianya produk pengembangan bahasa dapat dicapai melalui pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyusunan kamus bidang ilmu, dan pengembangan produk-produk integrasi kosakata dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dilakukan secara intensif. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan acuan kebahasaan bagi penutur bahasa Indonesia serta menjadi standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada tahun 2024, Tim Perkamusan dan Peristilahan telah menghasilkan satu kamus bahasa Indonesia yang termutakhirkan, yaitu KBBI Daring edisi 6, empat kamus bidang ilmu, tiga kamus etimologi, serta dua produk pedoman kebahasaan. Berikut ini rincian setiap produk.

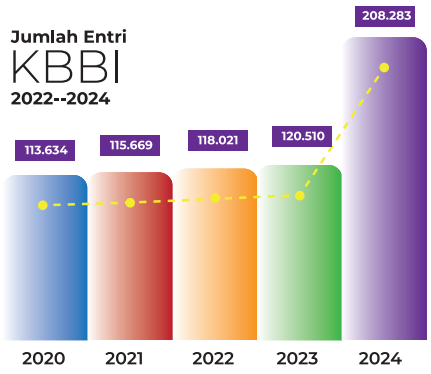
1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring



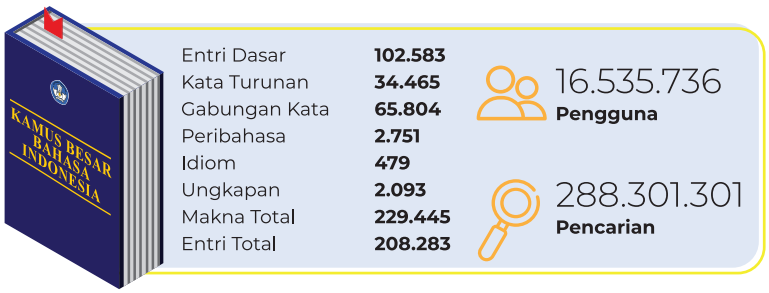
Gambar 18 Tampilan Laman KBBI Daring

Tahun 2024 menjadi salah satu tahun dengan catatan istimewa dalam sejarah perkembangan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pada tahun ini, kosakata dalam KBBI mencapai 208.283 entri, dengan penambahan sebanyak lebih dari 80.000 entri baru. Hal ini merupakan pencapaian yang belum pernah dilakukan, karena pada tahun-tahun sebelumnya penambahan kosakata baru dalam KBBI per tahun secara konsisten hanya sebanyak 2.000 entri yang dimutakhirkan dua kali dalam setahun.

Pemutakhiran KBBI 2024, menggerakkan statistik KBBI secara signifikan pada klasifikasi data kamus, pencarian, dan pengguna. Berikut perinciannya.



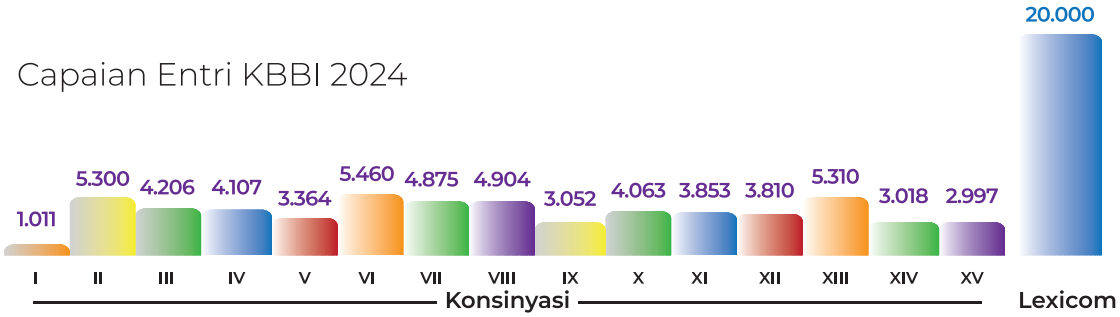
Grafik 12 Peningkatan jumlah entri KBBI per tahun



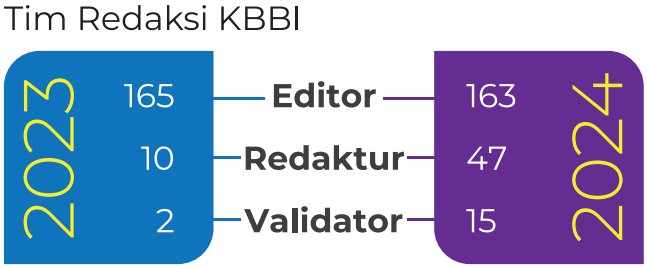
Grafik 13 Data Statistik KBBI

Untuk mengumpulkan 80.000 entri dalam waktu satu tahun, Tim Perkamusan dan Peristilahan menargetkan 60.000 kosakata baru melalui 15 kali konsinyasi inventarisasi kosakata dengan melibatkan berbagai pihak terpilih, antara lain anggota KKLP (Tim Redaksi) dari UPT, validator, redaktur, dan editor eksternal hasil rekrutmen, juga mahasiswa jurusan bahasa dan sastra dari 18 perguruan tinggi. Sumber entri berasal dari usulan masyarakat, Kamus Bidang Ilmu, serta hasil inventarisasi kosakata bahasa daerah yang terverifikasi melalui Sidang Komisi Bahasa Daerah (SKBD). Sementara itu, sebanyak 20.000 kosakata baru lainnya diperoleh dari hasil kerja sama antara Tim Perkamusan dan Peristilahan (Badan Bahasa) dengan Oxford Universitiy Press (OUP) dan Lexical Computing CZ (Lexicom) melalui proyek Lexonomy dan Dictionary Express. Berikut progres hasil program percepatan entri KBBI tahun 2024.

Grafik 14 Progres Capaian Entri



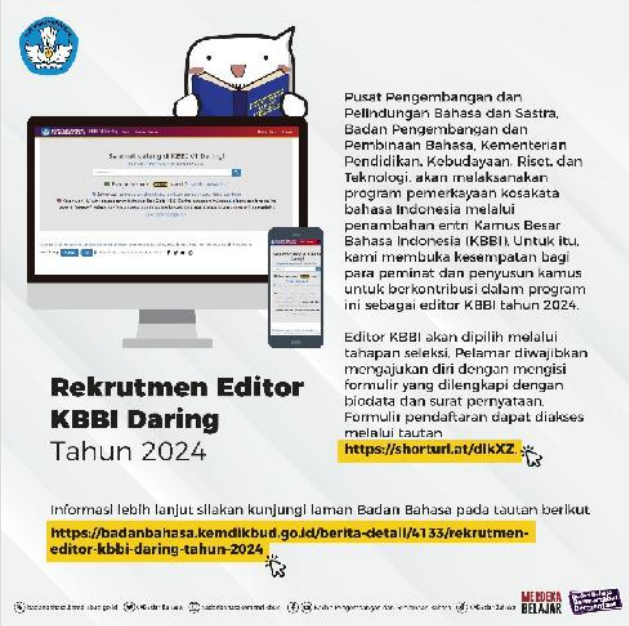
Pelibatan Anggota KKLP (Tim Redaksi) di UPT



Gambar 19 Perbandingan Jumlah Tim Redaksi Tahun 2023 dengan 2024

Pelibatan Anggota KKLP Perkamusan dan Peristilahan di Balai/Kantor Bahasa, dilakukan untuk mengimbangi beban kerja KBBI yang naik menjadi 2.000% di tahun 2024 ini. Peran redaksi juga disesuaikan agar pekerjaan dapat terlaksana dengan efisien. Berikut perbedaan jumlah redaksi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Pelibatan Editor Eksternal (Editor Rekrutmen)



Gambar 20 Bahan Publikasi Rekrutmen Editor KBBI Daring

Selain usulan kosakata baru dari tim redaksi internal dan masyarakat umum, penambahan usulan baru juga dilakukan oleh 20 editor eksternal yang direkrut secara khusus untuk mengusulkan kosakata baru sebanyak 20.000 entri, dengan target masing-masing 1.000 entri. Editor eksternal terikat dalam perjanjian kerja pada bulan Maret—Oktober 2024.

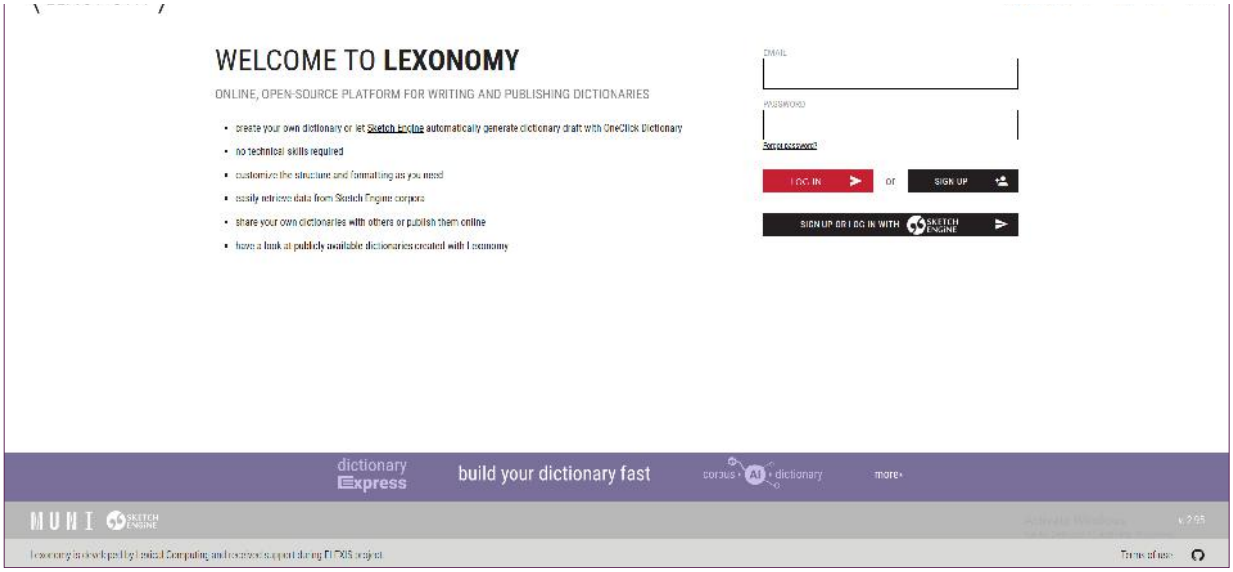
Pelibatan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pelibatan mahasiswa dalam percepatan penambahan entri difokuskan pada jenis kosakata turunan sebanyak 9.000 entri, dengan target dari tiap-tiap universitas sebanyak 500 entri. Untuk mendukung program ini, sebelumnya Tim Perkamusan dan Peristilahan melaksanakan pembekalan terhadap mahasiswa beserta dosen pendamping terpilih. Berikut daftar universitas yang terlibat.

- Universitas Indonesia
- Universitas Al Azhar Indonesia
- Unika Atma Jaya
- Universitas Negeri Jakarta
- Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
- UIN Syarif Hidayatullah
- Universitas Gadjah Mada
- Universitas Negeri Yogyakarta
- Universitas Sanata Dharma
- Universitas Sebelas Maret
- Universitas Ahmad Dahlan
- Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Universitas Negeri Malang
- UIN Sunan Ampel Surabaya
- Universitas Brawijaya
- Universitas Airlangga
- Universitas Muhammadiyah Malang
- Universitas Negeri Surabaya

Kerja sama dengan Oxford University Press (OUP) dan Lexical Computing SZ (Lexicom)

Sebanyak 20.000 entri dari target 80.000 entri KBBI, dikerjakan secara semiotomatis melalui kerja sama trilateral antara Tim Perkamusan dan Peristilahan (Badan Bahasa) dengan OUP dan Lexicom. Dalam kerja sama ini, OUP dan Lexicom memberikan data calon kosakata baru dari data korpus bahasa Indonesia yang telah ditapis dari data KBBI. Lexicom juga memberikan akses penggunaan platform Lexonomy bagi Tim Perkamusan dan Peristilahan untuk menyeleksi dan menyunting calon kosakata baru, sebelum akhirnya siap dimasukkan secara otomatis ke dalam KBBI.



Gambar 21 Platform Lexonomy oleh Lexicom

Perolehan Usulan dari Sidang Komisi Bahasa Daerah (SKBD)

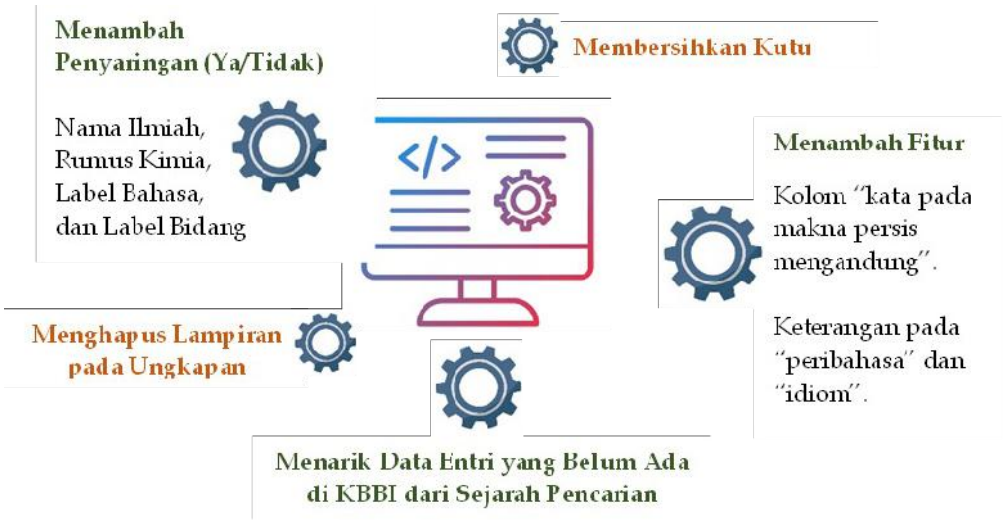
Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, penambahan entri KBBI tahun ini juga masih diperoleh dari hasil inventarisasi kosakata yang dilaksanakan oleh Balai dan Kantor Bahasa melalui program Sidang Komisi Bahasa Daerah (SKBD). Berikut hasil inventarisasi kosakata Balai/Kantor Bahasa tahun 2024.

Tabel 16Hasil inventarisasi kosakata Balai/Kantor Tahun 2024

No.	Balai/Kantor	Target Entri	Usulan Awal	Usulan Entri Terverifikasi
1	Balai Bahasa Provinsi Aceh	910	910	514
2	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Utara	707	707	428
3	Balai Bahasa Provinsi Riau	846	846	504
4	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat	506	509	431
5	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan	773	773	585
6	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	351	400	350
7	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	745	745	525
8	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	279	283	274
9	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	661	757	597
10	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	1.127	1.134	762
11	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	682	684	445
12	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	1.013	1.003	774
13	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	505	505	437
14	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	683	702	582
15	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	845	856	630
16	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	540	540	295
17	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	854	927	655
18	Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	572	577	493
19	Balai Bahasa Provinsi Bali	615	615	508
20	Balai Bahasa Provinsi Papua	508	508	405

No.	Balai/Kantor	Target Entri	Usulan Awal	Usulan Entri Terverifikasi
21	Balai Bahasa Provinsi Bengkulu	1.303	1.303	391
22	Balai Bahasa Provinsi Jambi	742	744	611
23	Balai Bahasa Provinsi Lampung	1.078	1.078	499
24	Balai Bahasa Provinsi Maluku	1.196	1.196	911
25	Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	802	836	484
26	Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara	711	711	454
27	Kantor Bahasa Provinsi Banten	523	526	309
28	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	514	520	453
29	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	350	352	288
30	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	301	301	261
	TOTAL	**21.267**	**21.714**	**15.021**

Untuk mendukung pemutakhiran data KBBI, Tim Perkamusan dan Peristilahan juga melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Aplikasi KBBI Daring. Kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengembangkan fitur-fitur KBBI Daring yang dibutuhkan untuk dapat mendukung upaya kerja tim redaksi dalam penambahan kosakata, membuat penyajian kosakata kepada publik yang lebih baik, serta mengatasi berbagai kutu yang menghambat proses kerja tim redaksi.



Gambar 22 Kegiatan Pemutakhiran Aplikasi KBBI Daring

2) Senarai Istilah

Senarai Istilah Sidang Komisi Istilah merupakan keluaran dari kegiatan Sidang Komisi Istilah (SKI). Kegiatan ini biasanya dilaksanakan setahun dua kali. Namun, tahun 2024, pelaksanaan Sidang Komisi Istilah hanya dilaksanakan sekali karena ada pengalihan fokus untuk mengejar target percepatan KBBI 200.000 entri. Dalam kegiatan Sidang Komisi Istilah dilakukan pemadanan istilah asing dan penyelarasan istilah yang sudah dipadankan sebelumnya. Sidang Komisi Istilah melibatkan pakar, baik akademisi maupun praktisi,

dari berbagai bidang ilmu untuk mengumpulkan dan mendiskusikan istilah bidang ilmu yang telah ditentukan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.



Foto 19 Pelaksanaan SKI

Dalam setiap penyelenggaraan Sidang Komisi Istilah, lima hingga tujuh komisi bidang ilmu bersidang. Bidang ilmu yang disidangkan merupakan bidang ilmu yang populer atau yang masih banyak menggunakan istilah bahasa asingnya, baik dalam kegiatan akademis maupun profesional, karena belum dipadankan. Selain itu, terdapat pula bidang ilmu yang disidangkan atas permintaan khusus dari lembaga tertentu. Berikut capaian entri dalam senarai istilah sidang komisi istilah tahun 2024.

Tabel 17 Rekapitulasi Hasil SKI 2024

No.	Komisi	Jumlah Entri
1	Senarai IstilahIlmu Geologi	383
2	Senarai Istilah Ilmu Astronomi	522
3	Senarai Istilah Ilmu Pangan Subbidang Industri Pangan	519
4	Senarai Istilah Ilmu Pertahanan Subbidang Industri Pertahanan	612
5	Senarai Istilah Ilmu Pendidikan Subbidang Kebijakan Pendidikan	290
6	Senarai Istilah Ilmu Komunikasi Subbidang Penyiaran	606
	Total Entri	**2.932**

3) Kamus Bidang Ilmu (KBI)

Kamus Bidang Ilmu merupakan rujukan yang memuat sejumlah istilah bidang ilmu tertentu yang disusun secara alfabetis disertai dengan definisinya. Kamus Bidang Ilmu sangat diperlukan untuk memperluas wawasan para ilmuwan khususnya para dosen, mahasiswa, dan penerjemah, pada saat mereka memerlukan padanan dan makna suatu istilah. Kamus ini dapat memberikan informasi tentang istilah khusus suatu bidang ilmu, padanan, dan maknanya. Tahun 2024, Tim Perkamusan dan Peristilahan telah menyelesaikan empat buah kamus bidang ilmu, yakni Kamus Bidang Ilmu Pertahanan Subbidang Diplomasi Pertahanan, Kamus Bidang Ilmu Komunikasi Subbidang Hubungan Masyarakat, Kamus Bidang Ilmu

Pendidikan Subbidang Kurikulum, dan Kamus Bidang Ilmu Pendidikan Subbidang Pengajaran dan Pembelajaran. Jumlah entri yang dicapai melalui empat kamus bidang ilmu tersebut sebanyak 3.726 kosakata. Jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu, yaitu 3.534 kosakata.



Gambar 23 Sampul Kamus Bidang Ilmu

Penyusunan Kamus Bidang Ilmu adalah kelanjutan dari kegiatan Sidang Komisi Istilah yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, pendefinisian, verifikasi, dan penyuntingan. Dalam pengumpulan data, penyusun mencari data dari berbagai terbitan, baik cetak maupun elektronik. Data yang dikumpulkan meliputi konteks, kelas kata, definisi (jika ada), sumber konteks, dan sumber definisi. Data hasil seleksi didefinisikan sesuai dengan konteks pemakaiannya dengan merujuk ke berbagai sumber, baik sumber cetak, lisan maupun sumber elektronik (internet). Pendefinisian didasarkan pada prinsip-prinsip leksikografi dan ejaan yang benar. Data yang sudah didefinisikan dan dianggap layak kemudian diverifikasi melalui Sidang Komisi Istilah (SKI) untuk melihat kesesuaian dengan ejaan dan memenuhi syarat dalam penguasaan bahasa dan prinsip-prinsip leksikografi. Pada tahap tersebut, dilakukan verifikasi entri tertentu kepada ahlinya sebelum ditetapkan sebagai entri dalam kamus. Setelah substansi dalam definisi diverifikasi, entri beserta penjelasannya kemudian disunting secara bahasa sesuai dengan kaidah EYD, serta sesuai dengan prinsip leksikografi.

4) Kamus Etimologi

Selain Kamus Bidang Ilmu, pengembangan kamus juga dilakukan dengan penyusunan kamus etimologi. Seperti kita ketahui, kosakata bahasa Indonesia banyak menyerap dari bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Arab, Cina, Belanda, Jawa Kuno, dan Persia. Penyerapan kosakata tersebut dilakukan melalui berbagai cara, yaitu pemadanan, penerjemahan, serta penyesuaian ejaan dan lafal. Dalam KBBI, tidak semua kosakata yang terserap dari bahasa asing diberi label bahasa asal. Oleh karena itu, informasi etimologis perlu untuk terus ditambahkan pada kosakata yang diserap dari bahasa asing agar asal-usul kata tersebut dapat diketahui dengan jelas dan terdata dengan baik. Dengan demikian, penyusunan kamus etimologi ini sangat diperlukan untuk menunjang program pengembangan kamus.



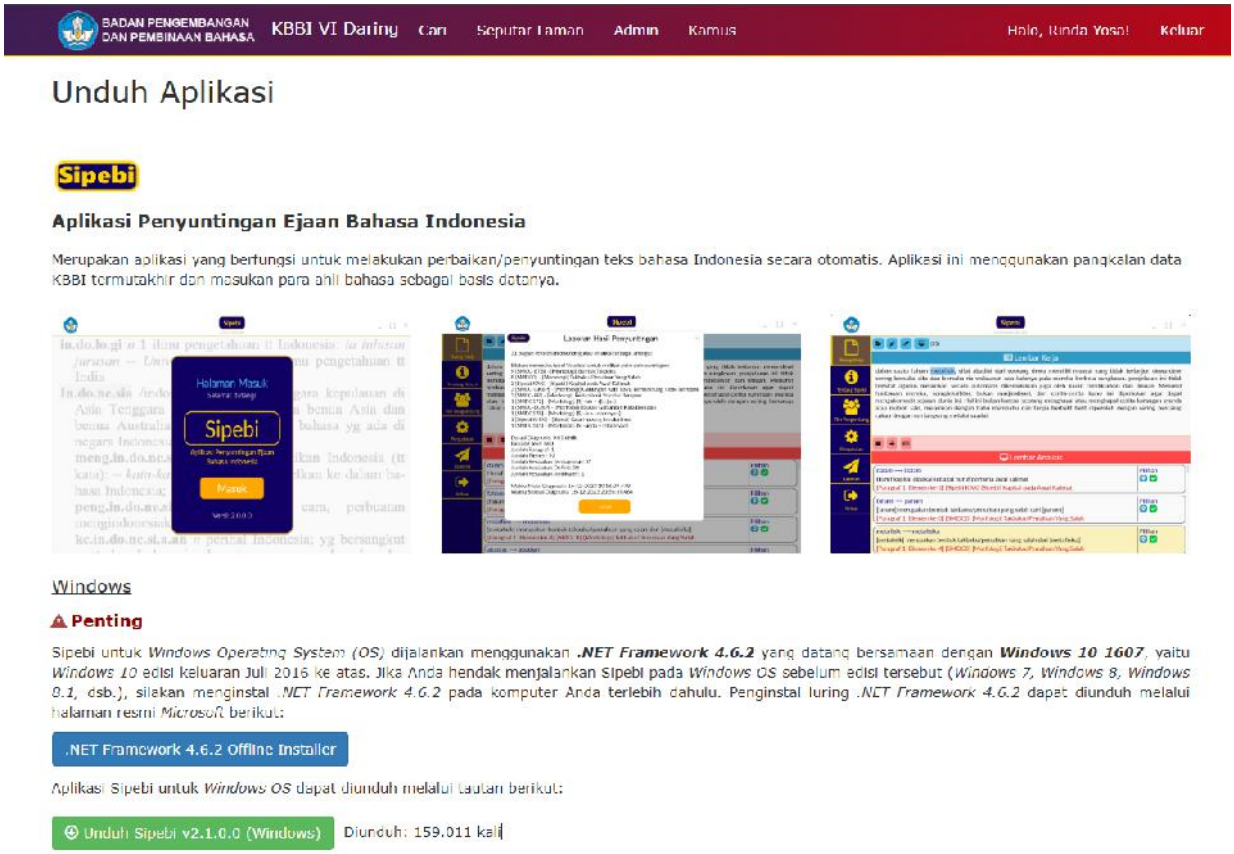
Gambar 24 Sampul Kamus Etimologi

Tahun 2024, Tim Perkamusan dan Peristilahan telah menyusun tiga kamus etimologi, yaitu Kamus Etimologi Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, dan Bahasa Jepang, dengan perincian jumlah entri Kamus Etimologi Bahasa Belanda 1.000, Bahasa Inggris 1.000, dan Bahasa Jepang 100 entri.

5) Sipebi



Untuk memberikan pelayanan terbaik dan menunjang kemudahan akses masyarakat dalam menggunakan aplikasi kebahasaan, Tim Perkamusan dan Peristilahan terus mengembangkan aplikasi Sistem Penyuntingan Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan Sipebi. Sipebi telah populer digunakan oleh masyarakat sejak diluncurkannya pada tahun 2021. Sipebi merupakan aplikasi penyuntingan bahasa yang berfungsi untuk melakukan perbaikan/penyuntingan teks bahasa Indonesia secara otomatis. Aplikasi tersebut menggunakan pangkalan data KBBI termutakhir dan masukan dari ahli bahasa. Aplikasi ini bersifat luring mudah alih (*portable*) dan dapat diunduh melalui KBBI Daring (Unduh Aplikasi - KBBI VI Daring). Hingga Desember 2024, aplikasi Sipebi sudah diunduh sebanyak 154.604 kali. Dengan demikian terdapat kenaikan jumlah pengunduh sebanyak 120.126 dari jumlah tahun lalu.



Gambar 25 Laman Unduh Sipebi

Fokus utama dalam pengembangan Sipebi tahun 2024 adalah penambahan data kamus Sipebi dan kamus kesalahan Sipebi. Saat ini, terdapat 186.562 ribu data pada kamus Sipebi, 52.700 ribu di antaranya adalah data formasi morfologi, dan 10.321 data kesalahan pada kamus kesalahan Sipebi. Jumlah data ini, meskipun sudah cukup memuaskan mengingat waktu pengumpulannya hanya dilakukan dalam satu tahun terakhir, masih perlu ditambah secara signifikan guna (1) meningkatkan kemampuan penyuntingan Sipebi dan (2) mempersiapkan lebih banyak sumber daya data (*data resources*) untuk dapat digunakan sebagai set data latihan (*training dataset*) bagi perangkat prosesi bahasa alami Sipebi (PBA Sipebi) yang direncanakan akan dikembangkan di tahun-tahun berikutnya. PBA Sipebi ini diperlukan untuk memampukan Sipebi melakukan kasus-kasus penyuntingan yang lebih kompleks, seperti kasus-kasus yang memerlukan pengertian semantik dan identifikasi kelas kata dalam kalimat. Tanpa set data latihan yang memadai, algoritma pembelajaran mesin semata, meskipun sangat baik, tidak mungkin akan membuat suatu perangkat PBA memiliki kualitas kerja yang baik.

6) Korpus Daerah (Koda)

Penyusunan korpus daerah (Koda), selain dilakukan untuk analisis bahasa seperti fungsi korpus pada umumnya (seperti mempelajari frekuensi kata dan frasa, menganalisis struktur sintaksis atau semantik, dan menyusun kamus atau tata bahasa), juga dilakukan untuk melatih dan menguji model dalam Pemrosesan bahasa alami (PBA), seperti pengenalan suara atau

terjemahan otomatis. Data korpus yang representatif dapat digunakan untuk analisis linguistik atau pemrosesan bahasa alami. Penyusunan Korpus Daerah di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra adalah rangkaian awal dari pembuatan aplikasi pelindungan bahasa daerah berbasis kecerdasan buatan.

Untuk mempercepat dan mempermudah pengumpulan data, serta untuk keperluan keterwakilan bahasa-bahasa derah di Indonesia, kegiatan ini perlu melibatkan UPT Badan Bahasa, dalam hal ini staf balai/kantor bahasa yang sudah terbiasa mengumpulkan data korpus. Namun, karena kegiatan ini adalah kegiatan baru, jumlah bahasa daerah yang dijadikan data sementara dibatasi hanya lima belas bahasa daerah saja, yaitu bahasa Bugis, Banjar, Bakumpai, Batak, Dayak, Jawa, Lampung, Madura, Makassar, Minang, Paser, Sasak, Sunda, dan Tolaki.



Gambar 26 impor Data Korpus

Data korpus yang terkumpul terdiri atas sumber-sumber berikut:

1. artikel atau berita di surat kabar atau majalah dalam bahasa daerah, baik dari sumber daring maupun luring;
2. cerita rakyat dalam bahasa daerah;
3. lagu-lagu berbahasa daerah;
4. bab buku atau karya ilmiah dalam bahasa daerah, baik dari sumber daring maupun luring; serta
5. surat dalam bahasa daerah, baik surat dinas resmi, surat undangan pernikahan, maupun surat pribadi yang sudah diizinkan untuk dipublikasi.

Jumlah data korpus yang terkumpul dalam kegiatan ini sebanyak 1.196 fail.

Tabel 18Jumlah Data Korpus

Daerah	Sub	Folder	Database
file_ach		14	13
file_bgs	Folder utama	1	77
	Pidato	8	
	Lagu Daerah dan Tradisi Lisan	14	
	Komedi Tunggal	8	
	Cerita Rakyat dan Karya Sastra	46	
file_bjr	Folder utama	1	14
	Cerita Rakyat	12	
	Berita	1	
file_bkm		8	8
file_btk		25	25
file_dyk		37	37
file_jwa	folder utama	1	863
	Jawa (Perpus)	850	
	Jawa (UPT)	12	
file_lam		0	0
file_mdr		30	30
file_mks		0	0
file_mng		17	17
file_psr		29	29
file_ssk		4	4
file_sun		60	59
file_tlk		20	20
		1198	**1196**

Tabel 19 Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya

No	Hambatan	Langkah Antisipasi
1	Peserta kegiatan tidak semuanya aktif dalam masa pendampingan.	Membuat metode pendampingan yang menarik dan menyenangkan.
2	Adanya kendala jaringan saat pelaksanaan tes awal/tes akhir di beberapa balai/kantor yang melaksanakan kegiatan di daerah perbatasan.	Berkordinasi dengan panitia daerah setempat untuk menyediakan jaringan internet yang memadai.
3	Jarak pemberian materi dengan tes akhir yang lama (karena adanya pendampingan) membuat peserta yang tidak aktif dalam pendampingan kesulitan dalam mengisi tes akhir.	Mengirimkan bahan materi kepada peserta dan membuat pengayaan materi.
4	Pengurusan nomor ISBN seluruh bahan bacaan literasi mengalami keterlambatan karena penulis belum mengirimkan surat pernyataan keaslian karya.	Melakukan koordinasi dan bersurat secara resmi kepada seluruh peserta untuk segera mengumpulkan surat pernyataan keaslian. Pengajuan nomor ISBN akan dilaksanakan pada awal tahun 2025.
5	Ketersediaan anak berkebutuhan khusus untuk menjadi peserta pada uji keterbacaan di Kota Surakarta tidak memenuhi jumlah target.	Mencari alternatif peserta lain melalui kerja sama dengan Dinas Sosial Kota Surakarta untuk mengundang peserta dewasa yang berkebutuhan khusus.
6	Pada saat *monitoring* kontrol mutu pekerjaan pencetakan buku pengayaan pendukung GLN terdapat perubahan konfigurasi warna cetak lembar petunjuk pengelolaan dan perubahan terhadap penggantian dan urutan judul di dokumen SPSE.	Membuat perubahan nilai adendum.
7	Terdapat 31 sekolah tutup dan 32 sekolah merger.	Berkoordinasi dengan PDM 10 perihal sekolah pengganti.
8	Inventarisasi Kosakata: Target 200 ribu entri KBBI terlalu besar dengan waktu yang sedikit dan SDM yang terbatas.	Merekrut editor eksternal, melaksanakan pembekalan mahasiswa sebagai calon pengusul entri KBBI, meningkatkan dan memonitor pelibatan tim redaksi KBBI dari UPT di seluruh Indonesia, dan melaksanakan 15 Konsinyasi Inventarisasi Kosakata.

No	Hambatan	Langkah Antisipasi
9	Proses pemutakhiran KBBI terkendala akibat ambatnya akses laman KBBI Daring karena server cadangan KBBI Daring belum memiliki lisensi.	Bekerja di jam istirahat atau malam hari (saat akses laman redaksi KBBI lancar), senyampang menunggu pemasangan lisensi pada server cadangan KBBI Daring.
10	Proses Integrasi Produk Kosakata dengan TIK, terutama terkait perizinan untuk pembelian perangkat lunak memiliki prosedur yang sangat panjang.	Berkoordinasi dengan berbagai pihak agar proses pembelian perangkat lunak berjalan lancar.

Berbagai kendala tentu ada dalam pencapaian target meningkatnya kualitas berbahasa penutur bahasa terbina. Dalam pelaksanaan Kemahiran Berbahasa Indonesia, Apresiasi Puisi: Festival Musikalisasi Puisi, Bengkel Penulisan Puisi dan Cerita Pendek terdapat beberapa hambatan, tetapi semuanya dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Beberapa hambatan yang terjadi adalah peserta kegiatan tidak semuanya aktif dalam masa pendampingan, adanya kendala jaringan saat pelaksanaan tes awal/tes akhir di beberapa balai/kantor yang melaksanakan kegiatan di daerah perbatasan, dan jarak pemberian materi dengan tes akhir yang lama (karena adanya pendampingan) membuat peserta yang tidak aktif dalam pendampingan kesulitan dalam mengisi tes akhir.

Salah satu tahapan dalam kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa adalah masa pendampingan selama 2–3 bulan. Pendampingan ini dilaksanakan secara daring setelah tes awal dan pemberian materi. Metode pendampingan ini dilakukan melalui grup WA dan pertemuan luring. Dalam masa pendampingan ini tidak semuanya peserta aktif berdiskusi melalui grup WA ketika disampaikan kasus kebahasaan atau topik pembahasan. Langkah yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, beberapa balai/kantor mengagendakan pertemuan luring dalam pendampingan. Dalam pertemuan luring tersebut, peserta diberi tugas untuk membuat tulisan atau konten kebahasaan yang diunggah di media sosial. Setelah itu, dalam pertemuan saat pendampingan peserta diberi kesempatan untuk presentasi di hadapan narasumber dan peserta lain. Pada saat presentasi, apabila ada kesalahan atau hal yang kurang tepat akan diberi pengarahan oleh narasumber. Hal tersebut, tentunya dilakukan dengan metode yang menarik sehingga semua peserta dapat aktif dan bisa mengerjakan tes akhir dengan baik.

Selanjutnya, adanya kendala jaringan saat pelaksanaan tes awal/tes akhir di beberapa balai/kantor yang melaksanakan kegiatan di daerah perbatasan menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan karena peserta tidak bisa berkonsentrasi dalam menjawab soal dengan baik. Peserta yang sudah mengerjakan soal tes baru dapat mengerjakan setengah dari seluruh soal, tiba-tiba mengalami kendala sinyal/jaringan sehingga soal yang sudah dikerjakan/ditulis, jawabannya hilang dan peserta tersebut harus mengulang dari awal lagi. Hal tersebut tentu memengaruhi konsentrasi peserta dan tidak dapat berupaya maksimal dalam mengerjakan soal karena diulang lagi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, panitia balai/kantor berkoordinasi dengan pelaksana daerah setempat untuk bisa menyediakan fasilitas yang memadai. Strategi yang dilakukan panitia daerah adalah menyediakan perangkat dan jaringan yang kuat untuk peserta sehingga mereka dapat mengerjakan tes akhir dengan maksimal dan memperoleh nilai terbaik.

Hambatan yang terjadi selanjutnya adalah, adanya jarak yang lama saat pemberian materi dengan tes akhir (karena ada tahap pendampingan) membuat peserta yang tidak aktif dalam pendampingan kesulitan dalam mengisi tes akhir. Langkah antisipasi yang dilakukan adalah membuat metode pendampingan yang menarik dan mengupayakan pendampingan secara luring sehingga peserta dapat antusias lagi. Strategi yang dilakukan dengan melaksanakan pendampingan secara luring (dalam 2–4 kali pertemuan). Dalam pendampingan luring tersebut, peserta diberi pengayaan materi, praktik langsung, dan membuat karya kreasi dan inovasi yang dapat diunggah ke laman Badan Bahasa. Setelah dilaksanakan berbagai strategi pelaksanaan dalam pendampingan secara terus-menerus dan tes akhir dapat berjalan lancar dan baik.

Indikator Kinerja Program 1.2: Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya

Penggunaan bahasa Indonesia saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Ruang-ruang publik bahasa Indonesia dapat dikatakan hampir tergeser oleh bahasa asing. Ruang publik yang seharusnya merupakan ruang yang menunjukkan identitas keindonesiaan melalui penggunaan bahasa Indonesia ternyata sudah diwarnai oleh bahasa asing. Berbagai papan nama, baik papan nama pertokoan, restoran, pusat-pusat perbelanjaan, hotel, permukiman, iklan maupun kain rentang hampir sebagian besar tertulis dalam bahasa asing. Peningkatan kualitas penggunaan bahasa dengan mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dilakukan dalam upaya memperkuat identitas keindonesiaan. Penggunaan bahasa yang berkualitas oleh lembaga di ruang-ruang publik akan membiasakan masyarakat dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar serta mengutamakan bahasa negara. Semakin banyak lembaga yang meningkat kualitas berbahasanya, semakin baik pula ruang publik serta dokumen yang diterbitkan oleh lembaga tersebut. Oleh karena itulah, lembaga yang belum baik kualitas berbahasanya merupakan lembaga yang dibina untuk ditingkatkan kualitas berbahasanya.

Lembaga yang mendapat pembinaan adalah lembaga pemerintah, pendidikan, dan swasta yang karena tugas dan fungsinya harus menggunakan bahasa Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya penggunaan papan nama, papan informasi, papan petunjuk, surat-menyurat, spanduk, selebaran. Pembinaan ini dilaksanakan multitahun selama tiga tahun dengan menetapkan sejumlah lembaga dengan harapan akan terlihat perubahannya dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2024 lembaga yang dibina adalah lembaga yang telah mulai dibina pada tahun 2022. Kegiatan pembinaan lembaga dilakukan dengan kegiatan utama berupa pendampingan kebahasaan dengan langkah

1) menentukan lembaga binaan yang akan dibina selama tiga tahun;
2) melakukan audiensi dan pengambilan data penggunaan bahasa, baik di ruang publik maupun pada dokumen lembaga, kemudian memberi penilaian atas data-data tersebut pada format penilaian yang telah disediakan;

3) melakukan sosialisasi untuk menyampaikan materi dan strategi pengutamaan bahasa negara berdasarkan data kebahasaan yang telah diambil dan dianalisis dan memberi rekomendasi perbaikan jika penggunaan bahasanya belum mengutamakan bahasa negara;
4) melakukan pendampingan atau fasilitasi dengan mengaktifkan grup-grup WA dengan pengampu pengutamaan bahasa negara dari lembaga yang dibina atau melakukan kunjungan konsultatif secara periodik ke lembaga yang dibina serta mengadakan pertemuan secara daring/luring untuk memberikan materi kebahasaan yang diperlukan;
5) melakukan evaluasi dengan pengambilan data sesudah pendampingan dan pembinaan dilakukan pada tahun berjalan; dan
6) memberikan apresiasi atau penghargaan kepada lembaga terbina yang memperlihatkan perbaikan atau usaha yang signifikan dalam pengutamaan bahasa negara. Penghargaan ini dapat berupa pemberian sertifikat/piagam penghargaan atau memberikan uang pembinaan selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah tiga tahun pembinaan, lembaga-lembaga yang dibina yang menunjukkan praktik penggunaan bahasa negara dengan baik secara konsisten dapat ditetapkan sebagai lembaga yang mengutamakan bahasa negara. Selanjutnya, lembaga ini dapat ditunjuk sebagai mitra pembinaan atau rujukan praktik baik pengutamaan bahasa negara.

Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya ditentukan dengan menerapkan metode penghitungan sebagai berikut.

Gambar 27 Metode Perhitungan Persentase Lembaga Terbina

$$PLT = \left(\frac{BRP}{LT} + \frac{BS}{LT}\right) \times \frac{100}{2}$$

Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya

(1.301/1.395 + 1.301/1.395) : 2 x 100 = 93,26

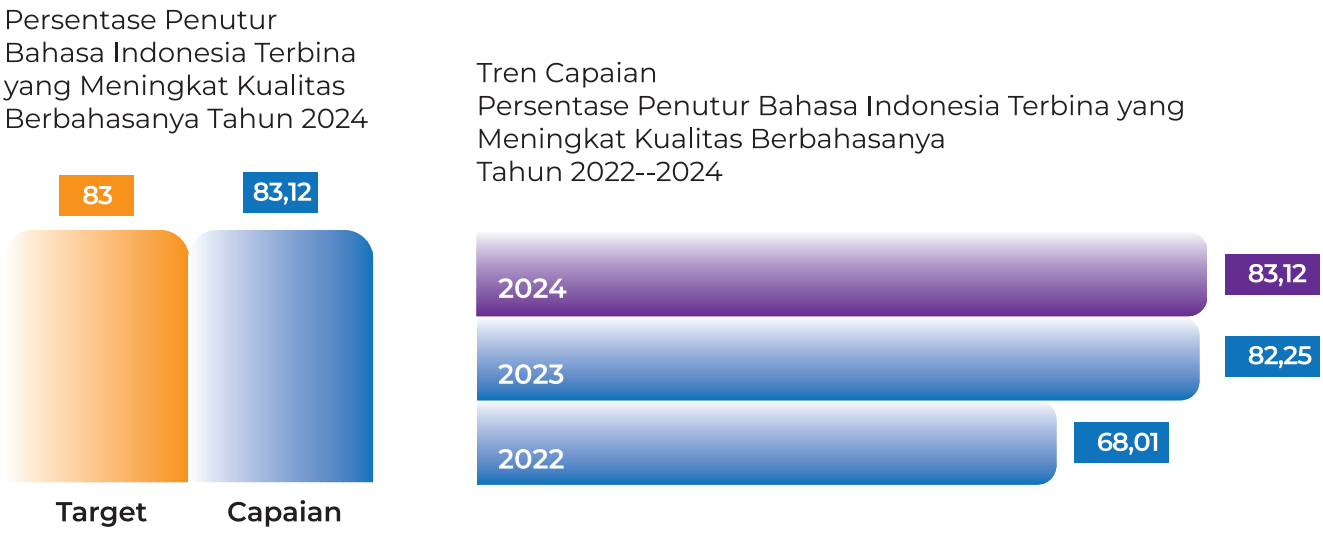
Keterangan:

PLT = Persentase lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya
BRP = Jumlah lembaga yang naik nilai bahasa ruang publiknya
BS = Jumlah lembaga yang naik nilai bahasa suratnya
LT = Lembaga terbina bahasa ruang publiknya
Tipe = Kumulatif

Tabel 20 Target dan Realisasi IKP Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Angka Dasar	2022	2023	Tahun 2024			Target Renstra 2024
							Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	1.2	Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya	43,9	60	75,99	91,99	93,26	101,48	91,99

Grafik 15 Capaian IKP Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya



Pada tahun 2024, Capaian IKP Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya sudah tercapai dengan baik. Target yang ditetapkan adalah 91,99, capaiannya adalah 93,36, dan persentase capaiannya sebesar 101,48%. Capaian IKP Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya dari tahun ke tahun terus meningkat capaiannya sehingga target pada akhir renstra pada tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Detail capaian dapat dilihat pada lampiran.

Data-data penggunaan bahasa di ruang publik yang mengalami peningkatan dapat lihat di antaranya sebagai berikut.

Foto 20 Perbaikan data objek penggunaan bahasa di ruang publik di Perumda Owabong, Jawa Tengah



Foto 21 Perbaikan data objek penggunaan bahasa di ruang publik di SMAN 32 Jakarta

Sebelum **Sesudah**









Foto 22 Perbaikan data objek penggunaan bahasa di ruang publik di Hotel Santika, Bengkulu

Sebelum **Sesudah**













Tercapainya target persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas berbahasanya pada tahun 2024, yaitu 93,36% didukung oleh peningkatan kualitas berbahasa lembaga binaan dalam pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan pada dokumen di 1.395 lembaga di seluruh Indonesia melalui balai/kantor bahasa. Tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta 30 balai/kantor bahasa bersama dengan pemerintah daerah menentukan lembaga yang menjadi sasaran pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara di 31 wilayah kerja, yaitu 1.395 lembaga yang terdiri atas lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan lembaga swasta.

2. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta balai/kantor bahasa melakukan pengambilan data penggunaan bahasa baik di ruang publik maupun pada dokumen lembaga, kemudian memberi penilaian atas data-data tersebut pada format penilaian yang telah disediakan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.
3. Berdasarkan data penggunaan bahasa, baik di ruang publik maupun pada dokumen lembaga, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta balai/kantor bahasa melakukan sosialisasi untuk menyampaikan materi dan strategi pengutamaan bahasa negara, kemudian memberi rekomendasi perbaikan jika penggunaan bahasanya belum mengutamakan bahasa negara (Instrumen Penilaian Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga terlampir).
4. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta balai/kantor bahasa melalui ahli bahasanya melakukan pendampingan atau fasilitasi dengan mengaktifkan grup-grup WA dengan pengampu pengutamaan bahasa negara dari lembaga yang dibina atau melakukan kunjungan konsultatif secara periodik ke lembaga yang dibina.
5. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta 30 balai/kantor bahasa melakukan evaluasi dengan pengambilan data sesudah pembinaan dilakukan pada tahun berjalan. Data tersebut juga dinilai dengan menggunakan format penilaian yang sama sebagaimana format penilaian pada analisis data pertama.

Selanjutnya pada tahun 2024 ini dilaksanakan pemberian Penghargaan Wajah Lembaga dari Badan Bahasa untuk lima lembaga terbaik untuk tiga kategori, yaitu lembaga pemerintah, pendidikan, swasta. Lembaga yang memiliki peningkatan kualitas berbahasa dari hasil pendampingan diberi penghargaan berupa sertifikat dan uang pembinaan. Lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 21 Lembaga Penerima Penghargaan Wajah Lembaga Tahun 2024

No.	Nama Lembaga	Predikat	Kategori
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Terbaik I	Lembaga Pemerintah
2	Perumda Owabong, Provinsi Jawa Tengah	Terbaik II	Lembaga Pemerintah
3	Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Terbaik III	Lembaga Pemerintah
4	Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu	Terbaik IV	Lembaga Pemerintah
5	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan	Terbaik V	Lembaga Pendidikan
6	SMP Negeri 2 Dobo, Provinsi Maluku	Terbaik I	Lembaga Pendidikan
7	SMP Budi Mulia Dua, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Terbaik II	Lembaga Pendidikan
8	MAN 1 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Terbaik III	Lembaga Pendidikan
9	SMK Negeri 4 Bandarlampung, Provinsi Lampung	Terbaik IV	Lembaga Pendidikan
10	SMA Negeri 32 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	Terbaik V	Lembaga Pendidikan
11	Hotel Santika, Provinsi Bengkulu	Terbaik I	Lembaga Swasta
12	Nirwana Gardens, Provinsi Kepulauan Riau	Terbaik II	Lembaga Swasta
13	Hotel New Idola, Provinsi DKI Jakarta	Terbaik III	Lembaga Swasta
14	Rumah Sakit Umum Kharisma Paramedika, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Terbaik IV	Lembaga Swasta
15	Rumah Sakit Syifa Medika, Provinsi Kalimantan Selatan	Terbaik V	Lembaga Swasta

Pemberian penghargaan dilaksanakan pada bulan Oktober pada puncak acara. Lembaga-lembaga tersebut akan menjadi mitra Badan Bahasa dalam mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik.



Foto 23 Pemberian Penghargaan Pembinaan 45 Lembaga Tingkat Nasional

Tabel 22 Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Persentase Lembaga Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya

No	Hambatan	Langkah Antisipasi
1	Beberapa instansi masih belum memberikan respons baik/positif terhadap hasil rekomendasi untuk perbaikan data penggunaan bahasa di ruang publik karena memerlukan anggaran.	Koordinasi dengan Pemda untuk pengutamaan bahasa negara di 45 lembaga dalam perbaikan data di ruang publik dan dokumen agar dapat dianggarkan.
2	Belum ada templat khusus yang memudahkan dalam pengolahan data	Membuat templat format pengolahan data yang memudahkan dalam mengolah nilai

Pembinaan lembaga dalam penggunaan bahasa di ruang publik, baik wajah bahasa lembaga maupun bahasa pada dokumen harus dilakukan secara berkelanjutan

dan terukur. Prinsip keberlanjutan ini merupakan upaya internalisasi sikap positif terhadap bahasa Indonesia terhadap para pemangku kepentingan pada lembaga-lembaga yang dibina. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia diwujudkan dengan adanya sikap setia terhadap bahasa Indonesia, bangga menggunakan bahasa Indonesia, dan sadar akan adanya norma dalam penggunaan bahasa Indonesia. Internalisasi ketiga sikap tersebut akan termanifestasi pada penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik lembaga (wajah bahasa dan dokumen/surat). Untuk bisa menginternalisasi sikap positif terhadap bahasa Indonesia, diperlukan upaya pembinaan yang berkelanjutan dalam pengutamaan bahasa negara. Pembinaan yang berkelanjutan ini dilakukan dengan minimal lima tahap pembinaan, yaitu penentuan lembaga sasaran pembinaan, audiensi dengan pemangku kepentingan lembaga binaan, sosialisasi bahan pengutamaan bahasa negara, fasilitasi/pendampingan kebahasaan, serta evaluasi dan apresiasi terhadap lembaga.

Dalam pelaksanaannya tentu ada beberapa kendala, misalnya masih ada instansi yang belum memberikan respons baik/positif terhadap hasil rekomendasi untuk perbaikan data penggunaan bahasa di ruang publik karena memerlukan anggaran. Upaya yang dapat dilakukan, yaitu berkoordinasi dengan pemda untuk mengutamakan bahasa negara di 45 lembaga dalam perbaikan data di ruang publik dan dokumen agar dapat dianggarkan dalam belanja negara. Strategi yang dilakukan dalam pencapaian program dengan memberikan saran perbaikan pada objek yang tidak memerlukan dana/anggaran besar.

Selain itu, adanya kendala internal dalam hal pengolahan data belum memiliki templat yang standar yang dapat digunakan oleh semua balai/kantor dalam pengisian data. Langkah antisipasi yang dilakukan dengan membuat templat pengolahan data yang standar. Strategi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target adalah membuat templat atau format pengolahan data sehingga bisa memudahkan dalam pengolahan nilai.

Berikut ini beberapa faktor keberhasilan capaian indikator Persentase Lembaga Bahasa Indonesia yang Meningkat Kualitas Bahasanya.

a. Adanya koordinasi dan kerja sama dengan pimpinan pemerintah daerah setempat baik dari lembaga pemerintah, pendidikan, dan swasta untuk memperbaiki data objek di ruang publik dan dokumen setelah diberikan rekomendasi perbaikan dari proses pembinaan dan pendampingan.
b. Keberhasilan capaian juga didukung oleh adanya komunikasi yang intensif antara tim kerja dari balai/kantor dan perwakilan lembaga binaan. Komunikasi yang baik dapat mempermudah dan memperlancar pendampingan sehingga perbaikan data di ruang publik dan dokumen dapat setiap saat dikomunikasikan.
c. Fasilitasi dan dukungan dari pemerintah daerah dalam upaya pengutamaan bahasa negara di wilayahnya masing-masing.

Sasaran Program 2:

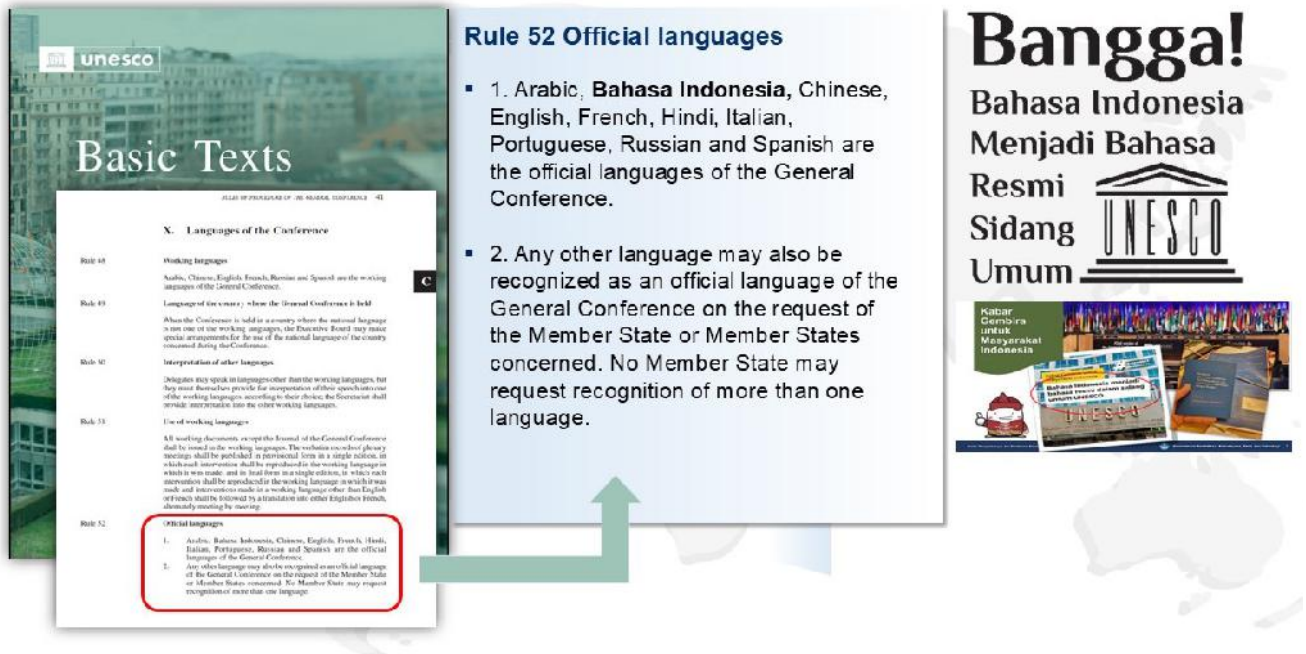
Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional

Upaya internasionalisasi bahasa Indonesia memiliki beberapa dampak positif, di antaranya:

1) meningkatkan martabat bahasa Indonesia: upaya internasionalisasi bahasa Indonesia dapat membantu meningkatkan peran dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional;
2) meningkatkan citra Indonesia: bahasa merupakan bagian penting dari identitas suatu negara. Dengan memperkenalkan bahasa Indonesia kepada dunia internasional, upaya internasionalisasi ini dapat membantu meningkatkan citra dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional;
3) Mendorong penguatan ekonomi: bahasa merupakan alat penting untuk berkomunikasi dan berbisnis. Dengan memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional dapat membantu memperluas jejaring pasar ekspor dan menarik investasi dari negara lain;
4) memperluas jejaring diplomasi: Upaya internasionalisasi bahasa Indonesia dapat membantu memperluas jejaring diplomasi Indonesia dengan negara lain dan membantu meningkatkan kerja sama dan hubungan diplomatik;
5) memperkuat identitas nasional: upaya internasionalisasi bahasa Indonesia membantu memperkuat identitas nasional dan memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap diakui dan dihormati di tingkat internasional.

Bahasa Indonesia telah berhasil menjadi *lingua franca* yang menyatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sejak ditetapkan oleh para pemuda pada tahun 1928 sebagai bahasa persatuan, posisi bahasa Indonesia diperkuat kembali pada tahun 1945 sebagai bahasa negara. Selama puluhan tahun bahasa Indonesia menjalankan perannya sebagai bahasa negara dan menjadi bahasa penghubung antarsuku yang memiliki bahasa daerah masing-masing. Pada tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pemerintah mulai berupaya untuk meningkatkan lagi peran dan fungsi bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa internasional. Pada tahun 2023, bahasa Indonesia secara resmi telah menjadi bahasa internasional dengan ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO.

Gambar 28 Penetapan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Resmi Sidang Umum UNESCO



Upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, salah satunya melalui program bahasa indonesia bagi penutur asing (BIPA). Program BIPA merupakan upaya pemerintah dalam menyebarluaskan bahasa Indonesia ke luar negeri melalui ranah pendidikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan warga negara asing untuk mempelajari bahasa Indonesia. Penyebarluasan bahasa Indonesia ke luar negeri dimulai pada tahun 2015. Sejak program ini dimulai hingga saat ini, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 56 negara. Program penginternasionalan bahasa Indonesia melalui program BIPA diharapkan menimbulkan dampak yang signifikan bagi meningkatnya peran bahasa Indonesia serta daya saing bangsa di kancah internasional dan menunjukkan jati diri bangsa.

Indikator Kinerja Program 2.1: Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia

Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia merupakan banyaknya negara di dunia yang menyelenggarakan program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) melalui lembaga penyelenggara program BIPA. Penyelenggaraan program BIPA dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Negara yang dimaksud merupakan negara berdaulat yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemilihan negara sasaran strategis penyebaran program BIPA berdasarkan kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan rekomendasi Kementerian Luar Negeri. Lembaga penyelenggara program BIPA yang dimaksud meliputi lembaga pendidikan (formal dan nonformal), lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau komunitas.

Peran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam pencapaian program penyebarluasan bahasa Indonesia adalah melalui fasilitasi pengembangan program BIPA. Fasilitasi ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Fasilitasi yang dimaksud adalah penyediaan bantuan teknis penyelenggaraan program pembelajaran BIPA, seperti penyediaan pengajar dan bahan ajar BIPA serta penyediaan bimbingan teknis ke-BIPA-an bagi pengajar dan lembaga.

Gambar 29 Metode Perhitungan Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia

Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia

$$\sum NBI = NA + NB$$

Keterangan:

∑NBI : Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia

NA : Akumulasi jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia hingga tahun tertentu

NB : Jumlah negara baru yang mengajarkan bahasa Indonesia pada tahun tertentu

Metode penghitungan jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia adalah hasil penambahan akumulasi jumlah negara hingga tahun tertentu dan jumlah negara baru pada tahun tertentu. Peran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam fasilitasi penyelenggaraan program BIPA dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

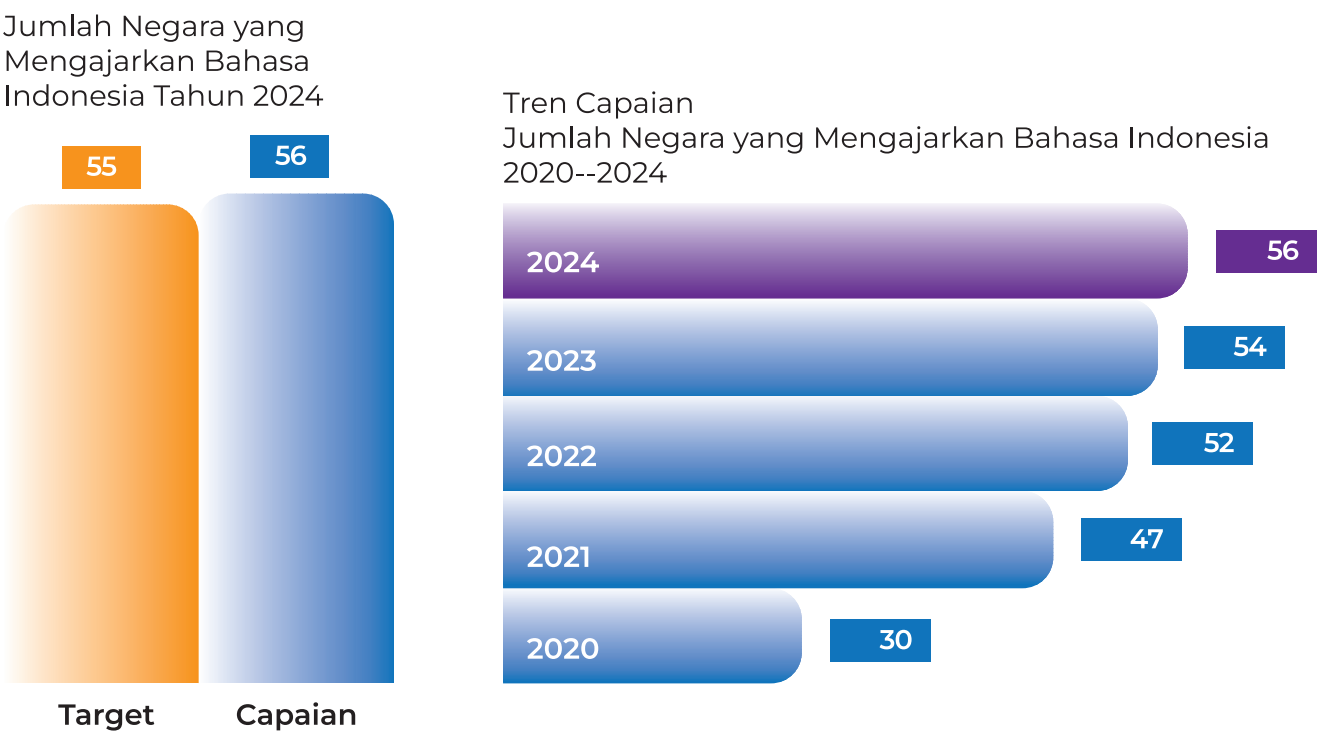
Tabel 23 Target dan Realisasi IKP Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Angka Dasar	2022	2023	Tahun 2024			Target Renstra 2024
							Target	Realisasi	%	
2	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	2.1	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	47	48	54	55	56	101,8	50

Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia pada tahun 2024 ditargetkan secara kumulatif meningkat sebanyak 1 negara dari capaian tahun 2023, yaitu sebanyak 54 negara.

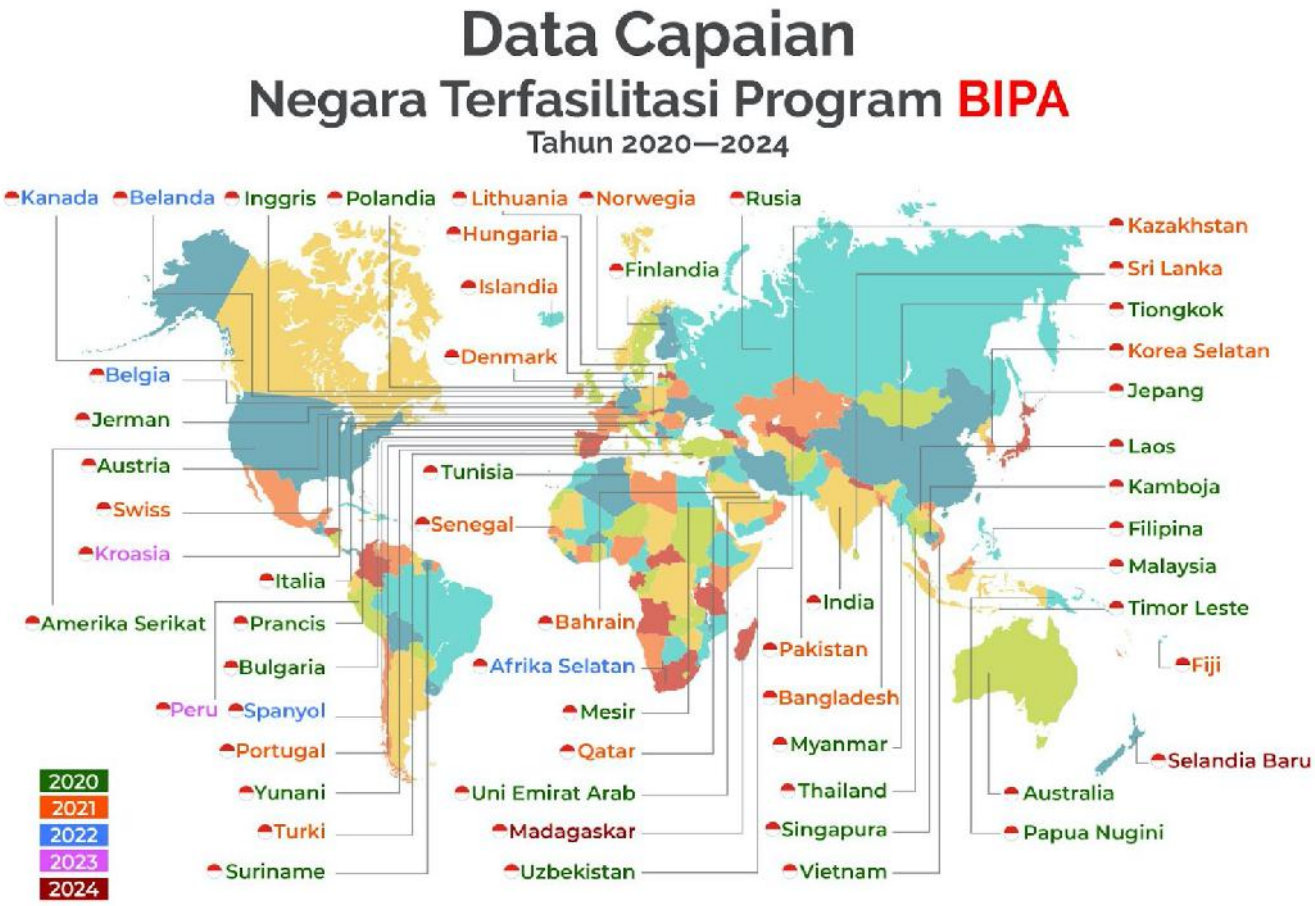
Secara tidak langsung, capaian tahun 2023 sudah melampaui target jumlah negara penyelenggara program BIPA yang tercantum dalam target renstra. Pada tahun 2024, terdapat penambahan dua negara baru yang terfasilitasi penyelenggaraan program BIPA. Dengan demikian, capaian jumlah negara penyelenggara program BIPA menjadi 56 negara.

Grafik 16 Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia Tahun 2024



Tren capaian jumlah negara yang menyelenggarakan program BIPA terus meningkat. Sejak tahun 2020, pemerintah menargetkan setidaknya ada 30 negara yang menyelenggarakan program BIPA. Realisasi jumlah negara yang menyelenggarakan program BIPA tercapai, yaitu 30 negara. Meskipun pada saat itu semua negara di dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang melanda sebagian besar negara di dunia. Program BIPA yang saat itu mulai diselenggarakan secara daring menjadi salah satu program yang sukses dengan tingginya minat pemelajar di luar negeri untuk mempelajari bahasa Indonesia. Hal ini terus meningkat pada tahun 2021, yaitu terdapat penambahan 17 negara baru yang menyelenggarakan program BIPA. Hal ini merupakan loncatan terbesar dalam sejarah fasilitasi program BIPA yang dilakukan oleh Badan Pengembangan

dan Pembinaan Bahasa. Pada tahun 2022, terdapat penambahan 5 negara baru yang menyelenggarakan program BIPA. Pada tahun 2023 dan 2024, terdapat penambahan negara masing-masing sebanyak 2 negara. Dengan demikian, pada tahun 2024 ada 56 negara yang menyelenggarakan program BIPA. Berikut ini infografis penyebaran bahasa Indonesia dari tahun 2020–2024.



Gambar 30 Data Capaian Negara Terfasilitas Program BIPA tahun 2020--2024

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra (Pusdaya) memiliki tugas untuk mengoordinasi peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Upaya penginternasionalan bahasa Indonesia dilakukan dengan menyelenggarakan program bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) secara sistemik dan berkelanjutan. Selain itu, dalam mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia, Pusdaya juga melaksanakan program penerjemahan.

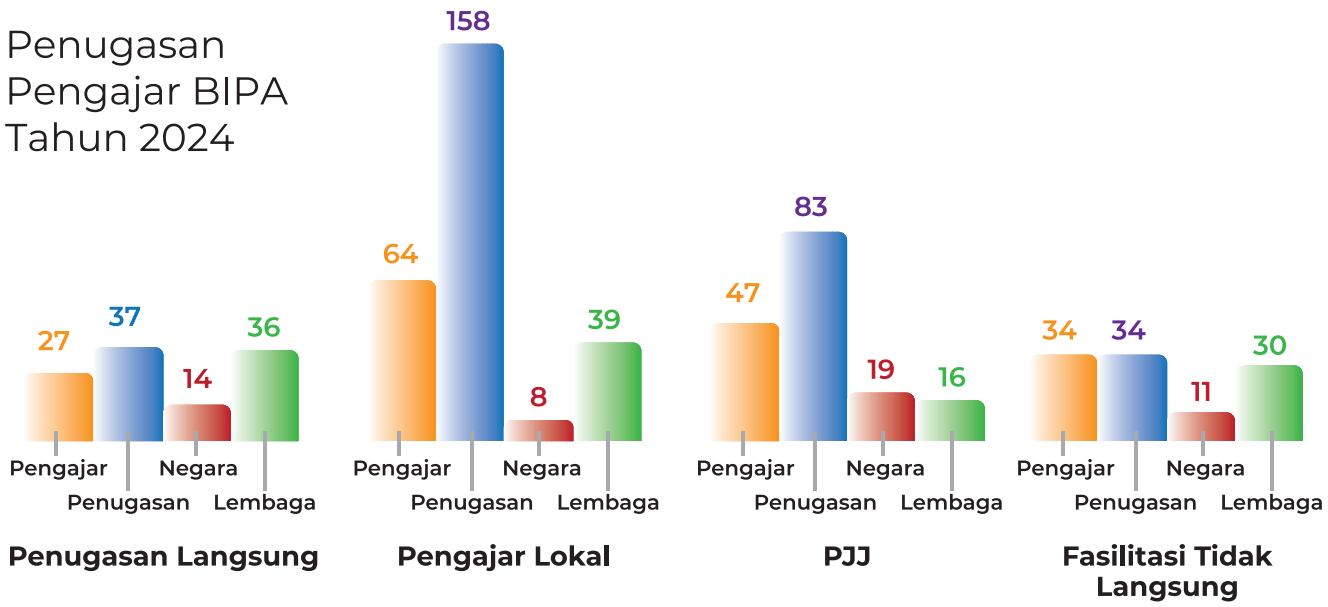
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki tiga peran, yaitu sebagai regulator, koordinator, dan fasilitator dalam pengembangan program BIPA dan penerjemahan. Pada ranah regulasi, Badan Bahasa berupaya menyediakan regulasi dan kebijakan sebagai acuan nasional dan internasional terkait dengan program BIPA dan penerjemahan. Pada ranah koordinasi, Badan Bahasa melakukan pengembangan jejaring kemitraan nasional dan internasional program BIPA dan penerjemahan. Pada ranah fasilitasi, Badan Bahasa menyediakan data, informasi, bahan, dan layanan bagi penerima manfaat dan pemangku kepentingan program BIPA dan penerjemahan.

Dalam rangka implementasi tiga peran di atas, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra menyelenggarakan program dan kegiatan sebagai berikut.

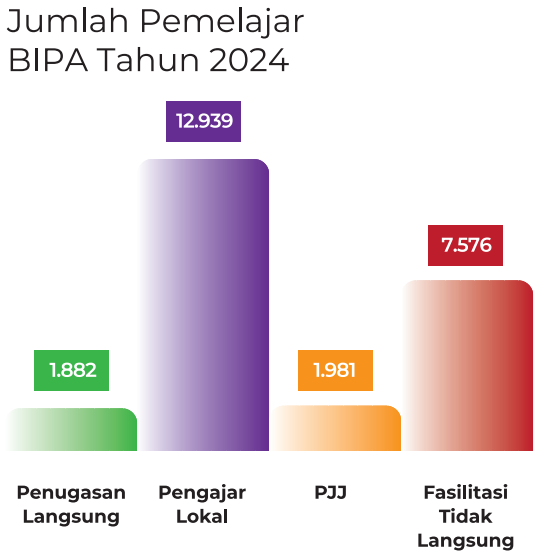
a. Bestari BIPA

Bestari BIPA merupakan subkomponen utama yang mendukung pencapaian IKP Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia yang merupakan bagian dari komponen Pelayanan profesional terhadap lembaga penyelenggara program BIPA. Fasilitasi program BIPA tahun ini diberikan kepada 121 lembaga di 33 negara dengan menugasi 172 orang pengajar melalui tiga skema penugasan: pengiriman pengajar, penugasan pengajar lokal di luar negeri, dan pembelajaran jarak jauh secara daring dengan total jumlah pemelajar sebanyak 24.378 orang. Rincian jumlah capaian yang diperoleh melalui fasilitasi, baik langsung maupun tidak langsung tersebut disajikan dalam grafik berikut ini.

Gambar 31 Jumlah Penugasan Pengajar BIPA Tahun 2024



Grafik 17 Jumlah Pemelajar BIPA Tahun 2024



Pada tahun 2024, Pusdaya menugasi pengajar secara langsung sebanyak 27 orang yang melayani 36 lembaga di 14 negara. Selain itu, Pusdaya juga melibatkan sebanyak 64 pengajar lokal yang bertugas di 8 negara. Pengajar lokal ini mengajar di 39 lembaga yang menyelenggarakan program BIPA. Untuk memperkuat fasilitasi program BIPA, khususnya bagi perwakilan RI di luar negeri, Pusdaya juga memfasilitasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) daring. Kelas ini diampu oleh 47 pengajar yang melayani 19 negara.

Pada tahun 2024, pemelajar BIPA yang terfasilitasi program BIPA sebanyak 24.378 pemelajar. Penugasan pengajar lokal menyumbang 53% capaian jumlah pemelajar BIPA pada tahun 2024 atau sekitar 12.939 pemelajar. Fasilitasi tidak langsung melalui penyelenggaraan kegiatan Bimtek dan penyediaan bahan fasilitasi pembelajaran menyumbang 31% capaian jumlah pemelajar atau sekitar 7.576 pemelajar. Sementara penugasan pengajar secara langsung dan PJJ menyumbang 7,7% dan 8,1% capaian jumlah pemelajar BIPA.



Foto 24 Penugasan Pengajar BIPA Pusat Secara Langsung Tahun 2024



Foto 25 Penugasan Pengajar Lokal BIPA Tahun 2024



Gambar 32 Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Daring Tahun 2024

b. Apresiasi Ke-BIPA-an

Apresiasi Ke-BIPA-an pada tahun 2022--2024 diwujudkan dalam bentuk kegiatan kompetitif dan apresiatif. Kegiatan kompetitif ini berupa lomba berbahasa Indonesia. Sementara itu, kegiatan apresiatif berupa pemberian apresiasi bagi para peserta terbaik dalam setiap jenis lomba. Kedua kegiatan tersebut dikemas dalam kegiatan Festival Handai Indonesia (FHI). FHI bertujuan untuk menyediakan wahana unjuk kemahiran dan kreativitas warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia dalam bertutur dan menulis kreatif dengan menggunakan bahasa Indonesia. Peserta FHI meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah peserta maupun dari segi jumlah negara asal peserta. Hal ini membuktikan bahwa penyebaran bahasa Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berikut adalah gambaran FHI yang dilaksanakan sejak tahun 2022–2024.

Tabel 24 Perkembangan pelaksanaan FHI tahun 2022—2024

Aspek	2022	2023	2024
Jumlah negara	33 negara	29 negara	1. Babak penyisihan diikuti oleh 78 negara
			1. Babak final diikuti oleh 43 negara
Jumlah peserta	130 peserta	146 peserta	1. Babak penyisihan diikuti oleh 539 peserta
			2. Babak final diikuti oleh 102 orang peserta
Jumlah peserta terbaik	18 orang	9 kategori (8 orang dan 1 tim)	21 orang

Pada tahun 2022, para peserta terbaik sejumlah 18 orang diberikan apresiasi berupa dana apresiasi. Pada tahun 2023, diperoleh 9 peserta terbaik I yang diundang ke Jakarta untuk mengenal Indonesia lebih dekat melalui studi wisata di Taman Mini Indonesia Indah dan Pulau Macan Eco Lodge. Sementara itu, pada tahun 2024 sebanyak 102 orang finalis diundang ke Bali untuk mengikuti babak final dan tampil secara langsung dihadapan dewan juri. Undangan tersebut sudah menjadi apresiasi bagi peserta FHI Tahun 2024 yang lolos ke babak final. Para peserta terbaik yang berjumlah 21 orang (tiga peserta terbaik dari setiap jenis lomba) diberikan penghargaan berupa piagam sebagai peserta terbaik dan dana apresiasi. Berikut dokumentasi pelaksanaan FHI.



Foto 26 Karya Peserta FHI Tahun 2024 Berupa Video dalam Babak Penyisihan



Foto 27 Penampilan Finalis FHI Tahun 2024 di Bali

c. Penyusunan Bahan Fasilitasi Pembelajaran BIPA

Penyusunan bahan fasilitasi program BIPA dilakukan dalam rangka melaksanakan peran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai fasilitator program BIPA di dalam dan luar negeri. Fasilitasi program BIPA dilakukan dengan menyediakan bahan-bahan pendukung pembelajaran BIPA. Bahan-bahan tersebut meliputi bahan ajar BIPA, bahan tes BIPA, bahan siaran BIPA, dan bahan alih wahana pembelajaran BIPA.

Pada tahun 2024, bahan ajar BIPA yang disusun adalah bahan ajar pengayaan membaca berjenjang dengan tema "Legenda Indonesia" yang telah dikembangkan sejak tahun 2023. Legenda dipilih dari tujuh provinsi yang memiliki destinasi wisata superprioritas sesuai dengan kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Berikut ini Bahan Ajar BIPA Pengayaan Membaca Berjenjang Seri Legenda Tahun 2024 yang berjudul: (1) Legenda Pulau Weh; (2) Legenda Pesut Mahakam; (3) Legenda Pantai Sulamadaha; (4) Legenda Minangkabau; (5) Legenda Danau Batur; (6) Legenda Candi Borobudur; (7) Legenda Batam; dan (8) Legenda Tanjung Penyusuk.



Gambar 33 Bahan Ajar BIPA Pengayaan Membaca Berjenjang Seri Legenda Tahun 2024

Selain bahan ajar, disusun juga bahan tes BIPA. Bahan tes BIPA merupakan sebuah instrumen terstandar yang dikembangkan oleh Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra dalam mengukur pencapaian tujuan pembelajaran pemelajar BIPA pada level tertentu (tes evaluasi belajar BIPA) dan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia pemelajar BIPA sebagai bahan pertimbangan dalam menempatkan pemelajar BIPA sesuai dengan levelnya (tes penempatan). Pada tahun 2024, Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra mengembangkan setidaknya satu baterai tes penempatan dan satu baterai tes evaluasi belajar level

BIPA 3. Bahan-bahan tersebut telah diunggah pada modul aplikasi Tera BIPA dalam laman BIPA Daring (bipa.kemdikbud.go.id) untuk dimanfaatkan oleh lembaga penyelenggara BIPA yang difasilitasi Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra.



Gambar 34 Bahan Tes BIPA Tahun 2024

Bahan Siaran BIPA merupakan produk kerja sama antara Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia melalui Stasiun Siaran Luar Negeri *Voice of Indonesia* sejak tahun 2018. Kerja sama tersebut dijalin dalam rangka Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia melalui Program Siaran Radio. Peran Pusdaya dalam program siaran tersebut adalah sebagai penyedia bahan dasar naskah siaran Mari Berbahasa Indonesia (MBI). Pada tahun 2024 telah disusun sejumlah 50 naskah bahan siaran dan diserahkan kepada RRI.



Gambar 35 Bahan Siaran BIPA Tahun 2024



Gambar 36 Alih Wahan Bahan Ajar BIPA Tahun 2024

Penyusunan bahan alih wahana bertujuan untuk menghasilkan bahan pendukung pembelajaran BIPA berbasis video dan buku suara. Pada tahun 2024, Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra berhasil mengalihwahanakan 3 Video. Video tersebut membahas materi tentang penggunaan kata tunjuk, kata hubung, dan kata tanya. Video pendukung pembelajaran tersebut diproduksi bagi pemelajar BIPA tingkat BIPA 1.



Gambar 37 Aplikasi *Chatbot* BIPA "Satria BIPA"

Selain alih wahana bahan pendukung pembelajaran berbasis video, Pusdaya juga menyusun media pembelajaran BIPA berbantuan kecerdasan buatan (AI) dalam bentuk *chatbot* BIPA dengan jenama Sahabat Tutur Berbahasa Indonesia (Satria) BIPA. Tujuan umum penyusunan Satria BIPA adalah untuk menyediakan bahan fasilitasi teknis program BIPA berupa media pembelajaran BIPA.

d. Diseminasi Program BIPA

Diseminasi program BIPA merupakan upaya yang dilakukan Pusdaya dalam memfasilitasi para pemangku kepentingan dan penerima manfaat program BIPA dengan informasi terkini tentang produk dan kebijakan serta peningkatan kepakaran ke-BIPA-an. Pada tahun 2024, Diseminasi Program BIPA diselenggarakan melalui tiga kegiatan, yaitu Forum Peningkatan Kepakaran Mitra Program BIPA, Diseminasi Produk dan Layanan Ke-BIPA-an, dan Forum Ilmiah Ke-BIPA-an.

Forum Peningkatan Kepakaran Mitra Program BIPA diselenggarakan dengan kegiatan bimbingan teknis ke-BIPA-an bagi pengajar lokal yang tinggal di luar negeri. Para pengajar tersebut merupakan diaspora Indonesia atau warga negara asing yang mengajarkan bahasa Indonesia di suatu lembaga atau secara mandiri.

Pada tahun 2024, Forum Peningkatan Kepakaran Mitra Program BIPA dilaksanakan sebanyak dua kali secara daring dan luring. Kegiatan yang pertama diselenggarakan secara daring untuk KBRI Den Haag, Belanda pada 2 dan 9 Februari 2024. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak sembilan orang yang merupakan pengajar lokal, baik diaspora Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal di Belanda. Kegiatan yang kedua diselenggarakan secara luring pada 10—15 Juli 2024 di Jakarta. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 42 orang pengajar lokal, baik diaspora Indonesia maupun warga negara asing yang berasal dari 9 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, Belanda, Korea Selatan, Jepang, Jerman, Mesir, Rusia, Thailand, dan Tiongkok.



Foto 28 Forum Peningkatan Kepakaran Mitra Program BIPA Tahun 2024

Diseminasi Produk dan Layanan Ke-BIPA-an diselenggarakan dengan pemberian informasi tentang produk dan layanan Ke-BIPA-an sekaligus pelatihan dan pengenalan dasar tentang pengajaran BIPA di 5 wilayah, yaitu Universitas Bina Nusantara, Universitas Sumatera Utara, Universitas Indraprasta PGRI, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, dan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan forum ilmiah ke-BIPA-an dirancang sebagai wadah diskusi strategis untuk mendukung pengembangan dan internasionalisasi bahasa Indonesia di kancah global. Pada tahun 2024, Pusdaya melaksanakan kegiatan webinar Internasionalisasi Bahasa Indonesia bekerja sama dengan *Working Group Education IDN Global*. Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga sesi, yaitu 5 Oktober, 12 Oktober, dan 2 November 2024. Kegiatan webinar ini mengangkat tiga tema, yaitu 1) Peran Perwakilan Republik Indonesia dalam Internasionalisasi Bahasa Indonesia pada sesi pertama, 2) Peran Diaspora Indonesia dan indonesianis dalam Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Luar Negeri pada sesi kedua, dan 3) Peran Kebijakan Pemerintah dalam Internasionalisasi Bahasa Indonesia pada sesi ketiga.



Gambar 38 Forum Ilmiah BIPA Bekerja Sama dengan IDN Global Tahun 2024

e. Penerjemahan Penunjang Diplomasi Kebahasaan

Produk penerjemahan merupakan salah satu produk pendukung diplomasi kebahasaan dalam upaya peningkatan peran bahasa Indonesia di kancah internasional. Program penerjemahan yang dikelola Badan Bahasa difokuskan pada penyediaan bahan penguatan literasi anak serta internasionalisasi bahasa Indonesia sehingga materi yang diterjemahkan berupa buku karya sastra Indonesia, buku cerita anak, dan dokumen strategis dari lembaga internasional yang merupakan mitra Badan Bahasa. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

1) Badan Bahasa mengelola penerjemahan buku karya sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa asing. Kegiatan ini sebagai upaya menginternasionalkan karya sastra Indonesia di luar negeri. Dengan kegiatan ini, Indonesia diharapkan mendapat citra positif serta menggaungkan bahasa dan sastra Indonesia di dunia internasional;
2) Badan Bahasa mengelola penerjemahan buku cerita anak untuk jenjang pembaca A dan B, serta sebagian kecil untuk jenjang pembaca C dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan buku bacaan sebagai penguatan literasi anak PAUD dan SD kelas bawah (kelas 1—3). Selain itu, produk buku terjemahan ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemelajar BIPA sebagai materi pengayaan bahan ajar;
3) Badan Bahasa juga mengoordinasi penerjemahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia yang dilaksanakan oleh Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra (Pusdaya) dan 30 unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dengan dua sisi kebermafaatan. Pada satu sisi, penerjemahan ini mendukung literasi bahasa Indonesia dan BIPA. Pada sisi lain, penerjemahan ini secara tidak langsung berdampak pada literasi bahkan revitalisasi bahasa daerah karena program ini turut menyediakan bacaan berbahasa daerah, sebagai dampak ikutan, di tengah kelangkaan tulisan berbahasa daerah sekarang ini. Dalam hal ini, karena sangat sulit ditemukan bahan yang sudah terbit untuk diterjemahkan, Badan Bahasa harus mengupayakan sendiri bahan bacaan anak berbahasa daerah ini melalui berbagai moda, yaitu sayembara, bimbingan teknis, dan adaptasi. Upaya ini sudah dilakukan sejak tahun 2022 dan merupakan program berskla besar di Indonesia karena dikerjakan oleh Pusdaya dan 30 UPT Badan Bahasa di seluruh Indonesia di bawah supervisi Pusdaya; dan
4) Badan Bahasa mengelola penerjemahan dokumen strategis dari lembaga internasional yang menjadi mitra Badan Bahasa. Penerjemahan dokumen tersebut adalah penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia.

Adapun dampak positif produk penerjemahan bagi Indonesia adalah:

1) tersedianya produk terjemahan berupa buku karya sastra sastrawan nasional untuk penguatan diplomasi bahasa;
2) tersedianya buku terjemahan cerita anak untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia;
3) tersedianya bahan-bahan bacaan anak berbahasa daerah sebagai upaya peningkatan literasi bahasa daerah dan revitalisasi bahasa daerah;

4) tersedianya buku terjemahan cerita anak yang bermutu dengan konten, ilustrasi, dan tata letak yang menarik sehingga dapat meningkatkan minat baca anak; dan
5) tersedianya terjemahan dokumen strategis dari bahasa asing ke bahasa Indonesia.

Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, Badan Bahasa telah menghasilkan 9.554 produk penerjemahan, baik berupa terjemahan dokumen dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan sebaliknya maupun terjemahan buku cerita anak dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia.

Tabel 25 Tabel Rincian Produk Penerjemahan Badan Bahasa Tahun 2021—2024

Pelaksana	2021	2022	2023	2024
Pusdaya	1718	1251	1511	1320
UPT	76	284	1523	1947
Total	1794	1535	3034	3248
Total Produk Terjemahan 9.554				



Gambar 39 Buku-buku hasil terjemahan

f. Bimbingan Teknis Penjurubahasaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kursus singkat Penjurubahasaan Lisan Konferensi di Universitas Macquarie di Sydney, Australia. Kegiatan ini diawali dengan proses seleksi (administrasi, praktik, dan wawancara) pada bulan Juli dan Agustus. Kegiatan pembekalan dan pemberangkatan peserta dilaksanakan pada bulan September 2024. Kursus singkat berlangsung dari tanggal 16 September sampai dengan 4 Oktober 2024.



Foto 29 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penjurubahasaan

g. Diseminasi Bidang Penerjemahan

Diseminasi Bidang Penerjemahan di Daerah dilaksanakan sebanyak satu kali, yaitu pada 27 Februari—1 Maret 2024. Kegiatan Diseminasi dilaksanakan secara tatap muka di Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan empat Sekolah Dasar yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemaparan produk penerjemahan, diskusi, tanya jawab, dan praktik langsung penggunaan laman penjaring. Pada saat praktik laman penjaring, peserta diminta untuk maju dan mengakses langsung laman penjaring. Diseminasi Bidang Penerjemahan diikuti oleh 55 orang guru penggerak dan guru dari sekolah-sekolah penggerak yang akan dikumpulkan di Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Peserta lainnya adalah 200 orang siswa dan 20 guru pendamping di empat sekolah dasar yang ada di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yaitu SDN 1 Rawa Laut, SDN 1 Gotong Royong, SDN 1 Segalamider, dan SD Kartika II-5 Bandarlampung.



Foto 30 Pelaksanaan Diseminasi di Bandarlampung

Selain itu, Badan Bahasa juga melakukan Diseminasi Nasional Bidang Penerjemahan. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada 27--30 Agustus 2024 dan pada 5—8 November 2024. Kegiatan pertama diikuti oleh 38 guru penggerak dari 34 provinsi dan 16 guru kreator konten dari 9 provinsi. Total peserta sebanyak 81 orang. Dalam kegiatan pertama ini dilakukan pemaparan produk-produk penerjemahan, pengenalan penggunaan media sosial sebagai

media diseminasi, serta diskusi, tanya jawab, dan praktik pembuatan konten promosi laman Penjaring. Narasumber berasal dari Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan VX Studio, serta dari internal KKLP Penerjemahan. Adapun peserta yang diundang dalam Diseminasi Nasional Bidang Penerjemahan Tahap II adalah Koordinator Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dari 38 provinsi. Jumlah total peserta 91 orang. Dalam kegiatan pertama ini dilakukan pemaparan produk-produk penerjemahan, pengenalan penggunaan media sosial sebagai media diseminasi, serta diskusi, tanya jawab, dan praktik pembuatan konten promosi laman Penjaring. Narasumber berasal dari komunitas Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan tim dari internal KKLP Penerjemahan.



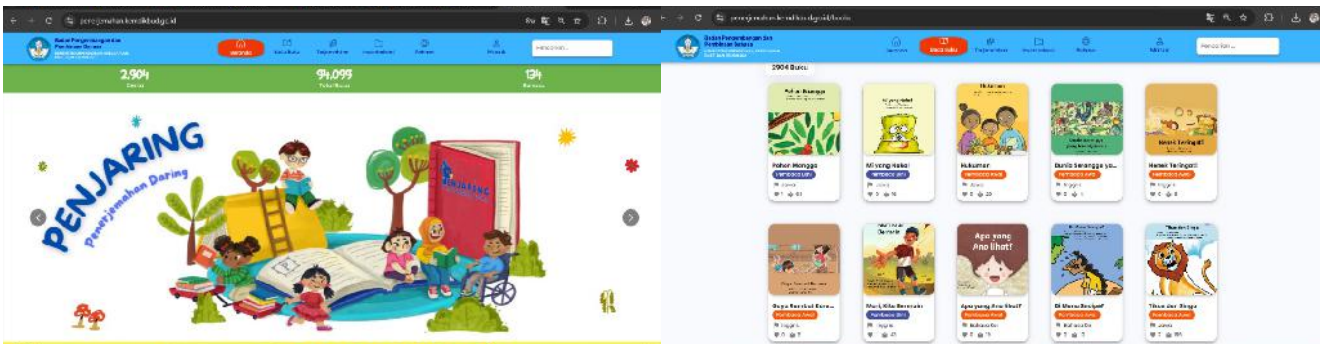
Foto 31 Pelaksanaan Diseminasi Nasional Bidang Penerjemahan

h. Pengembangan Laman Penjaring

Laman Penjaring adalah sistem informasi dan layanan penerjemahan berbasis jaringan yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Aplikasi berbasis jaringan melalui alamat https://penerjemahan.kemdikbud.go.id/ ini dibuat sebagai bentuk fasilitasi Badan Bahasa untuk mempermudah masyarakat mengakses produk-produk penerjemahan Badan Bahasa dalam bentuk buku digital yang bermutu secara mudah dan gratis.

Kategori bukunya sangat beragam. Mulai dari, alam dan lingkungan, sains, hingga ekonomi kreatif. Hingga saat ini, masyarakat dapat membaca 2.904 buku digital karya terjemahan di laman Penjaring.



Gambar 40 Tampilan laman penjaring

i. Fasilitasi Penjurubahasaan dalam Forum Internasional

Sejak bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi di sidang umum UNESCO, peluang bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai forum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri semakin terbuka. Sebagai salah satu tindak lanjutnya, Badan Bahasa menugasi sejumlah tenaga fungsional penerjemah untuk menjadi juru bahasa dalam kegiatan Revalidasi UNESCO Global Geopark Batur yang diselenggarakan pada tanggal 25--30 Juli 2024 di Provinsi Bali.

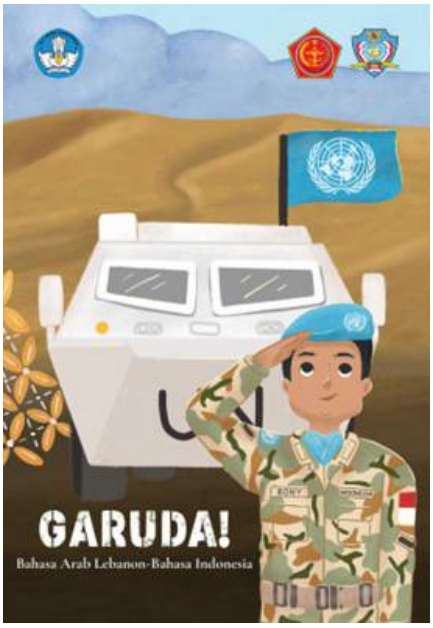
Penjurubahasaan yang dilakukan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan sebaliknya ini berperan dalam menjembatani komunikasi antara tim asesor dari UNESCO dan para pengelola taman bumi (*geopark*) yang ada di kawasan UNESCO *Global Geopark*, Batur, Bali. Melalui kegiatan ini, bahasa Indonesia berkontribusi terhadap peningkatan dan penguatan identitas bangsa.



Foto 32 Kegiatan Revalidasi UNESCO Global Geopark Batur

j. Pembuatan Buku Saku Garuda untuk Mendukung Program Peningkatan Kemahiran Berbahasa Asing (PKBA)

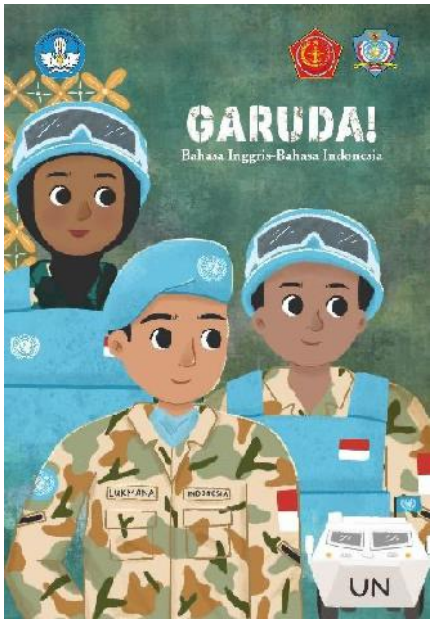
Buku Saku Garuda merupakan hasil kerja sama Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra dengan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI) untuk mendukung kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Asing Satuan Tugas TNI Kontingen Garuda yang akan bertugas di daerah misi.



Gambar 41 Buku Saku Garuda Arab Lebanon—Bahasa Indonesia



Gambar 42 Buku Saku Garuda Bahasa Prancis—Bahasa Indonesia



Gambar 43 Buku Saku Garuda Bahasa Inggris—Bahasa Indonesia

Tabel 26 Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia

No	Hambatan	Langkah Antisipasi
1	Blokir anggaran *automatic adjustment* berdampak pada pembatasan penugasan pengajar BIPA dengan skema pengiriman pengajar ke luar negeri	Mengoptimalkan penugasan pengajar BIPA dengan skema pembelajaran jarak jauh secara daring
2	Permohonan fasilitasi pembelajaran BIPA dari negara yang baru atau belum terfasilitasi sebelumnya diterima setelah penyusunan rencana program untuk tahun anggaran berjalan telah selesai dilaksanakan	Memfasilitasi permohonan fasilitasi pembelajaran BIPA sesuai dengan ketersediaan anggaran
3	Terjadi keterlambatan dalam penerbitan dokumen perizinan perjalanan dinas luar negeri, seperti Surat Persetujuan Sekretariat Negara (SP Setneg) dan visa untuk pengajar BIPA yang akan ditugasi ke luar negeri	Mengajukan perizinan perjalanan dinas luar negeri dengan tenggat waktu yang cukup sebelum keberangkatan
4	Pengajar BIPA, khususnya pengajar lokal mengalami kendala dalam melaporkan kegitan pembelajaran melalui portal BIPA Daring	Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan teknis mengenai tata cara pelaporan melalui portal BIPA Daring
5	Penambahan jumlah lembaga baru yang menyelenggarakan program BIPA belum signifikan pada awal triwulan kedua	Mengembangkan jejaring kemitraan yang lebih luas dengan melibatkan para pihak terkait, seperti perwakilan RI, lembaga penyelenggara program BIPA, kementerian/lembaga terkait, dan pengajar BIPA
6	Layanan posel kemdikbudristek sering mengalami galat sehingga posel dari penerbit tidak bisa masuk. Akibatnya, proses koordinasi dan pembahasan kontrak dengan penerbit berlangsung lama.	Menghubungi pihak Pusdatin untuk melaporkan kendala penggunaan posel Kemdikbud.
7	Pemrosesan pembelian lisensi buku mulai dari seleksi bahan terjemahan, pengadaan, sampai dengan pemerolehan fail produksi memerlukan waktu yang lama dan melibatkan banyak pihak antara lain penerbit, agen, tim pokja pengadaan di Biro umum dan PBJ, tim pengadaan satker.	Terus berkomunikasi/korespondensi dengan pihak penerbit, Biro Umum dan PBJ untuk mempercepat proses pengadaan.
8	Terdapat satu penerbit (dengan 15 judul buku) yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh izin dari penulis dan ilustrator sehingga pembelian lisensinya ditunda pada triwulan III.	Mencari alternatif penerbit lain.

Testimoni Mitra dan Penerima Manfaat Program dan Layanan Badan Bahasa

"Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramahan warganya. Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang penting untuk dipelajari khusunya sebagai panduan hidup di Indonesia. Seorang diplomat sangat mempelajari bahasa Indonesia untuk mengetahui lebih dalam tentang Indonesia dan berinteraksi dengan warga setempat, mereka akan sangat menghargai kita jika bisa berbahasa Indonesia. Terima kasih atas program yang luar biasa ini".



Hassane Rabehi

Duta Besar Aljazair untuk Indonesia

Sasaran Program 3:
Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah

Program revitalisasi bahasa daerah memiliki beberapa dampak positif, di antaranya sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bahasa daerah: program revitalisasi bahasa daerah ini memfokuskan perhatian pada pentingnya bahasa daerah dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hal tersebut.
2) Memperkuat identitas budaya lokal: bahasa daerah merupakan bagian penting dari budaya dan identitas suatu komunitas tutur. Program revitalisasi bahasa daerah ini membantu memperkuat identitas budaya lokal dan memastikan bahwa bahasa daerah tetap hidup dan lestari serta diwariskan kepada generasi berikutnya.
3) Menemukan fungsi dan ranah baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah.
4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan: Program revitalisasi bahasa daerah ini membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memelihara dan memperkuat bahasa daerah mereka sehingga membantu memastikan bahwa bahasa daerah akan tetap hidup dan lestari.
5) Membantu mencegah kepunahan bahasa daerah: sejumlah bahasa daerah saat ini sedang terancam punah. Program revitalisasi bahasa daerah ini membantu memperkuat dan memelihara bahasa daerah yang terancam punah sehingga memastikan bahwa bahasa-bahasa ini tetap hidup dan lestari.

Setakat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (yang sebelumnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) melalui Badan Bahasa telah mengimplementasi pendekatan baru dalam upaya pelestarian melalui pelindungan bahasa daerah yang berfokus pada revitalisasi bahasa daerah (RBD) sejak tahun 2021. RBD merupakan langkah strategis dalam rangka menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari melalui cara yang menyenangkan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun komunitas/masyarakat.

Penggunaan bahasa daerah sehari-hari dalam konteks revitalisasi bahasa sangat penting untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah yang terus bergeser daya hidupnya. Bahkan bahasa-bahasa dengan jumlah penutur besar, seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa Minangkabau juga mengalami pengurangan jumlah penutur. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan UNESCO, terdapat kepunahan satu bahasa dalam dua minggu sekali. Oleh karena itu, peran berbagai

pemangku kepentingan dalam pelestarian bahasa daerah perlu terus digalakkan.

Peran organisasi masyarakat dan komunitas tutur juga sangat penting dalam revitalisasi bahasa dengan memantau, mengadvokasi, dan mengimplementasikan sejumlah inisiatif untuk menjaga dan melestarikan bahasa-bahasa daerahnya. Di sisi yang lain, penguatan peran keluarga dan pewarisan bahasa antargenerasi juga memainkan peran penting dalam revitalisasi bahasa. Inisiatif di bidang pendidikan, seperti penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pembelajaran di kelas-kelas awal dan pemanfaatan teknologi serta digitalisasi bahasa daerah juga dapat memainkan peran penting dalam upaya revitalisasi bahasa daerah. Penelitian menunjukkan bahwa RBD dapat dicapai dengan mengintegrasikan kembali bahasa-bahasa tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal itu pulalah yang memengaruhi capaian Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah pada Indikator Kinerja Program Badan Bahasa berikut.

Indikator Kinerja Program 3.1: Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya

Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya (IPBD) merupakan indeks yang menggambarkan upaya yang dilakukan oleh penutur bahasa daerah, baik perseorangan maupun kelompok untuk mempertahankan keberadaan bahasa daerahnya dengan cara menggunakan bahasa daerah tersebut dalam berbagai ranah, yaitu dalam berkomunikasi dengan keluarga, kebijakan di ranah pendidikan, dan gerakan di masyarakat.

IPBD dirumuskan sebagai berikut.

Gambar 44 Metode Perhitungan IPBD

	Rumus	Nilai
VPen	jumlah penutur bahasa daerah/jumlah penduduk	67,97
VMul	jumlah bahasa yang dijadikan mulok/jumlah bahasa daerah	20,98
VGr	jumlah guru bahasa daerah/jumlah sekolah	0,12
VTb	jumlah bahasa daerah yang memiliki terbitan/jumlah bahasa daerah	0,15
VEl	jumlah bahasa daerah yang dipublikasikan di media elektronik/jumlah bahasa daerah	0,13
IPBD	**(VPen + VMul + VGr + VTb + VEl)/5**	**17,87**

Keterangan:

V	Variabel
Pen	Penutur
Mul	Mulok
Gr	Guru
Tb	Terbitan
El	Media elektronik

$$IPBD = \frac{(V\,Pen + V\,Mul + V\,Gr + V\,Tb + V\,El)}{5}$$

$$(67{,}97 + 20{,}98 + 0{,}12 + 0{,}15 + 0{,}13) : 5 = 17{,}87$$

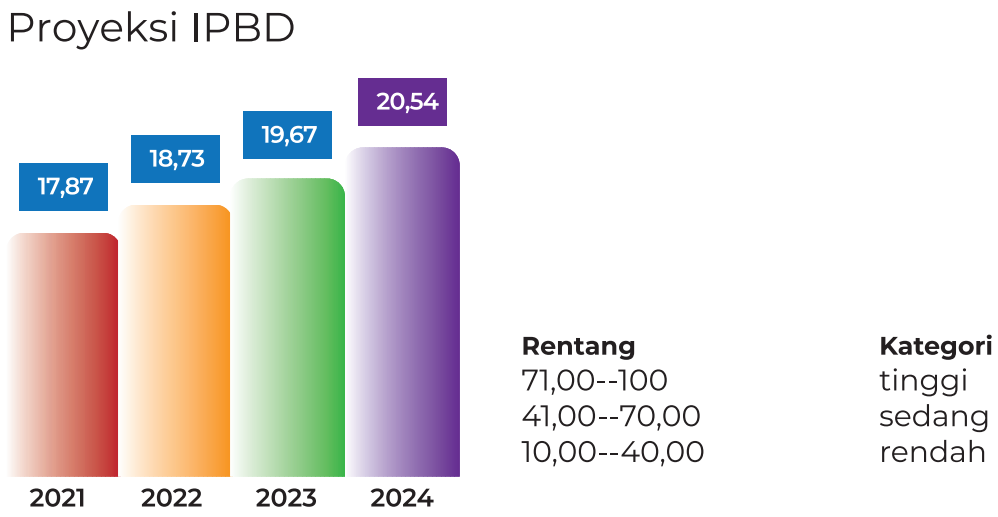
Penghitungan indeks tersebut menggambarkan kondisi ideal dari sejumlah variabel berikut.

1. Penutur bahasa daerah. Kondisi ideal penutur bahasa daerah diperoleh apabila setiap penduduk menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi, paling tidak di lingkungan keluarga.

2. Muatan lokal/kurikulum bahasa daerah. Kondisi ideal mulok bahasa daerah digambarkan dengan bahasa daerah yang dijadikan muatan lokal atau masuk ke dalam kurikulum pendidikan sesuai dengan peta persebaran bahasa daerah tersebut.
3. Pengajar bahasa daerah. Kondisi ideal guru (pengajar) bahasa daerah adalah dimilikinya tenaga pengajar mata pelajaran bahasa daerah oleh setiap sekolah.
4. Terbitan bahasa daerah. Kondisi ideal terbitan bahasa daerah adalah apabila setiap bahasa daerah memiliki terbitan atau media publikasi.
5. Publikasi bahasa daerah. Kondisi ideal publikasi elektronik adalah apabila setiap bahasa daerah dipublikasikan di media elektronik.

Sementara itu, proyeksi capaian IPBD yang ditargetkan pada 2021–2024 adalah sebagai berikut.

Grafik 18 Proyeksi IPBD Tahun 2021--2024



Proyeksi tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun dengan berbagai upaya kegiatan pelindungan (pelestarian) yang dilakukan di seluruh wilayah NKRI. Pada 2024, kegiatan pelindungan melalui RBD telah menjangkau di 38 provinsi. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya dilaksanakan di 22 provinsi. Demikian juga juga jumlah bahasa yang meningkat tajam menjadi 114 bahasa, dari sebelumnya hanya 72 bahasa daerah. Hal tersebut berdampak pada variabel IPBD, antara lain jumlah penutur bahasa daerah dari kelompok muda (tunas muda) yang meningkat, peningkatan jumlah pengajar bahasa daerah, dan publikasi berbahasa daerah. Berikut ini adalah hasil pemerolehan indeks pemanfaatan bahasa daerah yang dicapai pada tahun 2024.

Tabel 27 Hasil Penghitungan Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya Berdasarkan Indikatornya

RUMUS	HASIL	INDIKATOR
Jumlah Penutur Bahasa Daerah/Jumlah Penduduk	66.93	Indikator 1: Penutur
Jumlah Bahasa yang Dijadikan Mulok/Jumlah Bahasa	23,20	Indikator 2: Mulok
Jumlah Guru Bahasa Daerah/Jumlah Sekolah	39,55	Indikator 3: Guru
Jumlah Bahasa Daerah yang Memiliki Terbitan/Jumlah Bahasa Daerah	32,16	Indikator 4: Terbitan
Jumlah Bahasa Daerah yang Memiliki Program di Media Elektronik/ Jumlah Media Elektronik	32,98	Indikator 5: Media Elektronik
HASIL AKHIR	**38,96**	

Indeks pemanfaatan bahasa daerah pada 2024 diperoleh indeks sebesar 38,96 atau 123%. Hasil ini meningkat dari tahun 2023, yakni sebesar 31.52 atau 120%. Hal ini menunjukkan peningkatan indeks pemanfaatan bahasa daerah sebesar 7,44 atau 3% dari tahun 2023. Adapun cara pemerolehan angka indeks tersebut sebagai berikut.

1. Indeks penutur diperoleh dari jumlah penutur bahasa daerah/jumlah penduduk. Penghitungan sudah menggunakan hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.
2. Indeks mulok diperoleh dari jumlah bahasa yg dijadikan mulok/jumlah bahasa daerah. Mulokyang dihitung berdasarkan informasi balai/kantor bahasa tahun 2024.
3. Indeks guru diperoleh dari jumlah guru bahasa daerah/jumlah sekolah. Jumlah guru diperoleh dari data data guru utama pada pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah tahun 2024 yang merupakan keluaran dari kegiatan pelindungan bahasa di balai/kantor bahasa. Jumlahsekolah berdasarkan dari jumlah sekolah SD dan SMP di Dapodik, Kemdikbudristek periode2023/2024 semester ganjil.
4. Indeks terbitan dihitung dari bahasa yang memiliki esai, penelitian, bahan ajar, alkitab,danlain-lain. Jumlah bahasa daerah yang memiliki terbitan/jumlah bahasa daerah. Jumlah terbitan pada tahun 2023 ini dihitung dari informasi balai/kantor bahasa tahun 2024.
5. Indeks media elektronik diperoleh dari jumlah bahasa daerah yang dipublikasikan di media elektronik/jumlah bahasa daerah. Jumlah pemublikasian elektronik berdasarkan dari laporanbalai/kantor bahasa tahun 2024.

Untuk memberikan interpretasi terhadap angka indeks tersebut, berikut digambarkan tabel rentang nilai dan kategori nilainya.

RENTANG NILAI	KATEGORI
71,00—100,00	tinggi
41,00—70,00	sedang
10,00—40,00	rendah

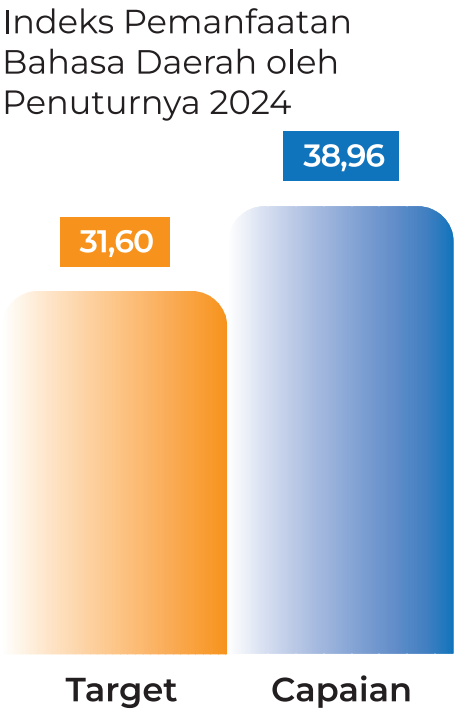
Berdasarkan rentang nilai di atas, IPBD yang ditetapkan masih terhitung rendah. Hal itu seturut dengan keadaan riil yang dihadapi dalam upaya pelindungan bahasa daerah di Indonesia serta respons publik terhadap kelestarian bahasa daerah, serta koordinasi dan pelibatan berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah sebagai pihak yang berkewajiban dalam upaya pelindungan bahasa daerah sebagaimana mandat Undang-Undang 23 Tahun 2014 masih relatif kurang. Namun seiring sejalannya waktu, dukungan dan kesadaran tersebut terus meningkat hingga 2024. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan IPBD yang signifikan dari target yang telah ditetapkan di setiap tahunnya.

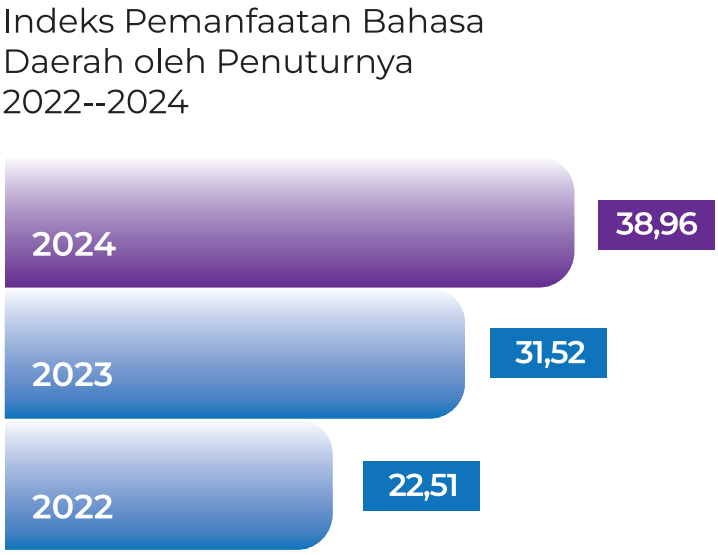
Berdasarkan hasil penghitungan pada setiap variabel itu, realisasi capaian target pada 2024 dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 28 Target dan Realisasi IKP Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya Tahun 2023

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Angka Dasar	Capaian		Tahun 2024			Target Renstra 2024
					2022	2023	Target	Realisasi	%	
3	Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah	3.1	Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya	17.87	22,51	31,52	31,6	38,96	123,29%	20,54

Grafik 19 Capaian Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya





Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, aktivitas utama pelestarian bahasa dan sastra daerah dilaksanakan melalui revitalisasi bahasa daerah (RBD). RBD telah memberikan dampak terhadap peningkatan IPBD. Dalam mendukung implementasi program pelindungan bahasa dan sastra daerah, sejumlah aktivitas (kegiatan) turut dikembangkan pada 2024 dalam menunjang RBD, adalah sebagai berikut.

a. Model Pelindungan Bahasa dan Sastra

Pada tahun anggaran 2024 telah dihasilkan sebanyak sepuluh model pelindungan, baik di bidang kebahasaan maupun kesastraan. Model tersebut sebagai desain dan/atau panduan pelaksanaan kegiatan substansi pelindungan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, seperti unit pelaksana teknis di daerah, pemerintah daerah, akademisi, serta berbagai pihak pemangku kepentingan terkait. Kesepuluh model tersebut, antara lain

1. Risalah Kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah: *Arah Baru Revitalisasi Bahasa Daerah: Menekan Laju Kepunahan Bahasa*
2. Rencana Induk Peta Kebinekaan: Bahasa, Sastra, dan Aksara
3. Model Digitalisasi Pemetaan Sastra
4. Pedoman Konservasi Bahasa

5. Pedoman Konservasi Manuskrip Nusantara
6. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah
7. Petunjuk Teknis Registrasi Sastra Daerah
8. Petunjuk Teknis Festival Film Pendek Berbahasa Daerah
9. Petunjuk Teknis Festival Teater Bahasa Daerah
10. Petunjuk Teknis Kemah Cerita Pendek Bahasa Daerah Tunas Bahasa Ibu

Gambar 45 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pelindungan Kebahasaan dan Kesastraan



b. Koordinasi Penguatan RBD antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan pada bulan Mei 2024 di Jakarta yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Rapat dihadiri oleh 160 pimpinan daerah kabupaten/kota yang telah melaksanakan RBD selama 2020–2023.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi bertujuan untuk (1) membangun pemahaman yang sama tentang isu kepunahan bahasa dan program Revitalisasi Bahasa Daerah sebagai bagian dari upaya pelindungan bahasa daerah; (2) meningkatkan kesadaran dan kepedulian; serta peran aktif dan dukungan konkrit para pemangku kepentingan terhadap pelestarian bahasa daerah; (3) menguatkan kerja sama serta sinergi dengan para kepala daerah di 38 provinsi dalam pelestarian bahasa daerah melalui Program Revitalisasi Bahasa Daerah yang dituangkan dalam berita acara komitmen Rekomendasi Bersama para pimpinan yang hadir.



Foto 33 pelaksanaan Koordinasi RBD dengan Pemerintah Daerah

c. Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional

Sebagai salah satu tahapan dari program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD), Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) merupakan upaya untuk mempromosikan keragaman bahasa daerah, menyebarluaskan semangat kecintaan dan ekspresi kebanggaan terhadap bahasa daerah, serta sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku RBD, khususnya generasi muda. FTBI di tingkat nasional (FTBIN) ini juga menjadi kegiatan dalam rangka memperingati hari bahasa ibu internasional pada tanggal 21 Februari. Sejak tahun 2023, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menyelenggarakan FTBIN yang diikuti oleh tunas bahasa ibu yang terpilih dari program RBD tahun 2022. Pada tahun 2024 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra kembali menyelenggarakan FTBIN sebagai bentuk apresiasi atas semangat para generasi muda terbaik penutur bahasa daerah yang telah terpilih dalam FTBI tingkat provinsi pada tahun 2023. Para peserta FTBIN 2024 merupakan tunas bahasa ibu yang mewakili 72 bahasa daerah yang direvitalisasi pada tahun 2023. Sebanyak 572 peserta dari 25 provinsi terlibat dalam FTBIN 2024.



Foto 34 Festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2024

Testimoni
Mitra dan Penerima Manfaat Program dan Layanan Badan Bahasa

"Salah satu hal yang menarik dari Festival Tunas Bahasa Ibu adalah bagaimana kita mendorong anak-anak untuk mau dan berani menggunakan bahasa daerah dengan cara yang mereka suka. Bagian terpenting dari kegiatan ini adalah dikemas dengan cara yang menyenangkan, semoga dengan hal ini bahasa daerah tetap terawat"



Ledia Hanifa Amaliah
Anggota Komisi X DPR RI

d. Pengembangan Vitalitas Bahasa dan Korpus Daerah dalam Upaya Pelindungan Bahasa dan Sastra Berbasis Kecerdasan Buatan

Vitalitas bahasa (VIBA) merujuk pada tingkat keberlangsungan atau daya hidup suatu bahasa dalam masyarakat. Vitalitas bahasa menjadi bagian dari studi tentang konteks penggunaan bahasa dalam suatu masyarakat yang berkaitan dengan upaya pelindungan atau pelestarian bahasa. Untuk mengetahui kondisi bahasa daerah, pengukuran daya hidup bahasa dilakukan melalui aplikasi VIBA. Pengukuran daya hidup bahasa merupakan bagian integral dari upaya pelindungan bahasa daerah. Melalui pengukuran ini, status atau kategori daya hidup bahasa daerah dapat diketahui sehingga kebijakan mengenai pelindungan bahasa daerah dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Pengukuran daya hidup bahasa dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan, penginputan, dan penghitungan data indeks untuk mengetahui status daya hidup suatu bahasa berdasarkan sepuluh faktor yang memengaruhinya. Proses dari setiap tahapan tersebut sebelumnya masih dilakukan secara manual dengan tenaga manusia (petugas lapangan) sehingga tidak efektif dan efisien. Kuesioner masih berbasis kertas sehingga pengisian kuesioner berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan pengisian dalam petunjuk teknis. Oleh karena itu, pada tahun 2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra bekerja sama dengan Politeknik Statistika STIS untuk memutakhiran aplikasi VIBA yang semula menggunakan metode *Computer Assisted Personel Interviewing* (CAPI) menjadi aplikasi VIBA berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), yaitu otomatisasi *interview* berbasis chatbot VIBA dengan pemanfaatan *generative* AI dan *large language model* (LLM). Dengan menggunakan teknologi ini, chatbot dapat berinteraksi langsung dengan responden melalui percakapan otomatis dan data dapat dikumpulkan secara cepat dan akurat tanpa memerlukan kehadiran fisik petugas. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pengumpulan data, tetapi juga dapat memperluas cakupan sampel, dan mengurangi biaya operasional yang biasanya dikeluarkan untuk tenaga kerja dan logistik.



Foto 35 Pembahasan Pemutakhiran VIBA Berbasi AI oleh STIS

e. Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra

Sejak 2023, Badan Bahasa telah menginisiasi rintisan penyaluran Bantuan Pemerintah (banpem) Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra melalui Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Terdapat dua jenis banpem yang disalurkan, yaitu (a) fasilitasi komunitas dengan nominal bantuan paling besar sejumlah Rp150.000.000,00. ; dan (b) penghargaan bagi komunitas/perseorangan (sastrawan) dengan nominal sebesar Rp25.000.000,00–40.000.000,00 dengan rentang kiprah karya minimal antara 40 s.d. 50 tahun.

Bantuan fasilitasi diberikan dalam rangka mendorong berkembangnya komunitas sastra, meningkatkan peran komunitas sastra sebagai sarana pembelajaran sastra, membantu pelaksanaan dan optimalisasi kegiatan bidang kebahasaan dan kesastraan, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra, serta mendorong jumlah, mutu, serta penyebaran dan publikasi karya sastra. Bantuan penghargaan diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada komunitas sastra atau perseorangan atas kinerjanya yang luar biasa dalam aktivitas kesastraan termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem kesastraan.

Total bantuan pemerintah yang telah disalurkan adalah sebagai berikut. Bantuan kepada 50 komunitas sastra serta 29 sastrawan atau sebanyak 79 paket bantuan diberikan pada tahun anggaran 2023. Sebanyak 218 paket bantuan untuk 121 sastrawan dan 97 komunitas sastra atas kinerjanya dalam pemajuan aktivitas kesastraan mendukung program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta pemberdayaan masyarakat dan ekosistem kesastraan Indonesia disalurkan pada tahun anggaran 2024. Pemberian Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran komunitas sastra sebagai penggerak dan sekaligus penguat dalam membangun karakter bangsa, serta dapat mengembangkan dan meluaskan produk karyanya.



Foto 36 Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2024

Testimoni

Mitra dan Penerima Manfaat Program dan Layanan Badan Bahasa

"Program bantuan sastra ini sangat bagus, komunitas sastra dan komunitas literasi sangat terbantu. Kami sangat senang bisa terpilih sebagai penerima bantuan, program sastra dan literasi yang sudah kami susun bisa berjalan dengan adanya program ini. Saya berharap program ini tetap berlanjut khususnya bagi komunitas yang selama ini sulit bergerak karena tidak ada dana, mereka merasa diambang kemiskinan karena tidak ada dana untuk menghidupkan sastra dan literasi".



Beril Ilham

Yayasan Indonesia Buku

f. Seminovel Revitalisasi Bahasa Daerah

Program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) telah berhasil mengatasi peliknya persoalan bahasa daerah di Indonesia. Kegiatan ini menjadi kompas yang mengarahkan proses, sasaran untuk pemartabatan bahasa daerah di Indonesia.

RBD melibatkan jutaan orang di berbagai wilayah Indonesia yang mencakup siswa, guru, pegiat bahasa, dan maestro. Beragam kisah di belakang layar kesukesan RBD yang luput dari catatan dan rekaman. Perjuangan tak kenal lelah, rasa haru, gembira, dan kejutan bersatu padu. Kisah yang menyentuh dan menarik tersebut terangkum dalam sajian novel.



Gambar 46 Buku Seminovel Bahasa Daerah

Pada 2024, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menerbitkan *Seri Seminovel Revitalisasi Bahasa Daerah: Kisah-kisah di Balik Perjalanan RBD*. Dalam lima jilid buku, ada ratusan kisah yang dirangkai dari perbincangan dan pengakuan jujur pelaku RBD di Indonesia. Banyak tangis dan tawa para guru serta siswa di sepanjang rangkaian RBD. Kegetiran perjuangan mengajarkan bahasa daerah terbentang dari barat hingga timur. Mereka menumpahkan harapannya agar kegiatan ini terus berlanjut setiap tahun. Para guru yang selama ini merasa sunyi dalam mengajarkan bahasa daerah, kini merasa diakui dan dihargai. Begitu juga para siswa, mereka mengungkapkan kegembiraanya saat mengikuti aneka lomba. Bukan hanya juara yang mereka dambakan, tetapi mendapat pengakuan atas kecintaan mereka terhadap bahasa daerah.

g. Pemodernan Sastra dalam Bentuk Komik Legenda Nusantara dan Cerita Bergambar Naskah Manuskrip Nusantara

Berbeda dari 2022 dan 2023, Badan Bahasa melalui Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, khususnya Kelompok Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, tidak lagi mengembangkan film animasi cerita rakyat, akan tetapi pemodernan sastra pada 2024 beralih ke pengalihwananaan legenda Nusantara menjadi komik dan manuskrip ke dalam cerita bergambar. Penetapan komik dan cerita bergambar untuk mendukung dua program prioritas Badan Bahasa sekaligus, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah serta mendukung literasi kebahasaan dan kesastraan. Keberadaan komik dan cerita bergambar diharapkan mampu mendukung upaya penyediaan bahan bacaan literasi yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, komik dan cerita bergambar yang bersumber dari khazanah sastra Nusantara ini diharapkan mampu mendorong praktik baik literasi baca-tulis di sekolah, di komunitas literasi, serta kegiatan lain yang berkaitan erat dengan penumbuhan budaya literasi, termasuk literasi sastra, serta kecintaan terhadap budaya leluhur yang tersebar di Nusantara.



Gambar 47 Contoh Komik Legenda Nusantara

Dengan mempertimbangkan arah pemodernan tersebut, ditetapkan sasaran pembaca dan sumber cerita komik dan cerita bergambar pada tabel berikut.

Tabel 29 Sasaran Pembaca dan Sumber Cerita Komik dan Cerita Bergambar

Jenis Produk	Target Pembaca	Sumber Cerita	Jumlah
Komik	Pembaca Semenjana (C) usia 10—13 tahun	Cerita rakyat dari 38 provinsi	114
Cerita Bergambar	Pembaca Awal (B) usia 7–10 tahun	Manuskrip melayu klasik	61



Gambar 48 Cerita Bergambar dari Manuskrip Nusantara

Dalam mengembangkan produk pemodernan tersebut Badan Bahasa tetap berkolaborasi dengan berbagai pihak atau yang dikenal dengan model pentahelix. Model pentahelix melibatkan kolaborasi lima unsur subjek atau *stakeholder* di bidangnya. Lima unsur yang dimaksud, meliputi akademisi, pelaku industri/bisnis/praktisi, komunitas, pemerintah, dan media. Kerja sama lima unsur tersebut kerap juga disingkat ABCGM (*academician*, *business*, *community*, *government*, dan *media*).

Tabel 30 Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya

No	Hambatan	Langkah Antisipasi
1	Setiap komponen dalam penghitungan Indikator IPBD diperoleh dari pihak eksternal dengan rentang waktu pemutakhiran yang tidak sama	Berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk menyinkronkan lini masa pemutakhiran data
2	Pendataan terkait komponen penghitungan revitalisasi bahasa daerah belum stabil	menggunakan metode pengumpulan lain yang lebih mudah untuk pendataan capaian RBD

Sasaran Program 4:

Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Implemenatasi SAKIP memberikan dampak positif terhadap:

1) seluruh capaian sasaran program beserta indikator kinerja program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
2) SAKIP mendorong penganggaran pada satuan kerja berbasis pada capaian kinerja tahun sebelumnya;
3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran mendorong upaya perbaikan pada tahun berikutnya; dan
4) Peningkatan layanan di bidang kebahasaan dan kesastraan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Bahasa merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan *Good Governance*. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Bahasa perlu menerapkan dan mengimplementasikan SAKIP di setiap satuan kerja di lingkungan Badan Bahasa. Untuk mengukur ketercapaian itu, Badan Bahasa menetapkan indikator kinerja Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP di tahun 2022.

Indikator Kinerja Program 4.1: Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, sampai dengan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas

dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja hingga evaluasi kinerja.

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tipe penghitungan Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ialah nonkumulatif.

$$\textit{Nilai SAKIP} = [\textit{ Perencanaan Kinerja }] + [\textit{ Pengukuran Kinerja }] + [\textit{ Pelaporan Kinerja }] + [\textit{ Evaluasi Kinerja }]$$

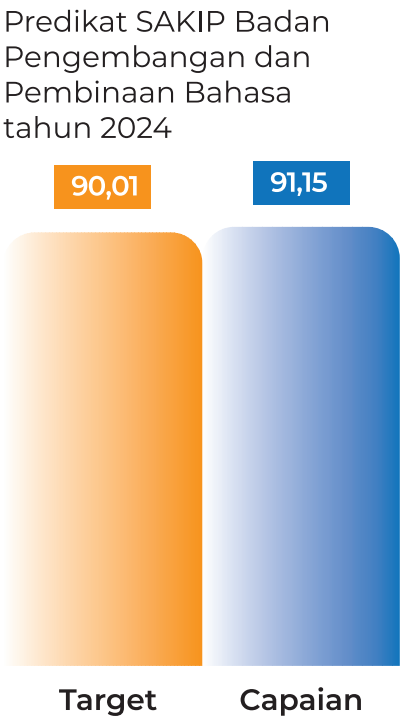
Tabel 31 Rentang Nilai, Predikat, dan Interprestasi Penilaian SAKIP

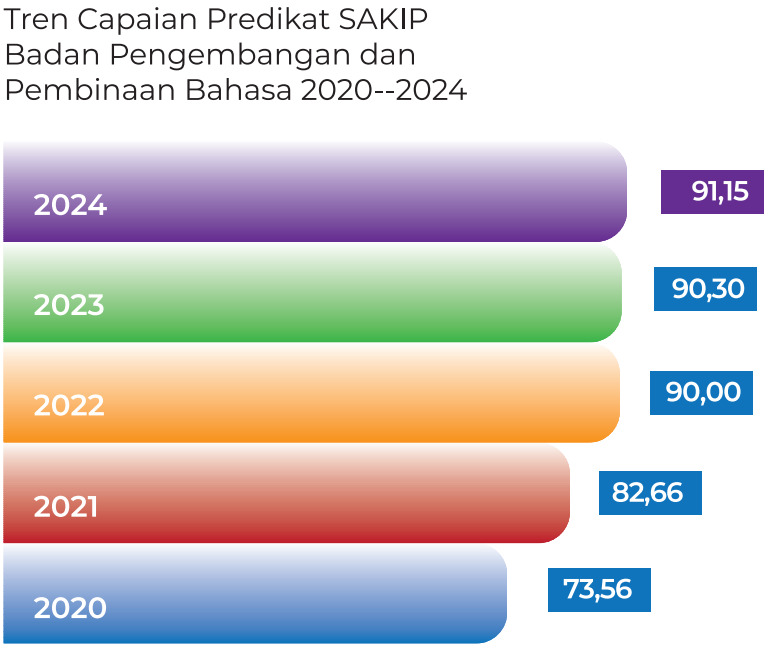
Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	D	Sangat Kurang

Tabel 32 Target dan Realisasi IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Angka Dasar	2022	2023	Tahun 2024			Target Renstra 2024
							Target	Realisasi	%	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	4.1	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A	A	AA	AA	AA	112,86%	A

Grafik 20 Capaian IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa





Pada tahun 2020, Badan Bahasa memperoleh predikat BB dengan nilai 73,56 dari target predikat BB dengan nilai 70,01. Pada tahun 2021, Badan Bahasa memperoleh predikat A dengan nilai 82,66 dari target predikat BB dengan nilai 70,01. Pada tahun 2022, Badan Bahasa memperoleh predikat A dengan nilai 90 dari target predikat A dengan nilai 80,01. Pada tahun 2023, Badan Bahasa memperoleh predikat AA dengan nilai 90,30 dari target predikat A dengan nilai 80,01. Pada tahun 2024, Badan Bahasa memperoleh predikat AA dengan nilai 91,15 dari target predikat AA dengan nilai 90,01. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa predikat SAKIP Badan Bahasa terus meningkat setiap tahun.

Peningkatan predikat SAKIP Badan Bahasa juga diikuti oleh seluruh satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 33 satker memperoleh nilai SAKIP dengan predikat A, dan satu satker, yaitu Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah memperoleh predikat AA.

Rincian nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 34 satker di lingkungan Badan Bahasa pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 33 Nilai SAKIP Seluruh Satker di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

No.	Nama Satker	2020		2021		2022		2023		2024	
		Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat
1	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	73,56	BB	80,48	A	90	A	90	A	91,15	AA
2	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	72,35	BB	80,48	A	90	A	90	A	90	A
3	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	83,48	A	86,77	A	84,9	A	82,4	A	88	A
4	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	69,13	B	73,68	BB	84,25	A	88,9	A	89,1	A
5	Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	-	-	-	-	-	-	74,05	BB	80,9	A
6	Balai Bahasa Provinsi Aceh	69,31	B	71,97	BB	86,55	A	89,15	A	90	A
7	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	73,57	BB	74,41	BB	84,7	A	87,15	A	88,75	A
8	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	69,72	B	72,77	BB	80,5	A	83,1	A	83,95	A
9	Balai Bahasa Provinsi Riau	77,78	BB	80,42	A	81,7	A	80,95	A	84,3	A
10	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	80,31	A	80,83	A	82,75	A	85,3	A	83,7	A

No.	Nama Satker	2020		2021		2022		2023		2024	
		Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat
11	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	80,76	A	82,85	A	87,1	A	88,15	A	90	A
12	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	78,47	BB	86,15	A	88,5	A	89	A	91,4	AA
13	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	80,15	A	82,91	A	82,6	A	84,7	A	88,35	A
14	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	67,92	B	72,33	BB	83,1	A	84,1	A	88,65	A
15	Balai Bahasa Provinsi Bali	80,76	A	87,27	A	88,05	A	89,25	A	83,5	A
16	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	69,04	B	71,98	BB	82,6	A	83,65	A	88,15	A
17	Balai Bahasa Kalimantan Tengah	74	BB	89,53	A	89,25	A	90	A	90	A
18	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	62,14	B	63,84	B	80,15	A	85,3	A	86,2	A
19	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	73,57	BB	79,65	BB	85,15	A	86	A	86,4	A
20	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	71,19	BB	74,84	BB	81,85	A	90	A	90	A
21	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	74,14	BB	76,85	BB	81,9	A	90	A	90	A
22	Balai Bahasa Provinsi Papua	44,63	C	66,44	B	85	A	87,6	A	85,95	A
23	Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	71,72	BB	72,19	BB	85	A	89,1	A	90	A
24	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	69,2	B	72,91	BB	82	A	83,2	A	87,75	A
25	Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	67,92	B	75,92	BB	82,9	A	87,25	A	88,5	A
26	Balai Bahasa Provinsi Jambi	75,95	BB	77,93	BB	82,65	A	86,85	A	90	A
27	Balai Bahasa Provinsi Maluku	72,76	BB	75,58	BB	84,7	A	86,25	A	87,6	A
28	Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara	76,29	BB	80,74	A	88,3	A	89,05	A	90	A
29	Balai Bahasa Provinsi Lampung	80,16	A	81,6	A	84,1	A	85,5	A	90	A
30	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	81,9	A	82,53	A	84,3	A	86,1	A	88,85	A
31	Balai Bahasa Provinsi Bengkulu	72,68	BB	75,17	BB	84,7	A	85,5	A	86,4	A
32	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	70,94	BB	76,32	BB	87,45	A	88,05	A	88,35	A

No.	Nama Satker	2020		2021		2022		2023		2024	
		Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat
33	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	68,58	B	74,57	BB	88	A	88,35	A	88	A
34	Kantor Bahasa Provinsi Banten	78,61	BB	83,25	A	84,1	A	85,15	A	88	A
35	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	78,7	BB	82,98	A	83,2	A	83,7	A	86,1	A

Dampak yang dapat dirasakan manfaatnya dari ketercapaian IKP ini adalah satker memiliki tata kelola dalam kinerja yang transparan, akuntabel, dan efisiensi serta efektif. Dengan demikian, satker yang dinilai memiliki sistem yang akuntabel, transparan dan efisien yang baik, akan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga tersebut.

Ketercapaian IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tidak terlepas dari komitmen seluruh kepala satker dalam menerapkan akuntabilitas kinerja di satkernya masing-masing, komitmen seluruh petugas pelaporan di lingkungan Badan Bahasa dalam memenuhi pendokumentasian data dukung hasil implementasi AKIP, dan dukungan seluruh pegawai Badan Bahasa terhadap capaian IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Selain itu, Ketercapaian IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk memfasilitasi, mendampingi, dan mengordinasi seluruh satker untuk meningkatkan kinerja. Berikuti ini kegiatan pendukung tercapainya IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

a. Layanan Evaluasi

Aktivitas yang dilakukan oleh layanan evaluasi dalam mendukung ketercapaian target IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu, melaksanakan koordinasi pendampingan penyusunan laporan kinerja (Lakin) mengimplementasikan manajemen risiko, evaluasi program dan angggaran secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan melakukan upaya optimalisasi nilai kinerja anggaran, evaluasi dan reviu Renstra Badan Bahasa tahun 2022—2024 dan mengoordinasi evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Bahasa dari tahun 2022—2024. Seluruh *output* hasil kegiatan tersebut mendukung komponen-komponen penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Layanan Evaluasi secara terus-menerus mengoordinasi dan mengawal upaya pendokumentasian data dukung SAKIP seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa ke Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal selaku pendamping dan evaluator AKIP. Berikut ini lini masa aktivitas Layanan Evaluasi.

Gambar 49 Lini Masa Aktivitas Layanan Evaluasi

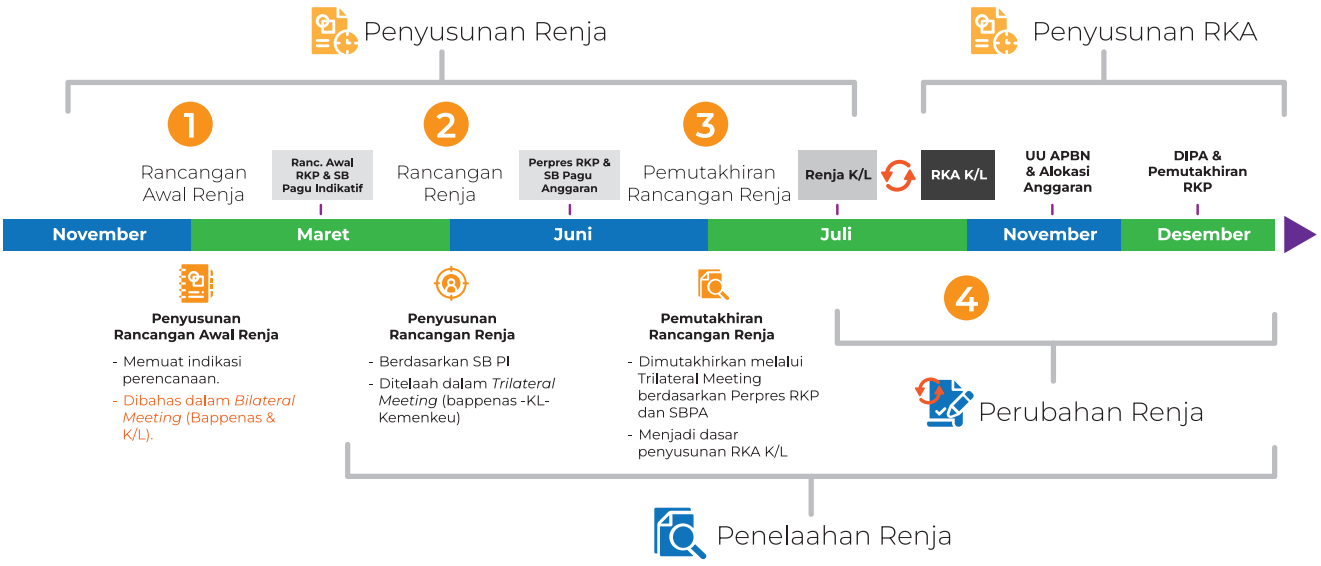


b. Layanan Perencanaan

Aktivitas Layanan Perencanaan dalam mendukung ketercapaian target IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berupa koordinasi penyusunan program dan anggaran sesuai dengan siklus perencanaan, menginisasi penyusunan indeks pembangunan kebahasaan (IPBas) yang merupakan instrumen dan basis formulasi kebijakan bidang Kebahasaan dan kesastraan, penyusunan standar biaya SBML (Standar Biaya Masukan Lainnya), SBKK (Standar Biaya Keluaran Khusus), sampai dengan SBKU (Standar Biaya Keluaran Umum) sebagai langkah optimalisasi NKA satker di lingkungan Badan Bahasa. Selain itu, Layanan Perencanaan juga melakukan penyusunan dan perumusan Renstra Badan Bahasa TA 2025—2029 dan meningkatkan penajaman program prioritas Badan Bahasa, serta mengupayakan sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah (kewenangan konkuren pusat dan daerah).

Dalam melakukan aktivitas tersebut, Layanan Perencanaan melakukan kolaborasi dengan seluruh layanan di Sekretariat Badan Bahasa, KKLP, dan mitra kerja, baik internal maupun eksternal yang memiliki keterkaitan fungsi untuk melakukan sinkronisasi program dan anggaran. Seluruh aktivitas ini yang akan menjadi dokumen dasar perencanaan program dan anggaran oleh seluruh satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berikut ini informasi lini masa aktivitas Layanan Perencanaan.

Gambar 50 Lini Masa Aktivitas Layanan Perencanaan

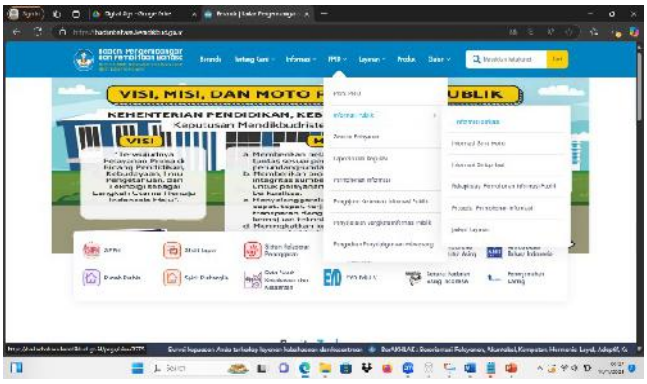


c. Layanan Data dan Informasi

Layanan Data dan Informasi melaksanakan pengembangan layanan sistem informasi untuk mengembangkan, merawat, dan mengelola sistem informasi. Layanan Data dan Informasi juga melaksanakan pengelolaan laman Badan Bahasa yang dikembangkan untuk menyesuaikan kebutuhan informasi publik terkait dengan produk dan layanan yang dihasilkan oleh Badan Bahasa. Selain itu, Layanan Data dan Indormasi juga menghasilkan data pokok kebahasaan dan kesastraan yang terpadu.

Pada tahun 2024, Layanan Data dan Informasi menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian seluruh pimpinan dan staf dalam menjaga stabilitas pelayanan informasi kepada masyarakat secara umum dan kepada seluruh pegawai Badan Bahasa. Tujuan lain penerapan SMKI yaitu, menutup, membatasi, dan mengatasi celah serangan siber pada aplikasi atau laman-laman yang dikelola di lingkungan Badan Bahasa secara khusus. Tim bekerja sama dengan tenaga IT khusus untuk menguji kerentanan, yaitu *Bug Hunter* untuk melakukan ujicoba guna mengetahui celah atau kerawanan yang ada pada aplikasi laman daring di lingkungan Badan Bahasa, seperti:

1. Laman Dapobas (Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan)
2. Laman GESIT (Gerbang Elektronik Sistem Informasi Terpadu)
3. Laman KBI (Kongres Bahasa Indonesia)
4. Laman Sidaks (Sistem Informasi Data Kebahasaan dan Kesastraan)
5. Laman Rumah Pusbin (Portal Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra)
6. Laman Peta Bahasa
7. Laman Registrasi Bahasa dan Sastra
8. Laman BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing)
9. Laman Penerjemahan Daring
10. Laman Spirit Pusbanglin (Portal Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra)



Gambar 51 Layanan Informasi Publik

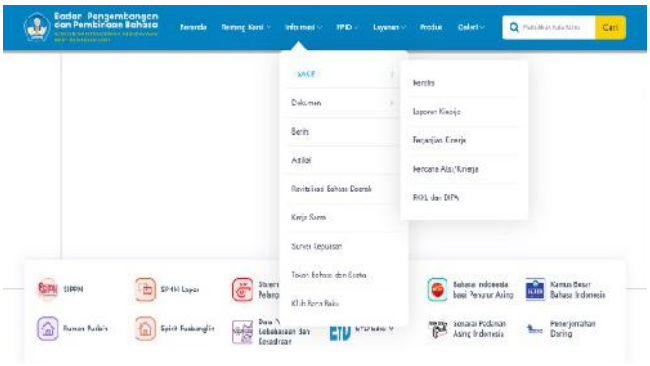
Integrasi data pada laman Badan Bahasa ini mempermudah aksesibilitas dan integrasi data dan informasi serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaporan dan evaluasi kinerja melalui platform digital. Data dan informasi yang tersaji pada laman mendukung akuntabilitas Badan Bahasa dalam meningkatkan transparansi informasi kepada publik/ masyarakat umum atas capaian kinerja.

Transparansi dan kemudahan dalam mengakses informasi publik merupakan amanah UU 14 tahun 2008 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta

melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Dengan demikian, pada tahun 2025, setelah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 244/P/2015 tentang PPID di Lingkungan Kemendikbud, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Surat Keputusan Kepala Badan No 0132/I1/HM.01.00/2024, Badan Bahasa bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.

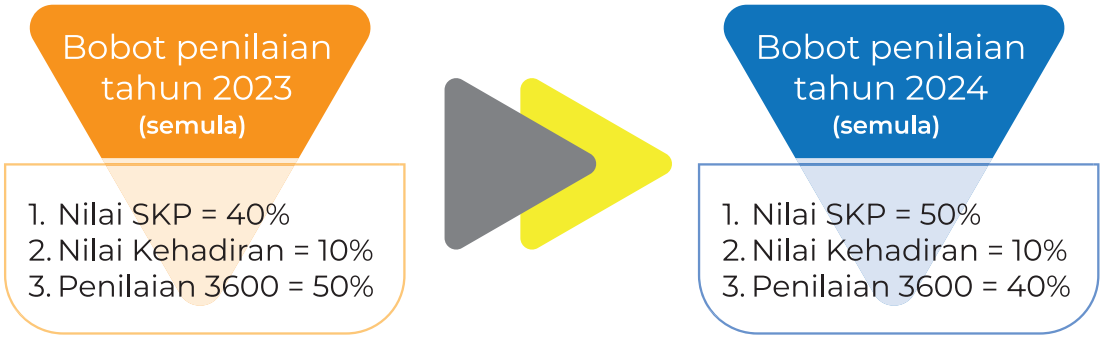


Foto 37 Narasumber dari UI untuk fitur PPID



Gambar 52 Fitur Publikasi Data Dukung SAKIP pada Laman Badan Bahasa

Upaya yang didukung oleh layanan data dan informasi lainnya adalah pengembangan fitur penilaian pegawai pada aplikasi GESIT pada tahun 2023 yang digunakan pada tahun 2024. Berikut perubahan semula-menjadi.



Pada tahun 2024, setiap pegawai dapat mengisi formulir data diri sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan capaian prestasi dan deskripsi diri. Dengan adanya fitur ini diharapkan pegawai lain menilai pegawai yang bersangkutan lebih jelas karena dapat membaca informasi data diri pegawai lain yang akan mereka nilai.

Hal lainnya, yaitu informasi publik yang dikelola untuk mendukung ketercapaian IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada menu informasi pada laman Badan Bahasa sehingga seluruh data dan informasi yang mendukung pendokumentasian data dukung SAKIP sejak tahun 2015—2024 telah diunggah dengan apik pada menu informasi pada fitur SAKIP di laman Badan Bahasa.

Berikut informasi lini masa pelaksanaan aktivitas Layanan Data dan Informasi dalam mendukung ketercapaian IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Gambar 53 Lini Masa Aktivitas Data dan Informasi



d. Layanan Sumber Daya Manusia (SDM)

Aktivitas Layanan SDM yang mendukung ketercapaian IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu dengan melakukan Pengembangan Kompetensi pegawai di lingkungan Badan Bahasa sesuai dengan jabatan, perencanaan SDM berbasis kinerja sesuai dengan rencana strategis Badan Bahasa, pengelolaan kinerja individu, pengelolaan penghargaan pegawai terbaik, dan pembinaan budaya kerja di lingkungan Badan Bahasa. Pengembangan kompetensi pegawai bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas SDM dalam pengambilan keputusan, mengelola perubahan, komunikasi yang efektif serta berorientasi pada hasil melalui penerapan nilai dasar ASN Ber-AKHLAK dan budaya KSATRIA di lingkungan Badan Bahasa serta untuk mempersiapkan calon pejabat fungsional tertentu agar mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang peran dan tugasnya sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional.



Foto 38 Narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan materi Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN dalam menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan

Dalam rangka memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mendorong peningkatan kinerja, Badan Bahasa memberikan penghargaan (reward) kepada pegawai yang berprestasi

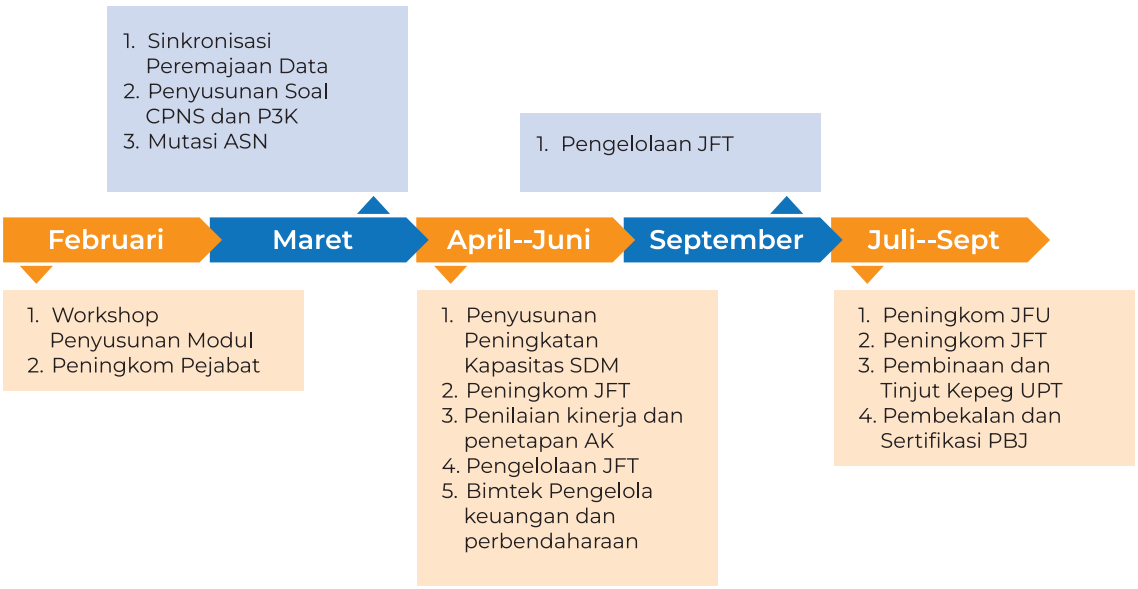
dan telah menerapkan nilai-nilai dasar BerAKHLAK. Upaya ini juga dilakukan untuk mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi bagi yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Penghargaan yang diberikan kepada pegawai berupa prioritas untuk menjadi pimpinan struktural satker di lingkungan Badan Bahasa. Hal ini menjadi pendorong bagi pegawai untuk terus meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai, seiring dengan penerapan SAKIP yang mengutamakan akuntabilitas dan transparansi.



Foto 39 Pemilihan Pegawai Berprestasi Tahun 2024

Berikut informasi lini masa pelaksanaan aktivitas layanan SDM dalam mendukung ketercapaian IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Gambar 54 Lini Masa Aktivitas Layanan Sumber Daya Manusia



e. Layanan Barang Milik Negara (BMN)

Layanan barang milik negara melakukan aktivitas Sinkronisasi SIMAK BMN UPT, Pengelolaan BMN, Penyusunan Laporan Wasdal, Penyusunan RK BMN, dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendukung ketercapaian IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Strategi pengelolaan barang milik negara ini dalam mendukung ketercapaian IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah dengan melakukan penguatan

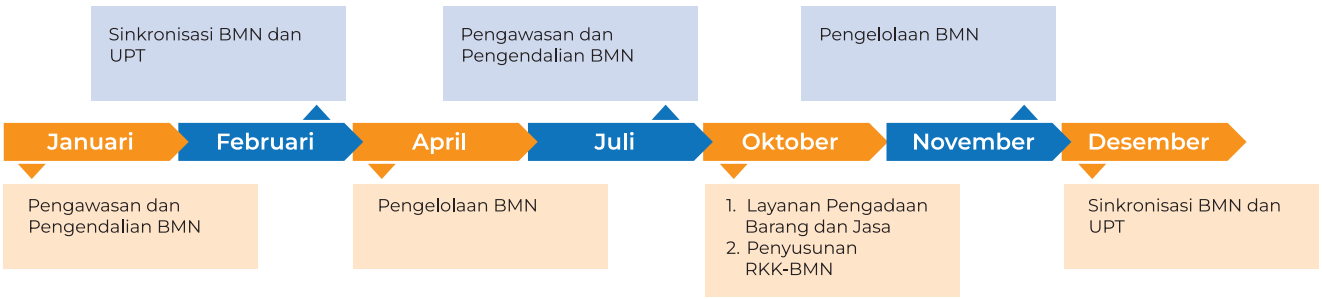
koordinasi dan konsinyasi antara Sekretariat Badan dan satker dalam rangka pengembangan pemahaman, kompetensi, dan penyelarasan dengan ketentuan/ Peraturan serta kepatuhan terhadap jadwal penyusunan RKBMN.

Pengelolaan aset negara yang optimal memiliki dampak positif terhadap nilai akuntabilitas yang tercermin dalam SAKIP. Hal ini dapat dilihat melalui kualitas data pada laporan kinerja yang akurat dan tepat tentang BMN , seperti status penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan aset negara. Layanan BMN yang baik memungkinkan penyusunan laporan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2024, sebagai bentuk perwujudan amanah dari PMK 113 tahun 2023 melalui Sekretariat Badan Bahasa, diusulkan Rincian Output Standar Biaya Keluaran Umum Barang Milik Negara di lingkungan Badan Bahasa. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalkan salah satu komponen Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yaitu implementasi dan efisiensi penggunaan RO SBKU BMN. Sejumlah 34 satker mengusulkan sisa anggaran dari aktivitas-aktivitas di layanan umum, program dukungan manajemen (WA) untuk dianggarkan menjadi RO SBKU BMN. Revisi anggaran untuk diusulkan menjadi RO SBKU BMN.

Berikut informasi lini masa pelaksanaan aktivitas layanan BMN dalam mendukung ketercapaian IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Gambar 55 Lini Masa Aktivitas Layanan Barang Milik Negara



f. Layanan Humas dan Publikasi

Layanan Humas dan Publikasi dalam mendukung ketercapaian IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui aktivitas konsolidasi kehumasan, promosi media luar ruang, MABBIM, dan Mastera. Aktivitas layanan publikasi yang dilaksanakan, yaitu penyusunan jurnal dan pengembangan publikasi digital. Aktivitas lain yang dilakukan oleh Layanan Humas dan Publikasi, yaitu dengan melakukan pengelolaan media sosial, penyusunan konten, peliputan kegiatan kebahasaan dan kesastraan, koordinasi dan konsolidasi media, peningkatan wawasan di bidang layanan kehumasan, dan berbagai penyediaan saranan promosi untuk kegiatan di lingkungan Badan Bahasa, publikasi program kebahasaan dan kesastraan lewat media luar ruang, forum kebahasaan dan kesastraan di luar negeri, serta kegiatan publikasi program kebahasaan dan kesasatraan melalui konten infografik dan audio visual.



Foto 40 Press Tour Kongres Pameran Kebahasaan dan Kesastraan 2024

Tabel 34 Tabel Kendala, Strategi, dan Langkah Antisipasi IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

No	Kendala/Hambatan	Strategi
1	Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 harus lebih tinggi dari capaian 2023 sesuai dengan hasil evaluasi kinerja.	Melakukan pendampingan kepada seluruh satker secara intensif dalam berbagai bentuk konsinyasi dan koordinasi, baik bersemuka maupun daring.
2	Format Renja K/L yang diminta melalui aplikasi e-planning mengalami kendala aplikasi sedang dalam masa perbaikan pada saat akan unduh untuk diunggah data ke aplikasi Spasikita.	Mengunduh satu format Renja K/L melalui aplikasi Krisna Renja untuk dapat digunakan oleh seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa sebagai data dukung.
3	Tenaga IT belum mengakomodasi insiden serangan siber laman dan aplikasi di lingkungan Badan Bahasa.	Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam pengujian dan kerentanan menangani serangan siber.
4.	Data capaian kebahasaan dan kesastraan yang masih beranekaragam jumlahnya dari berbagai sumber yang menyebabkan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perencanaan tidak relevan.	Melakukan validasi dan sinkronisasi data di tiap Satuan Kerja.
5	Peningkatan kompetensi pegawai belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas pegawai karena belum dilakukan analisis kebutuhan program peningkatan kompetensi untuk setiap individu pegawai.	Menuangkan rencana peningkatan kompetensi pegawai dalam bentuk rencana pengembangan individu (RPI) yang disepakati oleh pegawai dan atasan.
6	Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai di lingkungan Badan Bahasa belum memiliki formulasi penilaian berbasis capaian kinerja berdasarkan pengukuran kinerja individu.	Menyusun pedoman penilaian penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Badan Bahasa dan melakukan penilaian pegawai berprestasi melalui aplikasi.
7	Kemampuan operator daerah yang masih kurang sehingga saat pemberlakukan aplikasi SIMAN Web versi 2, petugas BMN perlu melakukan penyesuaian dan peningkatan pemahaman berkelanjutan.	Koordinasi dengan Satuan Kerja Pembina dan penyelenggaraan kegiatan BMN sehingga operator kemampuan dapat dioptimalkan.

Sasaran Program 5:

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

Dampak Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek:

1) Meningkatkan pola pikir dan budaya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi korupsi, kolusi dan nepotisme.
2) Meningkatnya kualitas tata kelola yang efisien, efektif, dan akuntabel.
3) Meningkatnya kualitas layanan publik.

Pelaksanaan ZI-WBK/WBBM atau pembangunan Zona Intergritas berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 Tahun

2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Indikator ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelola manajemen yang baik. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai anutan Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Indikator Kinerja Program 5.1: Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM

Satker adalah unit kerja di lingkungan Badan Bahasa yang terdiri atas Pusat, Sekretariat Badan Bahasa, dan UPT. Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah satker yang memenuhi 6 komponen, di antaranya manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas layanan publik. Dasar Hukum PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang ditetapkan oleh KemenPAN sebagai satker berpredikat ZI-WBK/WBBM.

Berdasarkan PermenpanRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Kepmendikbud Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Badan Bahasa melakukan pendampingan pada tiap satuan kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Pendampingan dilakukan bersama dengan Tim Biro Organisasi dan Tata Laksana serta Inspektorat Jenderal selaku TPI Kemendikbudristek (Tim Penilai Internal, asesor Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek). Dalam pengisian LKE dan pelaksanaan survei eksternal terkait dengan Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), Biro Organisasi dan Tata Laksana digunakan aplikasi SIAZIK. Kedua hal ini merupakan bagian penilaian ZIWBK/WBBM yang telah dilakukan tiap satker yang diusulkan. Sementara itu TPI telah melakukan pendampingan langsung kepada kesembilan satuan kerja dan memberikan masukan terkait dengan data ataupun sarana dan prasarana yang harus dipenuhi tiap satker. Tahap selanjutnya yang dilakukan Tim RB Badan Bahasa bersama Biro Organisasi dan Tata Laksana dan Itjen adalah mendampingi setiap satker agar lebih siap dalam penilaian tahun 2024 dan semua satuan kerja yang diusulkan diharapkan berhasil mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan langkah akselerasi dan miniatur penerapan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas guna mencapai sasaran reformasi birokrasi.

Secara umum, targetnya adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah diwajibkan membangun percontohan (*pilot project*) pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat unit kerja melalui pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Adapun makna pembangunan ZI WBK ini adalah:

1) Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.
2) Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
3) Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
4) Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
5) Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas-fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran/target reformasi birokrasi, terutama terkait dengan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu diterbitkannya PermenpanRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Kepmendikbud Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai panduan atau pedoman dalam pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah khususnya satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selain kedua peraturan tersebut, Kemendikbudristek melakukan penguatan dengan menerbitkan Kepmendikbudristek Nomor 228/O/2023 tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mendorong seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk melakukan pembangunan ZI-WBK/WBBM.

Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

mempunyai komitmen yang sangat kuat dalam pembangunan reformasi birokrasi untuk mewujudkan layanan prima kepada masyarakat.

Pengusulan satuan kerja calon ZI-WBK/WBBM melalui beberapa tahapan sesuai dengan PermenpanRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah.

Tabel 35 Tabel Kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah

SYARAT	WBK	WBBM
Tingkat Unit Kerja	Merupakan core layanan utama dari instansinya	
	Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi	
	LHKASN dan LHKPN 100%	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM minimal satu tahun
	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal “B”	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal “BB”

Setelah memenuhi persayaratan, satuan kerja diusulkan untuk divalidasi oleh TPI dan TPN. Pada tahapan ini ada beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh satuan kerja calon ZI-WBK/WBBM, yaitu sebagai berikut.

Tabel 36 Syarat ZI-WBK/WBBM

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Min. Pengungkit	40	48
Bobot Nilai Min. per Area Pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen Hasil “Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel”	Min. 18,25	Min 19,50
Nilai Sub-Komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi”	Min. 15,75 (Indeks 3,60)	Min. 15,75 (Indeks 3,60)
Nilai Sub-Komponen “Kinerja Lebih Baik”	Min. 2,50	Min. 3,75
Nilai Komponen Hasil “Pelayanan Publik yang Prima”	Min. 14,00 (Indeks 3,20)	Min. 15,75 (Indeks 3,60)

Satuan kerja memenuhi seluruh persyaratan tersebut, satuan kerja berhak mendapatkan predikat satker ZI-WBK/WBBM.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Sekretariat Badan telah melakukan beberapa kegiatan agar seluruh satuan kerja yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Kegiatan tersebut berupa pendampingan baik melalui pertemuan daring maupun luring, melakukan praktik baik dengan mengundang narasumber dari satker yang telah memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM dan juga melakukan simulasi wawancara. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan mulai dari tahap pencanangan sampai dengan proses penilaian di tingkat nasional yang dilakukan oleh TPN dalam hal ini dilakukan oleh asesor dari KemenpanRB. Berikut ini satker yang memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM.

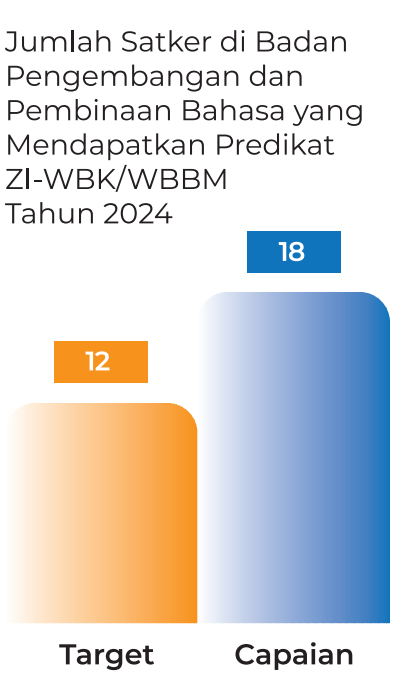
Tabel 37 Satker yang Memperoleh Predikat ZI-WBK/WBBM

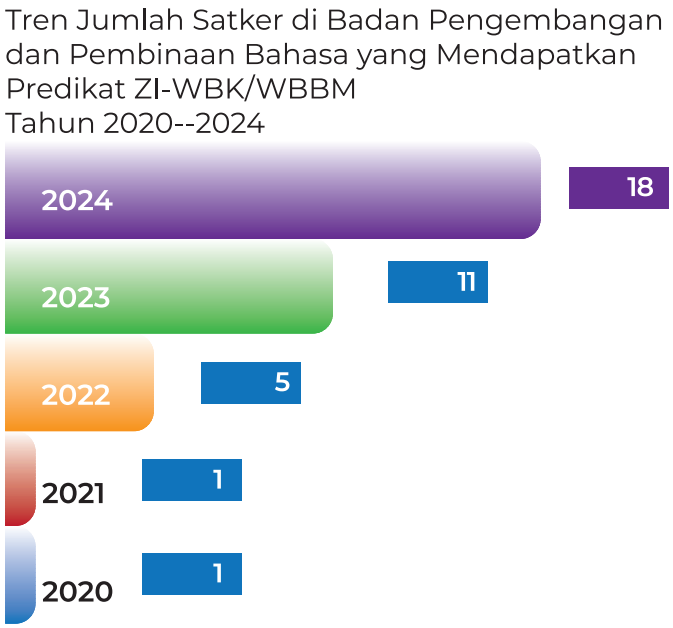
2020	2021	2022	2023	2024
0	0	4	7	7
		Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
		Balai Bahasa Provinsi Bali	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat
		Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
		Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
			Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah
			Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
			Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Balai Bahasa Provinsi Lampung

Tabel 38 Capaian IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Angka Dasar	2022	2023	Tahun 2024			Target Renstra 2024
							Target	Realisasi	%	
5	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	5.1	Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	1	2	11	12	18	150%	5

Grafik 21 Capaian IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM





Berikut penjelasan kinerja setiap layanan yang mendukung keberhasilan ketercapaian indikator kinerja kegiatan.

1. Layanan Hukum Tata Laksana (HTL)

Selama tahun 2024, dalam mendukung ketercapaian IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM, Layanan HTL melaksanakan aktivitas penyusunan peraturan perundang-undangan evaluasi organisasi dan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Penyusunan peraturan perundang-undangan diawali dengan mengidentifikasi topik atau isu aturan-aturan yang dibutuhkan oleh organisasi dan masyarakat. Sistematika yang dilaksanakan sebagai langkah awal, yaitu melakukan perencanaan isu atau topik yang telah ditentukan, kemudian pengkajian awal data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sehingga menghasilkan draf awal peraturan. Berikut beberapa produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh Layanan HTL bersama dengan mitra internal dan eksternal Badan Bahasa.

1. Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa.
2. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan
3. Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.



Foto 41 Evaluasi Organisasi Badan Bahasa

Upaya lain yang dilakukan oleh layanan HTL yaitu evaluasi organisasi yang dilakukan melalui proses penilaian untuk memastikan bahwa organisasi kementerian dapat berjalan secara efektif, efisien, dan adaptif dalam mencapai tujuan pemerintah dan melayani masyarakat. Evaluasi ini merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi dan dilakukan secara sistematis sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Evaluasi organisasi yang sudah dimulai sejak tahun 2023 ini memiliki tujuan akhir untuk menaikkan eselonisasi Kantor Bahasa menjadi Balai Bahasa dengan penetapan indikator-indikator kinerja utama yang telah diatur dalam Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2023, yaitu kesesuaian struktur organisasi, kualitas proses kerja, kinerja sumber daya manusia, dan efektivitas pelaksanaan program serta layanan. Hasil dari evaluasi organisasi ditandai dengan kantor bahasa yang semula berjumlah 13 menjadi 4 kantor bahasa. Dengan demikian total balai bahasa di lingkungan Badan Bahasa sebanyak 26 UPT.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Layanan HTL, yaitu pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan atau yang disebut dengan Pemantauan

dan Evaluasi Penyelenggaran Pelayanan Publik (PEKPPP) dengan hasil akhir berupa nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP). Dalam mewujudkan pelayanan publik seperti pelayanan barang, jasa, dan administrasi, Badan Bahasa melaksanakan pendampingan PEKPP pada lima satker, yaitu Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa Provinsi Bali, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu, dan Kantor Bahasa Provinsi Maluku.



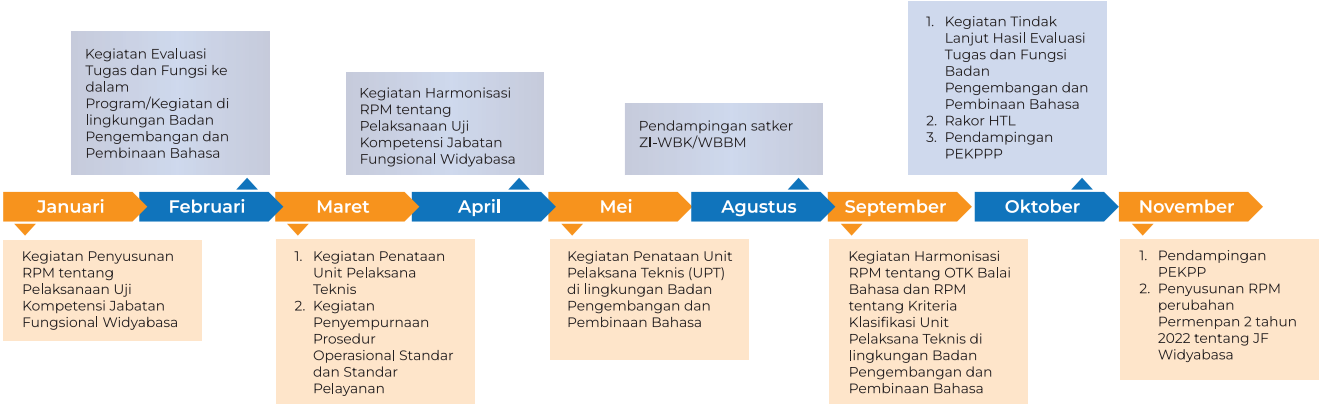
Foto 42 Pendampingan PEKPP di Kantor Bahasa NTB

Salah satu tahapan yang dilalui dalam PEKPP Mandiri adalah pembinaan yang merupakan proses peningkatan kualitas melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan kontekstual yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan basis bukti (*evidence bases*). Pendampingan melibatkan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek bersama dengan penanggung jawab satker dari Sekretariat Badan Bahasa.

Dalam mendukung ketercapaian IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM, Layanan HTL juga melakukan upaya mendorong satker untuk melakukan pembangunan setiap area ZI-WBK/WBBM dengan sosialisasi dan pendampingan, berkoordinasi dengan mitra internal (TPI) dan eksternal (TPN) terkait dengan mekanisme/sistematika serta kertas kerja format penilaian ZI-WBK/WBBM, dan mendukung pencapaian pelayanan publik yang bersih, efektif, dan berintegritas.

Berikut informasi lini masa pelaksanaan aktivitas Layanan HTL dalam mendukung ketercapaian IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM.

Gambar 56 Lini Masa Aktivitas Layanan Hukum Tata Laksana



2. Layanan Kerja Sama

Badan Bahasa melaksanakan kolaborasi dengan mitra strategis dalam rangka mendukung ketercapaian target kinerja satker di lingkungan Badan Bahasa, baik dengan pihak BUMN, swasta, perguruan tinggi, dan asosiasi di dalam maupun luar negeri. Indikator keberhasilan dari layanan kerja sama dalam mendukung ketercapaian IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM, yaitu implementasi hasil perjanjian kerja sama antara Badan Bahas dan mitra yang telah disepakati dan ditandatangani bersama. Dari total 16 sinergisitas yang sudah dituangkan dalam perjanjian kerja sama, berikut 12 perjanjian kerja sama yang telah diimplementasikan.

a. Nota kesepakatan antara Badan Bahasa dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Implementasinya salah satunya adalah Pengimbasan Revitalisasi Bahasa Dayak Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur.
b. Nota Kesepakatan antara Badan Bahasa dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan yang telah terlaksana adalah penyelenggaraan Festival Bedak Sejuk Duano di Desa Tanjung Solok, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
c. Nota Kesepakatan antara Badan Bahasa dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sinergi yang telah dilakukan adalah pemprov dengan memfasilitasi kegiatan revitalisasi bahasa Tolaki.
d. Perjanjian kerja sama antara Badan Bahasa dan Badan Informasi Geospasial, ditindaklanjuti dengan kegiatan penelaahan dan pengawasan nama rupabumi
e. Nota Kesepakatan antara Badan Bahasa dan Pemerintah Kota Bogor. Implementasinya adalah pembinaan 45 lembaga di kota Bogor dalam rangka pemartabatan bahasa negara.



Foto 43 Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Bogor

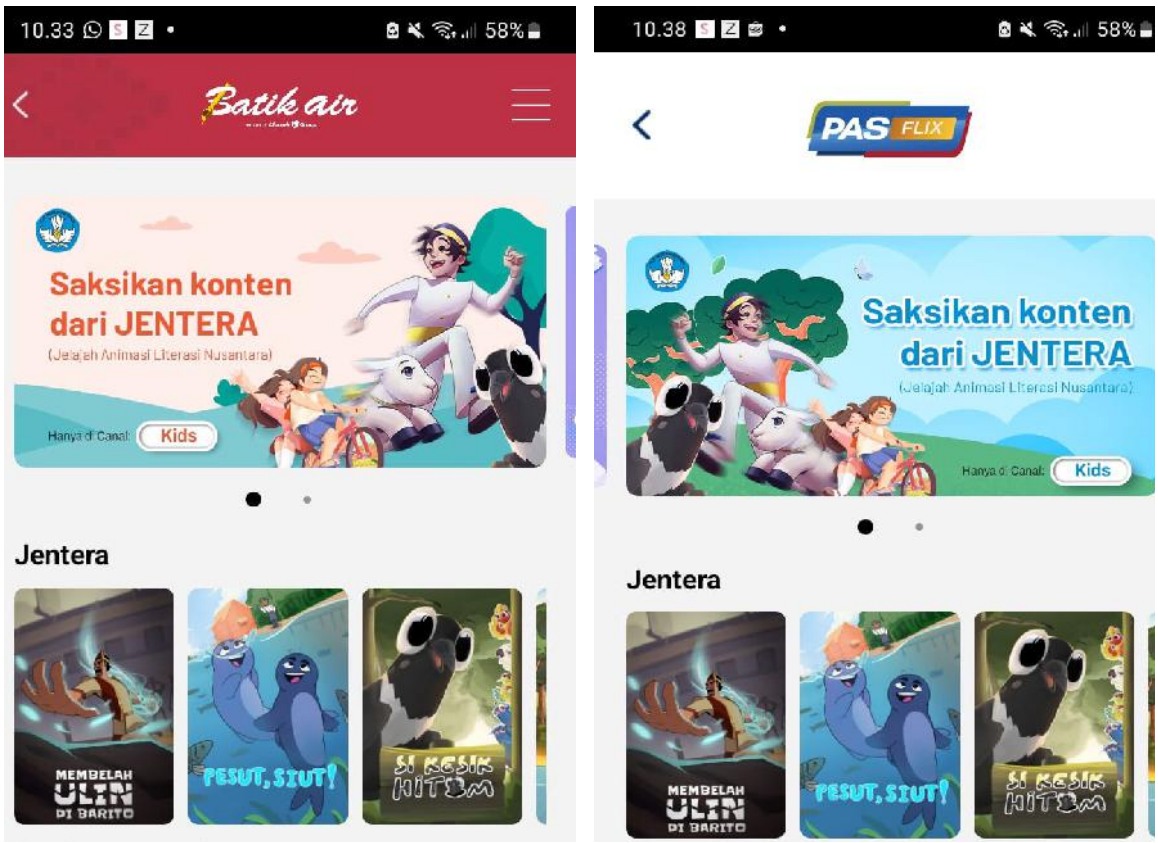
f. Perjanjian kerja sama antara Badan Bahasa dan Perpusatkaan Nasional RI. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pemanfaatan bahan Perpustakaan

yang dikelola dan dimiliki Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra untuk dicetak ulang oleh Perpusnas.

g. Perjanjian kerja sama antara Badan Bahasa dan IPDN. Perjanjian ini telah ditindaklanjuti oleh Kantor Bahasa NTB dalam program peningkatan bahasa Inggris dan pembinaan bahasa Indonesia bagi praja.

h. Perjanjian kerja sama antara Badan Bahasa dan Japan *Foundation*. Implementasinya adalah pembekalan BIPA bagi mitra Nihongo yang ditugasi sebagai pengajar bahasa Jepang di beberapa provinsi di Indonesia.

i. Perjanjian kerja sama antara Badan Bahasa dan Lynkstream. Lynkstream Pte. Ltd. adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi konten hiburan, seperti film, video pendek, majalah, dan permainan dan merupakan distributor eksklusif untuk PT. Dua Surya Dinamika (DSD), PT DSD memiliki dua aplikasi Tripper dan Pasflix. Dua aplikasi ini merupakan aplikasi yang mengkhususkan pada fitur-fitur hiburan di dalam pesawat (*inflight entertainment*).



Gambar 57 Tampilan Konten JENTERA di aplikasi Tripper dan Pasflix

j. Perjanjian kerja sama antara Badan Bahasa dan TVRI Stasiun Kalimantan Selatan. Implementasi dari perjanjian ini adalah penyiaran program berita berbahasa Banjar melalui siaran Habar Banua.

k. Perjanjian kerja sama antara Badan Bahasa dan DPRD Kutai Kartanegara. Kegiatan yang telah terlaksana adalah penyusunan Rancangan peraturan daerah bahasa Kutai bersama dengan Balai Bahasa Kalimantan Timur.

l. Nota kesepakatan antara Badan Bahasa dan Pemerintah Kota Surabaya. Implementasinya adalah Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar sosialisasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) untuk pemangku

kepentingan di Pemerintah Kota Surabaya pada 12 November 2024. Sosialisasi ini diikuti oleh 70 orang dari dinas dan OPD di lingkungan Pemkot Surabaya.

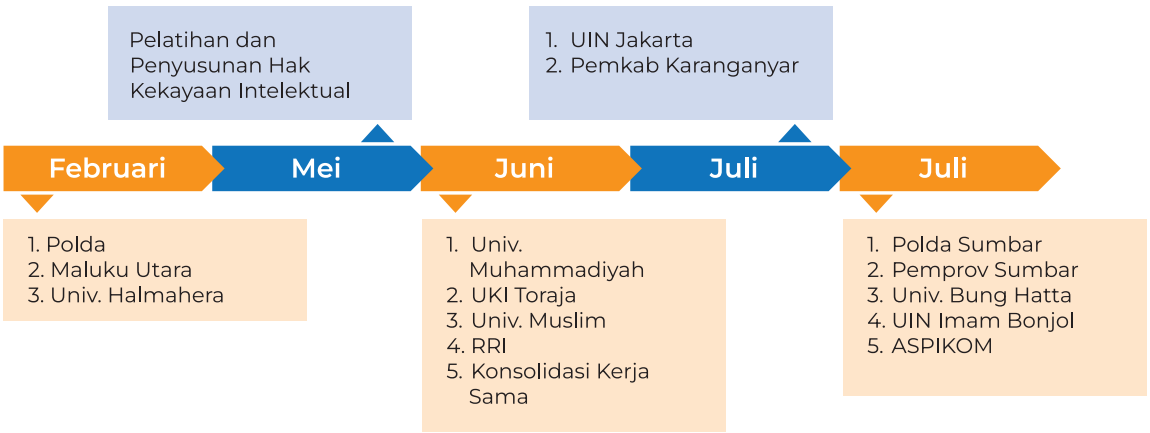
Empat perjanjian kerja sama yang belum terimplementasi, yaitu dengan pihak berikut.

a. IPSA (*Indonesian Professional Speakers Association*). Layanan kerja sama sebelumnya telah menjadwalkan akan mengadakan pelatihan wicara publik untuk layanan kerja sama dan humas di bulan November. Namun, kegiatan ditangguhkan karena adanya pemotongan anggaran dan direncanakan akan terlaksana pada tahun 2025.
b. Universitas Kristen Indonesia. Implementasi perjanjian akan dimulai pada tahun 2025 karena perjanjian ini baru saja ditandatangani pada bulan Oktober 2024.
c. Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Implementasi perjanjian akan dimulai pada tahun 2025 karena perjanjian ini baru saja ditandatangani pada bulan Oktober 2024.
d. Pemerintah Kabupaten Kerinci. Implementasi perjanjian akan dimulai pada tahun 2025 karena perjanjian ini baru saja ditandatangani pada bulan November 2024.

Upaya penandatanganan dan implementasi kerja sama yang baik dapat memperkuat aspek transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik yang menjadi fokus utama dalam proses pembangunan ZI-WBK/WBBM.

Lini masa pelaksanaan Layanan Kerja Sama dalam mendukung ketercapaian IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM ada di sepanjang tahun dilaksanakan selama adanya permintaan untuk melakukan kerja sama baik di internal Badan Bahasa maupun dari eksternal Badan Bahasa. Berikut lini masa aktivitas pokok yang dilaksanakan oleh layanan kerja sama di tahun 2024.

Gambar 58 Lini Masa Aktivitas Layanan Kerja Sama



3. Layanan Keuangan dan Perbendaharaan

Berdasarkan tugas dan fungsi dari Layanan Keuangan dan Perbendaharaan, aktivitas yang dilaksanakan dalam mendukung ketercapaian IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-

WBK/WBBM, yaitu pendampingan pengelolaan keuangan satker di lingkungan Badan Bahasa, koordinasi pelaksanaan anggaran dengan pihak eksternal, fasilitasi pelaksanaan serta evaluasi anggaran dan pengelolaan keuangan satuan kerja. Sekretariat Badan Bahasa yang memiliki fungsi membina sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan yang profesional untuk mendukung tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang tepat guna dan berhasil guna melaksanakan pendampingan sekaligus memastikan bahwa pengelolaan keuangan di Badan Bahasa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas korupsi, kolusi, efektif, dan efisien serta transparan dan akuntabel sesuai dengan Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara.



Foto 44 Pendampingan Pengelolaan Keuangan di UPT

Berikut informasi lini masa pelaksanaan aktivitas layanan Keuangan dan Perbendaharaan dalam mendukung ketercapaian IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM.

Gambar 59 Lini Masa Aktivitas Layanan Keuangan dan Perbendaharaan



4. Layanan Layanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK)

Pelaksanaan proses pelaporan akuntansi dalam mendukung pelaksanaan IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM dilaksanakan melalui penyusunan laporan keuangan, bahan SPIP, koordinasi dan penyelesaian tindak lanjut hasil audit, dan pendampingan pelaporan keuangan serta tindak lanjut hasil audit. Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh layanan APK menunjang tercapainya sinkronisasi data keuangan dan BMN yang sesuai dengan standar, memberikan solusi terhadap permasalahan penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan seluruh

satker dapat disampaikan tepat waktu.

Dalam rangka mendukung pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga, layanan APK melaksanakan penyiapan bahan penilaian atas maturitas SPIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa baik untuk komponen penetapan tujuan, struktur dan proses maupun pencapaian tujuan.



Foto 45 Penyusunan laporan keuangan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 dan 2024



Foto 46 Penyusunan bahan SPIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021). Pada tahun 2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah memperoleh nilai maturitas penyelenggaraan SPIP 3,408. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi turut berperan dalam upaya memperoleh nilai maturitas tersebut. Sementara itu, hasil evaluasi pada tahun 2024 masih pada tahap Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Jenderal.



Foto 47 Penyusunan laporan keuangan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa TA 2023 Unaudited

Kegiatan lainnya yang turut mendukung ketercapaian indikator kinerja ZI-WBK/ WBBM adalah terkait dengan hasil pelaporan keuangan dan pengendalian internal

atas pelaporan keuangan (PIPK). Upaya ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyusunan pelaporan keuangan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Strategi yang dilakukan oleh layanan APK adalah melakukan pendampingan ke seluruh satker terkait dengan pelaporan keuangan dan pemantauan tindak lanjut hasil. Berikut pendampingan ke satker di lingkungan Badan Bahasa pada tahun 2024.

Gambar 60 Pendampingan UPT



Di samping melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan, Layanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa didampingi oleh tim BPK RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berhasil melakukan tindak lanjut temuan BPK RI dan Inspektorat Jenderal dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 39 Temuan BPK

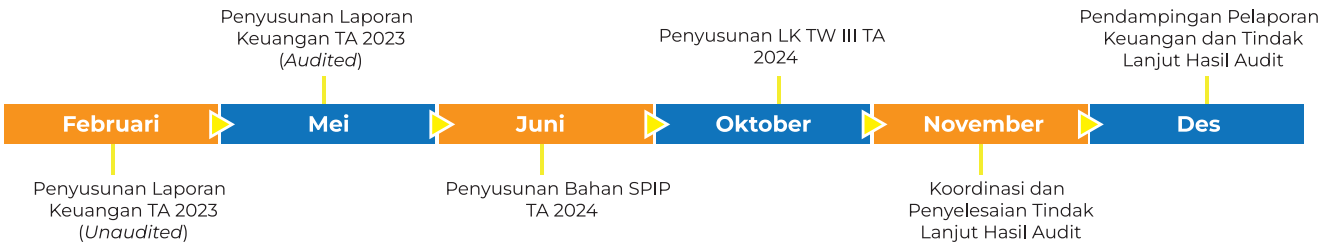
No	Tahun LK		Uraian	Jumlah Temuan	Tindak Lanjut	Saldo Temuan
1	2013	LK	Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak Tertib.	783.660.000	731.126.000	52.534.000
2	2014	LK	Kelebihan Pembayaran Pekerjaan atas Kegiatan Belanja Modal pembangunan Gedung Badan Bahasa	347.000.000.000	346.899.111.001	100.888.999
3	2015	LK	Penerimaan kas sebesar Rp17,92 Miliar belum dilaporkan dan/atau digunakan langsung / K-1.1.4	1.848.336.091	1.848.336.091	-
3	2016	LK	Terdapat Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan. Pada Balai Bahasa Sumatera Barat dan Balai Bahasa Riau	110.994.500	5.760.000	105.234.500
4	2020	LK	Belanja modal Kemendikbudristek tidak sesuai ketentuan pada Balai Bahasa Sumatera Barat	378.615.370	378.615.370	-
5	2021	LK	Pengelolaan Keuangan pada Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Tidak tertib	569.736.753	569.736.753	-
6	2022	LK	Kekurangan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum sesuai ketentuan.	2.511.000	2.511.000	-
7	2023	LK	Penyelesaian Gedung KB Gorontalo tidak sesuai ketentuan dan jaminan pelaksanaan Rp1.065.063.250,00 tidak diakui oleh Bank Penerbit	1.065.063.250	-	1.065.063.250

Tabel 40 Temuan Inspektorat Jenderal

No.	Satuan Kerja	Temuan		Tindak Lanjut Sesuai			Tindak Lanjut Belum Sesuai		
		Jumlah kejadian	Nominal	Jumlah kejadian	Nominal	%	Jumlah	Nominal	%
1	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	5	63.978.120	0	63.978.120	100,00	0	-	0,00
2	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	10	36.892.747	3	36.892.799	100,00	7	- 52	0,00
3	Kantor Bahasa Provinsi NTB	4	37.532.000	4	37.532.000	100,00	0	-	0,00
4	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	6	122.580.000	6	122.580.000	100,00	0	-	0,00
5	Kantor Bahasa Provinsi Kaltim	4	5.550.000	0	5.550.000	100,00	3	-	0,0
6	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	7	10.024.753	7	10.024.753	100,00	0	-	0,0
7	Balai Bahasa Provinsi Bali	8	9.303.153	8	9.303.153	100,00	0	-	0,0
8	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	6	6.389.450	6	6.389.450	100,00	0	-	0,0
9	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	4	25.323.085	4	25.323.085	100,00	0	-	0,0
10	Kantor Bahasa Provinsi Babel	6	42.155.000	6	42.155.000	100,00	0	-	0,0
11	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	5	7.617.600	0	7.617.600	100,00	0	-	0,0
12	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	4	-	2	-	0,00	2	-	0,0
13	Kantor Bahasa Provinsi Banten	8	4.045.000	6	4.045.000	100,00	2	-	0,0
14	Balai Bahasa Provinsi Kalbar	5	17.826.129	4	17.826.129	100,00	1	-	0,0
15	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	5	11.634.000	0	11.634.000	100,00	5	-	0,0
16	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	4	763.500	0	763.500	100,00	1	-	0,0
17	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	4	18.180.250	1	18.180.250	100,00	1	-	0,0
18	Kantor Bahasa Provinsi Kep. Riau	3	10.590.000	0	10.590.000	100,00	0	-	0,0
19	Balai Bahasa Kalimantan Selatan	2	4.691.987,87	2	4.691.987,87	100,00	0	-	0,0
20	Balai Bahasa Kalimantan Tengah	5	7.128.000,00		7128000	100,00	5	-	0,0
21	Kantor Bahasa Provinsi NTT	2	1.260.000		1260000	100,00	1	-	0,0
22	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	3	3.221.200,00	3	3.221.200,00	100,00	0	-	0,0
23	Balai Bahasa Provinsi Sumsel	4	1.800.000		1800000	100,00	3	-	0,0
24	Balai Bahasa Provinsi Aceh	5	6.034.762	5	6.034.762	100,00	0	-	0,0
25	Balai Bahasa Provinsi Papua	4	3.850.000	4	3.850.000	100,00	0	-	0,0
26	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	6	108.735.000	6	108.735.000	100,00	0	-	0,0
27	Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara	4	20.962.500	4	20.962.500	100,00	0	-	0,0
28	Balai Bahasa Sulawesi Selatan	5	3.380.000		2834500	83,86	5	545.500	16,1
29	Balai Bahasa Sulawesi Tengah	6	8.550.000		8.550.000	100,00	5	-	0,0
30	Balai Bahasa Riau	6	11.900.000		11.900.000	100,00	6	-	0,0
Jumlah		150	611.898.237	81	611.352.789	99,91	47	545.448	0,09

Berikut informasi lini masa pelaksanaan aktivitas layanan Analisis Pelaporan Keuangan dalam mendukung ketercapaian IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM.

Gambar 61 Lini Masa Layanan Akutansi dan Pelaporan Keuangan



5. Layanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan

Dukungan layanan kerumahtanggaan dan perlengkapan terkait dengan ketercapaian IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM mencakup pengelolaan fasilitas, peralatan, dan sarana lainnya yang mendukung operasional instansi pemerintah. Meskipun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan publik dalam arti umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan yang dikelola dengan baik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung efisiensi kerja, mempercepat birokrasi, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Pemenuhan

sarana dan prasarana serta fasilitas kerja yang memadai mendukung efektivitas dan produktivitas serta kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dalam pencapaian ZI-WBK/WBBM.

Penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas kantor turut mendukung kelancaran serta peningkatan pelayanan publik sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Peran Layanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan dalam ZI-WBK dan WBBM sangat strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan pengelolaan fasilitas dan perlengkapan yang baik, instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi potensi penyalahgunaan, serta memastikan bahwa pegawai bekerja dalam lingkungan yang kondusif dan produktif. Semua ini berkontribusi pada tercapainya tujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, melayani, dan mampu memenuhi harapan masyarakat.

Informasi lini masa pelaksanaan aktivitas Layanan Kerumahtanggaan dan perlengkapan dalam mendukung ketercapaian IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM dilakukan setiap bulan.

6. Layanan Perpustakaan



Foto 48 Seminar dan Pameran Perpustakaan Badan Bahasa

Aktivitas yang dilaksanakan oleh layanan perpustakaan seperti bedah buku, pameran buku kebahasaan dan kesastraan, dan studi banding antarperpustakaan, menjadi salah satu faktor pendukung upaya peningkatan pelayanan publik ketercapaian IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM. Perpustakaan di Badan Bahasa merupakan perpustakaan khusus tentang kebahasaan dan kesastraan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Perpustakaan Badan Bahasa melayani pemustaka yang terdiri atas pegawai, peneliti, dosen, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum. Koleksi cetak yang tersedia di perpustakaan berupa buku terbitan Badan Bahasa, Balai, dan Kantor Bahasa hasil penelitian/penyusunan buku tentang teori, kamus, glosarium, antologi, majalah, jurnal ilmiah, dan kliping kebahasaan dan kesastraan. Selain itu, di perpustakaan

juga tersedia buku-buku tentang pengetahuan umum, pengajaran, dan bidang keagamaan, cerpen, novel, dan sastra anak yang jumlahnya sudah mencapai ribuan judul, serta ada juga koleksi digital yang berupa terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa dan Kantor Bahasa. Adapun jumlah koleksi cetak berjumah 36.663 judul, 49.455 eksemplar.



Foto 49 Aktivitas Bedah Buku di Lingkungan Badan Bahasa

Kegiatan Bedah Buku dalam meningkatkan layanan publik ke masyarakat memiliki bertujuan, selain untuk berdiskusi dan membahas buku yang menjadi tema Bedah Buku juga untuk menarik minat pengunjung perpustakaan agar dapat langsung memanfaatkan layanan di perpustakaan.

Tabel 41 Kendala, Strategi, dan Langkah Antisipasi IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM

No.	Kendala	Strategi
1	Perubahan kebijakan dari tim penilai KemenpanRB terkait proses penilaian ZI-WBK/ WBBM.	Berkoordinasi dengan tim penilai dari KemenpanRB dan mitra dari Biro Ortala terkait proses penilaian ZI-WBK/WBBM yang terbaru.
2	Belum seluruh pegawai di lingkungan Badan Bahasa yang memiliki kesadaran dalam membangun setiap area ZI-WBk/WBBM.	Melakukan sosialisasi dan pendampingan tentang urgensi pembangunan ZI-WBK/WBBM

B. Agenda Prioritas

Badan Bahasa memiliki program prioritas yang mendukung program prioritas adalah Penguatan Literasi Kebahasaan, dan Kesastraan, Pelindungan Bahasa dan Sastra, dan Internasionalisasi Bahasa Indonesia. Program tersebut telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sudah lebih 100%.

Tabel 42 Realisasi Program/Agenda Prioritas Badan Bahasa Tahun 2024

No	Program Prioritas Badan Bahasa	RO Prioritas Nasional	Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
1	Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	Produk Kodifikasi Bahasa	70	100	142,86%	24.543.925.000	21.708.391.871	88,45%
		Penutur Bahasa Terbina	9.154	12.889	140,80%	24.433.020.000	24.012.910.601	98,28%
		Penutur Bahasa Teruji	111.586	252.687	226,45%	13.526.243.000	11.816.573.642	87,36%
		Generasi Muda Terbina Program Literasi	19.133	22.554	117,88%	22.880.973.000	20.550.363.831	89,81%

2	Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah	Partisipan Pelindungan Bahasa dan Sastra	8.292	13.191	159,08%	83.460.915.000	78.958.305.365	94,61%
3	Internasionalisasi Bahasa Indonesia	Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	256	438	171,09%	37.162.478.000	33.147.749.563	89,20%

Selain seluruh target yang ditetapkan dalam RO Prioritas telah tercapai, berikut ini agenda prioritas yang dilakukan sebagai bentuk upaya dalam mencapai program prioritas Badan Bahasa.

1. Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan

Upaya untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan apresiasi terhadap bahasa dan sastra dilakukan melalui penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan. Literasi kebahasaan mencakup kemampuan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara dengan baik serta memahami berbagai aspek bahasa, seperti tata bahasa, kosakata, dan struktur kalimat. Sementara itu, literasi kesastraan berfokus pada kemampuan untuk mengapresiasi dan memahami karya sastra, seperti puisi, prosa, dan drama.

Badan Bahasa dalam menguatkan literasi kebahasaan dan kesastraan menyelenggarakan aktivitas berupa penyusunan, pencetakan, dan pengiriman buku pendukung literasi. Upaya ini mendukung gagasan Program Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia yang diusung oleh Kemendikbudristek sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Episode 23.

Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan minat membaca siswa melalui pemberian buku bacaan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan siswa, disertai dengan pelatihan bagi guru. Target program ini adalah seluruh satuan pendidikan jenjang SD yang memiliki capaian literasi rendah (kategori 1 dan 2 pada hasil AN).

Puncak aktivitas dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat Indonesia, yaitu Badan Bahasa setiap tahun melaksanakan Bulan Bahasa dan Sastra (BBS). Bulan Bahasa dan Sastra (BBS) merupakan ikon kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang berpusat pada setiap bulan Oktober. Ikon kegiatan tersebut dikembangkan sejak tahun 1980 untuk mengenang dan memanifestasikan gerakan dan pemikiran visioner pemuda Angkatan 1928 ke dalam kegiatan nyata. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai aktivitas kebahasaan dan kesastraan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari ekosistem pendidikan, insan dan komunitas pegiat dan pemerhati bahasa dan sastra, lembaga, hingga masyarakat umum. Bulan Bahasa dan Sastra diselenggarakan dalam rangka (1) memelihara semangat persatuan yang digagas oleh para pemuda dalam peristiwa Sumpah Pemuda; (2) meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan memperkuat semangat gerakan Trigatra Bangun Bahasa; serta (3) meningkatkan peran serta masyarakat luas dalam mendukung pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra serta meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

Pada tahun 2024, Bulan Bahasa dan Sastra kembali diselenggarakan dengan mengusung tema “Berbahasa Cerdas untuk Generasi Emas”. Melalui tema tersebut,

seluruh elemen masyarakat diajak untuk memaknai "kecerdasan berbahasa" para pejuang pergerakan Angkatan 1928. Dalam hal ini, generasi muda Indonesia diharapkan mampu memahami informasi secara tepat dan efektif serta mampu menyampaikan gagasan secara jelas dan santun, baik melalui lisan maupun tulisan. Selain itu, mereka juga diharapkan memiliki gairah untuk menghasilkan karya kebahasaan yang kreatif dan inovatif untuk memajukan bangsa Indonesia dan mewujudkan Generasi Emas 2045 yang berkarakter, berkompeten, dan berdaya saing tinggi. Semangat Sumpah Pemuda itu dipelihara dengan merayakan BBS Tahun 2024 melalui berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan sebagai ajang untuk bertukar gagasan, berkompetisi, dan berbagi apresiasi serta informasi.

Bulan Bahasa dan Sastra 2024

Tahun 2024 terdapat berbagai rangkaian kegiatan festival/perlombaan, penghargaan, dan acara puncak yang diselenggarakan dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra. Sasaran umum kegiatan BBS Tahun 2024 adalah seluruh masyarakat pengguna, pemerhati, dan pencinta bahasa dan sastra. Secara khusus, kegiatan ini menyasar generasi muda sesuai dengan konsep BBS yang mengusung semangat Sumpah Pemuda. Berikut adalah rangkaian kegiatan dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2024.

Gambar 62 Rangkaian Kegiatan BBS 2024

1
Penghargaan Sastra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
April—Oktober 2024

2
Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga Tingkat Nasional
September—Oktober 2024

3
Apresiasi Giat UKBI Adaptif Merdeka
Februari—Oktober 2024

4
Festival Musikalisasi Puisi Tingkat Nasional
Agustus—Oktober 2024

5
Festival Film Pendek Berbahasa Daerah
April—Oktober 2024

6
Festival Handai Indonesia
Maret—Agustus 2024

7
Pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasional
Agustus—Oktober 2024

8
Lomba Cerdas Mengulas Buku
Februari—Oktober 2024

9
Lomba Mendongeng bagi Penyandang Disabilitas Netra
Agustus—Oktober 2024

10
Lomba Monolog Pesan Pujangga
Agustus—Oktober 2024

11
Menjalin Indonesia
Oktober 2024

12
Acara Puncak Bulan Bahasa dan Sastra
28 Oktober 2024

Puncak Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2024 dilaksanakan pada 25—29 Oktober 2024 di Hotel Sultan, Jakarta. Dalam rentang waktu tersebut dilaksanakan pula final Festival Musikalisasi Puisi Tingkat Nasional, Lomba Mendongeng bagi Penyandang Disabilitas Netra, Lomba Monolog Pesan Pujangga, Pameran Bulan Bahasa dan Sastra, dan Acara Puncak Bulan Bahasa dan Sastra.



Foto 50 Taklimat Media Bulan Bahasa dan Sastra



Foto 51 Peresmian Pameran Bulan Bahasa dan Sastra oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Kebudayaan, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



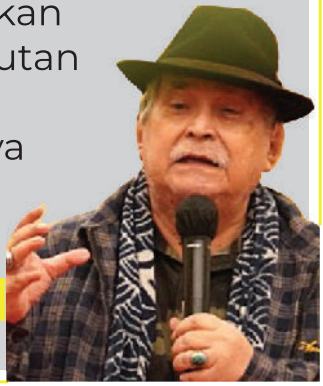
Foto 52 Peluncuran Produk dan Capaian Badan Bahasa oleh Ketua Komisi X DPR RI dan Pejabat Kementerian



Foto 53 Penyerahan Penghargaan dan Penampilan Seni Budaya pada Acara Puncak Bulan Bahasa dan Sastra

Testimoni Mitra dan Penerima Manfaat Program dan Layanan Badan Bahasa

"Penghargaan sastra yang diberikan sangat penting, lebih penting lagi jika diadakan pelatihan-pelatihan sastra. Keberlanjutan program adalah sesuatu yang harus dilaksanakan secara nyata tidak hanya sekadar keinginan semata"



Slamet Rahardjo Djarot

Aktor dan sutradara

2. Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

Pelindungan bahasa dan sastra daerah merupakan upaya untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah sebagai warisan budaya bangsa.

Ancaman kepunahan bahasa daerah semakin mengkhawatirkan seiring dengan perkembangan globalisasi dan dominasi bahasa-bahasa besar seperti bahasa Indonesia, Inggris, atau bahasa lainnya yang lebih banyak digunakan di ranah pendidikan, pekerjaan, dan media.

Badan Bahasa mempunyai program prioritas melaksanakan pelindungan bahasa dan sastra melalui program revitalisasi bahasa daerah (RBD).

Revitalisasi Bahasa Daerah atau RBD merupakan langkah strategis dalam rangka menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari melalui cara yang menyenangkan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun komunitas/masyarakat. Pada tingkat pusat, revitalisasi bahasa daerah dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut.

1. Penyusunan model pelindungan bahasa dan sastra. Model ini sebagai desain dan/atau panduan pelaksanaan kegiatan substansi pelindungan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, seperti unit pelaksana teknis di daerah, pemerintah daerah, akademisi, serta berbagai pihak pemangku kepentingan terkait.
2. Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan sebagai penguatan Komunitas Sastra. (banpem) dalam melaksanakan kegiatan bidang kebahasaan dan kesastraan.
3. Pemodernan Sastra dalam Bentuk Komik Legenda Nusantara dan Cerita Bergambar Naskah Manuskrip Nusantara. Kegiatan ini sekaligus mendukung literasi kebahasaan dan kesastraan. Keberadaan komik dan cerita bergambar diharapkan mampu mendukung upaya penyediaan bahan bacaan literasi yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, komik dan cerita bergambar yang bersumber dari khazanah sastra Nusantara ini diharapkan mampu mendorong praktik baik literasi baca-tulis di sekolah, di komunitas literasi, serta kegiatan lain yang berkaitan erat dengan penumbu-

han budaya literasi, termasuk literasi sastra, serta kecintaan terhadap budaya leluhur yang tersebar di Nusantara.

Pada tingkat satker (UPT) kegiatan revitalisasi daerah dilakukan melalui bimbingan teknis guru master. Bimtek guru master dimaksudkan untuk menciptakan guru-guru utama yang memiliki kemampuan terkait dengan kebahasaan yang berfokus untuk merevitalisasi bahasa daerah serta diharapkan dapat menyampaikan ilmu dan pemahamannya kepada guru, penutur, atau anggota komunitas di daerahnya.

Sebagai salah satu tahapan dari program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD), festival tunas bahasa ibu nasional (FTBIN) merupakan upaya untuk mempromosikan keragaman bahasa daerah, menyebarluaskan semangat kecintaan dan ekspresi kebanggaan terhadap bahasa daerah, serta sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku RBD, khususnya generasi muda. FTBI di tingkat nasional (FTBIN) ini juga menjadi kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional pada tanggal 21 Februari. Sejak tahun 2023, Badan Bahasa menyelenggarakan FTBIN yang diikuti oleh tunas bahas ibu yang terpilih dari program RBD tahun 2022. Pada tahun 2024 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra kembali menyelenggarakan FTBIN sebagai bentuk apresiasi atas semangat para generasi muda terbaik penutur bahasa daerah yang telah terpilih dalam FTBI tingkat provinsi pada tahun 2023. Para peserta FTBIN 2024 merupakan tunas bahasa ibu yang mewakili 72 bahasa daerah yang direvitalisasi pada tahun 2023. Sebanyak 572 peserta dari 25 provinsi terlibat dalam FTBIN 2024. Dalam penyelenggaraan FTBIN ini, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra juga berkoordinasi dengan 19 UPT yang telah melaksanakan RBD pada tahun 2023, yaitu Balai/Kantor Bahasa Provinsi 1) Aceh, 2) Sumatera Utara, 3) Sumatera Selatan, 4) Lampung, 5) Bengkulu, 6) Jawa Barat, 7) Jawa Tengah, 8) Jawa Timur, 9) Bali, 10) Kalimantan Timur dan Utara, 11) Kalimantan Tengah, 12) Kalimantan Selatan, 13) Sulawesi Selatan dan Barat, 14) Sulawesi Tengah, 15) Nusa Tenggara Barat, 16) Nusa Tenggara Timur, 17) Maluku, 18) Maluku Utara, dan 19) Papua. Selain itu, dalam FTBIN 2024, penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah dari Mendikbudristek diberikan kepada 20 pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) atas dukungan dan kontribusi nyata dalam kesuksesan program RBD di wilayahnya.



Foto 54 Acara Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 202

3. Internasionalisasi Bahasa Indonesia

Sebagai bentuk implementasi amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, pada tahun 2023, Badan Bahasa berhasil menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO. Pada tahun 2024, Badan Bahasa berupaya untuk mengenalkan sastra Indonesia melalui peringatan 100 Tahun A.A. Navis Tingkat Internasional.

Peringatan 100 Tahun A.A. Navis Tingkat Internasional dilaksanakan pada tanggal 13–14 November 2024 di Prancis, Paris dan La Rochelle berdasarkan Keputusan Sidang UNESCO Nomor 217EX/32.INF tentang *Celebration of anniversaries*. Kegiatan ini dirancang untuk mencakup berbagai aktivitas, seperti seminar internasional, peluncuran buku kumpulan cerita pendek A.A. Navis dalam edisi dwibahasa Indonesia-Prancis, dan pameran interaktif. Dampak dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1) Terselenggaranya gelar wicara dengan narasumber terpilih di kantor Pusat UNESCO, Paris dan terlaksananya kegiatan Pekan Indonesia dalam rangka Peringatan 100 Tahun A.A. Navis di La Rochelle.
2) Terbangunnya jejaring kerja sama antara institusi budaya dan akademik di Indonesia dan Prancis, serta diluncurkannya edisi dwibahasa kumpulan cerpen karya A.A. Navis untuk memperluas akses pembaca internasional.
3) Terwujudnya pemahaman global tentang sastra sebagai media transformasi sosial dan inspirasi generasi muda untuk menggali lebih jauh kekayaan sastra Indonesia.
4) Terselenggaranya Pameran Nasional tentang A.A. Navis di Perpusnas sebagai penutup rangkaian Peringatan 100 Tahun A.A. Navis.
5) Terterjemahkannya 10 karya A.A. Navis. Karya-karya ini dipilih karena merepresentasikan inti dari warisan sastra Indonesia yang kaya. Kesepuluh karya tersebut tidak hanya dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga memuat penggambaran sejarah yang mendalam, mulai dari masa penjajahan hingga era modern. Dengan menampilkan kisah-kisah ini, dunia internasional dapat memahami lebih baik perjalanan sejarah dan budaya Indonesia, serta kontribusi penting A.A. Navis dalam menggambarkan identitas bangsa melalui narasi yang penuh makna dan refleksi kritis. Kesepuluh karya tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 43 Terjemahan 10 karya A.A. Navis

No.	Judul Bahasa Indonesia	Judul Terjemahan dalam Bahasa Prancis
1.	Robohnya Surau Kami	L'effondrement de notre mosquée
2.	Percakapan Lebaran	Conversation de l'Aïd
3.	Kawin	Un maria e
4.	Topi Helm	Le casque
5.	Bertanya Kerbau kepada Pedati	La question du buffle à la charrette
6.	Orde Lama	L'Ordre Ancien
7.	Pak Menteri Mau Datan	Monsieur le Ministère va venir
8.	Orang dari Luar Ne eri	Ceux de l'étran er
9.	Kucing	Les chats
10.	Maria	Maria

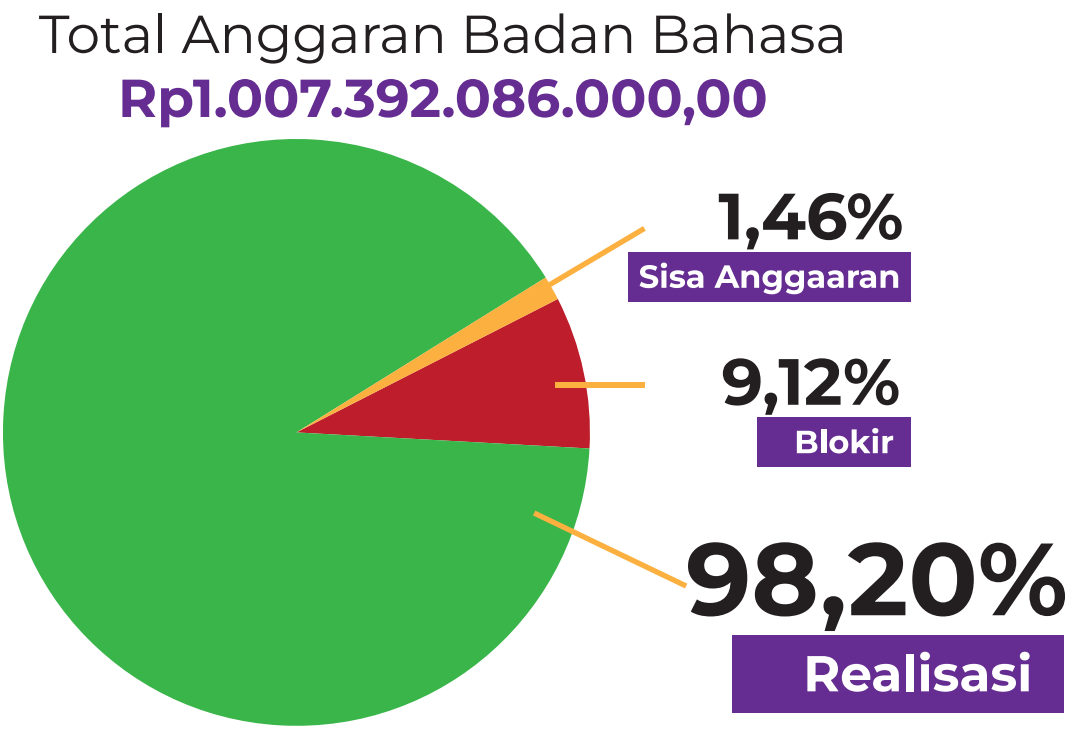


Foto 55 Pelaksanaan Peringatan 100 Tahun A.A. Navis

2. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Badan Bahasa dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp1.007.392.086,00 (satu triliun tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah) dengan blokir anggaran sebesar Rp91.904.476.000,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus empat juta empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sehinggat total pagu aktif sebesar Rp915.487.610.000,00 (sembilan ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh delapan tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Dari pagu anggaran tersebut, Badan Bahasa berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp899.043.671.201,00 (delapan ratus miliar sembilan puluh sembilan juta empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu dua ratus satu rupiah) dengan persentase daya serap sebesar 98,20% (tanpa blokir) atau 89,24% (dengan blokir).

Gambar 63 Total Anggaran Badan Bahasa 2024



Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian lima sasaran dengan enam indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada setiap sasaran/ indikator kinerja.

Tabel 44 Realisasi Per Sasaran Program

Sasaran Program	Indikator	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa (Rp)
[SP 1] Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	[IKP 1.1] Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya	329.243.062.000	259.637.840.106	78,86%	69.605.221.894
	[IKP 1.2] Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya	43.829.400.000	42.429.845.101	96,81%	1.399.554.899
[SP 2] Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	[SP 2] Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	104.381.307.000	93.040.130.609	89,13%	11.341.176.391
[SP 3] Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah	[IKP 3.1] Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya	100.638.693.000	94.253.389.744	93,66%	6.385.303.256
[SP 4] Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	68.569.204.000	54.383.696.077	79,31%	14.185.507.923
[SP 5] Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/ WBBM	360.730.420.000	355.298.769.564	98,49%	5.431.650.436
TOTAL		**1.007.392.086.000**	**899.043.671.201**	**89,24%**	**108.348.414.799**

Tabel 45 Anggaran Satker di Lingkungan Badan Bahasa

No	Satuan Kerja	Pagu	Blokir	Realisasi	Sisa Anggaran	%
PUSAT						
1	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	152.908.251.000	2.845.532.000	149.104.009.473	958.709.527	99,36%
2	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	85.828.852.000	6.120.000.000	79.198.005.863	510.846.137	99,36%
3	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	264.308.234.000	57.044.634.000	199.641.932.086	7.621.667.914	96,32%
4	Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	83.589.014.000	7.571.666.000	73.760.474.566	2.256.873.434	97,03%
Kantor/Balai Bahasa						
5	Balai Bahasa Provinsi Aceh	11.438.926.000	335.096.000	10.960.852.110	142.977.890	98,71%
6	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	13.033.116.000	282.962.000	12.657.654.958	92.499.042	99,27%
7	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	11.495.495.000	1.162.233.000	9.951.143.707	382.118.293	96,30%

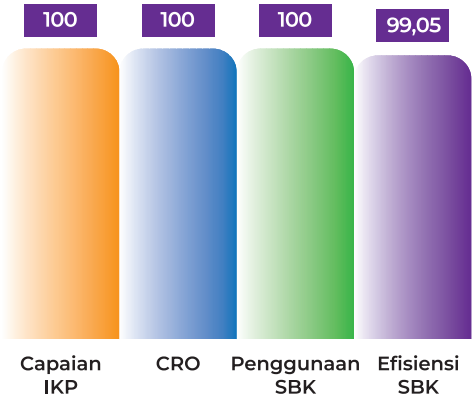
No	Satuan Kerja	Pagu	Blokir	Realisasi	Sisa Anggaran	%
8	Balai Bahasa Provinsi Riau	11.058.798.000	337.084.000	10.711.635.103	10.078.897	99,91%
9	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	10.041.836.000	826.226.000	9.162.322.266	53.287.734	99,42%
10	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	15.437.156.000	436.531.000	14.899.312.105	101.312.895	99,32%
11	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	15.065.007.000	1.114.385.000	13.944.971.029	5.650.971	99,96%
12	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	17.008.937.000	697.328.000	16.197.826.717	113.782.283	99,30%
13	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	14.953.414.000	724.441.000	14.145.847.385	83.125.615	99,42%
14	Balai Bahasa Provinsi Bali	12.782.977.000	481.700.000	12.139.109.236	162.167.764	98,68%
15	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	10.300.900.000	659.345.000	9.613.384.289	28.170.711	99,71%
16	Balai Bahasa Kalimantan Tengah	14.996.277.000	467.144.000	14.451.430.034	77.702.966	99,47%
17	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	10.287.697.000	575.824.000	9.630.309.929	81.563.071	99,16%
18	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	10.060.623.000	619.181.000	9.411.490.337	29.951.663	99,68%
19	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	8.389.533.000	1.025.341.000	7.150.270.682	213.921.318	97,10%
20	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	12.401.134.000	491.879.000	11.882.683.514	26.571.486	99,78%
21	Balai Bahasa Provinsi Papua	13.952.953.000	225.095.000	13.724.986.568	2.871.432	99,98%
22	Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	11.855.904.000,0	593.667.000,0	11.239.074.253,0	23.162.747	99,79%
23	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	10.583.020.000,0	1.132.171.000,0	9.207.438.071,0	243.410.929	97,42%
24	Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	9.332.093.000,0	286.874.000,0	8.681.159.558,0	364.059.442	95,98%
25	Balai Bahasa Provinsi Jambi	9.390.015.000,0	794.220.000,0	8.563.166.958,0	32.628.042	99,62%
26	Balai Bahasa Provinsi Maluku	13.032.424.000,0	357.838.000,0	12.636.240.704,0	38.345.296	99,70%
27	Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara	30.732.232.000,0	510.106.000,0	30.093.079.096,0	129.046.904	99,57%
28	Balai Bahasa Provinsi Lampung	9.528.566.000,0	829.989.000,0	8.515.525.788,0	183.051.212	97,90%
29	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	12.385.860.000,0	517.377.000,0	11.847.417.232,0	21.065.768	99,82%
30	Balai Bahasa Provinsi Bengkulu	26.732.956.000,0	460.596.000,0	26.119.320.792,0	153.039.208	99,42%
31	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	7.783.794.000,0	740.267.000,0	6.878.563.608,0	183.051.212	97,66%
32	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	26.458.788.000,0	555.555.000,0	24.354.184.534,0	21.065.768	94,02%
33	Kantor Bahasa Provinsi Banten	31.089.398.000,0	384.266.000,0	30.517.250.825,0	153.039.208	99,39%
34	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	9.147.906.000,0	697.923.000,0	8.051.597.825,0	164.963.392	95,29%
Total		**1.007.392.086.000**	**91.904.476.000**	**899.043.671.201**	**14.665.780.171**	**98,20%**

2. Efisiensi Anggaran

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Aggaran, Efisiensi Penggunaan Anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu. Pengukuran efisiensi pada perencanaan anggaran dilakukan pada RO dengan mengacu pada standar biaya penggunaan SBK dan efisiensi SBK. Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel efisiensi SBK pada seluruh satuan kerja.

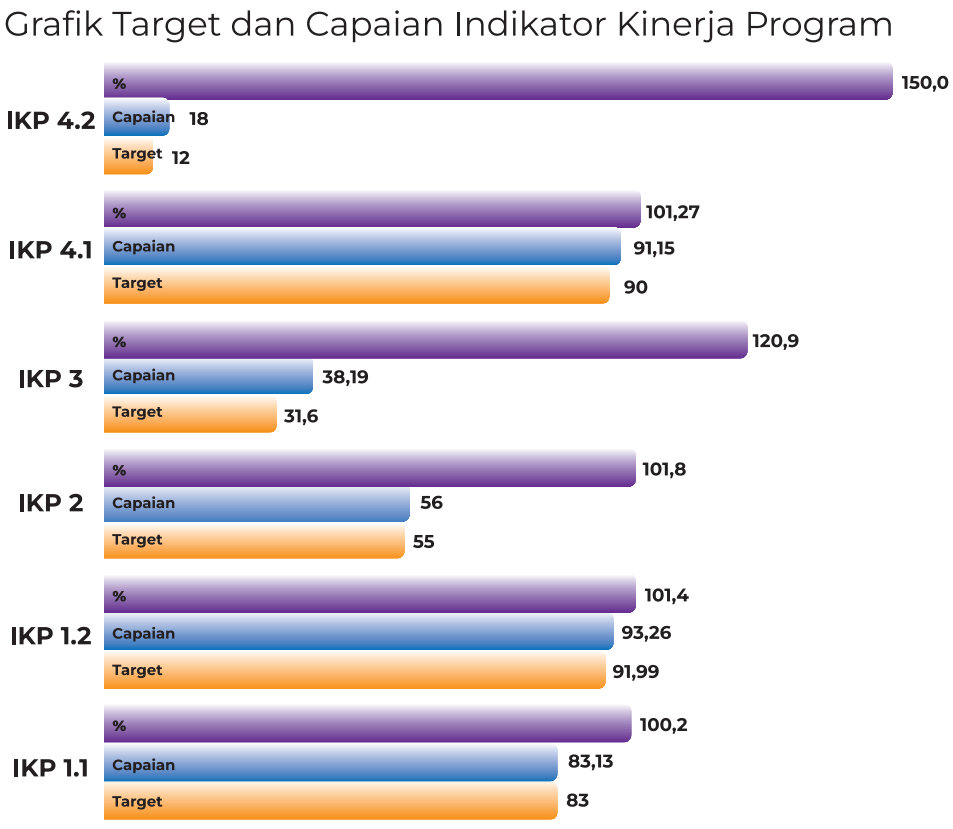
Berdasarkan data pada aplikasi Monevkeu, Nilai efisiensi SBK Badan Bahasa tahun 2024, yaitu sebesar 99,05% dengan penggunaan SBK sebesar 100%. Adapun rincian Nilai Kinerja Perencanaan Angaran Badan Bahasa dapat digambarkan pada grafik, sebagai berikut.

Grafik 22 Efisiensi Anggaran



Selain penghitungan efisiensi berdasarkan KMK 466 Tahun 2023, efisiensi anggaran pada Badan Bahasa dapat dilihat juga dari pencapaian Indikator Kinerja Program dan Rincian *Output* sebagai turunannya dengan membandingkan antara pencapaian kinerja fisik dan pencapaian kinerja anggaran. Berikut ini grafik target dan capaian indikator kinerja program.

Grafik 23 Target dan Capaian Indikator Kinerja Program



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh target IKP Badan Bahasa dapat tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Tabel 46 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program	% Capaian IKP (CKIP)	Alokasi	Blokir	Alokasi Anggaran Aktif (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	%	Sisa Anggaran	(AA x CIKP)	AA x CIKP) - RA
									Ribuan Rupiah
IKP 1.1	100,1%	329.243.062	62.268.651	266.974.411	259.637.840	97,2%	7.336.570	267.360.398	7.722.557
IKP 1.2	101,4%	43.829.400	1.012.543	42.816.857	42.429.845	99,10%	387.011	43.407.980	978.134
IKP 2	101,8%	104.381.307	9.029.203	95.352.104	93.040.130	97,58%	2.311.973	97.085.778	4.045.648
IKP 3	123,3%	100.638.693	5.825.703	94.812.990	94.253.389	99,41%	559.600	113.775.588	19.522.198
IKP 4.1	100%	68.569.204	13.470.436	55.098.768	54.383.696	98,70%	715.071	55.098.768	715.071
IKP 4.2	150%	360.730.420	297.940	360.432.480	355.298.769	98,58	5.133.710	432.518.976	77.220.206
Jumlah		**1.007.392.086**	**91.904.476**	**915.487.610**	**899.043.671.**	**98,20%**	**16.443.938**	**1.009.247.488**	**110.203.817**

Berdasarkan tabel di atas, anggaran Badan Bahasa mengalami penyesuaian dari Rp1.007.392.086,00 menjadi Rp915.487.610,00,00 yang dipengaruhi oleh

1. pengalihan anggaran untuk pembangunan gedung kantor empat UPT;
2. pengalihan anggaran untuk kebutuhan belanja operasional;
3. blokir efisiensi (A), *selfblocking* (AA), dan reguler;
4. pengalihan anggaran dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra ke UPT untuk kegiatan kemah teater generasi muda RBD dan penyediaan kumpulan (antologi) cerita anak berbahasa dan beraksara daerah; dan
5. pengalihan anggaran ke satker pusat dan UPT untuk pemenuhan belanja modal.

Jumlah efisiensi dalam pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Program Badan Bahasa yaitu sebesar Rp110.203.817.557 dengan rincian penyebab adanya efisiensi anggaran, yaitu sebagai berikut.

D. Kinerja Lain-lain

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Sasaran reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024 disesuaikan dengan sasaran pembangunan subsektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020--2024 dan sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2020—2024, yaitu terciptanya birokrasi di Kemendikbudristek yang bersih dan akuntabel serta terciptanya birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada Badan Bahasa adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan,

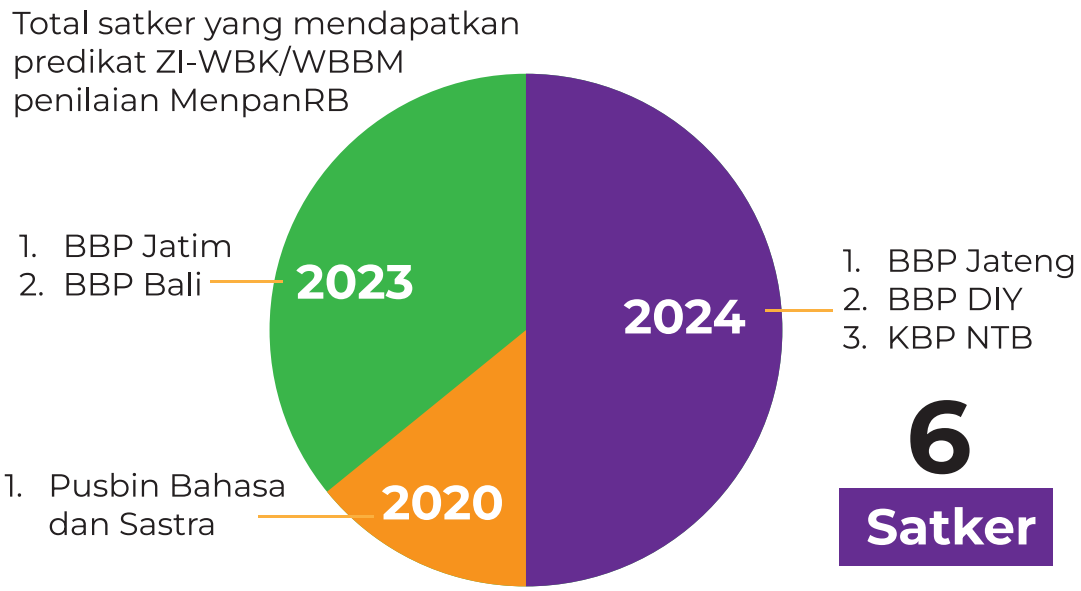
akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada Badan Bahasa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian adalah sebagai berikut.

1. Menentukan satker yang berpotensi untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
2. Melakukan penilaian mandiri oleh asesor Badan Bahasa berdasarkan hasil pengisian LKE ZI-WBK/WBBM satker
3. Seleksi administrasi satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
4. Rapat pleno dengan tim asesor eselon 1
5. Mengusulkan satker yang sudah memenuhi kriteria ke TPI
6. Melakukan pendampingan pada tahapan observasi data dukung, wawancara, dan visitasi.
7. Rapat pleno asesor TPN

Berdasarkan PermenpanRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Kepmendikbud Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Badan Bahasa melakukan pendampingan pada tiap satuan kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Berikut tahapan pengusulan satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi BPP Bahasa.

Berikut satker di lingkungan BPP Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM sebagai salah satu dampak upaya implementasi Reformasi Birokrasi selama periode Renstra 2020—2024.

Grafik 24 Satker Badan Bahasa yang Mendapatkan Predikat Zi-WBK/WBBM



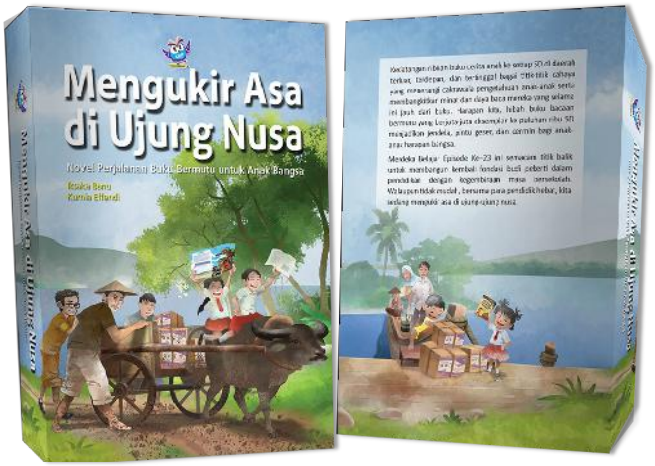
Melalui upaya ini, diharapkan birokrasi menjadi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.

2. Informasi Capaian Kinerja Lainnya yang mendukung

Pada tahun 2024 terdapat capaian kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian indikator kinerja. Berikut ini beberapa hal yang terkait dengan capaian kinerja yang mendukung ketercapaian indikator kinerja.

a. Penyusunan Seminovel

Pada tahun 2023, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah menunjuk secara langsung Tim Penulis yang terdiri atas dua orang penulis novel beserta dua anggota pendukung untuk melaksanakan penulisan novel semifiksi. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk ekplorasi dan pendalaman untuk mencari rangkaian cerita dan segala kisah terkait dengan pengiriman buku, pendampingan buku, dan pemanfaatan buku tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2024 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra telah meneruskan dan menindaklanjuti program penulisan buku tersebut dengan melakukan penyusunan seminovel perjalanan buku GLN pada program Merdeka Belajar Episode Ke-23.



Gambar 64 Buku Seminovel

Kegiatan ini menghasilkan satu buku seminovel dengan jumlah 714 halaman. Penyusunan ini merupakan bagian dari diseminasi bahan bacaan literasi, dilakukan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan cerita-cerita menarik tentang perjalanan buku GLN kepada masyarakat. Mekanisme penulisan dilakukan dalam bentuk pendampingan penulisan, mulai dari penyusunan draf awal penulisan hasil eksplorasi penulis, reviu, penyelarasan, penyuntingan, cetak dumi, sampai dengan tahap peluncuran buku.

b. Indeks Pembangunan Kebahasaan

Urgensi pembangunan kebahasaan di Indonesia makin jelas di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi. Di satu sisi, globalisasi menuntut kemampuan untuk berkomunikasi secara global, sementara di sisi lain, modernisasi berpotensi mengancam keberlangsungan bahasa-bahasa daerah yang menjadi bagian dari warisan kultural bangsa Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sekitar 139 bahasa daerah di Indonesia saat ini berada di ambang kepunahan. Hal ini menuntut adanya langkah konkret untuk melindungi dan mengembangkan bahasa-bahasa daerah, baik melalui kebijakan formal

maupun melalui inisiatif yang melibatkan komunitas lokal. Pelindungan bahasa daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan dalam menjaga warisan kultural nasional.

Selain melestarikan bahasa daerah, pengembangan bahasa Indonesia juga menjadi hal yang sangat penting agar bahasa-bahasa yang ada tetap relevan dan mampu bersaing di era digital dan global. Sebagai bahasa nasional dan alat komunikasi utama di berbagai sektor, bahasa Indonesia harus terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, teknologi, dan ekonomi kreatif. Peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia di kalangan masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Bahasa Indonesia harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam menyampaikan informasi secara efektif di ranah digital dan global, serta mendukung literasi di seluruh lapisan masyarakat.

Indeks ini dirancang untuk mencakup berbagai dimensi penting dalam kebahasaan, yaitu pembinaan bahasa, pelindungan bahasa, dan pengembangan bahasa. Setiap dimensi tersebut akan diukur melalui sejumlah indikator yang relevan sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kebahasaan di Indonesia. Hal ini menjadi krusial mengingat bahasa memiliki peran penting dalam memperkokoh identitas nasional, melestarikan keragaman bahasa dan budaya, serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas.

Dimensi pembinaan bahasa berfokus pada sejauh mana bahasa Indonesia digunakan dan diajarkan secara efektif dalam berbagai ranah kehidupan, baik ranah pribadi, sosial, vokasional maupun akademik. Dimensi ini mencakup kemampuan masyarakat untuk memahami dan menggunakan bahasa Indonesia secara lisan maupun tulis, yang akan diukur melalui sejumlah indikator seperti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang sudah diterapkan secara nasional. Peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia diharapkan tidak hanya memperkuat daya saing individu, tetapi juga meningkatkan kohesi sosial, mengingat bahasa Indonesia adalah alat pemersatu antarkelompok etnis dan budaya di Indonesia.

Dimensi pelindungan bahasa bertujuan untuk menjaga dan melestarikan bahasa-bahasa daerah yang merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Upaya pelindungan bahasa daerah menjadi hal yang sangat penting, mengingat banyak bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi penutur. Dalam konteks ini, indikator yang akan diukur mencakup persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertama, serta persentase remaja dan anak-anak yang mempelajari dan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Pelindungan bahasa daerah ini sejalan dengan pandangan UNESCO tentang pentingnya penggunaan bahasa ibu dalam Pendidikan–di dalamnya, bahasa daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas daerah dan melestarikan pengetahuan tradisional.

Dimensi pengembangan bahasa berfokus pada inovasi dan pemanfaatan bahasa, khususnya bahasa Indonesia, dalam berbagai sektor, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahasa Indonesia harus terus berkembang agar mampu mengikuti dinamika zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat modern, termasuk dalam bidang digital dan industri kreatif. Pengembangan bahasa

yang efektif akan mendukung produktivitas dalam bidang ilmu pengetahuan melalui publikasi karya ilmiah dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah, serta memperkuat peran bahasa dalam mendorong inovasi di berbagai sektor. Sejumlah indikator, seperti jumlah publikasi ilmiah kebahasaan, popularisasi sastra melalui platform digital, serta pemanfaatan bahasa dalam pengembangan teknologi dan seni, akan menjadi ukuran yang relevan dalam dimensi ini.

Dengan adanya Indeks Pembangunan Kebahasaan, pembuat kebijakan di tingkat nasional dan daerah akan memiliki instrumen evaluasi yang lebih akurat untuk menilai efektivitas kebijakan kebahasaan yang telah dilaksanakan. Indeks ini juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan baru yang lebih strategis dan berbasis data guna meningkatkan kualitas kebahasaan di Indonesia. Selain itu, indeks ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran bahasa sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Indeks ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembinaan, pelindungan, dan pengembangan bahasa, serta memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan untuk merancang intervensi yang tepat. Dengan demikian, indeks ini tidak hanya berperan sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai pendorong kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis bukti ilmiah.

Lebih lanjut, Indeks Pembangunan Kebahasaan ini juga dapat berpotensi menjadi model bagi negara-negara multibahasa lainnya dalam melestarikan dan mengembangkan bahasa nasional serta bahasa daerah mereka. Kesadaran global tentang pentingnya pelestarian bahasa makin meningkat, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh SDGs. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam wacana kebahasaan global serta menjadi contoh bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pembangunan kebahasaan.

Secara lebih detail, tujuan utama Indeks Pembangunan Kebahasaan adalah sebagai berikut.

1) Menjadi indikator keberhasilan pembangunan di bidang kebahasaan dan kesastraan.
2) Menjadi penentu peringkat atau level pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
3) Menjadi alat ukur strategis dalam mengukur capaian kinerja pemerintah di bidang kebahasaan dan kesastraan.
4) Menjadi dasar perumusan rancangan kebijakan pembangunan kebahasaan dan kesastraan.
5) Menjadi rujukan dan referensi dalam koordinasi lintas sektor K/L dan pemerintah daerah dalam pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan.
6) Menjadi pemicu dan pemacu K/L dan pemerintah daerah berpartisipasi aktif dalam pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan.

c. Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing (PKBA)

Sejalan dengan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. KB/02/M/2014 dan Nomor 02/II/KB/2014 tentang Pengelolaan Instalasi Strategis Nasional Kawasan *Indonesia Peace of Security Center* (*IPSC*). Dalam nota kesepahaman tersebut, Badan Bahasa sebagai salah satu lembaga yang berada di Kawasan *IPSC* memiliki fungsi memberikan fasilitasi bahasa asing kepada petugas negara yang akan diberangkatkan ke luar negeri.

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing bagi Misi Perdamaian dilaksanakan oleh Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra untuk mendukung persiapan personel TNI Kontingen Garuda (Kon-ga) yang ada di Kawasan IPSC dalam melaksanakan tugas negara; mengemban amanat Dewan Keamanan PBB dalam memelihara perdamaian dunia di wilayah konflik di berbagai negara. Kompetensi berbahasa asing berperan penting agar para personel TNI tersebut dapat berkomunikasi dengan personel militer dari negara lain serta berinteraksi dengan masyarakat di negara tempat bertugas. Selain itu, dengan memanfaatkan bahasa asing yang telah dikuasai, para petugas negara ini juga dapat menyebarkan bahasa negara, mengenalkan budaya Indonesia, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya perdamaian.

Pada tahun 2024, kegiatan ini telah memfasilitasi 1.684 personel Satgas TNI Kontingen Garuda yang akan berangkat ke berbagai daerah misi, di antaranya ke Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah. Bahasa asing yang diajarkan kepada personel TNI tersebut, di antaranya, adalah bahasa Inggris, Arab, dan Prancis. Bahan ajar berupa modul dan buku saku bahasa Inggris, Arab, dan Prancis pun disediakan oleh Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra sesuai dengan permohonan Markas Besar TNI melalui Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra. Berikut adalah perincian penerima manfaat kegiatan Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing bagi Misi Perdamaian.

1) 229 personel 5 Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL Lebanon tahun 2024.
2) 400 personel Satgas Batalion Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-R UNIFIL Lebanon Tahun 2024.
3) 220 personel Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XX-U MONUSCO Kongo Tahun 2024.
4) 400 personel Satgas BGC TNI Kontingen Garuda XXXIX-F MONUSCO Kongo Tahun 2024.
5) 55 personel Standby Military Observer dan Military Staff TNI Tahun 2024.
6) 240 personel Satgas TNI Kontingen Garuda XXXVII-K MINUSCA Republik Afrika Tengah Tahun 2024.
7) 140 personel Satgas Maritime Task Force TNI Kontingen Garuda XXVII-P UNIFIL Lebanon tahun 2024.



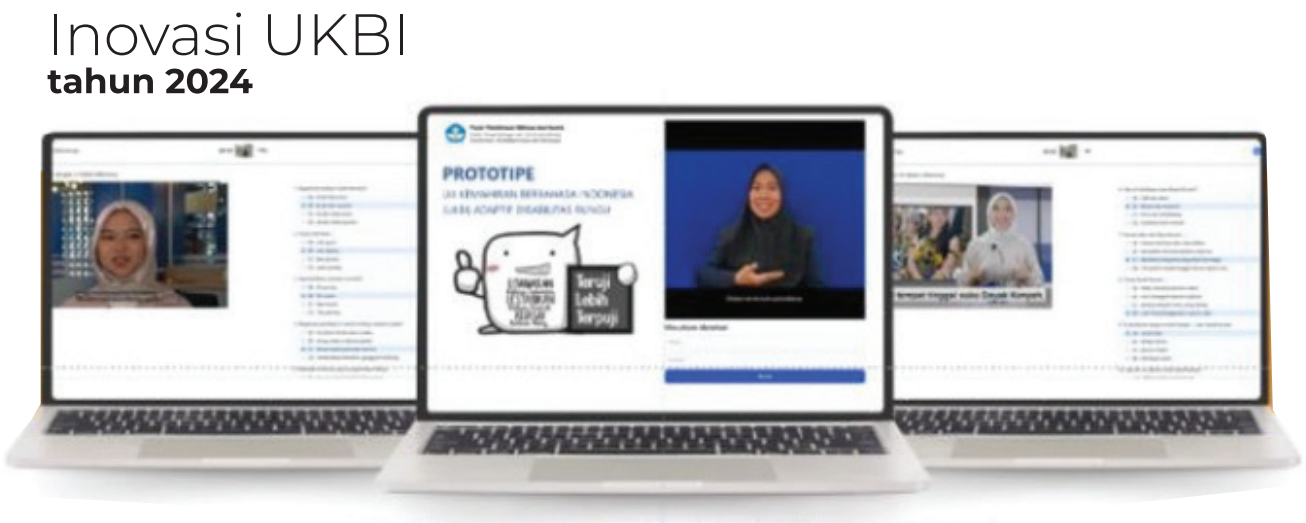
Foto 56 Kegiatan Pelatihan Pratugas Bagi Satgas TNI Kontingen Garuda

3. Inovasi

Pada tahun 2024, **Badan Bahasa** melakukan inovasi **:**

a. Rintisan UKBI Adaptif bagi Disabilitas Rungu

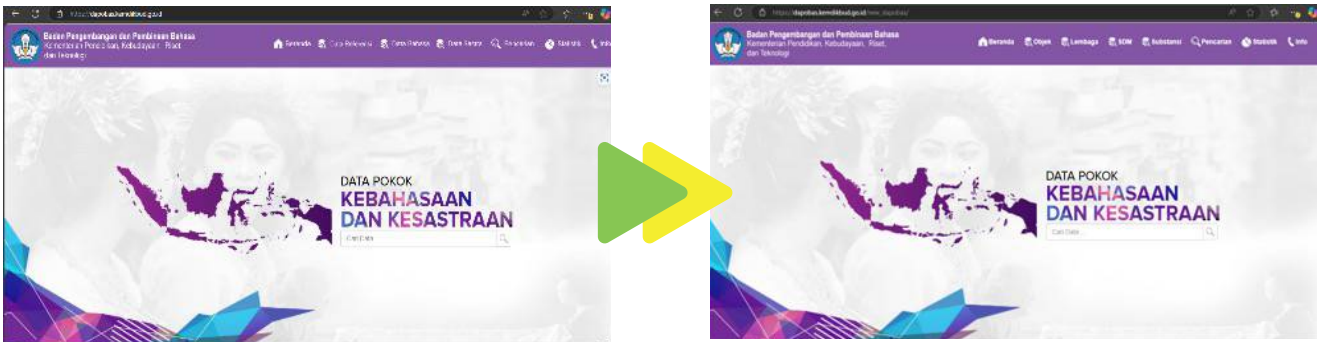
Gambar 65 Inovasi Laman UKBI



Dalam rangka mendukung prinsip inklusivitas dan kesetaraan dalam setiap program pemerintah, Badan Bahasa melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra melakukan inovasi dengan merintis alat uji kemahiran berbahasa Indonesia bagi kaum disabilitas terutama untuk penyandang tunarungu. Pengembangan UKBI

itu dimulai dengan pembuatan prototipe dan panduan layanan UKBI Adaptif. Beberapa seksi uji diubah dan disesuaikan dengan kemampuan penyandang disabilitas rungu, seperti seksi mendengarkan diubah menjadi seksi memirsa sehingga dialog atau audio diubah ke dalam bentuk video. Inovasi kegiatan ini diharapkan dapat menyetarakan kemahiran peserta uji kemahiran berbahasa Indonesia yang mendukung prinsip inklusivitas.

b. Pengembangan Laman Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan



Laman DAPOBAS Semula **Laman DAPOBAS Menjadi**

Berdasarkan arahan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Data Kebudayaan, Kebahasaan, dan Kesastraan, dilakukan inovasi untuk menyesuaikan dan menata atribut dan struktur data informasi (metadata) yang saat ini ada pada SIDAKS. Seluruh data dan informasi satker di lingkungan Badan Bahasa terpusat melalui aplikasi SIDAKS selanjutnya diintegrasikan ke Laman DAPOBAS. Pengembangan laman Dapobas yang disesuaikan dengan. Pada laman Dapobas baru, entitas yang dikembangkan antara lain:

1) Objek Kebahasaan dan Kesastraan
2) Lembaga Kebahasaan dan Kesastraan
3) SDM Kebahasaan dan Kesastraan
4) Substansi Kebahasaan dan Kesastraan

Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat memudahkan pemenuhan kebutuhan terkait dengan data dan informasi pengembangan, pelindungan, dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan, baik untuk internal Badan Bahasa maupun eksternal atau masyarakat yang membutuhkan informasi kebahasaan dan kesastraan.

c. Mudik Asyik Baca Buku

Sebagai pelopor penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan Badan Bahasa melakukan inovasi berupa aktivitas Mudik Asyik Baca Buku yang dilaksanakan di berbagai pusat pemberhentian transportasi umum. Salah satu upaya ini untuk mendukung program Gerakan Literasi Nasional dengan memasyarakatkan dan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan buku yang bermutu dengan harga terjangkau dan tersebar secara merata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017.



Badan Bahasa bekerja sama akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Gerakan Literasi Nasional melalui Mudik Asyik Baca Buku Tahun 2024 selama tanggal 2–4 April 2024 di lima lokasi, yaitu Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, Terminal Kalideres, Terminal Kampung Rambutan, dan Terminal Pulo Gebang. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya gemar membaca sejak dini.

Pelaksanaan inovasi kegiatan ini memiliki harapan dapat berdampak pada meningkatnya minat baca terutama untuk anak-anak usia dini dan memberikan pengetahuan kepada orang tua jenis buku yang cocok untuk jenjang usia anak-anak.

d. Laman Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dalam Jaringan (BIPA Daring)



Gambar 66 Tampilan laman BIPA

Pengembangan portal BIPA Daring menerapkan prinsip gotong royong, yaitu penyediaan layanan yang melibatkan partisipasi berbagai pihak. Portal BIPA Daring dikembangkan sebagai wujud peran koordinasi dan fasilitasi Badan Bahasa dalam penyediaan akses bagi penerima manfaat dan pemangku kepentingan program BIPA terhadap layanan ke-BIPA-an dari berbagai sumber.

Pelayanan dalam Portal BIPA daring dapat diakses melalui lima modul aplikasi, yaitu (1) Belajar BIPA sebagai saluran layanan berbagi bahan pembelajaran BIPA, (2) Jaga BIPA sebagai saluran layanan berbagi informasi lembaga penyelenggara program BIPA, (3) Bakti BIPA sebagai saluran berbagi informasi tentang kiprah dan karya pemerhati BIPA, (4) Tebar BIPA sebagai saluran layanan informasi dan penyelenggaraan pembelajaran daring BIPA, serta (5) Tera BIPA sebagai saluran layanan informasi dan penyelenggaraan tes pembelajaran daring BIPA.

4. Penghargaan

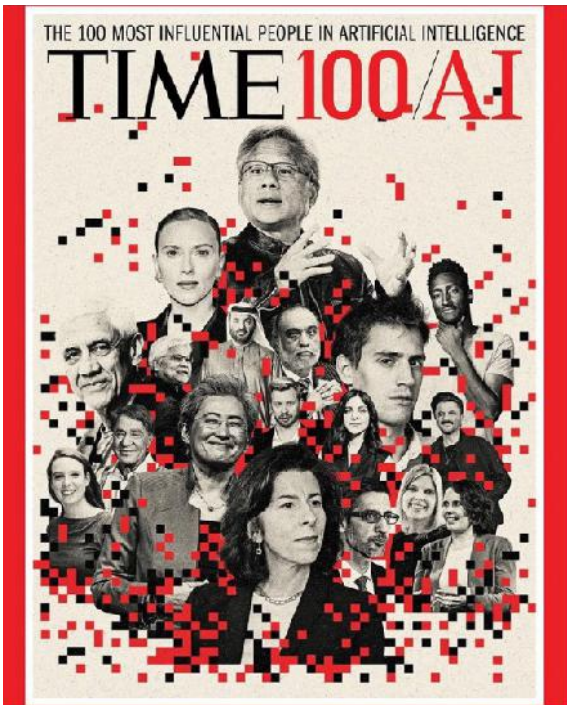
Pada tahun 2024, **Badan Bahasa** mendapatkan penghargaan**:**

a. Peringatan 100 Tahun A.A. Navis



Pada penutupan Sidang Umum ke-42 UNESCO di Paris pada 22 November 2023, Direktur Jenderal UNESCO mengumumkan A.A. Navis sebagai salah satu tokoj Indonesia yang ulang tahun ke-100-nya dirayakan sebagai peringatan internasional. Ali Akbar Navis (1924—2023) merupakan sastrawan dan kritikus budaya kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat, dengan kontribusi besar terhadap kesustraan Indonesia dan Peradaban dunia. Salah satu karyanya yang berpengaruh adalah cerita pendek "Robohnya Surau Kami". Selain itu, karya-karyanya yang lain juga memiliki sastrawi yang baik dan menyimpan kekhasan gaya tutur satir dan kritis.

b. Penghargaan 100 orang paling berpengaruh dalam kecerdasan buatan tahun 2024 atau *The 100 Most Influential People In Artificial Intelligence 2024 (TIME100 AI 2024)*



Majalah TIME memasukkan nama E. Aminudin Aziz (Kepala Badan Bahasa Tahun 2020—2024)) sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh dalam kecerdasan buatan tahun 2024 atau *The 100 Most Influential People In Artificial Intelligence 2024 (TIME100 AI 2024)*.

E. Aminudin Aziz dinilai oleh Majalah Time memiliki peran dalam penyelamatan lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia memanfaatkan *Large Language Models* (LLM) atau sistem AI yang mampu memahami dan menghasilkan bahasa manusia dengan memproses data teks dalam jumlah besar. Majalah TIME menilai tugas berat yang hanya dilakukan oleh E. Aminudin Aziz memikirkan ratusan bahasa agar memiliki skrip atau simbol tulisan yang cukup untuk dicatat dan disimpan karena banyak bahasa yang tidak memiliki dokumentasi yang memadai

.

c. Kontributor Aksi Damai Gaza



Foto 57 Kegiatan "Parade Puisi Untuk Gaza"

Berkolaborasi dengan Majalah Horison dan Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), Badan Bahasa menggelar bentuk solidaritas sastrawan dan budayawan Indonesia untuk Gaza dengan tajuk "Parade Puisi Untuk Gaza" dengan mengangkat tema "Solidaritas Sastrawan dan Budayawan Indonesia untuk Palestina". Penghargaan diberikan oleh Kedutaan Besar Palestina, yang diserahkan dan diterima oleh Sekretaris Badan Bahasa pada tanggal 30 Agustus 2024.

d. Serah Simpan Karya Cetak

Penghargaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada individu, institusi, atau penerbit yang telah memenuhi kewajibannya menyerahkan karya cetak dan karya rekam kepada perpustakaan nasional atau lembaga yang berwenang. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) dalam rangka melestarikan warisan intelektual dan budaya bangsa. Penghargaan KCKR kategori Penerbit Kementerian/Lembaga diberikan oleh Perpustakaan Nasional yang diterima oleh perwakilan Sekretariat Badan Bahasa pada tanggal 19 September 2024.

e. Fasilitasi Lembaga Penyelenggara Program BIPA



Dalam rangka fasilitasi lembaga penyelenggara program BIPA, pada tahun 2024 Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra memperoleh penghargaan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Warsawa dan Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington, D.C.

f. Kearsipan



Berdasarkan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) tahun 2023, Badan Bahasa berada pada urutan ketiga pemilik nilai entitas tertinggi. Nilai entitas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa diperoleh dari hasil rata-rata nilai Unit Pengolah ditambah dengan nilai Unit Kearsipan dibagi dua, sebagai mana tergambar dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 47 Penilaian Laporan Audit Kearsipan

No	Unit Pengolah	Nilai Pengawasan Tahun 2023
1	Sekretariat Badan PP Bahasa	98,72
2	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	95,83
3	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	95,83
4	Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	95,23
TOTAL		**385,61**
Rata-rata UP		**96,40**
Nilai UK		**91,79**
Nilai Entitas		**94,10**

Berdasarkan hasil penilaian pengawasan tersebut, Badan Bahasa berhasil memperoleh penghargaan sebagai Unit Pengolah Arsip Terbaik III di lingkungan Unit Kearsipan Unit Utama yang diberikan pada tanggal 22 April 2024.

g. LSM Internasional



Pada tahun tahun 2024, Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra mendapatkan penghargaan dari International *Congress for the Protection of Human Rights and Freedom "World"* atas terselenggaranya Festival Handai Indonesia. Festival ini diikuti oleh 539 peserta dari 78 negara.

h. Opini Pengawasan Penyelenggaraan Publik



Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, melalui layanan UKBI, berkontribusi terhadap pencapaian predikat Kualitas Tertinggi atas pelayanan publik yang diberikan oleh Ombudsman RI. Hasil tersebut diperoleh atas hasil Pelaksanaan penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga Tahun 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat nilai 89 dengan kriteria A (Kualitas Tertinggi).

i. Pembekalan Mahasiswa sebagai Editor KBBI



Pada tahun 2024 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berhasil mendapatkan ucapan terima kasih dari UIN Sunan Ampel karena sudah dilibatkan dalam pencapaian penambahan 80.000 entri KBBI melalui kegiatan inventariasi kosakata.

j. Pembangunan ZI WBK/WBBM Tingkat Kementerian



Penghargaan internal di lingkungan Kemendikbudristek yang diperoleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dalam rangka Pembangunan ZI-WBK/ WBBM diserahkan melalui Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek pada tanggal 10 Desember 2024 di Hotel Le Meridien Jakrarta, berdasarkan surat undangan nomor 34516/A.A4/ OT.01.01/2024 dari Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek.

k. Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP



Piagam Penghargaan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memberikan penghargaan kepada:

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

atas prestasinya meraih posisi Terbaik II pada kategori Unit Organisasi Eselon I,
dengan raihan Skor sebesar 90,30%, predikat AA
dan atas kontribusinya dalam mendukung peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Tahun 2023

Jakarta, 30 April 2024
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A

Badan Bahasa meraih posisi Terbaik II pada kategori Unit Organisasi Eselon I dengan raihan Skor 90,30, Presikat AA dan atas kontribusinya dalam peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kemendikbudristek Tahun 2023.

l. Penghargaan Nilai Kinerja Anggaran



Piagam Penghargaan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memberikan penghargaan kepada:

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

atas prestasinya meraih posisi Terbaik I pada kategori Unit Organisasi Eselon I,
dengan raihan Skor Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 96,29%, dengan predikat Sangat Baik
dan atas kontribusinya dalam mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran
di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Tahun 2023

Jakarta, 30 April 2024
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A

Badan Bahasa meraih posisi Terbaik I pada kategori Unit Organisasi Eselon I dengan raihan Skor Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 96,29%, dengan predikat Sangat Baik dan dan atas kontribusinya dalam peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Kemendikbudristek Tahun 2024.

5. Program *Crosscutting/Collaborative*

Salah satu manfaat dari program kolaborasi dan integrasi lintas fungsi ini adalah berbagi peran dan sumber daya sehingga program atau kegiatan antarlembaga (pemerintah dan nonpemerintah) yang memiliki fungsi berbeda (lintas fungsi) dapat dikerjakan bersama, tidak tumpang tindih, dan mendukung efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam upaya mewujudkan salah satu program Kemendikbudristek, yaitu pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, Badan Bahasa berupaya melakukan kolaborasi dan integrasi lintas fungsi pada tiga fokus utama yang juga menjadi program prioritas Badan Bahasa, yaitu

1. penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan,
2. pelindungan bahasa dan sastra daerah,
3. internasionalisasi bahasa Indonesia.

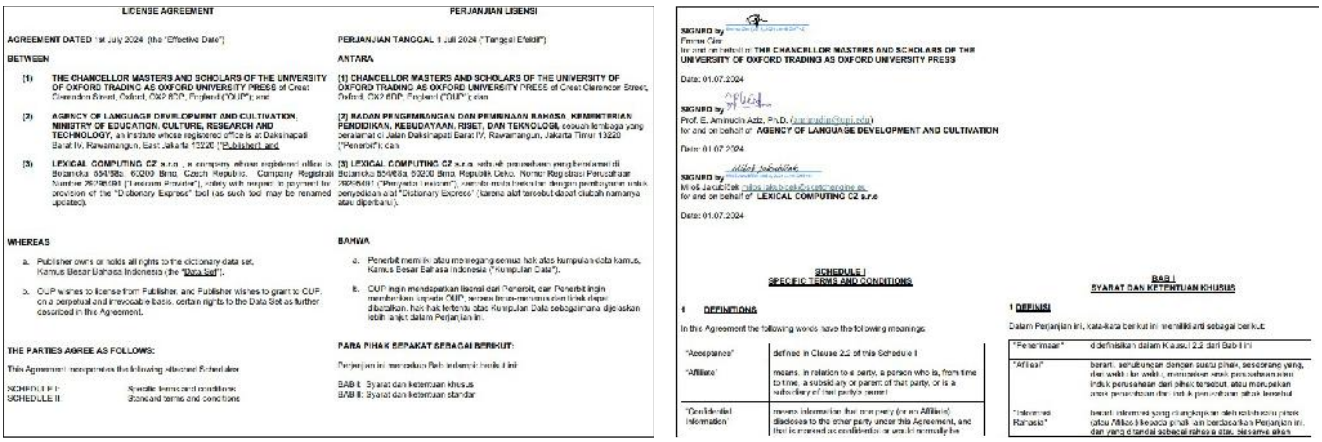
Selain itu, untuk menunjang tercapainya tiga fokus tersebut, terkait dengan dukungan manajemen, Badan Bahasa juga melakukan kolaborasi dan integrasi lintas fungsi dengan berbagai lembaga.

Berikut ini pemetaan kolaborasi dan integrasi lintas fungsi berdasarkan tiga fokus utama Badan Bahasa.

3.1 Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan

Tabel 48 Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Literasi Kebahasaan dan Kesastraan

Literasi Kebahasaan dan Kesastraan		
Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi	**Pembagian Peran**	
	Badan Bahasa	**Pihak Eksternal**
Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesatraan dilaksanakan melalui berbagai program yang dikolaborasikan dan diintegrasikan dengan berbagai pemangku kepentingan, internal dan eksternal.		
Penambahan 80.000 Entri KBBI	Badan Bahasa melakukan beberapa program kolaborasi untuk mendukung upaya percepatan penambahan entri KBBI sebanyak 80.000 entri. Salah satunya adalah melalui rekrutmen editor eksternal KBBI, yang bertugas untuk mengusulkan masing-masing 1000 entri baru untuk KBBI.	◊ **Editor eksternal KBBI** yang terdiri atas 180 mahasiswa dari 18 universitas yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur diberi materi pembekalan dari pakar di bidang terminologi dan leksikografi, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara mengusulkan entri baru. Setiap mahasiswa diharapkan untuk mengusulkan 50 kata turunan yang layak dimasukkan ke dalam KBBI. ◊ **OUP dan Lexicom** memberikan data calon kosakata baru dari data korpus bahasa Indonesia yang telah ditapis dari data KBBI. Lexicom juga memberikan akses penggunaan platform Lexonomy bagi Tim Perkamusan dan Peristilahan untuk menyeleksi dan menyunting calon kosakata baru, sebelum akhirnya siap dimasukkan secara otomatis ke dalam KBBI. OUP membantu membiayai Lexicom yang menyediakan entri baru untuk KBBI melalui aplikasi Dictionary Express dan Lexonomy). Perjanjian kerja sama ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2024 oleh Kepala Badan Bahasa pada waktu itu (Prof. E. Aminudin Aziz), Oxford University Press (Emma Gier), dan Lexical Computing LZ (Milos Jakubicek).
Program Merdeka Belajar Episode Ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia	Badan Bahasa menyusun bahan penguatan literasi berupa buku bacaan bermutu untuk semua jenjang baca, mencetak buku, dan mendistribusikan buku bacaan bermutu ke sekolah (SD kategori 1 dan 2 berdasarkan nilai AN)	◊ **PSKP** memilih sekolah berdasarkan AN 2021/2022, memantau dan mengevaluasi progam (melakukan kajian damprogram bersama World Bank dan J-Pal) ◊ **Pusbuk** menilai buku berdasarkan kriteria buku bacaan bermutu, menyeleksi, dan merekomendasikan buku bacaan bermuti yang akan dicetak dan didistribusikan Badan Bahasa sesuai dengan minat dan sasaran ◊ **GTK** menyiapkan materi untuk pelatihan guru dan pendampingan pemanfaatan buku bermutu yang melibatkan unit utama yang relevan di Kemendikbudristek dan mengembangkan materi di PMM untuk Kepala Sekolah, Guru, dan Dinas Pendidikan untuk memanfaatkan buku bacaan bermutu. ◊ **PDM-10** melakukan advokasi ke Pemda menggunakan materi pelatihan dan pendampingan buku bacaan bermutu serta bekerja sama dengan Mitra Pembangunan dan Konsolidator untuk mencetak dan mendistribusikan ke sekolah yang belum mendapatkan buku bacaan bermutu dari badan bahasa. ◊ **Kampus Mengajar** menyiapkan para mahasiswa Kampus Mengajar untuk melakukan pendampingan buku bacaan bermutu di sekolah.



Gambar 67 Tangkapan Layar Perjanjian Trilateral Badan Bahasa – OUP – Lexicom

3.2 Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

Tabel 49 Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah		
Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi	**Pembagian Peran**	
	Badan Bahasa	**Pihak Eksternal**
Penguatan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah dilaksanakan melalui berbagai program yang dikolaborasikan dan diintegrasikan dengan berbagai pemangku kepentingan, internal dan eksternal.		
Pemutakhiran Aplikasi VIBA Berbasis AI	Badan Bahasa bermitra dengan Politeknik Statistika STIS agar pengukuran daya hidup bahasa menjadi lebih efektif dan efisien.	**Politeknik Statistika STIS membantu** untuk memutakhiran aplikasi VIBA yang semula menggunakan metode Computer Assisted Personel Interviewing (CAPI) menjadi aplikasi VIBA berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence), yaitu otomatisasi interview berbasis chatbot VIBA dengan pemanfaatan generative AI dan large language model (LLM). Dengan menggunakan teknologi ini, *chatbot* dapat berinteraksi langsung dengan responden melalui percakapan otomatis dan data dapat dikumpulkan secara cepat dan akurat tanpa memerlukan kehadiran fisik petugas.
Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah	Badan Bahasa menghitung: mulok/ jumlah bahasa daerah; jumlah guru bahasa daerah, terutama data guru utama pada pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah tahun 2024; bahasa yang memiliki esai, penelitian, bahan ajar, Alkitab, dan lain- lain; jumlah bahasa daerah yang dipublikasikan di media elektronik/ jumlah bahasa daerah.	**Badan Pusat Statistik** menyediakan informasi terkait dengan Indeks penutur. Indeks penutur diperoleh dari jumlah penutur bahasa daerah/ jumlah penduduk sesuai dengan hasil Sensus Penduduk 2020.
Penamaan Tempat dan Visualisasi Peta Digital, penamaan tempat atau toponimi berfokus pada pemberian nama-nama tempat, apa arti di balik nama tersebut, serta bagaimana nama-nama ini berubah seiring dengan waktu. Nama-nama tempat sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sejarah, budaya, bahasa, serta kondisi alam setempat	Badan Bahasa bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial untuk menetapkan sebuah nama pada suatu tempat yang mencakup penulisan, pelafalan, dan penggunaan nama geografis dengan cara yang benar. Selain itu, kolaborasi yang dilakukan ialah dengan membuat visualisasi peta digital bahasa dan sastra. Dalam penyusunan peta bahasa, BIG berperan menyediakan peta dasar dan persebaran wilayah tutur bahasa daerah.	**Badan Informasi Geospasial (BIG)** berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan toponimi. BIG bekerja untuk menyusun, mengelola, dan menyediakan data serta informasi terkait nama tempat di Indonesia melalui sistem yang terstandarisasi dan bertanggung jawab untuk menetapkan standar penulisan nama tempat di Indonesia.

3.3 Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Internasionalisasi Bahasa Indonesia

Tabel 50 Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Internasionalisasi Bahasa Indonesia

Internasionalisasi Bahasa Indonesia		
Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi	**Pembagian Peran**	
	Badan Bahasa	**Pihak Eksternal**
Penguatan Internasionalisasi Bahasa Indonesia dilaksanakan melalui berbagai program yang dikolaborasikan dan diintegrasikan dengan berbagai pemangku kepentingan, internal dan eksternal.		
Program siaran Mari Berbahasa Indonesia (MBI) merupakan program pembelajaran BIPA yang disiarkan oleh RRI melalui siaran radio. Sasaran pendengar MBI adalah warga asing dunia yang ingin mengenal dan belajar bahasa Indonesia. Siaran yang berdurasi 7 hingga 10 menit tersebut disiarkan setiap Senin, Selasa, dan Rabu ke mancanegara dalam delapan bahasa, yaitu Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Jepang, Mandarin, Arab, dan Spanyol. Siaran tersebut dapat didengarkan melalui saluran radio teresterial SW 3325, 9525, 15150, 11785 Khz.	Badan Bahasa penyedia bahan siaran MBI	**RRI** menyelaraskan naskah siaran MBI dengan format siaran dan diterjemahkan ke dalam delapan bahasa asing. diterjemahkan, naskah tersebut disiarkan oleh RRI ke seluruh dunia.
Fasilitasi lembaga penyelenggaran BIPA di luar negeri	Badan Bahasa berperan dalam menyediakan tenaga pengajar dan bahan ajar serta sarana dan prasarana pendukung pembelajaran BIPA	**Kementerian Luar negeri melaui Direktorat Diplomasi Publik dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri** berperan dalam 1) menyosialisasikan program BIPA di negara akreditasi; 2) menjaring peserta program BIPA; 3) mendukung pengiriman tenaga pengajar BIPA dalam bentuk dukungan admistrasi, akomodasi, dan/atau dukungan lain dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia; 4) menyediakan tempat pelaksanaan pembelajaran; dan 5) memantau pelaksanaan program BIPA secara berkala dan penyampaian laporan pelaksanaan pembelajaran dan tugas diplomasi kebahasaan lainnya.
Fasilitasi Pembelajaran BIPA bagi Diplomat Asing Negara Sahabat. Badan Bahasa bekerja sama dengan empat perguruan tinggi dan lembaga bahasa yang ada di Jakarta, yaitu Universitas Negeri Jakarta, Universitas Trisakti, Institut Pariwisata Trisakti, dan lembaga bahasa LIA.	Bahasa berperan dalam mengoordinasi dan memfasilitasi penyediaan sarana tes penempatan, bahan ajar acuan, penyusunan silabus, validasi bahan ajar dan instrumen evaluasi pembelajaran.	**Universitas Negeri Jakarta, Universitas Trisakti, Institut Pariwisata Trisakti, dan lembaga bahasa LIA.** Peran perguruan tinggi dan lembaga bahasa adalah menyediakan bahan ajar, menyusun silabus dan instrumen evaluasi, mendukung sarana dan prasarana pembelajaran, dan menyediakan tenaga pengajar.
Penerjemahan buku cerita anak berbasis STEAM dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Kolaborasi yang dilakukan Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra dengan instansi lain dalam hal penerjemahan berdampak pada bertambahnya jumlah buku cerita anak berbasis STEAM yang diterjemahkan sehingga dapat dimanfaatkan oleh anak-anak usia PAUD—SD di seluruh Indonesia.	Badan Bahasa menerjemahkan dan memuplikasikan buku terjemahan cerita anak melalui laman Badan Bahasa, laman Penerjemahan Daring, serta laman milik mitra Badan Bahasa, seperti *Let's Read Asia, StoryWeaver,* dan *Global Digital Library*.	***Global Digital Library* (GDL)**. sebagai penerbit buku cerita anak berperan dalam menyediakan buku sumber berlisensi CC 4.0.



RENCANA KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA
DAN
KANTOR URUSAN INTERNASIONAL, KERJA SAMA,
DAN KEBUDAYAAN (KUIKK) UNIVERSITAS TRISAKTI
TAHUN 2024

I.	NAMA KEGIATAN FASILITASI PROGRAM BAHASA INDONESIA UNTUK DIPLOMAT NEGARA SAHABAT		
	Penanggung Jawab	Pihak Kesatu	Iwa Lukmana
		Pihak Kedua	Agus Guntoro
	Perincian Kegiatan	Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Kesatu a. Menyediakan sarana tes penempatan b. Menyediakan bahan ajar acuan c. Memfasilitasi kegiatan penyusunan silabus pembelajaran d. Memvalidasi materi ajar yang disusun Pihak Kedua e. Memvalidasi instrumen evaluasi pembelajaran d. Membayar honorarium pengajar sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bersama Pihak Kedua	
		Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Kedua a. Menyediakan materi ajar b. Menyusun silabus pembelajaran c. Menyusun instrumen evaluasi pembelajaran d. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung program pembelajaran e. Menyediakan pengajar BIPA sesuai kriteria f. Menyampaikan perkembangan program yang berjalan secara berkala g. Menyusun laporan pelaksanaan pembelajaran di kelas	
	Mitra Kerja (jika ada)	-	
	Penerima Manfaat	Perwakilan negara sahabat	
	Lokasi	KUIKK Universitas Trisakti di Jakarta	

RENCANA KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA
DAN
LEMBAGA BAHASA LIA
TAHUN 2024

I.	NAMA KEGIATAN FASILITASI PROGRAM BAHASA INDONESIA UNTUK DIPLOMAT NEGARA SAHABAT		
	Penanggung Jawab	Pihak Kesatu	Iwa Lukmana
		Pihak Kedua	Amur Indri Pawoko, S.S
	Perincian Kegiatan	Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Kesatu a. Menyediakan sarana tes penempatan b. Menyediakan bahan ajar acuan c. Memfasilitasi kegiatan penyusunan silabus pembelajaran d. Memvalidasi materi ajar yang disusun Pihak Kedua e. Memvalidasi instrumen evaluasi pembelajaran d. Membayar honorarium pengajar sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bersama Pihak Kedua	
		Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Kedua a. Menyediakan materi ajar b. Menyusun silabus pembelajaran c. Menyusun instrumen evaluasi pembelajaran d. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung program pembelajaran e. Menyediakan pengajar BIPA sesuai kriteria f. Menyampaikan perkembangan program yang berjalan secara berkala g. Menyusun laporan pelaksanaan pembelajaran di kelas	
	Mitra Kerja (jika ada)	-	
	Penerima Manfaat	Perwakilan negara sahabat	
	Lokasi	Lembaga Bahasa LIA Pangadegan, Jakarta	
	Waktu	4 Maret—30 Agustus 2024	

Gambar 68 Tangkapan Layar Perjanjian Kerja Sama Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa dengan Perguruan Tinggi

3.4 Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Dukungan Manajemen

Selain tiga fokus utama, dalam menunjang tercapainya program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan, Badan Bahasa juga berupaya melakukan kolaborasi dan integrasi lintas fungsi terkait dukungan manajeman. Berikut ini pemetaan kolaborasi dan integrasi lintas fungsi dukungan manajemen.

Tabel 51 Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen		
Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi	**Pembagian Peran**	
	Badan Bahasa	**Pihak Eksternal**
Penguatan Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui berbagai program yang dikolaborasikan dan diintegrasikan dengan berbagai pemangku kepentingan, internal dan eksternal.		
Pengelolaan Data dan Informasi Kebahasaan dan Kesastraan.	Badan Bahasa melaksanakan: pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di bidang bahasa dan sastra Indonesia; dan penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang bahasa dan sastra Indonesia.	**Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)** melaksanakan: pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi; pengembangan indikator dan metode statistik pendidikan dan kebudayaan, pelayanan data, analisis data, dan statistik Pendidikan dan kebudayaan; dan analisis data dan penyusunan statistik pendidikan dan kebudayaan.

Dukungan Manajemen		
Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi	**Pembagian Peran**	
	Badan Bahasa	**Pihak Eksternal**
Sosialisasi Program Prioritas Badan Bahasa bersama Komisi X DPR-RI	Badan Bahasa melakukan fasilitasi sosialisasi dan merekapitulasi masukan	**Komisi X DPR** menyosialisasikan tiga program prioritas Badan Bahasa dan menjaring masukan dari masyarakat tentang program kebahasaan dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan.
Perayaan 100 tahun A.A. Navis. Badan Bahasa bersama dengan Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia (HISKI) menyelenggarakan kegiatan penulisan buku bersama tentang A.A. Navis. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seminar nasional dan peluncuran buku Seratus Tahun A.A. Navis: Kajian Kritis, Pemikiran, dan Visi Budaya.	Badan Bahasa Memfasilitasi seminar dan rangkaian perayaan 100 tahun A.A. Navis dan mendokumentasikan visi dan estetika A..A. Navis sebagai salah satu pelopor perubahan dan pengembangan budaya dan estetika lokal dan nasional.	**HISKI** melakukan pengembangan kajian-kajian akademik di bidang bahasa dan sastra untuk kemajuan peradaban bangsa.



Gambar Buku Statistik Kebahasaan dan Kesastraan Tahun 2024, Volume 6.

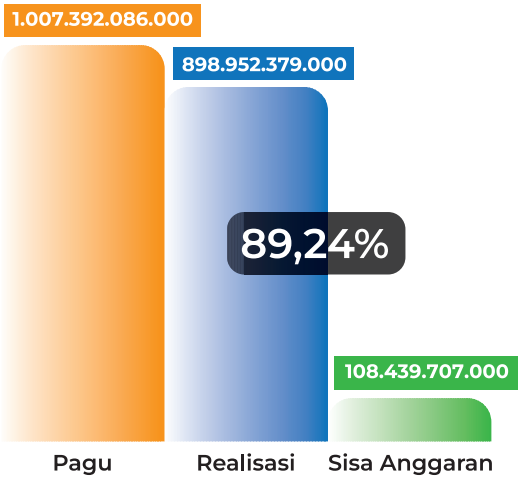
BAB IV
PENUTUP

Selama tahun 2024, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

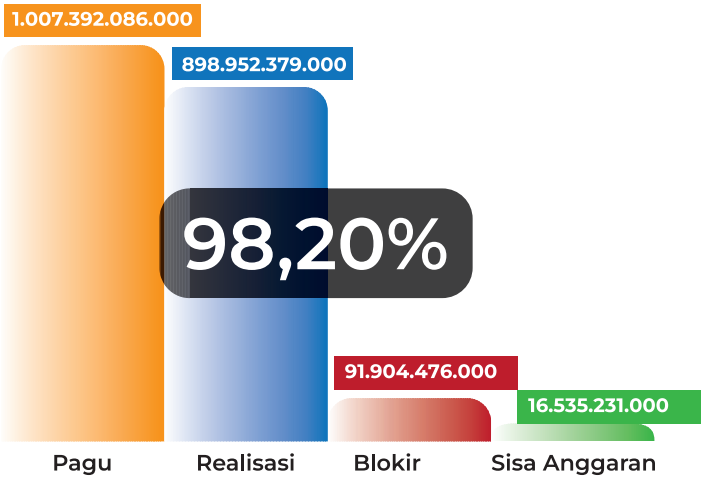
Persentase Capaian IKP
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



Pagu dan Realisasi Anggaran
Badan Bahasa tahun 2024 (Blokir)



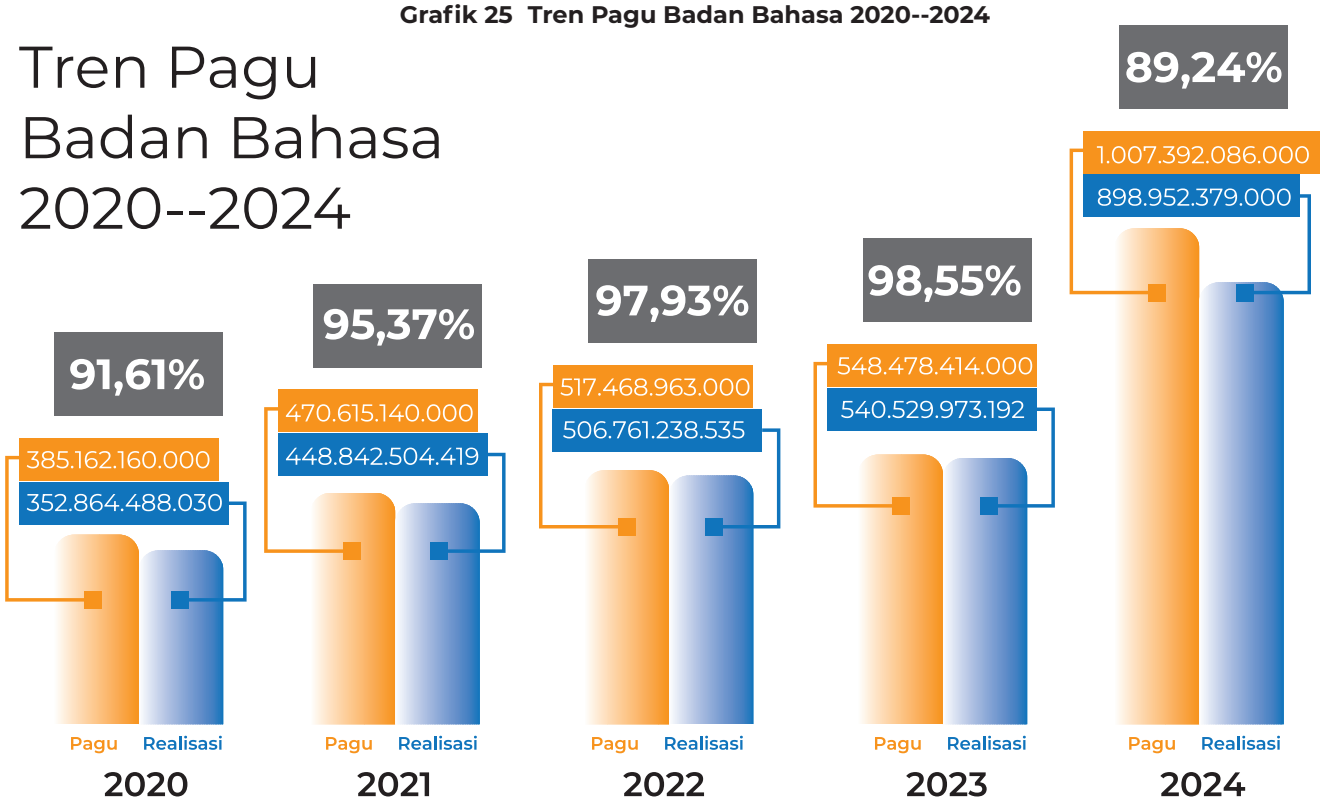
Pagu dan Realisasi Anggaran
Badan Bahasa tahun 2024 (Tanpa Blokir)



Pagu anggaran Badan Bahasa dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp Rp1.007.392.086,00 (satu triliun tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan enam rupiah) dengan blokir anggaran sebesar Rp91.904.476.000,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus empat juta empat ratus tujuh puluh enam juta) sehinggat otal pagu aktif sebesar Rp915.487.610.000,00 (sembilan ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh delapan tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Dari pagu anggaran tersebut, Badan Bahasa berhasil merealisasikan sebesar Rp899.043.671.201,00 (delapan ratus miliar sembilan puluh sembilan juta empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu dua ratus satu rupiah) dengan persentase daya serap sebesar 98,20% (pagu aktif) atau 89,24% (blokir).

Alokasi anggaran Badan Bahasa dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terus meningkat. Berikut ini tren anggaran Badan Bahasa Tahun 2020—2024.

Grafik 25 Tren Pagu Badan Bahasa 2020--2024



Alokasi anggaran tersbut dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Target, Capaian, dan Persentase Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2020—2021 berdasarkan **Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020** dan **Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022**.

Tabel 52 Target dan Capaian Sasaran Program dan Indikator Program Tahun 2020—2021 sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline	2020			2021		
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
[SP 1] Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia								
[IKP 1.1] Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji	Persen	42	42	65,8	156,67	44	49,59	112,70
[IKP 1.2] Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Persen	16	26	27,87	107,19	35	35,02	100,06
[SP 2] Meningkatnya Budaya Literasi								
[SP 2] Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	Indeks	55,03	58,2	59,11	101,56	61,4	61,63	100,37
[SP 3] Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah								
[IKP 3.1] Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah	Indeks	0,54	0,55	0,55	100,0	0,56	0,58	103,57
[SP 4] Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional								

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline	2020			2021		
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
[IKP 4.1] Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	Negara	29	30	30	100	31	47	151,61
[IKP 4.2] Jumlah Pemelajar BIPA	Orang	70.865	75.865	79.705	105,06	80.865	90.449	111,85
[SP 5] Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas								
[IKP 5.1] Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB	Predikat	B	BB	BB	105,07%	BB	A	118,07%
[IKP 5.2] Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	2	2	1	50,00%	3	0	0,00%

Tabel 53 Target dan Capaian Sasaran Program dan Indikator Program Tahun 2022—2024 sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline	2022			2023			2024		
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
[SP 1] Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan											
[IKP 1.1] Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya	Persen	62	66	68,01	103,04	70	82,25	117,50	83	83,12	100,14
[IKP 1.2] Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya	Persen	43,9	59.93	60	100,11	75,96	75,99	100,04	91,99	93,26	101,38
[SP 2] Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional											
[SP 2] Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	Negara	47	48	52	108,30	49	54	110,20	55	56	101,82
[SP 3] Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah											
[IKP 3.1] Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya	Indeks	17,87	18,73	22,51	120,20	19,67	31,52	120	31,6	38,96	123,29
[SP 4] Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi											
[IKP 4.1] Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A	A	A	112,49	A	AA	112,86	AA	AA	101,27

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline	2022			2023			2024		
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek											
[IKP 5.1] Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/ WBBM	Satker	1	2	2	100	3	11	366,67	12	18	150

Tabel 54 Fokus Perbaikan Tahun 2023, Tindak Lanjut, dan Hasil

Fokus Perbaikan Tahun 2023	Tindak Lanjut	Hasil
Penambahan koleksi untuk menjangkau sekolah dasar kelas tinggi (4—6). Pemantapan Pembinaan literasi baik perorangan maupun Lembaga.	Penyusunan Bahan Bacaan dengan dengan mengundang penulis komik dari seluruh wilayah di Indonesia untuk berpartisipasi mengirimkan rancangan storyboard komik.	Buku Bacaan komik sejumlah 116 judul untuk Peningkatan Implementasi Literasi Numerasi Anak melalui Komik pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6.
Pelibatan mitra-mitra dalam pelaksanaan revitalisasai bahasa daerah antara lain Kemendagri, Kemendes, Pemda secara lebih masif.	Melakukan audiensi dengan pemangku kepentingan di daerah melalui pimpinan satker.	Fasilitasi kerja sama di 73 pemerintah daerah, kepolisian daerah, instansi/perguruan tinggi, dan lembaga lainnya di tahun 2024.
Strategi baru dalam perluasan cakupan KBBI dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri.	Melakukan kolaborasi dengan mitra eksternal untuk mendukung percepatan penambahan entri KBBI.	Penambahan 80.000 entri KBBI hasil dari rekrutmen editor eksternal KBBI, dan OUP dan Lexicom.
Memanfaatkan potensi yang sudah ada dengan mengisi peluang yang sudah terbuka melalui program yang lebih variatif. Pelibatan lebih banyak mitra termasuk sastrawan untuk menduniakan karya sastra Indonesia.	Melakukan fasilitasi peringatan 100 tahun AA Navis baik nasional maupun internasional dalam rangka merepresentasikan keanekaragaman warisan sastra Indonesia.	Terselenggaranya perayaan 100 tahun AA Navis baik di dalam negara Indonesia maupun di luar negara Indonesia yang difasilitasi oleh Badan Bahasa.
Peningkatan eselonisasi satuan kerja UPT di lingkungan Badan Bahasa.	Mengusulkan peningkatan eselonisasi 17 kantor bahasa menjadi balai bahasa dengan melalui proses penilaian di kementerian/lembaga terkait.	Meningkatnya eselonisasi 13 kantor bahasa menjadi balai bahasa.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada tahun 2025, antara lain:

1. menjaga kolaborasi dan koordinasi dengan mitra eksternal yang bekrontribusi dalam penghitungan komponen indikator kinerja Badan Bahasa,
2. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi penyuluh Bahasa di lingkungan Badan Bahasa,
3. mendorong kolaborasi pemerintah daerah dengan Badan Bahasa dalam melaksanakan pembinaan Lembaga di ruang publik,
4. melakukan percepatan penyusunan peta jalan Internasionalisasi Bahasa Indonesia,

5. meninjau kembali penetapan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya karena terdapat kendala yang bervariatif mempengaruhi ketercapaian IKP,
6. kesiapan satker di lingkungan Badan Bahasa untuk diusulkan menjadi satker berpredikat ZI-WBK/WBBM.

Memasuki periode Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2025—2029, Badan Bahasa menghadapi tantangan baru yang sejalan dengan RPJPN 2025—2045 dan RPJMN 2025—2029. Arah kebijakan baru ini bertujuan untuk memperkuat peran bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, melindungi dan mengembangkan bahasa daerah, serta memperluas pengaruh bahasa Indonesia di tingkat internasional.

Arah kebijakan Badan Bahasa Tahun 2025—2029 difokuskan pada beberapa aspek utama yang mencerminkan komitmen terhadap pengembangan dan pembinaan bahasa serta sastra nasional sepeerti berikut ini.

a. Penguatan Peran Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional

1) Mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pemerintahan, media, dan ruang publik.
2) Mengembangkan regulasi dan kebijakan kebahasaan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan teknologi.
3) Memperkuat pelaksanaan UKBI sebagai standar kemahiran berbahasa Indonesia, khususnya bagi murid, guru, dan dosen.
4) Indeks Pembangunan Kebahasaan (IPBas) akan dikembangkan sebagai tolok ukur utama dalam menilai perkembangan kebijakan kebahasaan secara nasional, mencakup aspek literasi, pelindungan bahasa daerah, serta internasionalisasi bahasa Indonesia.

b. Pelindungan dan Revitalisasi Bahasa Daerah

1) Mengimplementasikan strategi konservasi bahasa daerah yang lebih komprehensif dengan pendekatan berbasis komunitas.
2) Mengembangkan program dokumentasi digital untuk bahasa daerah guna menjaga keberlanjutannya.
3) Menyediakan insentif dan penghargaan bagi komunitas dan individu yang aktif dalam pelestarian bahasa daerah.
4) Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) perlu kemandirian dari pemerintah daerah agar pelaksanaan program dapat berkelanjutan dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah perlu didorong untuk memiliki inisiatif dan sumber daya dalam menjalankan program RBD secara mandiri, termasuk dalam pengembangan kurikulum bahasa daerah dan pelibatan komunitas lokal.

c. Internasionalisasi Bahasa Indonesia

1) Meningkatkan kerja sama dengan institusi akademik dan lembaga kebahasaan internasional untuk memperluas jangkauan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).
2) Mengembangkan standar internasional untuk bahan ajar dan sertifikasi kemahiran berbahasa Indonesia.
3) Memperkuat diplomasi kebahasaan melalui partisipasi aktif dalam forum-forum internasional dan organisasi kebahasaan dunia.
4) Peta jalan penginternasionalan bahasa Indonesia perlu disusun secara strategis yang mencakup target jangka pendek, menengah, dan panjang dalam meningkatkan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Hal ini mencakup kerja sama dengan negara sahabat, penguatan program BIPA di luar negeri, serta diplomasi bahasa dalam berbagai forum multilateral.

d. Penguatan Literasi dan Kesastraan Nasional

1) Menyediakan lebih banyak buku bacaan bermutu untuk mendukung peningkatan literasi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah 3T.
2) Meningkatkan program sayembara dan apresiasi bagi penulis, sastrawan, dan komunitas literasi untuk mendorong produksi karya sastra berkualitas.
3) Mengintegrasikan teknologi dalam penyebaran dan akses literasi digital, termasuk perpustakaan digital yang lebih inklusif dan mudah diakses masyarakat.

e. Digitalisasi dan Inovasi dalam Kebahasaan

1) Mengembangkan teknologi pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*/NLP) berbasis kecerdasan buatan untuk mendukung dokumentasi, analisis, dan penerjemahan bahasa.
2) Meningkatkan platform digital yang menyediakan layanan kebahasaan dan kesastraan secara lebih luas, termasuk UKBI adaptif dan kamus daring yang lebih interaktif.
3) Memanfaatkan data kebahasaan secara strategis untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

f. Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program dan anggaran Badan Bahasa.
2) Mengimplementasikan sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*) dalam tata kelola administratif guna meningkatkan efisiensi layanan kebahasaan. ERP dapat mengefisienkan pengelolaan dan pengintegrasian berbagai aspek bisnis dalam satu platform maksudnya. ERP juga membantu dalam mengoordinasikan dan mengotomatiskan berbagai proses bisnis, seperti keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana BMN, pengelolaan persediaan, hingga layanan pengguna.
3) Memperluas jaringan kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan sektor swasta dalam upaya mengoptimalkan program kebahasaan dan kesastraan.

Pentingnya kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk akademisi, komunitas bahasa/sastra/literasi, lembaga internasional, dan sektor swasta dalam mendukung kebijakan kebahasaan dan kesastraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Dengan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : E. Aminudin Aziz
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim
Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 15 Februari 2024

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi,

Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Nadiem Anwar Makarim
NIP -

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,

Ditandatangani secara elektronik
oleh :
E. Aminudin Aziz
NIP 196711161992031001

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Sasaran (SP)	Indikator (IKP)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1] Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	[1.1] Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	83
[1] Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	[1.2] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	91.99
[2] Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	[2.1] Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	55
[3] Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	[3.1] Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	31.6
[4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[4.1] Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	AA
[5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[5.1] Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	12

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp. 448.358.850.000,-
2.	2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Rp. 158.642.121.000,-
3.	2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	Rp. 295.296.117.000,-
4.	6702	Penguatan Diplomasi Kebahasaan	Rp. 105.094.998.000,-
Total Anggaran			Rp. 1.007.392.086.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Nadiem Anwar Makarim
NIP -

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
E. Aminudin Aziz
NIP 196711161992031001

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Laporan Kinerja Triwulan 4
Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SP 1] Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan				
[IKP 1.1] Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	83	%	83	83.12
[IKP 1.2] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	91.99	%	91.99	93.26
[SP 2] Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional				
[IKP 2.1] Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	55	Negara	55	56
[SP 3] Meningkatnya kelestarian bahasa daerah				
[IKP 3.1] Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	31.6	Indeks	31.6	34.14
[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi				
[IKP 4.1] Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	AA	Predikat	AA	AA
[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek				
[IKP 5.1] Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	12	Satker	12	18

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SP 1] Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan
[IKP 1.1] Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya

Progress/Kegiatan

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Capaian sampai dengan Triwulan IV untuk Indikator Kinerja Program **Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya**, yaitu sebesar 83,12 dari target 83 dengan persentase capaian sebesar 100,14%. Seluruh kegiatan peningkatan kompetensi berbahasa dan apresiasi sastra yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Program Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Penutur Terbina yang meningkat kualitas berbahasanya sudah terlaksana, baik yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra terkait dengan penyusunan petunjuk teknis, penyusunan bank soal, penyediaan referensi materi, pelaksanaan sosialisasi petunjuk tenis, peningkatan kemahiran berbahasa, pendampingan, pengolahan data dan evaluasi, maupun yang dilaksanakan oleh UPT di daerah terkait dengan melakukan peningkatan kompetensi berbahasa dan apresiasi sastra.

Pada Triwulan IV ini, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra berfokus pada penyelesaian kegiatan, yaitu melakukan pengukuran/penilaian kemahiran menulis selanjutnya diformulasikan dengan nilai kemahiran kaidah dan membaca. Selain itu, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra juga melaksanakan pengolahan data nilai dari Balai/Kantor Bahasa untuk menjadi nilai utuh capaian IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkat Kualitas Berbahasanya.

Kendala/Permasalahan

Penilaian pada tes awal dan tes akhir pada pelaksanaan kegiatan perlu kecermatan dan ketelitian serta waktu yang cukup. Saat ini Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra belum memiliki format/instrumen khusus untuk memudahkan proses penilaian.

Strategi/Tindak Lanjut

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra membuat borang berupa instrumen khusus untuk memudahkan tim untuk menilai hasil tes menulis para peserta.

[SP 1] Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan
[IKP 1.2] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya

Progress/Kegiatan

Capaian sampai dengan Triwulan IV untuk Indikator Kinerja Program **Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya**, yaitu 93,26 dari target sebesar 91,99 dengan persentase capaian sebesar 101,38%.

Tahapan pembinaan melalui pendampingan kepada seluruh lembaga binaan, baik lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, maupun swasta pada tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan UPT di daerah sudah selesai dilaksanakan. Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi sosialisasi (pemberian materi peraturan terkait kebahasaan dan materi kebahasaan), pendampingan (memberikan layanan konsultasi berkelanjutan), dan evaluasi.

Fokus kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra pada Triwulan IV ini adalah 1) verifikasi data dan pengolahan data tingkat provinsi, 2) pengolahan data tingkat nasional, dan 3) pelaporan hasil penilaian untuk menjadi nilai utuh ketercapaian Indikator Kinerja Program Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya.

Kendala/Permasalahan

Pusat Pembinaan Bahasa dan Satra belum memiliki templat untuk instrumen khusus guna memudahkan dalam melakukan pengolahan data agar dalam proses pengolahan data lebih mudah dan cepat.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Strategi/Tindak Lanjut

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra membuat tamplate untuk instrumen khusus pengolahan data sehingga dalam mengolah data nilai lebih mudah dan cepat.

[SP 2] Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional
[IKP 2.1] Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia

Progress/Kegiatan

Capaian sampai dengan Triwulan IV untuk Indikator Kinerja Program **Jumlah negara yang mengajarkan Bahasa Indonesia**, yaitu sebanyak 56 negara dari target 55 negara di tahun 2024 sehingga persentase capaian sebesar 101,82 persen. Jumlah 56 negara tersebut merupakan negara yang pernah mengajarkan bahasa Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya dengan melakukan pengajaran BIPA pada lembaga-lembaga baik dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal.

Negara yang dimaksud merupakan negara berdaulat yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemilihan negara sasaran strategis penyebaran program BIPA berdasarkan kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

Peran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam pencapaian program penyebarluasan bahasa Indonesia adalah melalui fasilitasi pengembangan program BIPA. Fasilitasi ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Fasilitasi yang dimaksud adalah penyediaan bantuan teknis penyelenggaraan program pembelajaran BIPA, seperti penyediaan pengajar dan bahan ajar BIPA serta penyediaan bimbingan teknis ke-BIPAan bagi pengajar dan lembaga.

Sampai dengan tahun 2021, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 47 negara yaitu Amerika Serikat, Austria, Bulgaria, Denmark, Finlandia, Hungaria, Islandia, Inggris, Italia, Jerman, Lithuania, Norwegia, Polandia, Portugal, Prancis, Rusia, Suriname, Swiss, Turki, Yunani, Australia, Bahrain, Bangladesh, Fiji, India, Jepang, Kazakhstan, Korea Selatan, Mesir, Pakistan, Papua Nugini, Republik Rakyat Tiongkok, Qatar, Senegal, Sri Lanka, Tunisia, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, Vietnam.

Pada tahun 2022, jumlah negara baru yang mengajarkan bahasa Indonesia bertambah 5 negara yaitu Belgia, Belanda, Kanada, Spanyol, dan Afrika Selatan. Sehingga akumulasi jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia sampai dengan 2022 sebanyak 52 negara.

Pada tahun 2023, jumlah negara baru yang mengajarkan bahasa Indonesia bertambah 2 negara yaitu Kroasia dan Peru, sehingga akumulasi jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia sampai dengan 2023 sebanyak 54 negara.

Pada tahun 2024, sampai dengan dengan bulan November ini terdapat penambahan 2 negara baru (penambahan negara baru terdapat di bulan September dan Oktober) yaitu Selandia Baru dan Madagaskar. Dengan demikian, total akumulasi jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia sampai dengan saat ini sebanyak 56 negara. Sehingga dengan demikian capaian IKP Jumlah negara yang mengajarkan Bahasa Indonesia sampai dengan saat ini sebanyak 56 negara.

Dari 56 negara tersebut, jumlah negara yang difasilitasi secara langsung sebanyak 33 negara yang meliputi Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Denmark, Filipina, India, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Laos, Madagaskar, Mesir, Norwegia, Papua Nugini, Polandia, Portugal, Qatar, Rusia, Selandia Baru, Swiss, Thailand, Timor Leste, Tiongkok, Tunisia, Turki, Uzbekistan, dan Vietnam.

Fasilitasi program BIPA ini diberikan kepada 121 lembaga di 33 negara dengan dengan menugaskan 172 orang pengajar melalui tiga skema penugasan yaitu pengiriman pengajar, penugasan pengajar lokal di luar negeri, dan pembelajaran jarak jauh secara daring dengan jumlah pemelajar sebanyak 24.378 orang.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Sementara itu, capaian jumlah pemelajar BIPA secara kumulatif sampai dengan tahun 2024 sebanyak 198.268 pemelajar.

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada TW IV, yaitu sebagai berikut.

1. Penelaahan dan pencetakan bahan ajar untuk uji coba bahan ajar.
2. Penyusunan dan penelaahan bahan tes evaluasi belajar level BIPA 3 dan tes penempatan.
3. Penyusunan dan pengatakan antologi naskah bahan siaran BIPA dalam 9 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, Spanyol, Belanda, Jerman, Jepang, Mandarin, dan Arab.
4. Penyusunan dan penelaahan Bahan Alih Wahana Video Pembelajaran BIPA.
5. Pelaksanaan uji coba bahan ajar BIPA bersama dengan bahan fasilitasi pembelajaran lainnya di 5 lembaga di Provinsi Jawa Tengah, 2 lembaga di Provinsi DIY, dan 4 lembaga di Provinsi Bali
6. Pelaksanaan uji coba bahan fasilitasi pembelajaran BIPA berbantuan kecerdasan buatan (AI) chatbot di 6 lembaga di Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Monitoring dan evaluasi penugasan pengajar BIPA secara langsung ke negara sasaran (Thailand, Saudi Arabia, dan Mesir).
8. Penyusunan fasilitasi belajar yang terdiri dari bahan ajar, bahan tes ke-BIPA-an, bahan siaran BIPA, dan Chatbot AI.
9. Evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis pengajar BIPA
10. Fasilitasi penyediaan bahan fasilitasi pembelajaran BIPA ke Madagaskar, Jerman, dan Taiwan.

Dalam mendukung program penginternasionalan bahasa Indonesia, Unit Pelaksana Teknis di daerah juga berperan aktif dengan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis ke-BIPA-an, Forum Ilmiah, Pemasyarakatan Program BIPA, dan Fasilitasi Program BIPA bagi Tenaga Kerja Asing.

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pada Triwulan IV, yaitu sebagai berikut.

1. Pembatasan anggaran perjalanan dinas mengakibatkan perlunya dilakukan kembali penataan ulang perencanaan penugasan pengajar BIPA pada Triwulan IV.
2. Beberapa penyelenggara program BIPA (universitas) melaksanakan program secara lintas tahun anggaran. Hal tersebut tidak sesuai dengan skema penugasan Badan Bahasa yang mengharuskan pengajar untuk kembali ke Indonesia maksimal pada bulan terakhir tahun anggaran.
3. Adanya kebijakan dari Kementerian Keuangan tentang penghematan anggaran belanja perjalanan dinas sebesar minimal 50% dari sisa anggaran perjalanan dinas tahun 2024 yang berdampak pada rencana pelaksanaan kegiatan pada TW IV.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melaksanakan analisis kebutuhan fasilitasi pembelajaran BIPA untuk Triwulan IV, menyusun perencanaan penugasan pengajar, dan melaksanakan fasilitasi pembelajaran BIPA melalui tiga skema, yaitu pengiriman ke luar negeri, penugasan pengajar lokal, dan pembelajaran jarak jauh secara daring sesuai dengan kebijakan pembatasan anggaran perjalanan dinas.
2. Pengajar kembali ke Indonesia maksimal pada bulan terakhir tahun anggaran. Jika memungkinkan, pengajar akan kembali bertugas pada kesempatan pertama tahun anggaran berikutnya.
3. Pengurangan volume kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program BIPA ke LN dan pemindahan kegiatan Seleksi Calon Tenaga Pengajar BIPA ke awal tahun 2025.

[SP 3] Meningkatnya kelestarian bahasa daerah
[IKP 3.1] Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya

Progress/Kegiatan

Capaian sampai dengan Triwulan IV untuk Indikator Kinerja Program **Indeks Pemanfaatan Bahasa**

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Daerah oleh Penuturnya adalah 34,14 dari target 31,6 sehingga persentase capaian sebesar 108,04 persen.

Sebagai salah satu upaya pelestarian bahasa daerah di Indonesia, program revitalisasi bahasa daerah (RBD) dari tahun ke tahun telah meluas, baik sasaran jumlah bahasa maupun wilayah sebarannya. Pada 2024, RBD telah diselenggarakan di 30 Balai/Kantor Bahasa untuk 114 bahasa/dialek yang tersebar di seluruh provinsi. Jumlah ini bertambah dari tahun sebelumnya tahun 2023 hanya terselenggara di 19 UPT Balai/Kantor Bahasa pada 25 provinsi dengan jumlah 72 bahasa/dialek.

Intervensi pelestarian bahasa daerah melalui RBD ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan angka Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah (IPBD) oleh penuturnya, di antaranya dengan bertambahnya penutur bahasa daerah, khususnya dari kalangan tunas muda (usai SD/MI dan SMP/MTs); jumlah pengajar bahasa daerah; serta jumlah terbitan dan publikasi berbahasa daerah. Program RBD tersebut juga diharapkan mampu mendorong munculnya berbagai regulasi mengenai pelindungan bahasa daerah, termasuk di antaranya melalui penetapan muatan lokal bahasa daerah di satuan pendidikan. Selain itu, RBD juga diharapkan menguatkan kembali komitmen pemerintah daerah yang telah memiliki payung regulasi pelindungan bahasa dan sastra daerah untuk mengimplementasikan peraturan tersebut ke dalam program riil.

Sampai dengan Desember 2024, seluruh UPT telah melaksanakan tahapan terakhir dalam kegiatan RBD, yaitu Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) tingkat provinsi sehingga penghitungan untuk Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah (IPBD) sudah dapat diselesaikan, terutama untuk menghitung indikator II, yaitu indikator Guru Bahasa Daerah.

Adapun peran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Menginisiasi program kegiatan pelindungan bahasa daerah.
2. Menyiapkan regulasi/kebijakan berupa pedoman pelaksanaan RBD pada tingkat pusat (nasional).
3. Melakukan supervisi dan penjaminan mutu UPT Balai/Kantor Bahasa/pemerintah daerah dalam pelaksanaan RBD.
4. Melaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional Tahun 2024 sebagai apresiasi terhadap partisipan RBD tahun 2023.
5. Melaksanakan Rapat Koordinasi RBD dengan seluruh pemangku kepentingan di 38 provinsi di Indonesia.

Sementara itu, dalam perhitungan IPBD, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berperan dalam melakukan koordinasi kepada pihak eksternal yang menjadi sumber data (BPS, Perpusnas RI, Direktorat Jenderal GTK Kemdikbudristek, dan Pusat Data dan Informasi Kemdikbudristek), mengompilasi data, serta melakukan penghitungan data indeks sesuai dengan data yang diterima, baik dari balai/kantor bahasa maupun dari pihak eksternal.

Peran UPT di daerah sebagai berikut.

1. Melaksanakan RBD.
2. Melakukan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah.
3. Melaksanakan diskusi kelompok terpumpun dan pelatihan guru utama.
4. Melaksanakan FTBI tingkat provinsi.
5. Memublikasikan pelaksanaan RBD dan FTBI.
6. Melaporkan hasil RBD ke Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.
7. Melakukan pendataan setiap indikator dan menyampaikan hasil pendataan tersebut ke Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.

Kendala/Permasalahan

1. Dalam penghitungan indikator I, yaitu persentase penutur bahasa daerah, data diambil dari hasil Sensus Penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Hal ini berarti

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

indikator I tidak akan mengalami perubahan jumlah sampai dengan 2030.
2. Dalam penghitungan indikator II, yaitu persentase jumlah bahasa daerah yang masuk kurikulum, jumlah bahasa daerah yang masuk dalam kurikulum tidak banyak di setiap provinsi, khususnya untuk wilayah yang memiliki lebih dari dua atau tiga bahasa daerah.
3. Dalam penghitungan indikator III, yaitu persentase guru bahasa daerah, data tidak tersedia dalam Data Pokok Kependidikan karena kebanyakan guru bahasa daerah di satuan pendidikan bukan berstatus sebagai guru mata pelajaran.
4. Balai/kantor bahasa sampai dengan November 2024 belum melakukan pemutakhiran data capaian RBD sehingga IPBD belum dapat dimutakhirkan dari TW 3.
5. Aplikasi Registrasi Bahasa dan Sastra (Regbastra) yang sedianya digunakan untuk mendata capaian RBD tidak dapat diakses sampai dengan bulan Oktober 2024 karena kapasitas yang belum maksimal.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan diskusi lebih lanjut untuk memanfaatkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) terkait dengan pertanyaan penggunaan bahasa daerah kepada responden sehingga data penutur dapat termutakhirkan setiap tiga tahun sekali.
2. Melakukan koordinasi dan konfirmasi kembali kepada pemerintah daerah mengenai penerapan muatan lokal di wilayahnya dalam Rapat Koordinasi antara UPT dengan pemda.
3. Data guru bahasa daerah diambil dari jumlah peserta pelatihan guru utama RBD. Perlu melakukan koordinasi dengan asosiasi guru bahasa daerah di setiap wilayah untuk memperoleh data di luar data tersebut.
4. Melakukan pemutakhiran pelaporan data capaian RBD dengan seluruh UPT.
5. Menggunakan *spreadsheet* untuk mendata capaian RBD apabila terjadi kendala teknis pada aplikasi Regbastra.

[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
[IKP 4.1] Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Progress/Kegiatan

Capaian sampai dengan triwulan 4 untuk Indikator Kinerja **Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,** yaitu memperoleh berpredikat AA dari target yang harus dicapai tahun 2024 yaitu predikat AA.

Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek selaku evaluator kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa membuahkan hasil yang baik. Lembar Hasil Evaluasi yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal pada tanggal 24 Desember 2024 secara umum memberikan catatan yang positif pada setiap komponen/indikator penilaian SAKIP sehingga nilai SAKIP yang diperoleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yaitu Berpredikat AA dengan skor nilai sebesar 91,15 dengan rincian nilai perkomponen, yaitu sebagai berikut.

- Perencanaan Kinerja 27,6 dari bobot penilaian 30%
- Pengukuran Kinerja 28,5 dari bobot penilaian 30%
- Pelaporan Kinerja 13,8 dari bobot penilaian 15%
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 21,25 dari bobot penilaian 25%

Pada periode triwulan 4 tahun 2024, aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam mendukung IKP **Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu**

- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran TW 4 di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa termasuk pelaksanaan pendampingannya.
- Melakukan pengukuran kinerja TW 4, mengukur dan mengevaluasi ketercapaian progres IKSS, IKP,

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

dan IKK yang melibatkan tim KKLP dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dan Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, dan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Melaksanakan kegiatan Finalisasi nilai SAKIP yang melibatkan tim dari Inspektorat Jenderal untuk melakukan sanggah terhadap nilai SAKIP sementara. Pada kegiatan ini, seluruh satuan kerja diberikan kesempatan untuk melakukan sanggah dan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen-dokumen SAKIP yang masih perlu diperbaiki.
- Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sekretariat Badan dengan melibatkan seluruh petugas pelaporan/penyusun LAKIN seluruh satker.
- Pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa dan UPT di daerah yang mendukung pelaksanaan implementasi SAKIP di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Kendala/Permasalahan

1. Pemahaman antar evaluator yang bervariasi sehingga proses penilaian pada setiap komponen menghasilkan nilai yang berbeda.
2. AKIP bukan hanya pemenuhan dokumen SAKIP tetapi kaitannya juga dengan kinerja lembaga secara keseluruhan, dokumen pendukung SAKIP sudah terpenuhi dengan baik, tetapi pada kinerja lain yang dinilai masih ada yang kurang maksimal, hal tersebut yang menyebabkan nilai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tidak naik secara signifikan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan koordinasi dan fasilitasi serta penguatan kepada tim evaluator untuk menjelaskan secara detil terhadap komponen-komponen yang dinilai agar kinerja yang sudah dilakukan dapat tersampaikan dengan baik, sehingga nilai yang dihasilkan pada setiap komponen penilaian dapat maksimal.
2. Melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap seluruh kinerja lembaga baik peningkatan kinerja di internal sendiri maupun peningkatan kinerja eksternal/pelayanan publik.

[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
[IKP 5.1] Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Progress/Kegiatan

Capaian sampai dengan triwulan 4 untuk Indikator Kinerja Program **Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM**, yaitu sebesar 18 satuan kerja dari target yang ditetapkan sebesar 12 satuan kerja secara akumulatif sampai dengan tahun 2024. Sebanyak 18 satuan kerja ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan penilaian Tim Penilai Internal (TPI) dengan predikat ZI-WBK/WBBM dari tahun 2022—2024, yaitu sebagai berikut.

- Tahun 2022: Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Balai Bahasa Provinsi Bali, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Tahun 2023: Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta, Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Tahun 2024: Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Balai Bahasa Provinsi Lampung.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Dari 18 satuan kerja yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM yang ditetapkan Kemendikdasmen berdasarkan penilaian Tim Penilai Internal tersebut, terdapat 6 satuan kerja yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM yang ditetapkan oleh Kemenenterian Penayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa Provinsi Bali, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, dan Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta.

Pada tahun 2024 ini, sejumlah 12 satuan kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM, dan yang berhasil lolos sebanyak 7 satuan kerja. Proses satker menuju predikat ZI-WBK/WBBM sudah dilakukan mulai dari bulan Januari, melalui tahapan pengusulan, penilaian oleh TPI, pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Biro Ortala dan Sekretariat Badan, pemenuhan data dukung, gpenilaian dan pengumuman hasil oleh Tim Penilai Internal (TPI) dan Kemenpan RB di bulan Desember 2024. .

Proses kegiatan yang dilaksanakan di triwulan 4, yaitu proses penilaian oleh asesor TPN dengan tahapan wawancara melalui daring dan visitasi ke dua satker, yaitu Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan rapat pleno oleh TPN ditetapkan satuan kerja yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM tahun 2024.

Kendala/Permasalahan

1. Implementasi penilaian ZI-WBK/WBBM antar Tim Penilai Internal (TPI) di satuan kerja masih bervariasi.
2. Keterlibatan kepala satuan kerja sebagai figur anutan belum maksimal dalam mengelola perubahan dan inovasi.
3. Masih terdapat resistensi di satuan kerja terhadap implementasi pembangunan ZI-WBK/WBBM sehingga belum seluruh pegawai belum terlibat.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menyusun pedoman penilaian pembangunan ZI-WBK/WBBM sebagai acuan bagi tim penilai dan kepala satuan kerja agar memiliki kesamaan pemahaman.
2. Melakukan penguatan dan internalisasi ZI-WBK/WBBM kepada seluruh pimpinan dan seluruh pegawai di seluruh satuan kerja.
3. Melakukan pendampingan dan pemantauan serta evaluasi pembangunan ZI-WBK/WBBM secara terpadu dengan Tim Inspektorat Jenderal dan Biro Organisasi dan Tatalaksana.

C. Rekomendasi Pimpinan

1. IKP Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya.

a. Pengembangan borang penilaian *pre-test* dan *post-test* yang terstandar dan bisa digunakan oleh seluruh satuan kerja untuk membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi proses penilaian.
b. Pelatihan atau bimbingan teknis bagi para evaluator secara intensif guna diantaranya untuk meningkatkan kompetensi evaluator dalam menjaga kualitas penilaian uji kemahiran secara konsisten dan terstandar, semakin piawai dalam mengolah data penilaian yang berbasis digital, dan piawai dalam menyusun laporan akhir secara komprehensif.
c. Perkuat koordinasi pembinaan dengan UPT di daerah untuk memastikan konsistensi pelaksanaan program. Fungsi koordinasi ini sendiri juga sekaligus untuk membahas progres, tantangan, dan solusi terkait pelaksanaan program di masing-masing wilayah.
d. Kombinasikan program peningkatan kemahiran berbahasa dengan kegiatan apresiasi sastra untuk meningkatkan minat peserta dan memperluas cakupan penguasaan bahasa Indonesia. Salah satu strateginya bisa melalui lomba atau festival sastra di tingkat lokal dan nasional untuk memotivasi peserta dalam meningkatkan kemahiran berbahasa.

2. IKP Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu melakukan strategi untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di suatu lembaga pemerintah dan swasta melalui:

a. pengembangan instrumen terstandar dan berbasis teknologi untuk mempercepat proses pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data, baik di tingkat provinsi maupun nasional;
b. pelaksanaan diseminasi terkait peraturan di bidang kebahasaan secara intensif;
c. penerapan sistem evaluasi berkala dan berkelanjutan terhadap lembaga binaan guna memastikan kualitas penggunaan bahasa di masing-masing lembaga bisa tetap konsisten;
d. peningkatan koordinasi antara Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dengan UPT di daerah agar program pembinaan dapat berjalan konsisten dan terintegrasi;
e. peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan bagi petugas UPT dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap Lembaga;
f. pelibatan lembaga binaan dalam pengembangan modul atau materi pelatihan berbasis pengalaman mereka untuk meningkatkan relevansi program;
g. perkuat kerja sama dengan pihak swasta atau organisasi lokal untuk memperluas jangkauan pembinaan ke sektor-sektor strategis yang membutuhkan peningkatan kompetensi kebahasaan.

3. IKP Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia

Badan Bahasa perlu melakukan langkah-langkah dalam rangka untuk memajukan jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia.

a. Ekspansi Strategis:

- Identifikasi mendalam terhadap negara-negara baru yang berpotensi menjadi target pengajaran Bahasa Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti diplomasi, ekonomi, dan budaya. Fokus target kerja sama pada negara strategis yang memiliki potensi pengaruh besar di kawasan masing-masing.
- Perluas area kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah negara mitra untuk menjamin keberlanjutan program BIPA, termasuk dukungan logistik, regulasi, dan bahan ajar.

b. Fasilitasi BIPA:

- Perluas dukungan bagi lembaga pengajaran BIPA melalui skema fasilitasi yang fleksibel, termasuk pelibatan pengajar lokal dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan daring dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang untuk mendukung proses pembelajaran.
- Pengembangan dan pengimplementasian platform daring yang terintegrasi untuk mendukung pembelajaran BIPA, termasuk pelatihan bagi pengajar, penyediaan bahan ajar interaktif, dan monitoring program secara *real-time*.
- Penyelesaian kendala administratif, dengan makukan koordinasi antar lembaga untuk mempercepat izin perjalanan dinas pengajar dan meminimalkan hambatan administratif lainnya.
- Tinjau ulang kebijakan alokasi anggaran untuk memastikan optimalisasi anggaran tidak berdampak signifikan pada keberlanjutan program. Fokus pada efisiensi tanpa mengurangi kualitas dukungan bagi program BIPA.
- Perbanyak agenda/program kampanye atau promosi budaya yang dapat mendukung pengenalan bahasa Indonesia, misalnya melalui festival budaya, program pertukaran pelajar, atau kolaborasi sastra dengan negara mitra.
- Peningkatan agenda monitoring dan evaluasi program BIPA secara intensif dengan melibatkan pihak eksternal guna menjamin objektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program, sekaligus memberikan ruang untuk pengembangan program yang lebih baik di masa depan.

4. IKP Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya

Berikut rekomendasi terhadap Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya dalam rangka pelestarian bahasa daerah.

a. Pemutakhiran data: melalui kolaborasi dengan BPS untuk memanfaatkan data dari Survei

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sehingga informasi penutur bahasa daerah dapat diperbarui secara berkala setiap tiga tahun guna mengurangi ketergantungan pada Sensus Penduduk 10 tahunan.

b. Peningkatan kapasitas aplikasi Regbastra untuk memastikan kelancaran proses pendataan RBD di seluruh UPT.
c. Kemitraan lokal: dengan cara perkuat ekosistem kemitraan dengan pengampu kepentaingan strategis daerah untuk mendorong penerapan muatan lokal bahasa daerah di kurikulum pendidikan formal melalui kebijakan yang lebih tegas. Ekosistem yang terbangun bisa jadi ruang interaksi untuk membahas progres, tantangan, dan solusi dalam pelestarian bahasa daerah.
d. Digitalisasi bahasa daerah: melalui kampanye publik a) penciptaan konten digital berbasis bahasa daerah seperti aplikasi edukasi, e-book, dan platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh generasi muda (tiktok, instagram); b) kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan bahasa daerah melalui media massa dan digital.
e. Perluasan jangkauan program RBD (penambahan jumlah bahasa dan wilayah sasaran), terutama di daerah yang terancam kehilangan bahasa daerahnya.
f. Pembangunan sistem evaluasi berbasis teknologi untuk memastikan pelaporan capaian RBD oleh UPT dapat dilakukan secara *real-time* dan transparan.
g. Pemberian penghargaan kepada daerah atau UPT yang menunjukkan progres signifikan dalam pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi daerah lain.

5. IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

a. Penguatan pemahaman evaluator: melalui penguatan koordinasi dengan evaluator (Inspektorat Jenderal) secara intensif untuk menyelaraskan pemahaman atas indikator penilaian SAKIP, memastikan evaluasi mencerminkan kinerja aktual lembaga secara maksimal.
b. Pelaksanaan rapat kerja khusus bersama evaluator untuk membahas secara rinci komponen-komponen SAKIP yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.
c. Peningkatan kinerja internal dalam pengelolaan dokumen dan pelaporan kinerja melalui sistem berbasis teknologi yang terintegrasi untuk memastikan setiap satker memenuhi standar akuntabilitas secara konsisten.
d. Peningkatan kinerja pelayanan publik: melalui peningkatan kinerja eksternal dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik dengan inovasi program berbasis kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang kebahasaan dan pelindungan bahasa daerah.
e. Tim khusus pemantauan dan evaluasi progres SAKIP dioptimalkan secara berkala di seluruh satuan kerja, memastikan rekomendasi dari evaluasi sebelumnya telah diimplementasikan dengan baik. Tim ini juga membantu proses penilaian mandiri *(self-assessment)* di tingkat satuan kerja sebelum dilakukan evaluasi oleh tim pusat untuk mengidentifikasi potensi kekurangan lebih awal.
f. Pengembangan *dashboard* digital untuk pemantauan *real-time* capaian indikator kinerja sehingga progres setiap satker dapat diawasi lebih transparan. Selain itu dapat juga melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk memberikan masukan atas kinerja layanan publik sebagai bagian dari evaluasi implementasi SAKIP.

6. IKP Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

1. Pedoman penilaian ZI-WBK/WBBM: melalui penyusunan pedoman pembangunan ZI-WBK/WBBM yang jelas dan komprehensif untuk digunakan sebagai acuan oleh seluruh satuan kerja.
2. Tingkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian PANRB (selaku Tim Penilai Nasional) dan Inspektorat Jenderal (selaku Tim Penilai Internal) terkait Pembangunan Zona Integritas baik WBK dan WBBM untuk seluruh satuan kerja.
3. Sosialisasi Internal

    - Laksanakan sosialisasi dan internalisasi intensif untuk membangun komitmen seluruh pegawai dalam pelaksanaan ZI WBK/WBBM.
    - Peningkatan pemahaman dan keterlibatan kepala satuan kerja dalam pembangunan ZI-

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

WBK/WBBM sebagai figur utama yang menjadi panutan bagi seluruh pegawai.

4. Pendampingan Berkelanjutan
    - Pendampingan teknis secara intensif kepada seluruh satuan kerja yang sedang menuju predikat ZI-WBK/WBBM. Fokus utama pada pemenuhan data dukung dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung predikat tersebut.
    - Pendampingan capaian secara berkala untuk memastikan bahwa satuan kerja yang diusulkan dapat memenuhi standar penilaian tepat waktu dan tepat mutu.
5. Pembangunan ekosistem kerja yang kondusif dan saling mendukung sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dari seluruh pegawai melalui diskusi kelompok, bimbingan teknis, dan penyampaian manfaat pembangunan ZI-WBK/WBBM bagi institusi.
6. Diseminasi program secara intensif dan terintegrasi mengenai konsep dan implementasi ZI-WBK/WBBM di seluruh satuan kerja melalui seminar, webinar, dan lokakarya.
7. Berbagi praktik baik bagi satuan kerja yang berhasil mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM untuk meningkatkan motivasi dan mendorong satuan kerja lain agar mendapatkan hasil yang sama.
8. Penghargaan bagi satuan kerja berprestasi yang berhasil memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM untuk memotivasi satker lain agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan ZI. Penghargaan ini bisa juga disampaikan dalam forum nasional sebagai bentuk apresiasi sekaligus strategi promosi institusi.
9. Penggunaan sistem digital untuk pengelolaan dokumen dan laporan guna memudahkan proses penilaian, baik oleh Tim Penilai Internal maupun Tim Penilai Nasional. Sistem ini juga bisa digunakan untuk penampungan data dukungan yang dibutuhkan oleh setiap satuan kerja secara lengkap dan tersedia dalam format yang sesuai untuk penilaian.

Jakarta, 31 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

E. Aminudin Aziz

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

REKAP 2A: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

2. UNIT ORGANISASI : 13 - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 03 - Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan

4. PROGRAM : Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2024 (RIBU)
04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	160.338.276,0
04.04	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	160.338.276,0
Total		160.338.276,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan		140.969.149,0
01.01	Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	72	
01.02	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	91,99	
02	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah		72.775.074,0

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
02.01	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	20,54	
68	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional		67.101.172,0
68.01	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	50	
Total			280.845.395,0

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2024 (RIBU)
13	Bahasa dan Sastra Terkembangkan, Terbina, dan Terlindungi	280.845.395,0
13.01	Jumlah orang mahir teruji kemahiran berbahasa Indonesia	
13.02	Jumlah bahasa terlindungi	
13.03	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	
Total		280.845.395,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2025	2026	2027
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	109.034.558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109.034.558,0	111.912.598,0	114.876.976,0	117.930.276,0
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	103.739.690,0	969.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104.709.665,0	99.042.979,0	102.014.535,0	105.075.044,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2025	2026	2027
5289	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6702	Penguatan Diplomasi Kebahasaan	67.101.172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67.101.172,0	69.114.207,0	71.187.638,0	73.323.259,0
Total		279.875.420,0	969.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280.845.395,0	280.069.784,0	288.079.149,0	296.328.579,0

Jakarta, 22 Agustus 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Prof. Endang Aminudin Aziz, MA., Ph.D
NIP 196711161992031001

REKAP 2A: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

2. UNIT ORGANISASI : 13 - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 03 - Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan

4. PROGRAM : Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2024 (RIBU)
04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	160.338.276,0
04.04	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	160.338.276,0
Total		160.338.276,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan		140.969.149,0
01.01	Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	72	
01.02	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	91,99	
02	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah		72.775.074,0

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
02.01	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	20,54	
68	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional		67.101.172,0
68.01	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	50	
Total			280.845.395,0

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2024 (RIBU)
13	Bahasa dan Sastra Terkembangkan, Terbina, dan Terlindungi	280.845.395,0
13.01	Jumlah orang mahir teruji kemahiran berbahasa Indonesia	
13.02	Jumlah bahasa terlindungi	
13.03	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	
Total		280.845.395,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2025	2026	2027
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	109.034.558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109.034.558,0	111.912.598,0	114.876.976,0	117.930.276,0
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	103.739.690,0	969.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104.709.665,0	99.042.979,0	102.014.535,0	105.075.044,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2025	2026	2027
5289	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6702	Penguatan Diplomasi Kebahasaan	67.101.172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67.101.172,0	69.114.207,0	71.187.638,0	73.323.259,0
Total		279.875.420,0	969.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280.845.395,0	280.069.784,0	288.079.149,0	296.328.579,0

Jakarta, 22 Agustus 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Prof. Endang Aminudin Aziz, MA., Ph.D
NIP 196711161992031001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 12330
Telepon: (021) 4706287; Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0310/I/PR.04.03/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : a. bahwa perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik;

b. bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik, perlu membentuk tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717);
11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun LAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Tim Penyusun LAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024;
b. menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024;
c. menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024;
d. merevisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
e. menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;

f. menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan

g. memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA BADAN,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

E. AMINUDIN AZIZ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0310/I/PR.04.03/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2024

TIM PENYUSUN LAKIP
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Hafidz Muksin	Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Pengarah	• Mengawasi capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024. • Mengawasi capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Mengarahkan penyusunan draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Mengarahkan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Mengawal hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

				• Mengawal penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Mengawal publikasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
2.	Imam Budi Utomo	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Pengarah	• Mengawasi capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024. • Mengawasi capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Mengarahkan penyusunan draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Mengarahkan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Mengawal hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Mengawal penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal,

				Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Mengawal publikasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
3.	Muh. Abdul Khak	Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Pengarah	• Mengawasi capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024. • Mengawasi capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Mengarahkan penyusunan draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Mengarahkan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Mengawal hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Mengawal penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Mengawal publikasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.

4.	Iwa Lukmana	Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa	Pengarah	• Mengawasi capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024. • Mengawasi capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Mengarahkan penyusunan draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Mengarahkan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Mengawal hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Mengawal penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Mengawal publikasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
5.	Ratna Perwitosari	Perencana Ahli Muda, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Ketua Tim	• Mengkoordinasi capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024.

				• Mengkoordinasi capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Mengkoordinasi penyusunan draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Mengkoordinasi revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Mengkoordinasi hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Mengkoordinasi penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Mengkoordinasi dalam publikasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
6.	Tri Indira Satya P.	Pranata Komputer Ahli Muda, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota	• Menyusun capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.

				• Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Melakukan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
7.	Sunardi	Analis Kepegawaian Ahli Muda, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota	• Menyusun capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Melakukan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

				Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
8.	Dede Saputra	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota	• Menyusun capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Melakukan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja

				Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
9.	Dinar Kartika Apriliani Wijayanti	Perencana Ahli Pertama, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota	• Menyusun capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Melakukan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

				• Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
10.	Dimas Satria Putra	Analis Kebijakan Ahli Pertama, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota	• Menyusun capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Melakukan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal,

				Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
11.	Dewi Puspita	Widyabasa Ahli Madya, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota	• Menyusun capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Melakukan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.

12.	Lisa Misliani	Widyabasa Ahli Madya, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota	• Menyusun capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Melakukan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
13.	Elvi Suzanti	Widyabasa Ahli Madya, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota	• Menyusun capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024.

				• Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Melakukan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
14.	Puteri Asmarini	Widyabasa Ahli Madya, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota	• Menyusun capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.

				• Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Melakukan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
15.	Eko Marini	Widyabasa Ahli Muda, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota	• Menyusun capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Melakukan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

				Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
16.	Marike Ivone Onsu	Penerjemah Ahli Madya, Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa	Anggota	• Menyusun capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Melakukan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja

				Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
17.	Iyus Yusuf	Widyabasa Ahli Muda, Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa	Anggota	• Menyusun capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Melakukan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

				• Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
18.	Danang Harry Wibowo	Penelaah Teknis Kebijakan, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota	• Menyusun capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Melakukan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal,

				Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
19.	M. Irfan Riansyah	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota	• Menyusun capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Melakukan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.

20.	Uud Suyuhudin	Pengolah Data dan Informasi, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota	• Menyusun capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Melakukan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
21.	Ika Maryana	Pengolah Data dan Informasi, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota	• Menyusun capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024.

				• Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Melakukan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.

KEPALA BADAN,

E. AMINUDIN AZIZ

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 12330
Telepon: (021) 4706287; Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0311/1/PR.04.03/2024
TENTANG
TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang :

a. bahwa perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik;
b. bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik, perlu membentuk tim reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717);
11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Reviu LAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Tim Reviu LAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memastikan akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 berkualitas; dan
b. menyusun rekomendasi hasil reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA BADAN,



E. AMINUDIN AZIZ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0311/I/PR.04.03/2024
TENTANG
TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2024

TIM REVIU LAKIP
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Sartono	Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Pengarah	• Mengawal akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 berkualitas. • Mengawal penyusunan rekomendasi hasil reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
2.	Margiyati	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Ketua Tim	• Mengkoordinasi dan memastikan akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 berkualitas. • Mengkoordinasi penyusunan rekomendasi hasil reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
3.	Sri Haryanti	Kepala Subbagian	Anggota	• Menganalisa akurasi, keandalan,

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		Tata Usaha, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra		dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 berkualitas. • Melakukan penyusunan rekomendasi hasil reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
4.	Yessy Rosalina	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota	• Menganalisa akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 berkualitas. • Melakukan penyusunan rekomendasi hasil reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
5.	Ganjar	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa	Anggota	• Menganalisa akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 berkualitas. • Melakukan penyusunan rekomendasi hasil reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
6.	Yiying Yuningsih	Perencana Ahli Madya, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota	• Menganalisa akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				(LAKIP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 berkualitas. • Melakukan penyusunan rekomendasi hasil reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
7.	Sun'an Yohantho	Perencana Ahli Muda, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota	• Menganalisa akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 berkualitas. • Melakukan penyusunan rekomendasi hasil reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.

KEPALA BADAN,

E. AMINUDIN AZIZ

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	☑
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	☑
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	☑
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	☑
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	☑
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	☑
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	☑
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	☑
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	☑
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	☑
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	☑
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	☑
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana stategis	☑
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☑
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	☑
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☑
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	☑
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	☑
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	☑
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	☑
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	☑

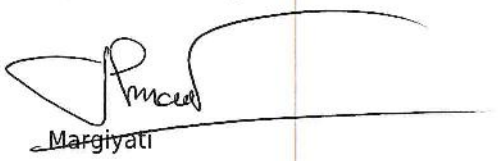
Pernyataan Telah Direviu
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Tahun Anggaran 2024

Kami telah mereviu laporan kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 13 Februari 2025
Ketua Tim Reviu,



Margiyati

Pernyataan Telah Direviu
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Tahun Anggaran 2024

Kami telah mereviu laporan kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 13 Februari 2025

Inspektur III,

Masrul Latif
NIP 196805081988121001

CATATAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN ANGGARAN 2024
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

<table>
<tr><td rowspan="3">Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</td><td>Direviu oleh/
Tanggal</td><td>Bahari Mulawarman
Carel Aponno
Armeini
Dasuki
Hartono
Gunung Panjaitan
Fery Hasan
Hani Handayani
Rohana
Agung Prasetyo
Raden Dwinna Des Riana
I Wayan Adi Atmaja
Yuliafni
Vivi Novianti
Belina Octasari
Swasti Pertiwi
Tanggal:
10 s.d 14 Februari 2025</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Disetujui oleh/
Tanggal</td><td>Dasuki
Tanggal: 13/2/2025</td></tr>
<tr><td colspan="3">Uraian Catatan Hasil Reviu:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Surat Tugas Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1034/G4/WS.01.05/2025 tanggal 13 Februari 2025 untuk melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Eselon I di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:</td></tr>
</table>

1. Sesuai pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, reviu laporan kinerja adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

2. Ruang lingkup reviu laporan kinerja antara lain:
   a. Pengumpulan data/informasi, dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.
   b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas, dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.
   c. Penyusunan kertas kerja reviu
   d. membuat surat pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja.

3. Tujuan dilakukan reviu laporan kinerja yaitu:
   a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
   b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

4. Laporan kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Tahun 2024 menyajikan tingkat pencapaian 5 (lima) Sasaran Program (SP) dengan 6 Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan target dan capaian kinerja Tahun 2024 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, bahwa terdapat 5 (lima) sasaran program dengan 6 (enam) IKP yang telah terealisasi. Dari tabel anggaran diatas diketahui bahwa total pagu dikurangi dengan blokir sampai dengan tahun anggaran berakhir tidak dapat dibuka/direalisasikan yaitu Rp915.487.610.000 dengan total realisasi sebesar Rp899.043.671.201 atau 98,20%.

5. Reviu laporan kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu format, mekanisme, dan substansi, dengan hasil sebagai berikut:
   a. Format
      1) Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja namun terdapat catatan oleh APIP yaitu:
         (a) Pada draf LAKIN Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Tahun 2024 agar dibuat cover yang menarik minat pembaca;
         (b) Dalam Kata Pengantar angka 2022 agar ditambahkan pada tahun 2022;

(c) Dalam Kata Pengantar Kepala Badan Bahasa agar disesuaikan yaitu Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan NIP Kepala Badan Bahasa terdapat kesalahan dalam penulisan, agar dicek kembali;

(d) Dalam Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Foto, dan Daftar Gambar belum tercantum nomor halaman;

(e) Belum terdapat Daftar Singkatan dan Daftar Istilah yang memuat penjelasan dari singkatan dan istilah yang digunakan dalam draf LAKIN;

(f) Kesalahan penulisan tahun pada *Footer* dari cover sampai dengan Ikhtisar Eksekutif, tertulis tahun 2023 seharusnya tahun 2024;

(g) Dalam Ikhtisar Eksekutif berikut tren alokasi anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020 sampai dengan 2024 agar ditambahkan tahun 2024;

(h) Dalam Ikhtisar Eksekutif berdasarkan dari grafik/tabel diatas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2020 hingga 2024 agar ditambahkan tahun 2024.

(i) Dalam gambaran umur tertulis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) merupakan salah satu lembaga di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), seharusnya tertulis dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

(j) Dalam gambaran umum berikut ini tren jumlah pegawai Badan Bahasa sejak 2020 sampai dengan 2024 agar ditambahkan tahun

(k) Dalam dasar hukum agar mencantumkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi RI Nomor 16 Tahun 2024.

(l) Terdapat kesalahan dalam penulisan tabel untuk nilai SAKIP, tertulis tahun 2023 sebanyak 2 kali, seharusnya tertulis tahun 2024

(m) Belum terdapat sub subbab C. 1. Capaian Anggaran pada uraian sesuai Daftar Isi.

(n) Judul Sub Komponen "**A. Akuntabilitas Kinerja"** sebaiknya dirubah menjadi **"Capaian Kinerja"** sebagaimana dalam Pedoman

Sesuai Pedoman Bab III memuat:

A. ***Capaian Kinerja Organisasi***

B. Realisasi Anggaran

(o) Pada **BAB III A. Akuntabilitas Kinerja SP 1.** Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan terdapat kalimat pada baris terakhir yang tidak selesai/terpotong. **"**Dampak pelaksanaan Sasaran Program Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan" nomor 5 (halaman 2 file pdf)

Sasaran Program 1: Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan



2) Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja
3) Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai.
4) **Belum** menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan pada LAKIN, yaitu Renstra awal dan Revisi Renstra tahun 2020-2024, Laporan Kinerja Triwulan 1 sampai dengan 3, SK Tim Penyusun Lakin
5) Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.
6) Telah menyajikan akuntabilitas keuangan secara memadai

b. Mekanisme
1) Laporan kinerja telah disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja yaitu Biro Perencanaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
2) Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai.
3) Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja.
4) Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja, yaitu Surat Keputusan yang menetapkan tim penyusun laporan kinerja tahun 2024 dan pembagian tanggung jawabnya.

5) Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya.

c. Substansi
   1) Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana stategis.
   2) KSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja.
   3) Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra.
   4) Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja, namun terdapat catatan APIP yaitu:
      a) Bab I Pendahuluan:
         1. Dalam gambaran umum terdapat total jumlah pegawai Badan Bahasa tahun 2024 sebanyak 1.138 orang belum dijelaskan jumlah pegawai ASN dan jumlah pegawai Non ASN dengan angka persentasenya.
         2. Pada Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi memuat Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, agar ditambahkan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi RI Nomor 16 Tahun 2024; serta struktur organisasi yang terbaru agar ditambahkan juga dalam LAKIN

      b) Bab II Perencanaan Kinerja
         1. Dalam tujuan tidak menjelaskan bagimana komitmen Badan Bahasa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan pada perjanjian kerja
         2. Dalam Matrik Kinerja belum ada keterangan target tahun berapa yang dijelaskan dalam tabel
         3. Dalam rincian alokasi anggaran Badan Bahasa masih terdapat persentasi realisasi diatas 100% (terdapa anomali) yang belum ada penjelasannya.
         4. Belum dijelaskan perbandingan target PK tahun 2020-2021 s.d. 2024 dan terget Renstra

      c) Bab III Akuntabilitas Kinerja:
         1. Agar menggunakan Struktur kalimat yang baku (S-P-O-K) dalam penyusunan uaraian penjelasan dari suatu tabel atau gambar sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya dan penggunaan kata “Sehingga” serta kata sambung lainnya di awal kalimat agar dikurangi/minimalisir. Uraian atas tabel/gambar sebaiknya fokus pada satu ide pokok atau gagasan utama yang merupakan pokok permasalahan atau inti pembicaraan yaitu Pencapaian tahun 2024.

Hal ini terjadi pada **penjelasan Tabel Target dan Realiasai IKP Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia**

2. Penulisan Akronim sebaiknya menggunakan huruf besar Huruf-Huruf awal yang akan disingkat tetapi masih ada ditemukan dengan huruf kecil. revitalisasi bahasa daerah (RBD)
3. Infografis terkait Tahap pendampingan satker, Posisinya tidak lazim/tidak baku Tahap 3 - Tahap 1 - Tahap 2 (dari kiri ke kanan)



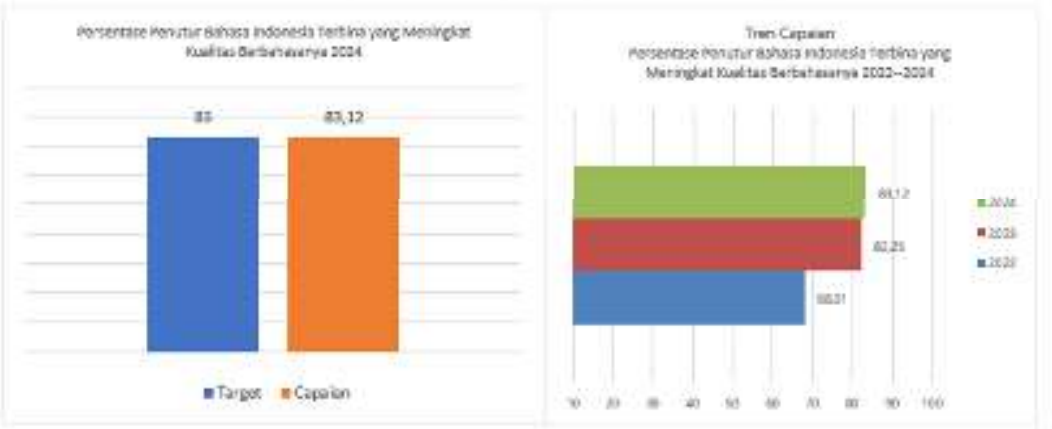
4. Perlu ditampilkan capaian tahun 2020 dan 2021 mengingat Lakin 2024 merupakan akhir tahun Renstra dalam tabel target dan realisasi capaian pada masing-masing IKP. Jika ada perubahan/tidak, dapat disandingkam maka dapat dituliskan pada tambahan informasi pelaksanaan program tahun 2020-2021 pada bagian akhir pada masing-masing sasaran program.

5. Perhitungan yang ditampilkan untuk **IKP 1.1 : Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya** masih menggunakan tahun 2023. Perlu disesuaikan dengan data/perhitungan tahun 2024.

6. Nominal angka Capaian yang ditampilkan dalam tabel **Target dan Realisasi IKP 1.1 : Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya** tahun 2023 (70) tidak sesuai dengan redaksional/penjelasan sebelumnya karena angka yang ditampilkan tersebut merupakan angka target (seharusnya capaian tahun 2023: 82,25) . Hal ini juga terjadi di tabel Target dan Realisasi IKP 1.2: Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya.

7. Grafik yang termuat dalam IKP 1.2: Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya Tidak sesuai (Grafik punya IKP 1.1)

Capaian IKP Persentase Lembaga Terbina yang Meningkat Kualitas Penggunaan Bahasanya



8. Terdapat ketidaksesuaian angka persentase capaian kinerja IKP 1.2 Persentase Lembaga Terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya antara tabel perhitungan (93,26) dengan uraian (93,36), agar disesuaikan.

9. Terdapat ketidaksesuaian jumlah nilai pada Program dan Kegiatan I**KP 2.1. Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia** antara **tabel Rincian Produk Penerjemahan Badan Bahasa Tahun 2021—2024 (halaman 71 pdf)** (9.611) dengan redaksionalnya (9.616).

10. Terdapat Ketidaksesuaian data dukung untuk nilai capaian IKP 3.1. **Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah (IPBD)** dalam tabel "Hasil Perhitungan Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya Berdasarkan Indikatornya" sehingga diperoleh nilai 38,96. Jika dihitung menggunakan rumus IPBD (V Pen + V mul + V Gr + V tb +V EI)/5 maka diperoleh nilai 31,52 (Hasil 66,93+22,74+7,63+30,67+29,61)/5. Perlu dicek kembali Data Hasil dari masing-masing variabel tersebut (V Pen + V mul + V Gr + V tb +V EI)

d) Bab IV Penutup
1. Arah dan kebijakan harus menjawab SP 1 sampai dengan SP 5.

2. Belum terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari hasil evaluasi kinerja.
3. Belum terdapat langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi
4. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan;
5. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran;
6. IKSS/IKP/IKK telah SMART

Seluruh catatan APIP pada bagian format, mekanisme dan substansi telah dibahas dan ditindaklanjuti oleh Tim Penyusun Lakin Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek sehingga dapat disimpulkan Laporan Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun Anggaran 2024 telah **menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas baik dari sisi format, mekanisme, maupun substansi**.

Simpulan:
Berdasarkan reviu yang telah dilakukan, APIP dapat memberikan keyakinan secara terbatas bahwa Laporan Kinerja yang telah disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengetahui/Menyetujui **Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen** Dr. Ganjar Harimansyah NIP197505222001121003	Jakarta, 13 Februari 2025 **a.n. Tim Reviu Inspektorat III Itjen Kemendikdasmen,** Agus Suprayogi NIP196301081988031002

JUMLAH KOMUNITAS LITERASI DAN GENERASI MUDA TERBINA PROGRAM LITERASI TAHUN 2024

No.	Nama Provinsi	Pemberdayaan Komunitas Literasi 2024	Generasi Muda Terbina Program Literasi 2024	Kendala Pemberdayaan Komunitas Literasi Tahun 2024 dan Solusinya	Kendala Generasi Muda Terbina Program Literasi Tahun 2024 dan Solusinya
1	DKI Jakarta	target 100 (tercapai 100)	target 600 (tercapai 760)	Kendala: anggaran untuk kegiatan pemberdayaan komunitas literasi di DKI Jakarta terblokir dan hanya tersisa 10 juta. Solusi: kegiatan pemberdayaan komunitas literasi di DKI Jakarta dimasukkkan dalam rangkaian Festival Literasi Nasional tahun 2024.	**Kendala:** anggaran untuk kegiatan ini sebagian terblokir sehingga mengakibatkan beberapa rangkaian kegiatan tidak dapat dilaksanakan **Solusi:** bermitra dengan Direktorat SMK yang memiliki program Banpem SMK PK yang berfokus pada peningkatan kompetensi literasi dan numerasi siswa SMK
2	Aceh	target 60 (tercapai 110)	Target 620 (tercapai 710)	kendala: Komunitas literasi yang berada di kab/kota yang jauh dari ibukota provinsi belum dapat terfasilitasi. Komunitas yang diundang tidak semuanya merupakan komunitas literasi mandiri sperti TBM, Rumah Baca, dll. Solusi: Membagikan informasi secara daring untuk komunitas yang belum terjangkau. mengundang komunitas lietrasi lainnya seperti perpustakaan desa dan juga pustakawan dari dinas arsip dan pustaka.	**Kendala**: pengimbasan terhadap pelaksanaan krida dan tingkat partisipasi peserta dalam menindaklanjuti hasil pelatihan masih rendah. **Solusi**: Panitia menghubungi kepala sekolah dan tim penanggung jawab kegiatan di sekolah untuk meminta bantuan memantau siswa/peserta dalam menghasilkan produk yang diharapkan.
3	Sumatera Utara	target 40 (tercapai 48)	target 620 (tercapai 745)	**Kendala:** Komunitas literasi dari Pulau Nias yang merupakan daerah 3T tidak terfasilitasi karena anggaran perjalanan hanya dapat memfasilitasi komlit yang melakukan perjalanan darat ke lokasi kegiatan. **Solusi:** Membagikan informasi dan materi kegiatan di grup WA yang mewadahi semua komlit yang ada di Sumatera Utara sehingga komlit-komlit yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan akan tetap mendapat informasi terkait kegiatan. Selain itu, Tim KKLP juga melakukan pertemuan daring untuk berbagi praktik baik literasi	**Kendala:** Tingkat partisipasi tindak lajut dan pengimbasan pelaksanaan krida yang belum maksimal dikarenakan kurangnya peran sekolah untuk menindaklanjuti hasil kelas atau pelatihan.Hal ini disebabkan sekolah belum merasa kegiatan ini menjadi prioritas sekolah. **Solusi:** Panitia melakukan komunikasi langsung dengan penanggung jawab setiap sekolah seperti ketua-ketua aktivis untuk tetap menindaklanjuti program dan menghasilkan produk sesuai yang diinginkan baik secara langsung atau secara daring.

4	Sumatera Barat	target 19 (tercapai 90)	620 (tercapai 620)	**Kendala**: Komunitas literasi dari Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah 3T yang tidak terfasilitasi karena anggaran perjalanan untuk kegiatan ini difasilitasi oleh komlit yang bersangkutan. **Solusi**: Membagikan informasi dan materi kepada kepada komlit-komlit yang belum bisa mengikuti kegiatan ini	**Kendala**: Tingkat partisipasi tindak lajut dan pengimbasan pelaksanaan krida yang belum maksimal dikarenakan sekolah belum merasa kegiatan ini menjadi prioritas sekolah. **Solusi**: Panitia melakukan komunikasi langsung dengan aktivis sekolah dan guru pembinanya.
5	Sumatera Selatan	target 75 (tercapai 75)	600 (tercapai 808)	**Kendala** : Komunitas Literasi dari Kabupaten tidak memiliki anggaran untuk memfasilitasi perjalanan anggota yang ditugasi. Penggerak komunitas literasi yang berprofesi sebagai ASN (guru) agak sulit untuk memperoleh izin mengikuti kegiatan beberapa hari karena meninggalkan tugas. **Solusi** : Mengundang / menambah jumlah perwakilan peserta tambahan dari komunitas literasi lain, dan membagikan materi kegiatan kepada komlit yang belum dapat menghadiri kegiatan.	**Kendala** : (1) Jadwal kegiatan krida bertepat dengan persiapan pelaksanaan ujian di sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK sehingga beberapa sekolah menunda untuk ikut berpartisipasi pelaksanaan Krida. (2) Anggaran kurang memadai, dari perencanaan untuk 100 peserta menjadi 600 peserta, (3) sebagian Duta bahasa yang terlibat juga sedang mengikuti UTS, (4) Jarak tempuh Duta Bahasa dari kampus menuju tempat pelaksanaan kegiatan Krida cukup jauh. **Solusi** : (1) Mencari beberapa sekolah yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan Krida, (2) Menambah layanan daring untuk peserta yang masih memerlukan bimbingan selama pendampingan. (3) Jumlah peserta Krida Duta Bahasa sebanyak 658 peserta. Sedangkan jumlah Peserta Pemilihan Duta Bahasa

6	Riau	target 60 (tercapai 60)	target 600 (tercapai 907)	**Kendala**: (1) Peserta yang diundang tidak semuanya berasal dari komunitas literasi mandiri (TBM, Rumah Baca, dll.) seperti yang diinginkan (2) Anggaran kurang memadai sehingga sebagian besar peserta yang diundang berasal dari daerah yang dekat dengan tempat kegiatan (ibukota kabupaten) **Solus**i: (1) Mengundang peserta dari Perpustakaan Desa, Perpustakaan Sekolah, dan Pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, (2) Mengundang beberapa komunitas yang berasal dari luar daerah yang tidak terlalu jauh dari ibukota kabupaten, tapi hanya menyediakan uang transpor, tanpa uang hotel.	**Kendala**: (1) Anggaran tidak memadai untuk menyelenggarakan kegiatan Krida Bahasa yang sesuai dengan juknis yang ditetapkan KKLP Literasi sehingga hanya 100 peserta yang dapat dijangkau dari yang seharusnya 600 orang, (2) Pengetahuan dubas terkait materi yang disampaikan dalam Krida Bahasa masih kurang memadai. **Solusi**: (1) Sebanyak 807 orang lainnya dijaring melalui kegiatan lain, yaitu: Pembinaan Literasi Generasi Muda bersama Duta Bahasa (700 orang) yang diselenggarakan setengah hari dan 107 orang melalui Pildubas, (2) Untuk Krida Bahasa, dubas dijadikan fasilitator saja, sedangkan narasumber diminta dari praktisi/akademisi.
7	Kepulauan Riau	Target 36 (tercapai 40)	Target 620 (Tercapai 640)	Kendala: 1. Kegiatan pembinaan Komunitas Literasi tidak dapat menjangkau komunitas literasi (TBM) di daerah terluar atau pelosok di kabupaten/ kota karena ketersedian anggaran yang terbatas. 2.Dana yang terbatas mengakibatkan sulitnya mencari narasumber yang berkualitas untuk kegiatan pembinaan komunitas literasi di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau . Solusi: 1. Panitia berdiskusi dengan peserta yang hadir untuk menyampaikan materi yang diajarkan dalam bimtek literasi atau melakukan peng imbasan informasi dan pengetahuan yang	Kendala : Pada kegiatan Krida Duta Bahasa, tim pendampingan dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau kesulitan menyesuaikan jadwal pelaksanaan program dengan jadwal atau aktifitas perkuliahan para duta bahasa dikarenakan pada umumnya berstastus mahasiswa aktif solusi : Pendampingan Krida dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau membuat surat permohonan izin untuk disampaikan kepada pihak kampus.

8	Jambi	Target 34 (tercapai 39)	Target 600 (tercapai 724)	**Kendala:** 1. Ada peserta yang tidak bisa memenuhi undangan. 2. Sebagian kecil peserta merupakan relawan pengganti pengurus yang diundang sehingga mereka kurang memahami substansi kegiatan. **Solusi:** 1. Mengundang peserta dari komunitas lain. 2. Membimbing relawan pengganti dengan penuh kesabaran.	**Kendala:** 1. Jadwal Krida Duta Bahasa sering tidak singkron dengan jadwal sekolah dan kuliah peserta. 2. Jarak waktu pembekalan dengan pendampingan terlalu lama. 3. Ada beberapa sekolah dan peserta yang kurang responsif saat pendampingan. **Solusi:** 1. Panitia harus berulang kali mengubah jadwal kegiatan. 2. Aktivitas pendampingan banyak dilakukan melalui grup WA. 3. Panitia berulang kali menghubungi pihak pendamping sekolah dan peserta
9	Bengkulu	Target 22 (Tercapai 27)	Taget 600 (Tercapai 725)	**Kendala:** 1. Beberapa komunitas tidak menjalankan program sesuai dengan pemberdayaan yang telah diikuti. 2. Ada peserta yang tidak hadir, sehingga harus digantikan dengan komunitas yang lain. **Solusi:** 1. Melakukan pendampingan secara daring dan luring. 2. Menghubungi komunitas lain sebagai pengganti.	**Kendala:** 1. Jadwal kegiatan setiap tahap Krida Duta Bahasa terlalu mepet sehingga setiap tahap tidak berjalan secara maksimal. 2. Beberapa sekolah tidak serius dalam melaksanakan setiap tahap. **Solusi:** 1. Memaksimalkan setiap tahapan dengan mempertimbangan jadwal ujian setiap sasaran. 2. Pendampingan dilakukan secara daring dan luring.
10	Bangka Belitung	Target 26 (tercapai 32)	Target 600 (tercapai 785)	Tidak ada	Tidak ada

11	Lampung	Target 49 (Tercapai 95)	Target 600 (Tercapai 999)	**Kendala** 1. Jumlah komunitas literasi C di Provinsi Lampung sangat banyak. Oleh karena itu, tidak semua pengelola komunitas mendapatkan kesempatan untuk mengikuti bimbingan teknis. 2. Jumlah komunitas literasi di 3 kabupaten ini sangat banyak, sehingga dengan kuota yang terbatas, tidak bisa semua komunitas ikut dalam kegiatan pemberdayaan **Solusi** 1. Mengundang pengelola komunitas literasi C dari masing-masing kabupaten dan pengelola tersebut diharapkan dapat mengimbaskan pengetahuan yang didapat ke teman-teman komunitas lainnya. 2. Peserta yang terpilih berasal dari komunitas literasinya yang aktif dan merupakan perwakilan dari setiap kecamatan yang ada di	**Kendala** 1. minimnya pengetahuan beberapa Duta Bahasa terkait materi yang akan dilombakan (Literasi). 2. Jadwal kegiatan sosialisasi krida yang tidak singkron dengan jadwal sekolah 3. Terdapat beberapa sekolah peserta yang akses jalannya sangat sulit ditempuh **Solusi** 1. Memberikan pembekalan kepada para Duta Bahasa terkait materi krida duta bahasa bagi aktivis sekolah dan kampus; Menyiapkan materi terkait krida yang mudah dipahami oleh para peserta krida 2. Menjadwalkan ulang kegiatan krida di sekolah tersebut 3. Sosialisasi dan pendampingan beberapa sekolah perserta, di intensifkan melalui daring.

12	Banten	Target 25 (Tercapai 40)	Target 620 (Tercapai 774)	Kendala 1. Kegiatan tidak bisa diikuti secara menyeluruh oleh komunitas penggerak literasi yang berada di wilayah Kabupaten Lebak. Hal ini karena lokasi kegiatan berada di Kecamatan Bayah, Lebak Selatan yang relatif jauh dari pusat Kabupaten Lebak. 2. Pegiat literasi sebagian besar tidak memiliki kemampuan dasar menulis. Solusi 1. Panitia mengoptimalkan kegiatan dengan berfokus mendatangkan peserta dari wilayah Lebak Selatan. Hal ini sesuai dengan prinsip pemerataan kegiatan agar agenda Bimtek dari Kantor Bahasa Provinsi Banten tidak berfokus pada kota-kota besar saja. 2. Panitia memberi arahan kepada narasumber untuk memberi materi untuk pemula. Selain itu kegiatan dikemas	Kendala 1. Keluaran Kegiatan Pemberkalan Krida Aktivis SMP adalah peserta dapat menulis dan membaca puisi berbahasa daerah, tetapi sebagian peserta tidak lancar atau kurang mahir dalam berbahasa daerah. 2. Waktu yang disediakan dalam kegiatan kelas kreatif pembuatan film pendek tidak mencukupi untuk penyampaian materi dan praktik. Solusi 1. Panitia dan Duta Bahasa mendampingi satu per satu peserta dan memberikan masukan terkait kosakata bahasa daerah yang belum dipahami oleh peserta. 2. Materi pembekalan film pendek dilanjutkan pada pendampingan daring agar praktik membuat film pendek dapat dilakukan secara optimal.

13	Jawa Barat	Target 94 (Tercapai 165)	Target 620 (Tercapai 915)	1. Kendala: Daerah sasaran kegiatan tiap tahunnya terbatas (sedikit), masih banyak daerah yang belum menerima manfaat kegiatan. Agar sasaran kegiatan ini lebih luas dan lebih banyak menjangkau para pegiat komunitas literasi, kegiatan ini harus menjadi agenda rutin demi menjangkau daerah-daerah yang belum mendapat pembinaan serta ada tindak lanjut kegiatan berupa monitoring dan evaluasi kegiatan. Kegiatan harus terlaksana secara konsisten dan konsepnya tetap, tidak banyak berubah. Solusi: Agar sasaran kegiatan ini lebih luas dan lebih banyak menjangkau para pegiat komunitas literasi, kegiatan ini harus menjadi agenda rutin demi menjangkau daerah-daerah yang belum mendapat pembinaan serta ada tindak lanjut kegiatan berupa monitoring dan evaluasi kegiatan.2. Kendala: Permasalahan yang menjadi	Tidak ada
14	Jawa Tengah	Target 10 (tercapai 16)	Target 620 (tercapai 725)	Kendala Kegiatan tidak dapat diikuti oleh seluruh komunitas yang ada di Jawa Tengah karena keterbatasan anggaran, maka kegiatan dilaksanakan di beberapa kabupaten saja sehingga banyak daerah yang belum menerima manfaat kegiatan. Solusi Memasukkan kabupaten/kota yang belum terbina komunitas literasinya sebagai target tahun berikutnya	Tidak ada

15	Jawa Timur	Target 10 (tercapai 19)	Target 600 (tercapai 724)	Kendala · Target komunitas yang dibina terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan luasnya wilayah kerja Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur (38 Kabupaten/Kota) sehingga masih banyak komunitas lietrasi di Jawa Timur yang membutuhkan pembinaan · Terbatasnya fasilitasi yang bisa diberikan ke masyarakat akibat adanya blokir anggaran · Belum maksimal memfungsikan sarana dan ruang pembelajaran (oengembangan dan pembinaan literasi) Solusi · Memetakan jumlah dan kategori komunitas lietrasi di Jawa Timur yang masih membutuhkan pembinaan untuk dijadikan bahan pengusulan · Menyesuaikan pelaksanaan progran sesuai dengan anggaran yang ada · Menampung	Kendala · Sulitnya membuat jadwal pelaksanaan/pembekalan karena terbentur dengan libu sekolah · Ada grup pendampingan yang belum dibuat mendekati tahap penilaian/selebrasi · Terdapat jeda waktu antara pembekalan dan pendampingan · Adanya miskomunikasi · Kurangnya minat peserta untuk krida film pendek Solusi · Memastikan di awal proses audiensi tentang waktu yang disepakati dengan sekolah (menyesuaikan dengan agenda sekolah) · Grup pendampingan dibuat saat pembekalan · Perlu interaksi yang intens dalam pendampingan grup · Menjalin komunikasi yang lebih inttens mulai proses audiensi hingga pembekalan · Mengnsformasikan program kegiatan ke komunitas secara

16	DI Yogyakarta	14 (tercapai 16)	target 600 (tercapai 600)	Pembinaan dan pendampingan komunitas literasi selama tahun renstra ditargetkan sebanyak 14. Hal ini dilakukan agar dapat dibina secara intens sehingga pada akhirnya dapat memberdayakan komunitas yang lain. Kendala: 1. Konsistensi jumlah peserta/anggota tiap komunitas yang berubah-ubah 2. Kegiatan yang selalu menyesuaikan kebutuhan komunitas, baik dalam hal waktu pelaksanaan maupun materi yang ingin disampaiakan. 3. Komunikasi antarkomunitas dalam hal program masih menyesuaikan kebutuhan masing-masing komunitas sehingga bagi tim literasi kadang kesulitan untuk menentukan landasan untuk bergerak, terutama untuk wilayah (kabupaten) yang sama. 4. *Outcome* yang kadang sulit untuk diidentifikasi karena tidak	Kendala: 1. Kendala komunikasi antara panitia pendamping dari Balai dengan Duta Bahasa yang kurang intens sehingga informasi perkembangan kegiatan kurang maksimal. Duta bahasa juga kurang aktif merespons perkembangan kegiatan karena terbentur aktivitas lain seperti kuliah dan lain-lain. 2. Adanya blokir anggaran. 3. Penyesuaian dengan kalender pendidikan. Solusi: 1. Meningkatkan koordinasi antara panitia pendamping dengan duta bahasa agar lebih fokus ke kegiatan. Duta bahasa sebaiknya tidak dibebani pengurusan administrasi dan keuangan, tetapi fokus ke pelaksanaan kegiatan di hari H. 2. Berkoordinasi dengan PPK terkait RAB. 3. Berkoordinasi masif dengan pihak kampus, BEM, Dinas

17	Bali	target 22 (tercapai 24)	target 600 (tercapai 600)	Kendala: Tidak seluruh komunitas binaan dapat hadir dalam kegiatan karena adanya benturan dengan agenda lain Solusi: mengundang komunitas pengganti	Kendala 1.Adanya blokir anggaran dan benturan dengan kalender sekolah membuat kegiatan tersendat dan antusiasme peserta berkurang jauh 2. Duta Bahasa tidak ada berperan aktif karena ada aktivitas lain yang tidak dapat ditinggalkan, seperti bekerja, berkuliah, atau berkegiatan di organisasi lain 3. Kurangnya SDM pelaksana di Balai Bahasa Provinsi Bali Solusi: 1. meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait (guru/sekolah mitra dan LLDikti) dan membuka lomba selebrasi tingkat kampus untuk mahasiswa umum 2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim pelaksana, pelibatan Duta Bahasa hanya bisa dilakukan pada hari-h pembekalan luring 3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menyesuaikan waktu/kondisi
18	Nusa Tenggara Barat	Target 40 (tercapai 67)	Taeget 30 (tercapai 30)	Kendala: Tidak semua komunitas bisa mengikuti kegiatan tersebut karena mereka berada di pulau berbeda dan jauh dari ibu kota provinsi Solusi: Mengikutsertakan komunitas yg tidak terjangkau dalam kegiatan tersebut secara daring	Kendala · Sinkronisasi jadwal sekolah/kuliah, libur dan masuk · Terdapat jeda waktu antara pembekalan dan pendampingan · Kiat pembuatan film pendek terbatas Solusi · Audiensi dengan sekolah/kamus secara intens · Pendampingan dalam pembuatan kontens lebih awal dengan waktu yang cukup

19	Nusa Tenggara Timur	target 50 (tercapai 51)	target 620 (tercapai 720)	**Kendala:** Tidak semua komunitas dapat hadir karena kondisi NTT yang kepulauan. Selain itu, banyak komunitas yang lokasinya jauh dari kota. **Solusi:** 1. Fokus pada kepulauan tertentu. 2024 di Pulau Sumba, 2025 rencana akan dilakukan di Flores. 2. Dilakukan secara hibrida. Komunitas di luar pulau mengikuti secara daring.	**Kendala:** 1. Pelaksanaan Krida Aktivis di sekolah berbenturan dengan agenda sekolah, sehingga pelaksanaan kurang maksimal. 2. Kurangnya komitmen peserta dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini karena peserta adalah siswa dan mahasiswa yang memiliki kesibukkan sndiri, sehingga ada beberapa tahapan seperti monev yang tidak diikuti oleh peserta. **Solusi:** 1. Koordinasi dengan sekolah untuk menyesuaikan dengan agenda sekolah. 2. Melakukan pendekatan kepada siswa dan mahasiswa melalui guru dan dosen, sehingga pihak sekolah/kampus membantu mengumpulkan peserta saat ada kegiatan.
20	Kalimantan Timur	target 44 (tercapai 56)	target 600 (tercapai 600)	Kendala: masih banyak komunitas literasi yang didirikan dengan tidak ada niat menjadikannya sebagai lembaga yang profesional. Solusi: tetap memberikan materi tentang penguatan lembaga dari sisi legalitias	Kendala: beberapa peserta yang dikirim oleh pihak sekolah kurang berkompeten. Solusi: tetap membina dengan sewajarnya
21	Kalimantan Utara	target 10 (tercapai 14)	-	Kendala: masih banyak komunitas literasi yang didirikan dengan tidak ada niat menjadikannya sebagai lembaga yang profesional. Solusi: tetap memberikan materi tentang penguatan lembaga dari sisi legalitias	Kendala: tidak tersedia anggaran untuk melakukan kegiatan di Kalimantan Utara. Solusi: diadakan di tahun anggaran berikutnya
22	Kalimantan Barat	Target 41 (tercapai 58)	target 600 (tercapai 728)	kendala: komunitas TBM di daerah masih belum banyak keberadaannya. solusi: mengundang semua komunitas yang berkaitan dengan literasi baca-tulis, digital, dan lainnya yang ada di daerah tersebut.	kendala: jadwal kegiatan beririsan dengan jadwal sekolah dan kampus. Solusi: berkoordinasi menentukan jadwal kegiatan yang ditentukan oleh pihak sekolah dan kampus karena kegiatan dilakukan di sekolah dan kampus yang menjadi peserta kegiatan.

23	Kalimantan Selatan	Target 40 (tercapai 46)	Target 741 (tercapai 931)	**Kendala pada kegiatan kedua (lanjutan):** (1) Jadwal buka blokir bertepatan dengan pelaksanaan program dari banpem di komlit sasaran. (2) Dana terbatas hingga tidak dapat menghadirkan narasumber dari luar daerah. **Solusi:** (1) Peserta ditambah dari komunitas literasi yang belum mengikuti pada kegiatan pertama. (2) Satu orang narasumber utama hadir melalui zoom meeting (hibrida).	Secara umum, koordinasi dan pelaksanaan program di bawah KKLP lain. Kendala pelaksanaan krida Dubas tidak dapat maksimal sesuai tahapan juknis karena keterbatasan waktu dan penganggaran kegiatan setelah semester pertama. Solusinya adalah dengan melaksanakan tahapan sosialisasi dan pembimbingan secara daring.
24	Kalimantan Tengah	target 22 (tercapai 24)	target 600 (tercapai 620)	**Kendala**: beberapa komunitas binaan tidak bisa memenuhi undangan karena jadwal yang bertabrakan dan tidak ada perwakilan dari pengurus lainnya, sedikit sekali pilihan narasumber dari daerah yang cocok sebagai pemateri di kegiatan Pemberdayaan Komunitas Literasi. **Solusi**: melakukan kegiatan secara hibrid, mengganti komunitas literasi yang sedianya akan diundang, mencari narasumber dari luar daerah dengan metode pembelajaran daring	**Kendala**: waktu pembinaan yang terlalu lama, membuat siswa tidak lagi memprioritaskan kegiatan Krida Duta Bahasa, jadwal berbenturan dengan kalender sekolah, siswa dari kalangan aktivis sibuk dengan aktivitas sekolahnya. **Solusi**: melakukan pendekatan terhadap guru pendamping dalam membantu melanjutkan program, melakukan pendampingan intensif melalui grup WhatsApp dan Zoom.

25	Gorontalo	target 34 (tercapai 36)	target 650 (tercapai 650)	1) Kendala - Beberapa peserta yang terlambat hadir pada saat kegiatan berlangsung. - Ada beberapa peserta pada saat registrasi, administrasinya masih salah atau kurang. - Peserta yang awalnya sudah didata oleh panitia tidak bisa mengikuti kegiatan karena tiba-tiba ada kepentingan lain. - Banyak komunitas penggerak literasi yang belum memiliki akta notaris 2) Strategi Pencapaian Sasaran - Peserta kegiatan yang terlambat hadir diharapkan segera menyesuaikan dan mengikuti kegiatan apabila sudah tiba di tempat kegiatan dan panitia akan membagikan materi kepada peserta. - Panitia memberikan waktu untuk melengkapi administrasi paling lambat pukul 22.00 pada hari pertama kegiatan. - Peserta yang tidak bisa hadir, digantikan dengan peserta lain dengan syarat peserta adalah	1) Kendala - Sebagian peserta tidak datang tepat waktu. - Tidak semua peserta menguasai bahasa Gorontalo secara fasih. - Kurangnya fasilitas yang mendukung kegiatan di sekolah. 2) Strategi Pencapaian Sasaran - Peserta kegiatan yang terlambat hadir diharapkan segera menyesuaikan dan panitia membagikan materi melalui pendamping dan diteruskan ke peserta. - Peserta bertanya kepada pakar bahasa daerah selaku pemateri terkait kosa kata bahasa daerah yang belum dimengerti. - Kegiatan dipindahkan ke ruang laboratorium agar lebih kondusif.
26	Sulawesi Utara	target 37 (tercapai 45)	target 620 (tercapai 750)	kendala: (1) Beberapa komunitas binaan tidak bisa hadir mengikuti kegiatan; (2) Pemilihan materi kegiatan yang membosankan. Solusi: (1) Mengganti beberapa komunitas yang tidak bisa hadir, dengan rintisan komunitas yang baru dibentuk; (2) Menghadirkan narasumber baru yang lebih kompeten.	Kendala: (1) Sebagian anggaran kegiatan krida ini terblokir sehingga tahapan pembekalan ke sekolah harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia; (2) Pelaksanaan selebrasi juga ada efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan Selebrasi Krida menjadi kurang maksimal Solusi: (1) Melakukan pembekalan ke sekolah dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia seperti untuk pembelian kudapan saja tanpa ada makan; (2) mengurangi hari pelaksanaan selebrasi yang awalnya direncanakan dua hari menjadi hanya satu hari.

27	Sulawesi Tengah	Terget sesuai PK 11; capaian 59	Target sesuai DIPA 35, capaian 105	Kendala dalam pemberdayaan komunitas penggerak literasi antara lain: Komlit penya kesibukan sendiri, sehingga sulit dihubungi; tidak/jarang merespons permintaan data; mereka memposisikan diri sebagai mitra (sejajar) dengan Balai Bahasa, sehingga mereka merasa berhak menolak permintaan Balai Bahasa sebagai lembaga pembina; mereka tidak jujur melaporkan sumber dana selain dari Badan Bahasa; mereka tidak sungguh-sungguh menjadikan komunitasnya memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Solusi yg telah diupayakan, antara lain, membuat grup sebagai wadah berkomunikasi dan berkoordinasi, menghadirkan Ketua Notaris sebagai narasumber untuk memndapatkan potongan biaya pengurusan akta notaris hingga 50%; narasumber dari Kemnterian Hukum dan HAM agar mereka bisa bertanya cara	Peserta kegiatan (generasi muda) dari sejumlah komunitas berasal dari berbagai jenjang pendidikan (lIusan SMA, sarjana, S-2, S-3); berbagai profesi guru, dosen, LSM, pegawai kantor pemerintah). Kondisi tersebut menyulitkan untuk berkoordinasi. Mereka merespon secukupnya jika ada kegiatan atau bantuan. Setelah itu, mereka sulit dihubungi. Solusi antara lain hanya komunitas yang memiliki data anak usia sekolah yang masih buta aksara dan/atau buta Bahasa Indonesia yang diundang dan diberi bantuan dari Pemerintah.
28	Sulawesi Tenggara	target 18 (tercapai 24)	target 620 (tercapai 720)	Kendala: (1) Komunitas binaan tidak dapat memenuhi undangan karena ada agenda lain Solusi: (1) Mengganti komunitas literasi yang akan diundang (2) Melakukan evaluasi secara daring.	Kendala: (1) Adanya renovasi gedung Kantor Bahasa Provinsi Sultra membuat kegiatan pembekalan tidak dapat dilakukan di aula kantor bahasa seperti yang direncanakan. (2) Jadwal pembinaan yang telah direncanakan berbenturan dengan kalender sekolah/agenda kampus lainnya. Solusi: (1) Berkoordinasi dengan UPT Kemendikbudristek (BPMP Provinsi Sultra) untuk peminjaman ruang kelas. (2) Menjadwalkan ulang dan memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan.

29	Sulawesi Selatan	target 60 (tercapai 73)	target 600 (tercapai 697)	Kendala: Sulitnya menyesuakan jadwal antara panitia balai bahasa dengan jadwal narasumber. Solusi: Melakukan penjadwalan ulang	Kendala: (1) Minimnya dukungan anggaran yang tersedia. (2) Jadwal yang berubah-ubah. Solusi: (1) Membatasi jumlah kampus dan sekolah yang terlibat. (2) Melibatkan kampus dan sekolah yang lebih mapan. (3) Melibatkan peserta yang dianggap tepat dan narasumber yang berkompeten.
30	Sulawesi Barat	target 5 (tercapai 7)	target 3 (tercapai 3)	Kendala: Sulitnya menyesuakan jadwal antara panitia balai bahasa dengan jadwal narasumber. Solusi: Melakukan penjadwalan ulang	Kendala: Kurangnya minat generasi muda Sulawesi Barat dalam mengikuti Pembinaan Literasi Generasi Muda. Solusi: Melakukan kegiatan soasialisasi melalui media sosial dan secara daring
31	Papua	target 1 (tercapai 4)	target 600 (tercapai 600)	Kendala: 1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan yang tidak mencukupi untuk memfasilitasi Komunitas-komunitas di yang cuma dianggarkan selama satu hari. 2. Lokasi komunitas yang sulit dicari karena komunitas berada di daerah terpencil, dengan kondisi jalan yang kurang baik. Hal ini diperparah dengan tidak terdapat jaringan internet sehingga pemanfaatan peralatan navigasi tidak dapat dilakukan. 3. Banyak anggota komunitas yang tidak dapat hadir pada saat dilakukan pembinaan disebabkan mereka sedang mengikuti keluarga bertani/berladang. Solusi: 1. Memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan intens berkoordinasi dengan pengurus komunitas sejak hari pertama tim tiba di kabupaten sasaran 2. Berkoordinasi dengan pengurus komunitas/warga lokal untuk memberikan patokan pasti terkait marka	Kendala: Progress pelaksanaan kegiatan terganggu dengan kebijakan Pemblokiran Dana, sehingga tahapan pendampingan luring ditunda dalam kurung waktu yang cukup lama. Hal ini membuat anggapan para peserta bahwa tidak ada lagi tindak lanjut dari kegiatan pendampingan, sehingga peserta sibuk dengan berbagai aktivitas sekolah/kampus, sehingga peserta tidak menyelesaikan krida mereka yang diberikan selama pembekalan. Solusi: 1. melakukan pendampingan secara daring kepada peserta melalui grup WA dan berkoordinasi dengan guru pendamping dan kepala sekolah/pihak kampus agar setiap sekolah/kampus dapat mengirimkan karya/peserta. 2. Meminta peserta yang kesulitan dalam penyelesaian krida, untuk datang ke kantor Balai Bahasa Provinsi Papua agar dapat dibantu secara lebih

32	Papua Barat	target 1 (tercapai 1)	target 0 (tercapai 0)	Kendala: Anggota Komunitas merupakan para Siswa SMA sehingga saat pelaksanaan kegiatan fasilitasi tidak dapat dihadiri anggota komunitas karena para anggota komunitas masih sekolah Solusi: Melaksanakan fasilitasi secara intensif kepada Ketua Komunitas sehingga ketua komunitas dapat mengimbaskan hasil fasilitasi kepada anggotanya	Kendala: belum tersedianya anggaran untuk melakukan kegiatan di Papua Barat. Solusi: diusulkan untuk diadakan pada tahun anggaran 2025
33	Papua Barat Daya	target 24 (tercapai 24)	target 0 (tercapai 0)	Kendala: jumlah pagu tidak mencukupi untuk dapat mengakomodasi banyaknya jumlah komunitas yang sangat tertarik untuk dapat mengikuti kegitan bimtek Solusi: Menambah waktu atau jam materi dari narasumber pelaksanaan yang sudah di luar Jadwal	Kendala: belum tersedianya anggaran untuk melakukan kegiatan di Papua Barat Daya. Solusi: diusulkan untuk diadakan pada tahun anggaran 2025
34	Papua Tengah	target 5 (tercapai 5)	target 0 (tercapai 0)	Kendala: Banyaknya komunitas di Papua Tengah yang meminta untuk mendapatkan kunjungan atau fasilitasi namun tidak berbanding lurus dengan alokasi dana termasuk jumlah hari kegiatan. Solusi: Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, hari pertama setelah perjalanan udara dan tiba di Kabupaten Mimika untuk mengunjungi Komunitas-Komunitas yang ada di Kabupaten tersebut	Kendala: belum tersedianya anggaran untuk melakukan kegiatan di Papua Tengah. Solusi: diusulkan untuk diadakan pada tahun anggaran 2026

35	Papua Selatan	target 2 (tercapai 2)	target 0 (tercapai 0)	Kendala: 1. Banyaknya komunitas di Papua Selatan yang meminta untuk mendapatkan kunjungan atau fasilitasi namun tidak berbanding lurus dengan alokasi dana termasuk jumlah hari kegiatan. 2. Lokasi komunitas yang sulit dicari karena komunitas belum memiliki alamat yang jelas. 3. Banyak anggota komunitas yang tidak hadir saat dilakukan pembinaan oleh petugas, hal ini dikarenakan adanya kegiatan lain yang mendesak untuk dihadiri oleh anggota komunitas tersebut. Solusi: 1. Tim langsung memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dengan langsung mengunjungi satu komunitas pada hari pertama pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat terjadi karena jadwal penerbangan petugas ke Kabupaten Merauke adalah di pagi hari, sehingga pada siang hari petugas dapat langsung	Kendala: belum tersedianya anggaran untuk melakukan kegiatan di Papua Selatan. Solusi: diusulkan untuk diadakan pada tahun anggaran 2026
36	Papua Pegunungan	target 0 (tercapai 0)	target 0 (tercapai 0)	Kendala: belum tersedianya anggaran untuk melakukan kegiatan di Papua Pegunungan. Solusi: diadakan di tahun anggaran 2025	Kendala: belum tersedianya anggaran untuk melakukan kegiatan di Papua Pegunungan. Solusi: diusulkan untuk diadakan pada tahun anggaran 2026

37	Maluku	Target 48 (tercapai 60)	target 600 (tercapai 777)	"Kendala: 1. Komunitas literasi tersebar dalam beberapa kabupaten yang terpisah antar kepulauan. Jadi, untuk mencapai target tahun 2023 BB Maluku tetap mengadakan kegiatan di wilayah yang sama dengan tahun sebelumnya. 2. Peserta yang hadir ikut pelatihan dalam komunitas literasi ada kecenderungan orang yang sama dari tahun ke tahun, terutama di Kota Ambon. Hal ini berkaibat tidak adanya pemerataan kompetensi bagi anggota komunitas lainnya. 3. Beberapa komunitas literasi hanya aktif pada saat kegiatan. Setelah kegiatan, komunitas seakan tidak ada model pengimbasan atau aktivitas tindak lanjut sebagai implementasi kegiatan. Solusi: 1. Untuk pencapaian target, BB Maluku juga melibatkan kombel sekolah sebagai sasaran peserta untuk pencapaian	Kendala: 1. Letak geografis Maluku membuat tim pelaksana kesulitan dalam penvcapaian target, termasuk penentuan sasaran peserta yang melibatkan beberapa jenjang peserta 2. Kurangnya pemahaman Duta Bahasa di Maluku pada Tema "Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik" 3. Kekurangan Duta Bahasa sebagai pelaksana Krida Duta Bahasa Maluku Tahun 2023 karena Duta Bahasa yang aktif sudah tergabung dalam Ikan 9 pendamping revitaslisasi bahasa daerah 4, Terrbatasnya penganggaran dan letak geografis Maluku membuat pola pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi Balai Bahasa provinsi Maluku. Solusi: 1. Sasaran peserta pelaksanaan Krida Duta Bahasa Tahun 2025 sebaiknya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing
38	Maluku Utara	target 47 (tercapai 74)	target 600 (tercapai 665)	Kendala: tidak semua komunitas yang diundang bisa hadir karena jarak tempuh lokasi kegiatan cukup jauh, dan kegiatan bertepatan dengan program lain. Solusi: kegiatan pemberdayaan komunitas literasi dilaksanakan di beberapa daerah dan mengundang peserta yang berasal dari Perpustakaan Sekolah dan Komunitas Literasi Sekolah	Kendala: sebagian anggaran kegiatan krida ini terblokir sehingga tahapan pendampingan luring ditunda dalam kurung waktu yang cukup lama. Hal ini membuat anggapan pada peserta bahwa tidak ada lagi tindak lanjut dari kegiatan tersebut sehingga peserta tidak menyelesaikan karya yang dibuat. Selain itu, peserta juga sibuk dengan berbagai aktivitas sekolah/kampus sehingga sebagian besar tidak membuat karya/tugas yang diberikan selama pembekalan. Solusi: melakukan pendampingan secara daring kepada peserta melalui grup WA dan berkoordinasi dengan guru pendamping dan kepala sekolah/pihak kampus agar setiap sekolah/kampus mengirimkan minimal satu

REKAPITULASI CAPAIAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

https://drive.google.com/drive/folders/1AQewG1eVEG2j1tCKHj0NmL3fGqQItOh9

1. Penghargaan 2020—2024
2. Inovasi 2020—2024
3. Buku Terjemahan 2020—2024
4. Kamus 2020—2024
5. Jumlah Kosa kata Daerah 2020—2024
6. Lembaga Terfasilitasi Kebahasaan 2020—2024
7. Lembaga Terfasilitasi Program BIPA 2020—2024
8. Pemelajar BIPA 2020--2024
9. Jumlah Bahan Fasilitasi Pembelajaran BIPA 2020—2024
10. Jumlah Peserta Penyuluhan 2020—2024
11. Jumlah Lembaga Terbina 2020—2024
12. Jumlah Duta Bahasa 2020—2024
13. Jumlah Komunitas Literasi 2020—2024
14. Jumlah Komunitas Sastra 2020—2024
15. Jumlah Bahasa Daerha yang Sudah Direvitalisasi 2020—2024
16. Jumlah Dampak Revitalisasi Bahasa Daerah
17. Jumlah Judul Buku Literasi 2020—2024
18. Jumlah Peserta UKBI 2020—2024
19. Jumlah Sekolah yang Terafiliasi UKBI 2020—2024
20. Jumlah Kolaborasi (Kerja Sama) 2020—2024
21. Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah (SAKIP) 2020—2024
22. IKP Lembaga Terbina
23. IKP Penutur Terbina
24. Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun,
Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564
Faksimile (021) 4750407
Pos-el badan.bahasa@kemdikbud.go.id